

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013-2018**



2015

**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyusunan Perubahan RPJM Daerah, dimaksudkan :

- a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan

- indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Provinsi;
 - c. pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Rencana Strategis SKPD.
 - d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut:
 - I. Bab I : Pendahuluan
 - II. Bab II : Gambaran Umum Dan Kondisi Daerah
 - III. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
 - IV. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - V. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
 - VI. Bab VI : Strategi Dan Arah Kebijakan
 - VII. Bab VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
 - VIII. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - IX. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - X. Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
 - XI. Bab XI : Penutup
- (3) Rincian dari RPJM Daerah dan lingkup BAB masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bappeda menyusun perubahan RPJM Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dengan memperhatikan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJM Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJM Daerah kepada masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan RPJM Daerah.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) RPJM Daerah hanya dapat diubah sekali dalam 5 (lima) Tahun yaitu setelah pelaksanaan RPJM Daerah berjalan 2 (dua) Tahun.
- (2) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJM Daerah hingga Tahun 2018 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan RPJM Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 September 2015

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN; (9/2015)

KATA PENGANTAR

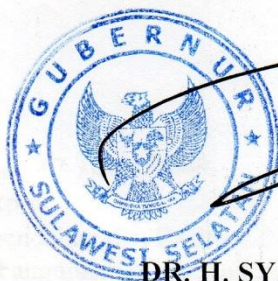
RPJM-Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, dan menjadi acuan dan sebagai arahan dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJM-Daerah disusun berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang selanjutnya dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan penyusunan RPJM-Daerah sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.

Dalam penyusunan Perubahan RPJM-Daerah ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan merupakan konsekuensi dari terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, juga tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana yang tersebut diatas, pendekatan penyusunan RPJM-Daerah harus bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder. Dokumen RPJM-Daerah ini diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mencapai Visi **“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”**.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Sulawesi Selatan guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin

Makassar, September 2015



Gubernur Sulawesi Selatan

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum dan Penyusunan	I-3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4 Sistematika Penulisan	I-6
	1.5 Maksud dan Tujuan	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....	II-1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah	II-1
	2.1.2. Potensi pengembangan wilayah	II-5
	2.1.3. Wilayah rawan bencana	II-15
	2.1.4. Demografi	II-16
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
	2.2.1. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	II-18
	2.2.2. Kesejahteraan masyarakat	II-27
	2.2.3. Fokus Seni budaya dan olahraga	II-44
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-45
	2.3.1. Layanan urusan wajib	II-46
	2.3.2. Layanan urusan pilihan	II-144
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-154
	2.4.1. Kemampuan ekonomi daerah	II-154
	2.4.2. Fasilitas wilayah/infrastruktur	II-157
	2.4.3. Iklim berinvestasi	II-167
	2.4.4. Sumber Daya Manusia	II-168
	2.5 Keterkaitan Dokumen Perencanaan	II-171
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	III-1
	3.1 Kinerja keuangan masa lalu	III-2
	3.1.1. Kinerja pelaksanaan APBD	III-2
	3.1.2. Neraca daerah	III-8
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-17
	3.2.1. Proporsi penggunaan anggaran	III-18
	3.2.2. Analisis pembiayaan daerah	III-22
	3.3 Kerangka Pendanaan	III-29
	3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat . serta prioritas utama	III-29
	3.3.2. Proyeksi data	III-31
	3.3.3. Penghitungan kerangka pendanaan	III-36

BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
	4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.2 Isu Strategis	IV-43
	4.2.1. Isu Global	IV-43
	4.2.2. Isu Strategis Daerah	IV-46
	4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-52
BAB V	PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1 Visi	V-1
	5.2 Misi	V-1
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V-5
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
	6.1 Strategi	VI-1
	6.2 Arah Kebijakan	VI-9
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN	VII-1
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS	VIII-1
	YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI & KAJIDAH PELAKSANAAN....	X-1
	10.1. Pedoman Transisi	X-1
	10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi	X-1
	10.3. Program Transisi	X-1
	10.4. Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI	PENUTUP	XI-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menganatkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar (pasal 288 ayat 1c). Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dan hasil *review* terhadap muatan dokumen rencana (RPJMD) serta penyesuaian kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode Tahun 2013-2018. Periode awal 2013 sesuai dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS oleh Menteri Dalam Negeri RI pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013 di Makassar.

RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program yang sifatnya kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD menjadi acuan utama penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Untuk menjamin sinergitas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tahunan, maka setelah penetapan PPRPMD dokumen ini menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Beberapa target indikator pembangunan yang ditetapkan, perlu disesuaikan dengan realisasi pencapaian dan kondisi tantangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Adanya perubahan data tahun dasar pada data makroekonomi (3) Terbitnya Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Perubahan dokumen RPJMD ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: (1) hasil pengendalian dan evaluasi

menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar; dan (3) merugikan kepentingan nasional. Serta melihat pada Peraturan Daerah **No. 2 Tahun 2010** Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. **Pasal 59** :Perubahan Dokumen Perencanaan, Ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis, Ayat (2) Substansi dinamis sebagaimana dimaksud ayat (1) Dapat dilakukan perubahan parsial tanpa mengubah dokumen perencanaan secara keseluruhan.

Pada dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pendekatan:

- a. **Teknokratik**, (Sesuai dengan Permendagri 54 pasal 6) pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. **Partisipatif**, (Sesuai dengan Permendagri 54 pasal 6) pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- c. **Politik**, (Sesuai dengan Permendagri 54 pasal 6) Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah. Olehnya itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. **Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*)**, (Sesuai dengan Permendagri 54 pasal 6) pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselenggarakan melalui musyawarah pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- e. **Kearifan Lokal**, Sumber pengetahuan yang diselenggarakan secara dinamis berkembang dan diteruskan secara turun-temurun yang terintegrasi terhadap pemahaman alam dan sekitarnya khususnya dalam pengambilan kebijakan.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028. Dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 telah ditetapkan Visi “Wilayah Berkemajuan di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan” yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu

- a. Meningkatkan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan;
- b. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar;
- c. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang kondusif dan atraktif;
- d. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari;
- e. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..)
 - 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata;
 - 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241);
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242);
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009.

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
- 28) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- 29) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008 – 2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, penyusunan dokumen ini senantiasa memperhatikan dokumen RPJMD provinsi tetangga dan juga RTRW provinsi tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

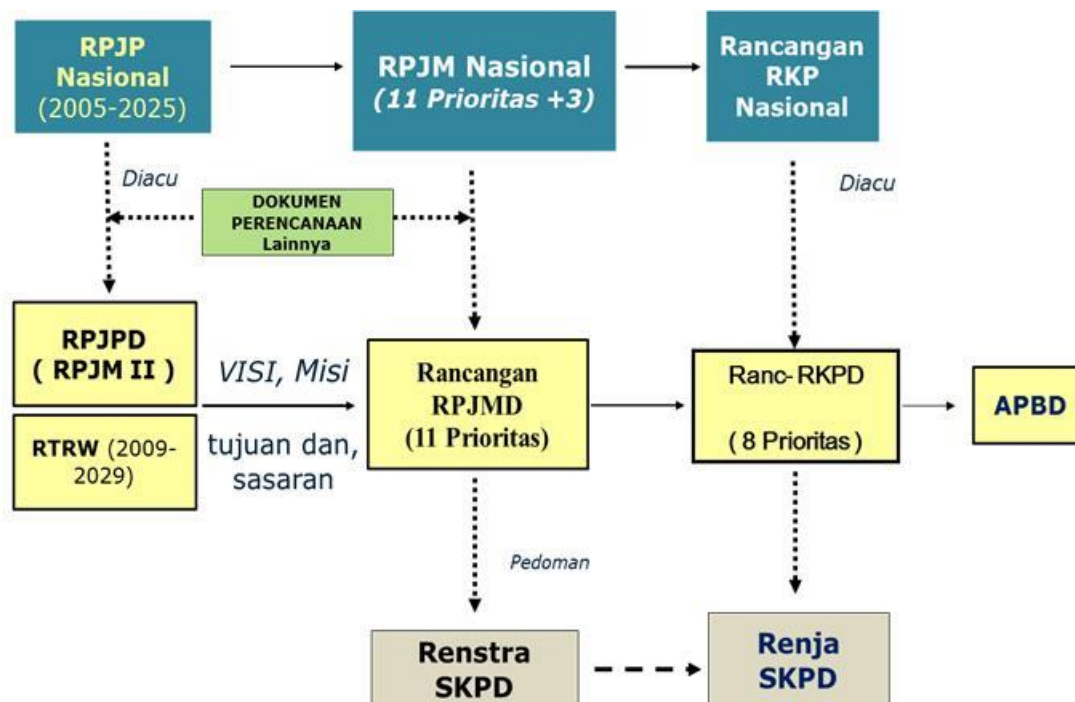
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan telah terintegrasi dengan Permendagri tersebut di atas, dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

RPJMD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders termasuk pemerintah Kabupaten dan Kota.

RPJMD Sulawesi Selatan ini nantinya akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan :



1.4. Sistematika Penulisan PPRPJMD

PPRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan PPRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk ;

- a) Menyediakan rumusan kebijakan dan program pembangunan;
- b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c) Menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
- d) Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi; dan
- e) Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2018 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan PRPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah untuk :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2013 - 2018;
2. Sebagaimana rujukan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD;
3. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Membangun komitmen melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan pada tingkatan Pemerintahan di Pemerintah Daerah;
6. Sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2013-2018.
7. Sebagai tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
9. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.
10. Sebagai acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda PRPJMD.
11. Sebagai rumusan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM SULAWESI SELATAN

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran geografi dan demografi secara umum untuk mengarah pada bagaimana kondisi potensi dan peluang pengembang wilayah Sulawesi Selatan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah **46.083,94** km persegi, memiliki daerah administratif **21** kabupaten, **tiga** kota, **304** kecamatan, dan **2.953** desa/kelurahan. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan Selat Makassar dan Laut Flores.

Tabel 2.1

**Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

Kode	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan
1	Selayar	1.199,91	11	74
2	Bulukumba	1.170,10	10	126
3	Bantaeng	397,06	8	67
4	Jeneponto	837,99	11	113
5	Takalar	620,26	9	83
6	Gowa	1.802,08	18	167
7	Sinjai	924,15	9	80
8	Maros	1.538,44	14	103
9	Pangkep	814,95	13	102
10	Barru	1.192,39	7	54
11	Bone	4.593,38	27	372
12	Soppeng	1.337,99	8	70
13	Wajo	2.394,15	14	176
14	Sidrap	2.081,01	11	105
15	Pinrang	1.892,42	12	104
16	Enrekang	1.821,41	12	129
17	Luwu	2.940,51	21	227
18	Tana Toraja	2.149,67	19	159
22	Luwu Utara	7.365,51	11	176
25	Luwu Timur	7.315,77	11	102
26	Toraja Utara	1.169,95	21	151
71	Makassar	181,35	14	143
72	Pare Pare	88,92	4	22
73	Palopo	254,57	9	48
	Sulawesi Selatan	46.083,94	304	2.953

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ}12'$ - 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan, serta gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan Timur.

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agar curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL.

2.1.1.4. Geologi

Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam propinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-vulkanik berumur Paleogen-Kuarter serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981). Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari vulkan tersier, Sebaran formasi vulkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan vulkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa).

2.1.1.5. Hidrologi

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

2.1.1.6. Klimatologi

Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan ditigal Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2010 rata-rata suhu udara 27,4 C di Kota Makassar

dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 C dan suhu minimum 24,0 C.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu Wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang, dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros, Bantaeng, dan Selayar.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Dalam Angka Tahun 2012 adalah 45.764,53 km². Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi. Dari total luasan tersebut terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Hutan Primer, Hutan Sekunder, Kebun Campuran dan seterusnya. Penggolongan penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan utama yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

Penggunaan Lahan Utama	Luas (Ha)	Persentase
Awan/Tidak teridentifikasi	53,264	1.16
Hutan Primer	1,294,061	28.28
Hutan Sekunder	558,617	12.21
Kebun Campuran	1,329,302	29.05
Mangrove	7,090	0.15
Perkebunan	7,681	0.17
Permukiman	32,676	0.71
Rawa	60,805	1.39
Sawah	154,959	3.39
Semak/Belukar	383,615	8.38
Tambak/Empang	79,784	1.74
Tanah Terbuka	259,873	5.68
Tegalan/Ladang	110,178	2.41
Tubuh Air	170,465	3.72

Penggunaan Lahan Utama	Luas (Ha)	Persentase
Lain-lain	74,084	1.62
Total	4,502,369	100.00

Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah, 2012

Berdasarkan data tersebut, penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kebun campuran, hutan primer, hutan sekunder, dan selebihnya penggunaan lahannya berada di bawah 10 (sepuluh) persen. Penggunaan lahan kebun campuran terluas di Kabupaten Bone, Luwu, dan Wajo, sedang penggunaan lahan hutan primer juga tersebar di Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan Bone. Selanjutnya penggunaan lahan hutan sekunder, terluas berada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara.

Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel tercatat 2.523.493,73 Ha yang termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 55,14% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Kawasan Hutan Kabupaten / Kota Menurut Peta Padu Serasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

No.	Kabupaten/ Kodya	Luas Wilayah (ha)	HL	HPT	HP	TWA/TN.L/CA/TB TAHURA/SM/TN	HPK	Luas Kawasan	% TLW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Makassar	17,577	-	-	-	-	-	-	-
2	Gowa	188,332	23,349.72	19,752.88	26,932.84	3,285.62	-	73,321.06	33,50
3	Maros	161,912	13,655.75	6,308.79	16,747.08	28,610.94	-	65,322.56	40,34
4	Pangkep	111,229	7,701.71	2,939.98	2,733.25	14,183.30	-	27,558.24	24,78
5	Takalar	56,651	692,17	-	2,961.10	3,883.11	-	7,536.38	13,30
6	Jeneponto	90,335	6,715.88	375.55	125.99	2,382.51	-	9,599.45	9,79
7	Bantaeng	39,583	2,721.98	1,098.78	1,971.56	-	-	5,792.32	14,63
8	Bulukumba	115,467	7,849.89	-	1.458,56	3,484.86	-	12,793.31	11,08
9	Selayar	90,350	10,094.06	5,932.21	3,923.21	430.886,30	-	450,836.23	498,99
10	Sinjai	81,996	10,996.2	7,193.20	-	723.51	-	18,912,91	9,65
11	Bone	455,900	40,067.23	80,470.30	15,817.95	3,779.91	-	140,135.39	30,74
12	Soppeng	135,944	34,286.94	10,876.42	538.72	1,572.50	-	47,274.58	34,78
13	Barru	117,471	51,266,03	16,913,96	-	-	-	68,179.99	58,04
14	Pare-Pare	9,933	2,003.65	308.95	-	-	-	2,312.60	23,28
15	Sidrap	188,325	45,322.15	23,999.16	115.6	284	-	69,720.91	36,87
16	Wajo	250,620	7,679.93	-	16,469.03	-	-	24,148.96	9,64
17	Pinrang	196,117	45,168.7	26,436.63	-	-	-	71,605.33	13,48
18	Enrekang	178,601	72,224.64	9,864.83	-	-	-	82,089.47	5,52
19	Tana Toraja	205,430	92,825.72	20,174.56	-	-	-	113,000.28	35,25
20	Luwu Utara	750,268	362,214.91	4,448.77	12,237.07	-	151,100.71	530,001.46	70,64
21	Luwu	300,025	85,371.63	5,122.08	18,349.70	-	-	108,843.41	36,27
22	Luwu Timur	694,488	240.775,89	97.452,26	8.078,18	166,594.4	21.041,89	533,942.62	105,80
23	Kota Palopo	24,752	8,297.53	1,023.84	-	968.21	-	10.289.58	37,66
24	Toraja Utara	115,147	50,276.69	-	-	-	-	50,276.69	43.66
X*	<i>J U M L A H</i>	4,576,453	1,197,809.19	264,282.23	128.459,84	723,355.17	248.552,97	2,523,493.73	55,14%
√*			1.232.683	494.846	124.024	851.267	22.976	2.725.796	58,30%

Sumber : Data dan Informasi Kehutanan (Statistik Kehutanan) 2011

Ket : X* ; Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sul-Sel

√*: SK. Menhut No. 434/ Menhut tgl 23 Juli 2009, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulsel.

Ket;

HL ; Hutan Lindung

HP ; Hutan Produksi

HPT ; Hutan Produksi Terbatas

TWAL/TNL/CA/TB: Taman Wisata Alam. Laut/Taman Nasional. Laut/Cagar Alam/Taman Buru

TAHURA/SM/TN : Taman Hutan Raya/Suaka Margasatwa/Taman Nasional

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar adalah Kabupaten Selayar dengan luas 450.836,23 Ha termasuk dengan luas Kawasan Taman Wisata Alam/Laut diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur seluas 533.942,62 Ha. Dari data tersebut di atas terlihat pula bahwa untuk kawasan hutan, luasan yang terbesar adalah Kawasan Hutan Lindung sebesar 1.197.809 Ha atau 46,7% dari luas kawasan hutan. Luas Kawasan Hutan Lindung ini merupakan 26% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaran Hutan Lindung terluas berada pada Kabupaten Luwu Utara seluas 362.214,91 Ha atau seluas 30,24% dari luasan Hutan Lindung seluruhnya dan merupakan 48,28% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur seluas 240.775 Ha atau 20,10% dari total luas Hutan Lindung atau seluas 34,67% dari luas wilayah kabupaten.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 264.282,23 atau 5,77% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan atau merupakan 10,31% dari luas kawasan hutan. Dari luasan Hutan Produksi Terbatas ini, 36,87% berada di Kabupaten Luwu Timur atau seluas 97.452,26 Ha dan merupakan 14,03% dari luas kabupaten tersebut. Luasan berikutnya terdapat pada kabupaten Bone seluas 30,45% dari total luas Hutan Produksi Terbatas atau seluas 80.470,30 Ha yang merupakan 17,65% dari luas wilayah kabupaten.

Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat seluas 248.552,97 Ha atau merupakan 5,43% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan atau 9,70% dari total luas kawasan hutan. Hutan Produksi yang dapat dikonversi ini HPK ini tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Utara seluas 151.100,71 Ha atau merupakan 20,14% dari luas wilayah kabupaten tersebut dan di Kabupaten Luwu Timur seluas 21.041,89 Ha yang merupakan 8,47% dari luas wilayah kabupaten.

Hutan Produksi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 128.459,84 Ha atau 2,81% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Dari luasan tersebut Kabupaten Gowa memiliki areal Kawasan Hutan Produksi terbesar yaitu 26.932,84 Ha atau 20,97% dari total luas Kawasan Hutan Produksi yang merupakan 14,30% dari luas total wilayah kabupaten ini. Luasan berikutnya adalah Hutan Produksi yang terletak di Kabupaten Luwu dengan luas 18.349,70 atau seluas 14,28% dari total Hutan Produksi dan merupakan 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Luwu.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi system perkotaan nasional, system jaringan transportasi nasional, system jaringan energy nasional, system jaringan telekomunikasi nasional dan system jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

Tabel 2.4

Sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Benteng dan Kawasan Pamatata
2	Bulukumba		Bulukumba (Agroindustri, Peratnian, Pariwisata, Perikanan)	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng
4	Jeneponto		Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata)	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
9	Pangkep		Pangkejene (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata)	
10	Barru		Barru (Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan)	Kawasan EMAS
11	Bone		Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian)	
12	Soppeng			Kawasan Watansoppeng
13	Wajo			Kawasan Sengkang
14	Sidrap			Kawasan Pangkajene
15	Pinrang			Kawasan Pinrang
16	Enrekang			Kawasan Enrekang
17	Luwu			Kawasan Belopa
18	Tana Toraja			Kawasan Makale
19	Luwu Utara			Kawasan Masamba
20	Luwu Timur			KTM Mahalona Kawasan Malili
21	Toraja Utara			Kawasan Rantetpao
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
23	Pare Pare		Parepare (Agroindustri, Perikanan)	
24	Palopo		Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian)	

Sumber : RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan

Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Sedangkan system perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan system perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia.

Tabel 2.5

Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1	Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Bandara pengumpan ▪ Lintas penyeberangan antar pulau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa gas dan minyak bumi Pamatata ▪ Depo minyak Pamatata 	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional Jeneberang
2	Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalur KA ▪ Lintas Penyebaran antar pulau 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional Jeneberang
3	Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional Jeneberang
4	Jeneponto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional Jeneberang
5	Takalar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri primer dan sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa gas dan 	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Jaringan jalur KA ▪ Lintas penyeberangan antar pulau 	<ul style="list-style-type: none"> minyak bumi Mamminasata ▪ SUTT 		Jeneberang
6	Gowa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri primer dan sekunder ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa gas dan minyak bumi Mamminasata ▪ Terminal sub pusat distribusi ▪ SUTT ▪ PLTA Bili-bili 	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional Jeneberang
7	Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Pelabuhan pengumpul dan pengumpan 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Strtaegis Nasional Jeneberang
8	Maros	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri primer dan sekunder ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Pelabuhan pengumpan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa gas dan minyak bumi Mamminasata ▪ SUTT 	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Strtaegis Nasional Jeneberang; ▪ WS Strtaegis Nasional Walanae-Cenranae; ▪ WS Lintas Provinsi Saddang
9	Pangkep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Pelabuhan pengumpan ▪ Jaringan jalur KA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa gas dan minyak bumi Makassar-Sengkang ▪ SUTT 	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Lintas Provinsi Saddang
10	Barru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Lintas penyeberangan antar pulau ▪ Jaringan jalur KA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTG Barru ▪ PLTU Barru ▪ SUTT 	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Strtaegis Nasional Jeneberang; ▪ WS Strtaegis Nasional Walanae-Cenranae;
11	Bone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri dan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Jaringan jalur KA 	PLTU Bone SUTT	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Strtaegis Nasional Jeneberang; ▪ WS Starategis Nasional Walanae-Cenranae; ▪ WS Lintas Provinsi Saddang
12	Soppeng		SUTT	Jaringan teresterial	WS Strategis Nasional Walanae-Cenranae;
13	Wajo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri dan kolektor primer ▪ Transportasi danau ▪ Lintas penyeberangan antar pulau ▪ Jaringan jalur KA 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Strategis Nasional Walanae-Cenranae;

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
14	Sidrap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer ▪ Jaringan Jalur KA 	SUTT	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Strategis Nasional Walanae-Cenranae; ▪ WS Lintas Provinsi Saddang
15	Pinrang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer ▪ Jaringan jalur KA ▪ Jaringan jalan bebas hambatan 	SUTT	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Lintas Provinsi Saddang
16	Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer 	PLTA Buntu Batu PLTP Sulili SUTT	Jaringan teresterial	WS Lintas Provinsi Pompengan-Larona
17	Luwu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan Jalur KA 	PLTM Batu Sitanduk, Rante Bala SUTT	Jaringan teresterial	WS Strategis Nasional Walanae-Cenranae;
18	Tana Toraja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan kolektor primer 	PLTP Bittuang, dan Sangalla PLTM Kadundung SUTT	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Strategis Nasional Walanae-Cenranae; ▪ WS Lintas Provinsi Pompengan-Larona ▪ WS Lintas Provinsi Pompengan-Larona
19	Luwu Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan bebas hambatan ▪ Jaringan Jalur KA 	PLTP Parara SUTT	Jaringan teresterial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS Lintas Provinsi Pompengan-Larona
20	Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri dan kolektor primer ▪ Jaringan jalur KA ▪ Transportasi danau 	PLTM Usu Malili SUTT	Jaringan teresterial	WS Lintas Provinsi Pompengan-Larona
21	Toraja Utara		SUTT	Jaringan teresterial	WS Lintas Provinsi Saddang
22	Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri primer dan sekunder ▪ Jaringan jalan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota dan dalam kota ▪ Jaringan jalur KA ▪ Pelabuhan utama ▪ Bandar udara pegumpul primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan pipa gas dan minyak bumi Mamminasata ▪ Terminal pusat distribusi ▪ Depo minyak dan gas bumi Ujung Tanah dan Tamalanrea ▪ SUTT ▪ PLTU Tello 	Jaringan teresterial	WS Nasional Jeneberang
23	Pare Pare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri dan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Jaringan jalur KA 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Lintas Provinsi Saddang

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelabuhan pengumpul 			
24	Palopo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalan arteri dan kolektor primer ▪ Jaringan jalan bebas hambatan antar kota ▪ Jaringan jalur KA 	SUTT	Jaringan teresterial	WS Lintas Provinsi Pompengan-Larona

Sumber : RTRWN, RTR Pulau Sulawesi, RTR Kawasan Maaminasata.

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Pulau Sulawesi yang mengemban peran sebagai lumbung pangan nasional, pusat pengembangan ekonomi kelautan dan pusat pertambangan mineral dan panas bumi didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut, jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar minyak/gas bumi dan jaringan pipa gas dan minyak bumi, dan system jaringan energy yang handal. Pengembangan jaringan telekomunikasi di Sulawesi Selatan berupa jaringan terrestrial, dan pengembangan jaringan mikro analog dan digital.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari satuan wilayah sungai (SWS) baik yang merupakan WS strategis nasional, WS lintas provinsi maupun WS lintas kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan.

Tabel 2.6
Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
1	Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman nasional Laut Takabonerate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan); ▪ Kawasan andalan laut Singkarang-Takabonerate (perikanan dan pariwisata). 	
2	Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman hutan raya Bonto Bahari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan). 	
3	Bantaeng		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, 	

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
			pertambangan, dan pariwisata)	
4	Jeneponto	▪ Taman Buru Bangkala	▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata)	
5	Takalar	▪ Taman buru Ko'mara ▪ Suaka margasatwa Ko'mara	▪ Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri) ▪ Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata)	Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi)
6	Gowa	▪ Taman Wisata Alam Malino	Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri)	Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi)
7	Sinjai		▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Teluk Bone DSK (perikanan, pariwisata dan pertambangan).	
8	Maros	▪ Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung	▪ Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri) ▪ Kawasan andalan laut Kapoposang (perikanan, pertambangan, dan pariwisata)	Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi)
9	Pangkep	▪ Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung	▪ Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata) ▪ Kawasan andalan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri)	
10	Barru		Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan)	KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi)
11	Bone	▪ Taman wisata alam Cani Sirenreng	▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan).	
12	Soppeng	Taman wisata alam Lejja	Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan)	
13	Wajo		▪ Kawasan andalan Bulukumba-Watampone DSK (pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Teluk Bone (perikanan, pariwisata dan pertambangan).	
14	Sidrap		Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan,	KAPET Parepare (sudut kepentingan

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
			perikanan, agroindustri dan perdagangan)	ekonomi)
15	Pinrang		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan) ▪ Kawasan andalan laut Selat Makassar (perikanan dan pariwisata). 	KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi)
16	Enrekang		Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan)	KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi)
17	Luwu		Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan)	
18	Tana Toraja		Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan)	Kawasan Toraja DSK (sudut kepentingan social budaya)
19	Luwu Utara		Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan)	
20	Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cagar alam Faruhumpenai ▪ Cagar alam Kalaena ▪ Taman wisata alam Danau Matano-Mahalona ▪ Taman wisata alam danau Towuti 	Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan)	Kawasan Sorowako DSK (sudut kepentingan penfayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi)
21	Toraja Utara		Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan)	Kawasan Toraja DSK (sudut kepentingan social budaya)
22	Makassar		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Mamminasata DSK (pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan agroindustri); ▪ Kawasan andalan laut Kapoposang DSK (perikanan, pertambangan, dan pariwisata) 	Kawasan Perkotaan Mamminasata (sudut kepentingan ekonomi)
23	Pare Pare		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Parepare DSK (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan); ▪ Kawasan andalan laut Selat Makassar DSK (perikanan dan pariwisata) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KAPET Parepare (sudut kepentingan ekonomi) ▪ Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam (LAPAN) (sudut kepentingan penfayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi)
24	Palopo		Kawasan Palopo DSK (pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan)	

Sumber : RTRWN dan RTR Pulau Sulawesi

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis dengan menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis pada kluster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Kawasan pertanian

dan perikanan yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian tanaman pangan komoditas padi dan jagung, kawasan berpotensi perkebunan komoditas kakao, sawit, kopi, mete dan jarak dan kawasan berpotensi komoditas peternakan sapi diarahkan pada kabupaten/kota Kabupaten Bantaeng, kabupaten Bulukumba, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar, kabupaten Jeneponto, kabupaten Barru, kabupaten Bone, kabupaten Sidrap, kabupaten Wajo, kabupaten Pangkep, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, kabupaten Selayar, Kabupaten Luwu, kabupaten Enrekang, kota Parepare, kabupaten Luwu Utara, Pengembangan Kawasan sentra ternak kerbau diarahkan pada kabupaten Tator, kabupaten Toraja Utara, kabupaten Pangkep, kabupaten Jeneponto, kabupaten Wajo, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur. Kawasan Pengembangan Kawasan sentra ternak sapi perah kabupaten Enrekang, kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa. Kawasan sentra ternak kambing kabupaten Selayar, kabupaten Jeneponto, kabupaten Pangkep, kabupaten Bulukumba, kabupaten Takalar, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Pinrang. Kawasan Sentra Ternak Unggas ternak ras ayam petelur kabupaten Sidrap, kabupaten Pinrang, kabupaten Enrekang, kabupaten Maros, kota Parepare, kabupaten Soppeng, kabupaten Wajo, kabupaten Gowa. Kawasan sentra Ternak Ayam ras Pedaging kabupaten Maros, kabupaten Sidrap, kabupaten Gowa, kabupaten Barru, Kota Parepare, Kota Makassar. Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya komoditas udang dan rumput laut dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap diarahkan pada kabupaten Barru, kabupaten Pangkep, kabupaten Bone, kabupaten Wajo, dan kabupaten Pinrang.

Pengembangan kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, dan kawasan pengembangan komoditas perikanan berupa rumput laut dan udang serta kawasan industri diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energy sehingga peran dan fungsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan lumbung pangan nasional dapat terwujud.

Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas ninerlogam berupa emas, besi, pasir besi, kromit, nikel dan tembaga diarahkan pada kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, Jeneponto, Barru, Toraja, dan Toraja Utara, pengembangan kawasan pertambangan komoditas batuan berupa andesit, basalt, dan marmer diarahkan pada kabupaten Pangkep, Bone, Sinjai, Maros, dan Gowa, pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral batubara diarahkan pada kabupaten Toraja Utara, serta pengembangan kawasan pertambangan komoditas minyak dan gas bumi diarahkan pada 8 blok wilayah pertambangan minyak dan gas bumi yaitu; Blok Segeri Barat, Blok Bone, Blok Sidrap, Blok Enrekang, Blok Bone Utara, Blok Kambuno, Blok Karaengta dan Blok Selayar.

Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi berupa kawasan pengembangan minyak dan gas

bumi dan kawasan pusat pembangkit listrik diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energy sehingga Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai simpul jejaring dengan melalui peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan potensi sumber daya alam baik berupa komoditas pertanian maupun pertambangan dan posisi geografis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta mempertimbangkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, maka kebijakan pengembangan kawasan industri diarahkan pada pengembangan kawasan industri skala besar serta pengembangan industri skala kecil dan menengah yang diarahkan tumbuh dan berkembang sebagai kawasan aglomerasi industri kecil dan menengah di sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komunitas lokal. Kawasan industri skala besar diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan nasional maupun pusat kegiatan wilayah yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yaitu di Kota Makassar, dan Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Pangkep Kepulauan, Maros, dan Gowa. Sedangkan pengembangan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada Kota Palopo, kabupaten Luwu, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru, Bone, Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto. Kebijakan pengembangan kawasan perdagangan diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, sedangkan kawasan perdagangan skala sedang diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan local provinsi. Pembangunan kawasan perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti; kawasan perkantoran, perbankan, pertokoan, hotel dan restoran, terminal bis dan kawasan pergudangan.

Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, diarahkan pada kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata dengan mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Selatan meliputi pengembangan kawasan pariwisata alam (TWA) yang mengandalkan potensi dan kekayaan alam diarahkan pada TWA yang berada di kabupaten Luwu Timur, Gowa, Bone, Soppeng, Pangkep, Kepulauan Selayar, Maros, Takalar, Jeneponto, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Sinjai, dan Kota Palopo serta Kota Makassar, pengembangan pariwisata budaya dan sejarah (TWB) yang mengandalkan kekayaan alam, adat, sejarah dan budaya pada kawasan permukiman dan perdesaan tradisional maupun kawasan peninggalan kerajaan, serta situs peninggalan sejarah diarahkan pada kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sinjai, Bone, Bulukumba, Gowa, Bulukumba serta Kota Makassar dan Kota Palopo.

Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan menunjuk pada peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPARNAS) yang telah menetapkan Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Makassar-Takabonerate dan sekitarnya kemudian DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang telah meliputi 7 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu: Maros (karst), Kota Makassar, Sengkang, Sinjai, Bulukumba, Selayar, dan Palopo dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu: Toraja dan Takabonerate.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan, obyek wisata dan potensi geografis yang mendukung jalur lalu lintas angkutan laut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Selatan menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan wisata bahari, kawasan berfungsi lindung, dan kawasan bendungan diarahkan dengan menyeimbangkan antara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan.

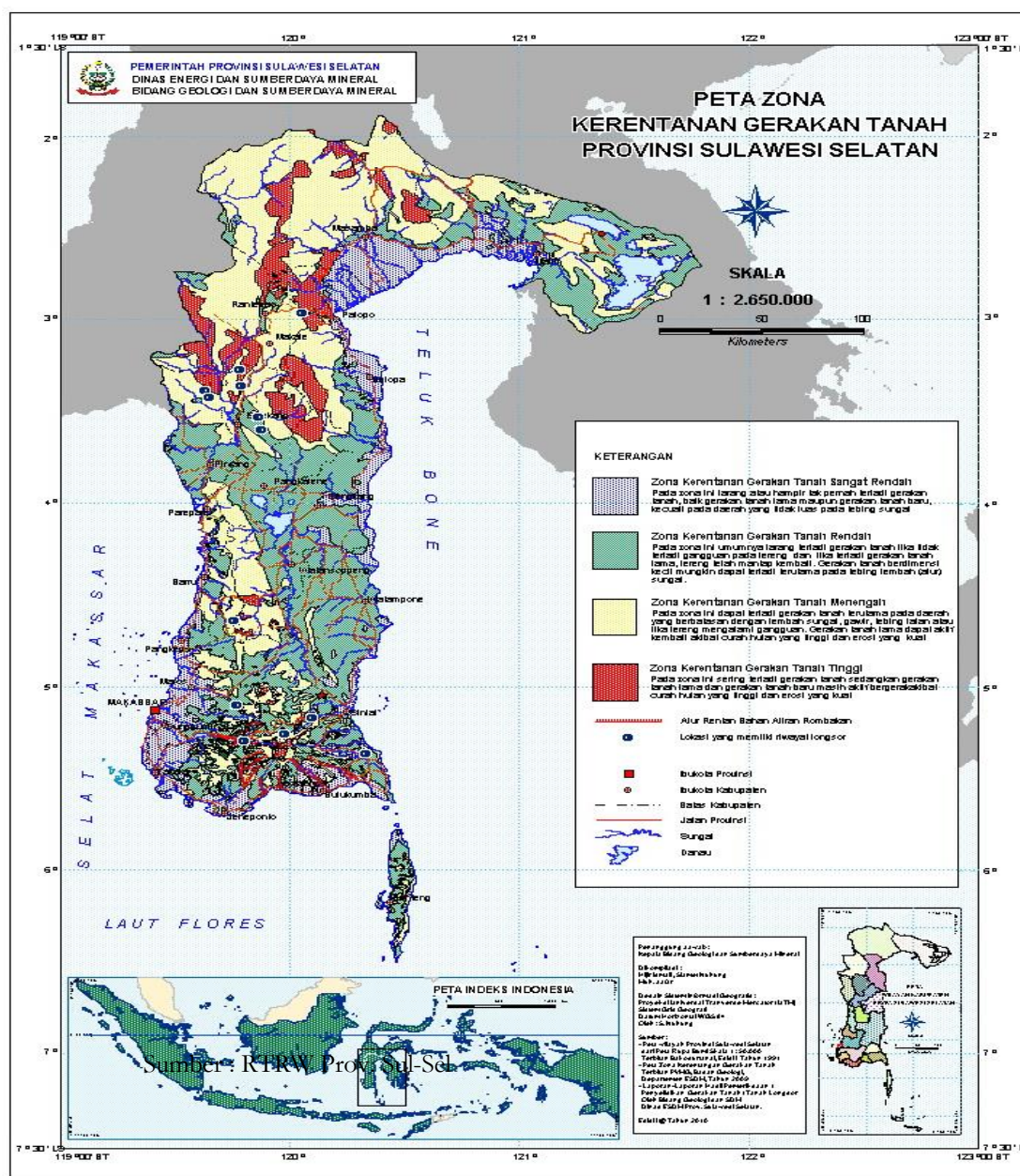
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena terjadinya proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan dan juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah yang biasanya terjadi di kawasan perkotaan. Berdasarkan data tahun 2012, luas wilayah genangan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 5.154 Km² atau sekitar 20% dari luas kawasan budidaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya merupakan kawasan sentra produksi pertanian. Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan di wilayah Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep Kepulauan, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pinrang, Luwu, dan Luwu Timur.

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh kegempaan. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya yang berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di kabupaten Pinrang, kabupaten Bulukumba, dan kabupeten Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan peta gerakan tanah Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh zona kerentanan gerakan tanah rendah dan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa bencana gerakan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah DAS dan pegunungan yang rentan akan bencana longsor. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wilayah yang rawan bencana gerakan tanah adalah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Luwu Timur.

Gambar 1.1
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011



2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 adalah sebesar 8.342.047 jiwa. Jumlah penduduk terbesar Tahun 2013 di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.408.072 jiwa. Terendah adalah Kab. Selayar 127.220 jiwa.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01.Selayar	121.749	122.055	123.283	124.553	127.220
02.Bulukumba	394.746	394.560	398.531	400.990	404.896
03.Bantaeng	174.176	176.699	178.477	179.505	181.006
04.Jeneponto	334.175	342.700	346.149	348.138	351.111
05.Takalar	257.974	269.603	272.316	275.034	280.590
06.Gowa	617.317	652.941	659.512	670.465	696.096
07.Sinjai	228.304	228.879	231.182	232.612	234.886
08.Maros	306.687	319.002	322.212	325.401	331.796
09.Pangkep	298.701	305.737	308.814	311.604	317.110
10.Barru	162.985	165.983	167.653	168.034	169.302
11.Bone	711.748	717.682	724.905	728.737	734.119
12.Soppeng	230.744	223.826	226.079	226.202	225.512
13.Wajo	381.066	385.109	388.985	389.552	390.603
14.Sidrap	252.483	271.911	274.648	277.451	283.307
15.Pinrang	351.042	351.118	354.652	357.095	361.293
16.Enrekang	190.576	190.248	192.163	193.683	196.394
17.Luwu	328.180	332.482	335.828	338.609	343.793
18.Tator	240.249	221.081	223.306	224.523	226.212
19.LuwuUtara	321.979	287.472	290.365	292.765	297.313
20.LuwuTimur	237.354	243.069	245.515	250.608	263.012
21.TorajaUtara	229.090	216.762	218.943	220.304	222.393
22.Makassar	1.271.870	1.338.663	1.352.136	1.369.606	1.408.072
23.Pare-Pare	118.842	129.262	130.563	132.048	135.192
24.Palopo	146.482	147.932	149.421	152.703	160.819
Provinsi	7.908.519	8.034.776	8,115,638	8.190.222	8.342.047

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.8
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-1	-2	-3	-4
0-4	425.524	408.373	833.897
5-9	414.120	394.656	808.776
10-14	415.892	396.129	812.021
15-19	405.247	394.915	800.162
20-24	357.326	367.075	724.401
25-29	319.501	342.138	661.639
30-34	301.411	331.611	633.022
35-39	293.055	315.921	608.976
40-44	272.227	293.158	565.385
45-49	229.332	253.026	482.358

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-1	-2	-3	-4
50-54	183.230	206.927	390.157
55-59	145.682	163.230	308.912
60-64	111.158	129.116	240.274
65-69	81.834	105.124	186.958
70-74	57.573	77.700	135.273
75+	58.322	91.514	149.836
Total	4.071.434	4.270.613	8.342.047

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.9
Penduduk menurut Agama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Selayar	186.409	1	35	172		-
2	Bulukumba	275.187	475	214	21	212	-
3	Bantaeng	176.138	321	208	6	35	-
4	Jeneponto	352.551	44	19	3		-
5	Takalar	272.137	85		10	5	-
6	Gowa	667.271	2.435	1.356	154	269	-
7	Sinjai	244.100	68	21	7		-
8	Maros	212.834	568		65	61	-
9	Pangkep	212.976	466	531	50		-
10	Barru	162.980	74				-
11	Bone	503.364	1.275	1.005	45	166	-
12	Soppeng	230.008	632	75	21	9	-
13	Wajo	276.127	99				-
14	Sidrap	219.495	1.205	165	26.793	39	-
15	Pinrang	333.063	5.428	4.153			-
16	Enrekang	207.888	524	77	5		-
17	Luwu	337.850	10.366	10.801	104	17	-
18	Tana Toraja	52.808	350.184	99.807	13.427	19	-
19	Luwu Utara	256.578	37.113	2.816	8.949	12	-
20	Luwu Timur	212.884	46.429	5.914	15.909	12	-
21	Toraja Utara						-
22	Makassar	2.148.312	218.730	52.262	9.684	14.064	-
23	Pare-Pare	120.746	6.381	3.165	1.363	936	-
24	Palopo	144.995	6.917	15.732	265	420	-
	Sulawesi Selatan	8.706.701	689.820	198.356	77.053	16.276	-

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 6,23 persen, pada tahun 2010 meningkat sebesar 8,19 persen. Namun pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 7,61 persen. Sementara pada tahun 2012 pertumbuhan meningkat menjadi 8,37 dan kembali menurun pada tahun 2013 menjadi 7,65 persen. Namun demikian, dalam kurun waktu 2009-2013 pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu 6,23 persen dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan telah melampaui kinerja Nasional, bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2012 ketika pertumbuhan nasional menurun.

Tabel 2.10
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2000)

No	Pertumbuhan PDRB	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi
1	Nasional	4,63	6,2	6,49	6,23	6,5	6,01
2	Prov Sul-Sel (Thn Dasar 2000)	6.23	8.19	7.61	8.37	7,65	7,65
3	Prov Sul-Sel (Thn Dasar 2010)		8.60	8.10	8.90	7.63	

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Meningkatnyaperkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB tercatat sebesar Rp. 47,326.10milyar kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 64.284,43milyar sehingga selama periode tersebut PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar Rp. 16.958.33 milyar.

2.2.1.2. PDRB

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2013. Sebagai daerah yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Sulawesi Selatan mencapai nilai Rp.16.145,48 milyar, meskipun sepanjang tahun 2009–2013 peranan sektor ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No.	Bidang /Urusan	Satuan	Tahun									
			2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1	Pertanian	Milyar	13,528.70	28.59	13,844.70	27.04	14,737.40	26.75	15,494.20	25.95	16,145,48	25.12
2	Pertambangan & Penggalian	Milyar	3,852.80	8.14	4,459.30	8.71	4,152.70	7.54	4,251.60	7.12	4,687,58	7.29
3	Industri Pengolahan	Milyar	6,468.80	13.67	6,869.40	13.42	7,394.50	13.42	8,083.50	13.54	8,703,87	13.54
4	Listrik, Gas & Air bersih	Milyar	490.40	1.04	529.80	1.03	575.40	1.04	647.50	1.08	701,63	1.09
5	Konstruksi	Milyar	2,656.80	5.61	2,900.30	5.66	3,250.80	5.90	3,638.70	6.09	3,956,88	6.16

No.	Bidang /Urusan	Satuan	Tahun									
			2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
6	Perdagangan Hotel & Restoran	Milyar	7,792.10	16.46	8,698.80	16.99	9,631.90	17.48	10,605.60	17.76	11.661,40	18.14
7	Pengangkutan & Komunikasi	Milyar	4,023.70	8.50	4,619.90	9.02	5,179.30	9.40	5,949.60	9.96	6.480,21	10.08
8	Kuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	Milyar	3,204.00	6.77	3,742.10	7.31	4,297.30	7.80	4,979.10	8.34	5.685,01	8.84
9	Jasa-Jasa	Milyar	5,308.80	11.22	5,535.60	10.81	5,879.60	10.67	6,058.80	10.15	6.262,38	9.74
	PDRB ADHK	Milyar	47,326.10	100.00	51,199.90	100.00	55,098.90	100.00	59,708.60	100.00	64.284,43	100.00

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, terjadi pergeseran struktur ekonomi Sulawesi Selatan yang mengarah pada keseimbangan dan perbaikan struktur ekonomi. Kondisi struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 memperlihatkan keadaan sebagai berikut : kontribusi sektor pertanian 25,12 persenADHK dan 23,90 persenADHB; sektor pertambangan dan penggalian 7,29 persenADHK dan 5,99 persenADHB; sektor industri dan pengolahan 13,54 persenADHK dan 12,21 persenADHB; sektor listrik, gas dan air bersih 1,09 persenADHK dan 0,90 persenADHB; sektor konstruksi 6,16 persenADHK dan 5,84 persenADHB; sektor perdagangan, hotel dan restaurant 18,14 persenADHK dan 17,88 persenADHB; sektor pengangkutan dan komunikasi 10,08 persenADHK dan 8,05 persenADHB; sektor keuangan, persewahan dan jasa 8,84 persenADHK serta 7,89 persenADHB; sektor jasa – jasa 9,74 persenADHK dan 17,35 persenADHB.

Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun									
			2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
1	Pertanian	Milyar	28,008.20	28.02	30,442.40	25.83	34,788.20	25.32	39,518.40	24.79	44,162.54	23.90
2	Pertambangan & Penggalian	Milyar	5,503.80	5.51	7,119.70	6.04	8,345.80	6.07	8,803.00	5.52	11,063.89	5.99
3	Industri Pengolahan	Milyar	12,514.90	12.52	14,457.30	12.27	16,789.30	12.22	19,492.50	12.23	22,559.13	12.21
4	Listrik, Gas & Air bersih	Milyar	949.20	0.95	1,088.00	0.92	1,245.90	0.91	1,439.20	0.90	1,661.40	0.90
5	Konstruksi	Milyar	5,387.80	5.39	6,534.50	5.54	7,760.90	5.65	9,109.80	5.71	10,788.20	5.84
6	Perdagangan Hotel & Restoran	Milyar	16,690.30	16.70	20,435.00	17.34	24,236.30	17.64	28,349.60	17.78	33,031.58	17.88
7	Pengangkutan & Komunikasi	Milyar	7,954.00	7.96	9,445.60	8.01	10,849.80	7.90	12,982.90	8.14	14,867.28	8.05

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun									
			2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	Milyar	6,241.50	6.24	7,810.10	6.63	9,513.70	6.92	11,803.30	7.40	14,584.81	7.89
9	Jasa-Jasa	Milyar	16,704.90	16.71	20,529.70	17.42	23,859.80	17.37	27,928.40	17.52	32,064.22	17.35
	PDRB ADHB	Milyar	99,954.60	100.00	117,862.30	100.00	137,389.70	100.00	159,427.10	100.00	184,783.06	100

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Dari tabel pertumbuhan kontribusi sektor PDRB ADHK dan ADHB. menunjukkan perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013. Kontribusi terbesar di dominasi oleh sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; dan sektor industri. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian mempunyai peranan relatif kecil, tetapi berpengaruh terhadap sektor yang dominan.

Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mempunyai andil sebesar 28,02 persen, tetapi terjadi penurunan menjadi 23,90 persen pada tahun 2013. Demikian halnya dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai 28,59 persen dan terjadi penurunan menjadi 25,12 persen pada tahun 2013.

Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 16,70 persen dan mengalami peningkatan dan menjadi 17,88 persen pada tahun 2013. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga konstan sebesar 16,46 persen, terjadi peningkatan pada tahun 2013 menjadi 18,14 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor Pertanian dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

Kontribusi sektor jasa-jasa pada tahun 2009 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tercatat 16,71 persen dan meningkat menjadi 17,35 persen pada tahun 2013. Namun kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 menurun signifikan dari 11,22 persen menjadi 9,74 persen pada tahun 2013. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang relatif besar memberi kontribusi dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

Selanjutnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 mencapai 12,52 persen dan mengalami penurunan menjadi 12,21 persen pada tahun 2013. Sementara kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami penurunan dari 13,67 persen pada tahun 2008 menjadi 13,54 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB ADHB& ADHK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	(4.84)	(1.46)	(7.82)	(5.41)	(1.97)	(1.08)	(2.11)	(2.98)	(3.59)	(3.20)
2	Pertambangan & Penggalian	(24.40)	(10.11)	9.71	6.98	0.56	(13.4)	(9.10)	(5.52)	8.51	2.39
3	Industri Pengolahan	(3.62)	(2.44)	(2.03)	(1.84)	(0.38)	0.03	0.05	0.88	-0.16	0.00
4	Listrik, Gas & Air bersih	(3.53)	2.36	(2.79)	(0.14)	(1.76)	0.92	(0.45)	3.84	0.00	0.93
5	Konstruksi	7.90	7.41	2.86	0.91	1.89	4.15	1.16	3.29	2.28	1.15
6	Perdagangan Hotel & Restoran	2.18	4.27	3.83	3.19	1.74	2.89	0.80	1.61	0.56	2.14
7	Pengangkutan & Komunikasi	(2.82)	3.73	0.71	6.13	(1.46)	4.18	3.12	6.00	(1.11)	1.20
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	2.18	4.68	6.12	7.96	4.50	6.71	6.92	6.92	6.62	6.00
9	Jasa-Jasa	22.36	(0.12)	4.22	(3.62)	(0.30)	(1.30)	0.87	(4.91)	(0.97)	(4.04)

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Dari perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat digambarkan pertumbuhan kontribusi sektor dominan (Pertanian) selama kurun waktu 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) kecenderungan bertumbuh negative, utamanya pada sector pertanian.

2.2.1.3. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2009 inflasi Sulawesi Selatan mencapai 3,39 persen. Namun pada tahun 2010 inflasi meningkat signifikan menjadi 6,56 persen, dan pada tahun 2011 turun menjadi 2,86 persen. Sementara pada tahun 2012 inflasi kembali naik menjadi 4,41 persen, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,24 persen.

Tabel 2.14
Perkembangan Laju Inflasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Inflasi	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Nasional	%	2,78	6,96	3,79	4,3	8,38
2	Prov. Sul-Sel	%	3,39	6,56	2.86	4.41	6,24

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Pada tahun 2013 inflasi di Sulawesi Selatan mengalami meningkat menjadi 6,24%, peningkatan laju inflasi ini, terbesar disumbang dari komponen Transpor, komunikasi, Perumahan dan Bahan Makanan.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dan PDRB perkapita merupakan proxy indicator untuk menentukan tingkat pendapatan per kapita di suatu wilayah.

Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan makin membaiknya struktur ekonomi Sulawesi Selatan, menciptakan kondisi pendapatan perkapita yang meningkat secara signifikan dan peningkatan kesempatan kerja yang semakin meningkat serta makin berkurangnya tingkat pengangguran.

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2000)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Nilai PDRB (Rp)	99,954.60	117,862.30	137,389.70	159,427.10	184,783,06
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	7.908.519	8.034.776	8,115,638	8.190.222	8.342.047
3.	PDRB perkapita (Rp/jiwa)	12,567,364	14,669,010	16,929,030	19,472,249	22,150.930

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.16
PDRB Per Kapita

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2010)

No	Kab/Kota	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1.	Nilai PDRB (Rp)	171,740,744.1	198,289,084.8	228,285,473.1	258,682,959.2
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	8.034.776	8,115,638	8.190.222	8.342.047
3.	PDRB perkapita (Rp/jiwa)	21,374,677.28	24,432,963.13	27,872,928.60	31,009,530.27

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Sementara perkembangan PDRB per kapita Kabupaten/Kota selama tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahun, PDRB per Kapita Kab/Kota tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 masing-masing urutan satu sampai dengan tiga yaitu Kab. Luwu Timur, Kota Makassar dan Kab. Pangkep . Sedangkan Kabupaten yang PDRB per kapita terendah di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 adalah Kabupaten Jeneponto.

Tabel 2.17
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Tahun Dasar 2000)

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011(Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1	Selayar	7,600,677	9,272,673	11,242,919	13,721,681	15,845,696
2	Bulukumba	8,304,680	9,537,341	10,755,395	12,580,775	14,399,997
3	Bantaeng	8,728,416	10,366,630	12,209,399	14,131,695	16,302,677
4	Jeneponto	5,498,174	6,634,117	7,730,819	8,890,871	10,115,389

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011(Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
5	Takalar	6,890,922	7,622,678	8,696,171	9,997,927	11,158,492
6	Gowa	6,723,419	7,783,598	8,993,574	10,128,896	11,252,442
7	Sinjai	10,535,799	12,293,670	13,994,793	15,975,743	18,241,810
8	Maros	6,822,748	8,144,361	9,432,271	10,743,536	12,111,006
9	Pangkep	15,187,789	17,594,543	20,766,938	24,668,919	28,059,752
10	Barru	8,723,197	10,036,580	11,358,620	13,032,438	14,784,903
11	Bone	8,985,077	10,492,627	12,188,533	14,234,064	16,058,521
12	Soppeng	10,360,170	12,189,646	14,195,790	16,315,876	18,868,099
13	Wajo	12,148,525	14,046,563	17,111,133	19,904,208	22,891,632
14	Sidrap	10,949,482	12,381,995	15,350,303	17,777,949	19,916,037
15	Pinrang	12,891,200	15,068,399	17,529,224	20,267,796	22,866,642
16	Enrekang	8,557,801	10,099,496	11,925,764	13,841,220	16,887,478
17	Luwu	9,698,354	11,181,456	12,956,485	14,856,356	16,826,189
18	Tana Toraja	5,728,578	6,658,056	8,053,762	9,755,778	11,352,196
19	Luwu Utara	9,399,879	10,673,524	12,298,014	14,195,395	16,317,588
20	Luwu Timur	27,013,744	34,123,050	39,387,454	41,056,857	48,628,372
21	Toraja Utara	5,868,904	6,917,434	8,319,159	9,987,988	11,742,177
22	Makassar	23,690,417	27,645,085	32,118,182	37,019,698	41,761,040
23	Pare Pare	11,900,669	13,893,981	15,881,651	17,997,404	20,502,729
24	Palopo	11,409,601	13,160,423	15,291,036	17,272,388	19,162,176
	Provinsi	12,567,364	14,669,010	16,929,030	18,957,553	22,150,805

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.2.1.5. Paritas Daya Beli (PDB)

Paritas daya beli Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009 hingga 2013 mempunyai kecenderungan yang terus meningkat yaitu dari Rp. 635,5 pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 646,70 pada tahun 2013.

Tabel 2.18
Paritas Daya Beli
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	PDB (Rp)	635,5	636,6	640,3	643,59	646.707

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.2.1.6. Indeks Gini Ratio

Selama kurun 2009-2013, Gini Rasio cenderung meningkat dari 0,37 pada tahun 2009 menjadi 0,41 tahun 2013. Pada tahun 2009, Gini Rasio Sulawesi Selatan diatas Gini Rasio Nasional yaitu 0,39 dan pada tahun 2013 Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,43. Angka Gini Rasio tersebut menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan masih timpang. Namun ketimpangan pendapatan penduduk Sulawesi Selatan masih termasuk kategori ketimpangan sedang.

Tabel 2.19
Indeks Gini Ratio
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Gini Ratio	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Nasional	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41
2	Prov. Sul-Sel	0,39	0,40	0,41	0,41	0,43

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.2.1.7. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 963,60 jiwa menjadi 857,54 jiwa pada tahun 2013. Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2009-2013 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat mencapai 12,31 persen kemudian menurun menjadi 10,32 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.20
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Penduduk Miskin	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kota+Desa	Ribu Jw	963,60	913,40	832,91	805,90	863,2
	a. Perkotaan	Ribu Jw	124,50	119,20	137,02	133,60	160,53
	b. Perdesaan	Ribu Jw	839,10	794,20	695,89	672,30	696,91
2	Persentase Kota+Desa	%	12,31	11,60	10,27	9,82	10,32
	a. Perkotaan	%	4,94	4,70	4,48	4,44	5,23
	b. Perdesaan	%	15,81	14,88	13,63	12,93	13,31
3	Jumlah Nasional Kota+Desa	Ribu Jw	32.530,00	31.023,40	30.018,93	29.132,40	28.169,22
4	persentase Nasional Kota+Desa	%	14,15	13,33	12,49	11,66	11,47

Sumber : Profil Sulawesi Selatan Tahun 2014

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan September 2012, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 40,18 persen di perdesaan dan 36,71 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah rokok (14,83 persen di perdesaan, 14,06 persen di perkotaan), bandeng (6,03 persen di perdesaan, 6,04 persen di perkotaan), gula pasir (5,23 persen di perdesaan, 4,56 persen di perkotaan), telur ayam ras (2,37 persen di perdesaan, 3,83 persen di perkotaan), mie instan (3,19 persen di perdesaan, 2,18 persen di perkotaan) minyak goreng (2,33 persen di perdesaan, 2,08 persen di perkotaan), dan ikan teri (1,91 persen di perdesaan, 3,78 persen di perkotaan).

Tabel 2.21
Jumlah Dan persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan Rph/Kapita/bulan			Jumlah penduduk miskin (jiwa)	persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Perkotaan	150.162	65.629	215.790	160,53	5,23
Perdesaan	144.931	39.028	183.959	696,91	13,31
Kota + Desa	146.849	48.779	195.627	863,2	10,32

Sumber :BRS BPS - Diolah dari data Susenas Maret 2008- September 2014

2.2.1.8. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2008-2012), namun pada tahun 2012 cenderung menurun. Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 15.137 kasus menjadi 22.051 kasus. Sedangkan jumlah kriminalitas yang tertangani di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung meningkat.

Tabel 2.22
Angka Kriminalitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2008-2012

No	Jenis Kriminal	TAHUN									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Jml Kasus Narkoba	364	434	463	387	479	460	634	577	798	734
2	Jml Kasus Pembunuhan	104	94	110	95	101	92	114	105	94	80
3	Jml Kasus Seksual	367	284	469	344	438	333	523	435	529	433
4	Jml Kasus Penganiayaan	3,142	1,973	3,674	2,564	3,896	2,879	4,613	3,307	4,338	3,131
5	Jml Kasus Pencurian	1,726	435	5,310	1,782	6,275	1,964	6,832	1,902	6,830	2,000
6	jml Kasus Penipuan	1,154	567	1,224	678	1,437	789	1,850	609	1,649	883
7	Jml Kasus Pemalsuan Uang	20	16	18	16	8	7	23	20	14	10
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	15,137	5,094	17,832	5,944	19,276	6,543	22,051	6,955	21,852	7,335

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.23
Angka Kriminalitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
	1	2	3	4	5	6
1	Angka Kriminalitas yang dilaporkan	14.260	16.580	17.523	20.045	19.819
2	Angka kriminalitas tertangani	8.832	10.434	10.257	11.162	11.787
3	Rasio Aparat Kepolisian dengan jumlah kepolisian	1 : 469	1 : 475	1 : 483	1 : 488	1 : 525

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2013

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada Tabel menunjukkan bahwa selama periode 2009 hingga 2013 angka IPM Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 2,38 point, pada tahun 2013, IPM Sulawesi Selatan berada pada peringkat 19 secara nasional.

Angka IPM tahun 2013 menurut kabupaten/kota se Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar yaitu dari 66,22 (Jeneponto) hingga 80,17 (Makassar). Penyebab terjadinya variasi angka tersebut disebabkan sebahagian oleh kondisi sosial, ekonomi, kultural serta geografis yang berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli dari masing-masing daerah.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
01. Kep. Selayar	68,9	69,34	69,85	70,49	71,00
02. Bulukumba	70,6	71,19	71,75	72,33	73,21
03. Bantaeng	69,4	70,1	70,6	71,51	72,22
04. Jeneponto	64,5	64,92	65,24	65,56	66,22
05. Takalar	68	68,62	69,04	70,14	70,77
06. Gowa	70	70,67	71,29	71,60	72,12
07. Sinjai	69,2	69,53	70,25	70,64	71,45
08. Maros	70,6	71,12	71,67	72,54	73,48
09. Pangkep	69,1	69,43	69,82	70,65	71,26
10. Barru	70,3	70,86	71,19	71,70	72,16
11. Bone	69,6	70,17	70,76	71,47	72,08
12. Soppeng	71,3	71,89	72,21	72,57	73,31
13. Wajo	69,4	70,22	71,03	71,67	72,55
14. Sidrap	72,1	72,37	72,7	73,36	74,05
15. Pinrang	72,6	73,21	73,56	74,39	74,87

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
16.Enrekang	74,2	74,55	74,81	75,30	75,67
17.Luwu	73,6	73,98	74,42	74,68	75,33
18.Tator	71,4	71,87	72,29	72,90	73,76
19.LuwuUtara	73,7	74,32	74,67	74,97	75,36
20.LuwuTimur	72,3	72,79	72,98	73,56	73,96
21.TorajaUtara	68,9	69,56	70,14	71,04	71,69
22.Makassar	78,2	78,79	79,08	79,49	80,17
23.Pare-Pare	77,5	77,78	78,24	78,63	79,02
24.Palopo	76,1	76,55	76,84	77,28	77,7
SulawesiSelatan	70,9	71,62	72,14	72,7	73,28
Nasional	71,8	72,27	72,77	73,29	73,81

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014

Pada tahun 2014 terdapat perubahan metodologi perhitungan untuk IPM beserta komponennya, dan dilakukan penyempurnaan yang pada dasarnya tentu berpengaruh kepada perubahan nilai secara keseluruhan pada komponen IPM, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut capaian IPM yang menggunakan metode baru;

Tabel 2.25

**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru)**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
IPM Sulawesi Selatan	66,0	66,65	67,26	67,92	68,49
IPM Nasional	71,62	72,14	72,77	73,28	

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH) / Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf. Indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama didaerah pedesaan dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar, menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf (komplemen dari buta huruf) dalam kurun waktu tahun 2009-2013 ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 sebesar 87,00 persen menjadi 89,69 persen pada tahun 2013. Artinya pada tahun 2013 masih terdapat 10,31 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Untuk penduduk yang berumur 60 tahun keatas Pada tahun 2007 sebesar 74,13 persen menjadi 73,48 persen pada tahun 2012. Artinya

pada tahun 2012 masih terdapat 26,52 persen penduduk yang berumur 60 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis

Tabel 2.26
Angka Melek Huruf
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No.	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	5.630.624	5.697.901	5.716.709	5.866.250	5.887.352
2	Jumlah Penduduk Usia 15 – 59 Tahun	4.973.637	5.028.247	5.032.430	5.168.686	5.175.012
3	Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun keatas (Lansia)	656.987	669.654	684.279	697.654	712.340
4	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang bisa membaca dan menulis	4.889.206	4.998.769	5.034.706	5.203.950	5.278.600
	Jumlah Penduduk Usia 15 – 59 Tahun yang bisa membaca dan menulis	4.605.588	4.671.241	4.691.734	4.830.654	4.847.951
5	Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun keatas (Lansia) yang bias membaca dan menulis	2.93.618	327.528	342.972	373.296	430.649
6	AMH Sulawesi Selatan (Usia 15 Thn keatas)	87.06	87.73	88.07	88.71	89.66
7	AMH Sulawesi Selatan (Usia 15 – 59 Thn)	92.60	92.90	93.23	93.46	93.68
	AMH Sulawesi Selatan (Usia 60 Thn keatas), Lansia	44.69	48.91	50.12	53.51	60.46
8	AMH Nasional (Usia 15 Thn keatas)					

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014

Tabel 2.27
Angka Melek Huruf
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No.	Kab.Kota	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Selavar						
	AMH Usia 15 Keatas	78.27	80.23	82.10	85.67	88.98	91.76
	AMH Usia 60 Keatas	40.73	40.76	42.87	50.81	50.99	62.82
	AMH Usia 15 -59 Tahun	89.90	89.20	89.23	90.17	91.12	95.72
2	Bulukumba						
	AMH Usia 15 Keatas	74.92	77.10	79.12	80.09	84.59	86.48
	AMH Usia 60 Keatas	40.28	41.31	50.29	50.32	55.31	60.41
	AMH Usia 15 -59 Tahun	85.20	87.40	86.34	86.89	88.32	90.19
3	Bantaeng						
	AMH Usia 15 Keatas	67.36	70.15	74.84	79.46	80.08	81.40
	AMH Usia 60 Keatas	39.23	40.35	42.48	50.51	50.61	60.62
	AMH Usia 15 -59 Tahun	76.60	77.50	78.28	82.98	84.69	86.85
4	Jeneponto						
	AMH Usia 15 Keatas	67.27	67.89	70.14	71.57	75.00	78.92
	AMH Usia 60 Keatas	49.23	50.23	51.64	53.94	58.78	60.06
	AMH Usia 15 -59 Tahun	76.50	77.20	77.48	77.97	78.46	80.33

No.	Kab.Kota	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
5	Takalar						
	AMH Usia 15 Keatas	75.44	77.06	79.35	81.90	82.44	84.69
	AMH Usia 60 Keatas	43.66	43.75	46.78	47.86	52.94	60.75
	AMH Usia 15 -59 Tahun	80.10	80.80	81.14	84.76	86.38	88.63
6	Gowa						
	AMH Usia 15 Keatas	73.18	75.62	76.04	78.23	80.74	83.13
	AMH Usia 60 Keatas	44.60	45.68	45.88	49.93	55.98	60.48
	AMH Usia 15 -59 Tahun	79.80	80.30	81.92	82.32	86.72	90.74
7	Sinjai						
	AMH Usia 15 Keatas	75.98	76.07	79.02	82.49	85.31	87.67
	AMH Usia 60 Keatas	42.40	43.10	44.43	48.49	50.60	61.71
	AMH Usia 15 -59 Tahun	86.40	88.50	90.45	94.98	95.91	97.31
8	Maros						
	AMH Usia 15 Keatas	77.94	78.90	80.96	71.08	83.19	84.23
	AMH Usia 60 Keatas	42.06	48.16	49.19	50.02	51.08	60.24
	AMH Usia 15 -59 Tahun	85.90	87.90	90.09	93.10	95.23	95.86
9	Pangkep						
	AMH Usia 15 Keatas	75.54	78.50	80.03	84.52	87.28	89.31
	AMH Usia 60 Keatas	46.16	47.53	50.52	51.56	55.65	61.01
	AMH Usia 15 -59 Tahun	85.90	86.90	87.25	90.55	90.88	91.19
10	Barro						
	AMH Usia 15 Keatas	77.12	79.83	80.29	84.74	86.64	89.55
	AMH Usia 60 Keatas	44.58	50.67	52.74	53.76	60.79	61.09
	AMH Usia 15 -59 Tahun	87.70	88.50	89.03	90.23	90.65	91.43

No.	Kab.Kota	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
11	Bone						
	AMH Usia 15 Keatas	74.75	74.66	74.63	75.99	77.38	88.46
	AMH Usia 60 Keatas	44.23	46.12	51.64	52.64	53.68	62.54
	AMH Usia 15 -59 Tahun	84.80	84.90	84.86	86.41	87.99	94.45
12	Soppeng						
	AMH Usia 15 Keatas	79.40	80.84	81.34	85.22	87.11	87.48
	AMH Usia 60 Keatas	40.20	46.68	48.33	50.45	53.57	61.78
	AMH Usia 15 -59 Tahun	84.60	85.10	89.67	92.67	94.68	95.90
13	Wajo						
	AMH Usia 15 Keatas	72.11	72.73	75.46	78.00	82.01	85.62
	AMH Usia 60 Keatas	42.89	44.63	45.67	48.87	50.42	61.15
	AMH Usia 15 -59 Tahun	82.00	84.70	85.53	88.97	90.43	91.23
14	Sidrap						
	AMH Usia 15 Keatas	80.71	84.07	86.82	87.05	89.44	90.25
	AMH Usia 60 Keatas	40.79	48.79	49.51	50.10	56.89	61.39
	AMH Usia 15 -59 Tahun	89.50	89.60	89.63	90.98	92.33	93.84
15	Pinrang						
	AMH Usia 15 Keatas	79.06	82.88	87.06	90.01	90.52	91.99
	AMH Usia 60 Keatas	41.84	42.82	48.73	50.91	57.67	61.06

No.	Kab.Kota	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	AMH Usia 15 -59 Tahun	89.90	91.70	93.90	95.46	96.02	96.65
16	Enrekang						
	AMH Usia 15 Keatas	78.97	80.15	84.27	88.53	90.80	91.35
	AMH Usia 60 Keatas	40.83	42.86	44.87	50.51	51.94	61.24
	AMH Usia 15 -59 Tahun	89.80	90.01	90.84	91.48	92.74	95.75
17	Luwu						
	AMH Usia 15 Keatas	80.47	81.47	83.45	87.13	90.70	91.82
	AMH Usia 60 Keatas	41.03	42.15	43.15	50.05	56.07	60.27
	AMH Usia 15 -59 Tahun	88.76	89.15	90.48	91.63	93.78	95.28
18	Tator						
	AMH Usia 15 Keatas	72.75	74.19	75.87	77.18	87.50	89.51
	AMH Usia 60 Keatas	40.25	40.31	44.41	50.58	50.77	61.70
	AMH Usia 15 -59 Tahun	85.00	85.50	86.28	89.76	90.27	92.16
19	Luwu Utara						
	AMH Usia 15 Keatas	80.90	87.99	89.22	90.66	91.10	93.11
	AMH Usia 60 Keatas	41.10	42.11	44.19	51.20	51.26	61.86
	AMH Usia 15 -59 Tahun	92.00	92.10	92.36	92.86	93.36	95.39
20	Luwu Timur						
	AMH Usia 15 Keatas	81.87	83.80	84.98	88.78	90.08	93.87
	AMH Usia 60 Keatas	41.23	43.23	43.89	51.16	52.62	61.46
	AMH Usia 15 -59 Tahun	89.10	90.02	91.14	92.24	93.34	96.34

No.	Kab.Kota	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
21	Toraja Utara						
	AMH Usia 15 Keatas	72.37	72.99	73.69	85.07	86.32	87.38
	AMH Usia 60 Keatas	40.93	41.12	44.12	46.45	50.47	61.41
	AMH Usia 15 -59 Tahun	85.30	87.00	89.80	90.15	90.79	93.54
22	Makassar						
	AMH Usia 15 Keatas	81.16	85.78	88.06	92.08	94.28	97.83
	AMH Usia 60 Keatas	40.48	44.07	50.17	55.12	58.12	62.64
	AMH Usia 15 -59 Tahun	89.60	90.17	92.47	94.79	97.11	99.05
23	Parepare						
	AMH Usia 15 Keatas	84.86	87.51	88.34	90.54	92.60	97.36
	AMH Usia 60 Keatas	41.64	41.59	58.79	59.12	60.07	61.83
	AMH Usia 15 -59 Tahun	96.50	96.10	97.04	97.16	97.28	98.48
24	Palopo						
	AMH Usia 15 Keatas	85.57	88.62	89.36	92.59	95.82	97.45
	AMH Usia 60 Keatas	41.73	42.65	43.72	51.74	57.17	62.07
	AMH Usia 15 -59 Tahun	97.30	96.22	97.07	97.33	97.59	98.16
	Sulawesi Selatan						
	AMH Usia 15 Keatas	86.49	87.06	87.73	88.07	88.71	89.66
	AMH Usia 60 Keatas	43.74	44.69	48.91	50.12	53.51	60.46
	AMH Usia 15 -59 Tahun	92.20	92.60	92.90	93.23	93.46	93.68

Sumber : BPSSulawesi Selatan Tahun 2014

Kondisi angka melek huruf Kabupaten/Kota pada tahun 2013 untuk usia 15 ke atas menunjukkan 10 Kab/Kota AMH-nya diatas rata-rata Provinsi dan 14 Kab/Kota, AMH-nya masih dibawah rata – rata Provinsi. Kabupaten/Kota yang angka melek huruf diatas Provinsi adalah Kab.Selayar (91.76 persen), Kab.Sidrap (90.25 persen), Kab.Pinrang (91.99 persen), Kab. Enrekang (91.35 persen), Kab. Luwu (91.82 persen), Kab.Luwu Utara (93.11 persen), Kabupaten Luwu Timur (93,87 persen), Kota Makassar (97,83 persen), persen), Kota Pare-Pare (97,36 persen) dan Kota Palopo (97,45 persen).Sementara angka melek huruf terendah Kabupaten Jeneponto (78,92 persen) dan tertinggi Kota Makssar (97,83 persen).

Tabel 2.28
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kab/Kota	Tahun 2013		
		Penduduk Usia 15 Tahun Keatas <i>(dalam ribuan)</i>		
		Seluruhnya	Yang Dapat Membaca	Angka Melek Huruf (%)
1	Selayar	84.78	77.79	91.76
2	Bulukumba	285.45	246.87	86.48
3	Bantaeng	130.32	106.08	81.40
4	Jeneponto	247.77	195.55	78.92
5	Takalar	198.02	167.71	84.69
6	Gowa	491.24	408.29	83.11
7	Sinjai	164.43	144.16	87.67
8	Maros	231.83	195.26	84.23
9	Pangkajene Kepulauan	223.78	199.86	89.31
10	Barro	119.48	106.99	89.55
11	Bone	511.45	452.41	88.46
12	Soppeng	159.14	139.21	87.48
13	Wajo	278.22	238.20	85.62
14	Sidenreng Rappang	199.92	180.44	90.25
15	Pinrang	254.97	234.56	91.99
16	Enrekang	138.60	126.61	91.35
17	Luwu	239.08	219.53	91.82
18	Tana Toraja	159.63	142.89	89.51
19	Luwu Utara	209.80	195.36	93.11
20	Luwu Timur	187.91	176.39	93.87
21	Toraja Utara	156.95	137.13	87.38
22	Kota Makasar	1002.99	981.21	97.83
23	Kota Pare Pare	98.11	95.52	97.36
24	Kota Palopo	113.48	110.59	97.45
SULAWESI SELATAN		5,887.35	5,278.60	89.66

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014

Berdasarkan perhitungan IPM dengan menggunakan metodologi baru, Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, terlampir pada tabel berikut ;

Tabel 2.29

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
AHLS Sulawesi Selatan	11,47	11,82	12,16	12,52	12,90

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015

2.2.2.3. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Selama periode 2009-2013, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009, rata-rata lama sekolah 7,41 tahun dan meningkat menjadi 8,01 tahun pada tahun 2013. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional, yang saat ini (2013) sudah mencapai 8,14 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan hanya mampu menyelesaikan pendidikan kelas I - II SMP dan putus sekolah pada saat memasuki semester lima di kelas III SMP. Kesenjangan (gap) antara capaian Sulawesi Selatan dan Nasional berangsur-angsur semakin membaik dari tahun ke tahun akibat rata lama sekolah Nasional bergerak lebih lambat dibandingkan dengan capaian rata lama sekolah Sulawesi Selatan.

Tabel 2.30

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kab./Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Selayar	6,75	6,95	7,07	7,19	7,26
Bulukumba	6,69	6,97	7,11	7,25	7,17
Bantaeng	5,87	5,97	6,10	6,23	6,48
Jeneponto	5,88	6,20	6,23	6,26	6,27
Takalar	6,23	6,42	6,46	6,50	7,02
Gowa	6,57	6,83	7,23	7,65	7,37
Sinjai	6,71	6,74	7,07	7,42	7,10
Maros	6,50	6,62	6,90	7,19	7,27
Pangkajene Kepulauan	6,61	6,73	6,94	7,16	7,22
Barru	7,39	7,61	7,62	7,63	7,89
Bone	6,38	6,70	6,72	6,74	6,73
Soppeng	6,98	7,25	7,28	7,31	7,37
Wajo	6,06	6,22	6,51	6,81	6,98
Sidenreng Rappang	7,24	7,25	7,27	7,29	7,77
Pinrang	7,22	7,61	7,62	7,63	7,89
Enrekang	8,25	8,30	8,32	8,34	8,39
Luwu	7,71	7,74	7,80	7,86	7,94
Tana Toraja	7,46	7,70	7,74	7,78	8,26

Kab./Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Luwu Utara	7,04	7,46	7,49	7,52	7,51
Luwu Timur	7,75	8,17	8,18	8,19	8,21
Toraja Utara	7,03	7,22	7,67	8,15	7,88
Kota Makassar	10,60	10,82	10,85	10,88	10,90
Kota Pare Pare	9,63	9,63	9,76	9,89	9,91
Kota Palopo	9,73	10,03	10,04	10,05	10,19
Sulawesi Selatan	7,41	7,84	7,92	7,95	8,01
Nasional	7,72	7,92	7,94	7,97	8,14

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2014

Sementara Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Kabupaten/Kota yang Rata-Rata Lama Sekolah diatas Provinsi dan Nasional adalah Kota Makassar (10,90 persen), Kota Palopo (10,19 persen), Kota Parepare (9,91 persen), Kab. Enrekang (8,39 persen), dan Kab. Luwu Timur (8,21 persen). Sedangkan Kabupaten yang Rata-rata Lama Sekolah terendah dan dibawah Rata-rata Lama Sekolah Provinsi adalah Kab. Bantaeng (6,48 persen) dan Kab. Jenepono (6,27 persen).

Berdasarkan perhitungan IPM dengan menggunakan metodologi baru, Angka Rata-Rata Lama Sekolah mengalami perubahan, terlampir pada tabel berikut;

Tabel 2.31

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan	7,29	7,33	7,37	7,45	7,49

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015

Tabel 2.32

Biaya Sekolah Per Siswa Pada Tiap Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	KAB./KOTA	SEKOLAH/MADRASAH						JUMLAH
		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK		
		SISWA	BIAYA	SISWA	BIAYA	SISWA	BIAYA	
1	Selayar	14.945	17.276.420.000	4.136	3.810.083.200	2.267	6.234.250.000	27.320.753.200
2	Bulukumba	46.922	54.241.832.000	14.131	13.017.477.200	8.296	22.814.000.000	90.073.309.200
3	Bantaeng	20.344	23.517.664.000	4.822	4.442.026.400	3.045	8.373.750.000	36.333.440.400
4	Jenepono	38.678	44.711.768.000	11.445	10.543.134.000	7.150	19.662.500.000	74.917.402.000
5	Takalar	29.360	33.940.160.000	9.194	8.469.512.800	4.299	11.822.250.000	54.231.922.800
6	Gowa	75.988	87.842.128.000	26.802	24.690.002.400	16.638	45.754.500.000	158.286.630.400
7	Sinjai	29.991	34.669.596.000	9.832	9.057.238.400	6.819	18.752.250.000	62.479.084.400
8	Bone	82.964	95.906.384.000	12.455	11.473.546.000	9.801	26.952.750.000	134.332.680.000
9	Maros	38.504	44.510.624.000	12.735	11.731.482.000	7.642	21.015.500.000	77.257.606.000

NO	KAB./KOTA	SEKOLAH/MADRASAH						JUMLAH
		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK		
		SISWA	BIAYA	SISWA	BIAYA	SISWA	BIAYA	
10	Pangkep	40.342	46.635.352.000	6.468	5.958.321.600	5.223	14.363.250.000	66.956.923.600
11	Barru	19.803	22.892.268.000	29.357	27.043.668.400	16.868	46.387.000.000	96.322.936.400
12	Soppeng	22.977	26.561.412.000	9.034	8.322.120.800	5.630	15.482.500.000	50.366.032.800
13	Wajo	41.914	48.452.584.000	10.943	10.080.691.600	6.099	16.772.250.000	75.305.525.600
14	Sidrap	31.341	36.230.196.000	9.191	8.466.749.200	6.382	17.550.500.000	62.247.445.200
15	Pinrang	42.716	49.379.696.000	15.496	14.274.915.200	9.789	26.919.750.000	90.574.361.200
16	Enrekang	27.130	31.362.280.000	9.880	9.101.456.000	5.940	16.335.000.000	56.798.736.000
17	Luwu	47.941	55.419.796.000	16.221	14.942.785.200	9.856	27.104.000.000	97.466.581.200
18	Tana Toraja	34.189	39.522.484.000	11.494	10.588.272.800	7.699	21.172.250.000	71.283.006.800
19	Luwu Utara	37.455	43.297.980.000	13.798	12.710.717.600	8.196	22.539.000.000	78.547.697.600
20	Luwu Timur	29.597	34.214.132.000	10.486	9.659.703.200	6.124	16.841.000.000	60.714.835.200
21	Toraja Utara	36.752	42.485.312.000	12.515	11.528.818.000	7.275	20.006.250.000	74.020.380.000
22	Makassar	148.640	171.827.840.000	48.092	44.302.350.400	35.085	96.483.750.000	312.613.940.400
23	Pare Pare	15.215	17.588.540.000	4.892	4.506.510.400	4.705	12.938.750.000	35.033.800.400
24	Palopo	18.486	21.369.816.000	4.044	3.725.332.800	5.964	16.401.000.000	41.496.148.800
	TOTAL	972.194	1.123.856.264.000	317.463	292.446.915.600	206.792	568.678.000.000	1.984.981.179.600

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Kasar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	SD/MI							
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	1.145.592	1.117.812	1.131.992	1.109.215	1.096.840	1.047.097	
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	1.048.643	1.039.874	1.042.615	1.086.493	1.064.347	977.136	
1.3.	APK SD/MI	Sul-Sel	111,51	107,49	108,57	102,09	103,05	107,16
		Nasional	111,12	113,77	116,48	119,26	122,11	
2	SMP/MTs							
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	365.296	375.115	379.977	423.756	466.974	435.766	
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	480.616	490.508	506.322	486.256	471.929	457.105	
2.3.	APK SMP/MTs	Sul-Sel	76,02	76,54	75,05	87,15	98,95	99,27
		Nasional	81,25	90,58	91,88	95,82	99,92	
3	SMA/MA/SMK							

No	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	228.556	271.087	321.957	285.684	319.253	335.816	
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	420.624	431.142	476.085	431.766	457.735	467.190	
3.3.	APK	Sul-Sel	54,73	62,78	67,71	66,17	69,75	71,88
	SMA/MA/SMK	Nasional	59,06	62,55	62,85	64,66		

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014
 - Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel Tahun 2014

Pada tabel menunjukkan APK SD/MI, APK SMP/MTs, dan APK SMA/MA/SMK menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2012. Pada tahun 2011, APK jenjang pendidikan SD/MI di seluruh kabupaten/kota menunjukkan angka di atas 100%. Sementara capaian APK SMP/MTs Kabupaten/Kota pada tahun 2012. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang capaian APK SMP/MTs yang menunjukkan capaian di atas capaian provinsi antara lain Kabupaten Takalar (100,23%), Gowa (105,18%), Sidrap (103,78%), Tanah Toraja (103,38%), Luwu Utara (103,32%), Makassar (102,21%), Pare-Pare (106,53%), dan Palopo (109,64%). Selanjutnya capaian APK SMA/MA/SMK Kabupaten/Kota yang berada di atas rata-rata Provinsi (69,75%) antara lain terdapat 12 Kabupaten/Kota yang APK SMA/MA/SMK di atas rata-rata Provinsi, yaitu Kota Bulukumba (76,53%), Kab. Gowa (70,72%), Kab. Sinjai (78,24%), Kab. Maros (70,13%), Kab. Pangkep (73,22%), Kab. Barru (82,02%), Kab. Soppeng (71,47%), Kab. Luwu (79,16%), Kab. Luwu Utara (76,69%), Kab. Luwu Timur (72,37%), Kab. Toraja Utara (71,28%), Pare-Pare (75,22%), Kab. Palopo (75,88%).

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Kasar Siswa Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No.	Kab./Kota	SD / MI			SMP / MTs			SMA/MA/SMK		
		Siswa yang bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APK (%)	Jumlah Siswa yang bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	APK (%)	Jumlah Siswa yang bersekolah di SMA/MA /SMK	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	APK (%)
1	Kep. Selayar	17,157	16,073	106.74	7,527	7,765	96.93	4,058	5,551	73.10
2	Bulukumba	51,585	48,741	105.83	22,233	23,015	96.60	14,240	22,269	63.95
3	Bantaeng	20,902	20,148	103.74	9,443	10,018	94.26	6,881	10,353	66.46
4	Jeneponto	48,638	46,608	104.36	19,807	21,121	93.78	12,182	21,335	57.10
5	Takalar	34,192	32,203	106.18	13,693	14,554	94.08	11,287	15,392	73.33
6	Gowa	86,930	79,290	109.64	34,839	34,665	100.50	21,883	39,324	55.65
7	Sinjai	31,445	27,118	115.96	15,319	16,025	95.59	9,652	14,241	67.78
8	Maros	42,362	41,512	102.05	16,857	17,214	97.93	10,682	19,322	55.28
9	Pangkep	40,934	40,703	100.57	15,661	14,204	110.26	12,339	18,226	67.70
10	Barru	21,625	20,637	104.79	11,546	11,298	102.20	7,018	10,692	65.64
11	Bone	91,227	92,286	98.85	37,187	39,888	93.23	23,561	39,832	59.15
12	Soppeng	23,977	24,412	98.22	11,535	11,565	99.74	8,755	11,631	75.27
13	Wajo	41,827	40,633	102.94	17,694	19,241	91.96	9,574	19,633	48.76
14	Sidrap	30,807	30,259	101.81	14,791	16,155	91.56	9,768	14,700	66.45
15	Pinrang	47,141	45,728	103.09	19,384	20,707	93.61	14,728	19,258	76.48
16	Enrekang	29,082	26,497	109.76	12,983	12,048	107.76	9,624	11,303	85.15
17	Luwu	49,093	45,126	108.79	21,973	22,552	97.43	15,600	20,987	74.33
18	Tana Toraja	34,371	31,795	108.10	14,339	13,328	107.59	11,460	13,850	82.74
19	Luwu utara	41,483	39,527	104.95	19,350	20,147	96.04	12,451	17,020	73.16
20	Luwu Timur	34,735	30,358	114.42	14,503	13,409	108.16	10,602	13,887	76.34

No.	Kab./Kota	SD / MI			SMP / MTs			SMA/MA/SMK		
		Siswa yang bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APK (%)	Jumlah Siswa yang bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	APK (%)	Jumlah Siswa yang bersekolah di SMA/MA /SMK	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	APK (%)
21	Toraja utara	37,292	31,153	119.71	15,615	13,188	118.40	11,500	14,942	76.96
22	Kota Makassar	155,471	136,326	114.04	69,967	69,690	100.40	68,549	75,255	91.09
23	Kota Pare-pare	16,317	14,098	115.74	7,589	7,496	101.24	8,262	7,945	103.99
24	Kota Palopo	18,504	15,905	116.34	9,931	7,812	127.12	11,160	10,242	108.96
Sulawesi Selatan		1,047,097	977,136	107.16	453,766	457,105	99.27	335,816	467,190	71.88
Nasional				122.11			99.92			74.3

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2013
 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.2.2.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan (APT) menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Angka Pendidikan Yang ditamatkan (APT)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011

No.	APT	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	SD	876.070	973.982	749.113	796.853	847.760
	Laki-Laki	578.586	624.068	477.821	521.577	553.385
	Perempuan	297.484	349.914	271.292	275.276	294.375
	APT (%)	39,57	40,13	33,14	33,41	33,37
2	SMP	557.969	574.089	580.757	558.975	581.536
	Laki-Laki	379.919	376.115	382.712	352.094	396.716
	Perempuan	178.050	197.974	198.045	206.881	184.820
	APT (%)	25,20	23,65	25,69	23,44	22,89
3	SMA	607.656	634.478	681.283	707.713	757.597
	Laki-Laki	436.862	432.350	458.565	479.897	502.968
	Perempuan	170.794	202.128	222.718	227.816	254.629
	APT (%)	27,45	26,14	30,14	29,67	29,82
4	PERGURUAN TINGGI	172.161	244.736	249.605	321.535	353.497
	Laki-Laki	112.104	124.953	120.958	160.102	174.022
	Perempuan	60.057	119.783	128.647	161.433	179.475
	APT (%)	7,78	10,08	11,04	13,48	13,92
JUMLAH		2.213.856	2.427.285	2.260.758	2.385.076	2.540.390

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2012
 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2012

Dari data tersebut di atas menggambarkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada tahun 2007 untuk jenjang pendidikan SD 39,57 persen, APT SMP 25,20 persen, APT SMA 27,45 persen dan APT PT 7,78 persen. Sedangkan pada tahun 2011, APT SD 33,37 persen, APT SMP 22,89 persen, APT SMA 29,82 persen dan APT PT 13,92 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia tamat SD, kemudian tamatan SMP, namun sudah banyak pula yang tamatan SMA.

2.2.2.6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator

daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM SD/MI di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 92,17 persen pada tahun 2008 menjadi 97,92 persen pada tahun 2013 Sementara APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun yang sama mengalami peningkatan, yaitu dari 61,06 persen di tahun 2008 mencapai 78,15 persen pada tahun 2013. Demikian pula APM SMA/MA mengalami peningkatan dari 41,99 persen pada tahun 2008 mencapai 61,48 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Murni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI						
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI + SDLB	966.300	959.522	968.210	1.059.765	1.041.996	956.812
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	1.048.643	1.039.874	1.042.615	1.086.493	1.064.347	977.136
1.3	APM SD/MI						
	Sul-Sel	92.17%	92.27%	92.86%	97.54%	97.90%	97,92
	Nasional	93.99	94.37	94.76	91.03		
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTS	291.333	302.803	315.564	317.463	322.186	357.228
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	480.616	490.508	506.322	486.256	471.929	457.105
2.3	APM SMP/MTS						
	Sul-Sel	61.06%	61.74%	62.32%	65.29%	68.27%	78,15
	Nasional	67.39	67.43	67.73	68.12		
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	182.260	181.298	203.213	206.792	219.347	287.229
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun	435.624	431.142	476.085	431.766	457.735	467.190
3.3	APM SMA/MA						
	Sul-Sel	41.99%	42.03%	42.75%	47.89%	47.92%	61,48%
	Nasional	44.97	45.11	45.59	47.97		

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Posisi relatif APM SD/MI menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki APM SD/MI terendah dibandingkan Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten Jeneponto (82,05%), Bantaeng (84,91%), Takalar (85,27%), Kota Palopo (86,35%), Luwu Timur (86,37%), Bone (87,66%) dan Sidrap (87,82%). Sedangkan Kab./Kota yang angka APM SD/MI tertinggi diatas rata-rata Provinsi dan Nasional adalah Kota Makassar (91,40%), Kep. Selayar (91,52%), Kab. Wajo (92,38%), Kab. Pangkep (92,41%), Kab. Tana Toraja (92,98%), dan Kab. Toraja Utara (96,94%).

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No.	Kab./Kota	SD / MI			SMP / MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa Usia 7 -12 tahun bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	APM (%)	Jumlah Siswa Usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	APM (%)	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	APM (%)
1	Kep. Selayar	14,900	16,073	92.70	6,075	7,765	78.24	3,133	5,551	56.44
2	Bulukumba	44,098	48,741	90.47	17,887	23,015	77.72	11,766	22,269	52.84
3	Bantaeng	18,932	20,148	93.96	7,546	10,018	75.32	5,464	10,353	52.78
4	Jeneponto	44,771	46,608	96.06	15,757	21,121	74.60	10,950	21,335	51.32
5	Takalar	31,642	32,203	98.26	10,836	14,554	74.45	8,520	15,392	55.35
6	Gowa	76,344	79,290	96.28	27,864	34,665	80.38	19,801	39,324	50.35
7	Sinjai	26,114	27,118	96.30	11,859	16,025	74.00	7,772	14,241	54.57
8	Maros	40,886	41,512	98.49	13,419	17,214	77.95	9,833	19,322	50.89
9	Pangkep	40,028	40,703	98.34	12,657	14,204	89.11	9,527	18,226	52.27
10	Barru	20,324	20,637	98.48	9,166	11,298	81.13	5,754	10,692	53.82
11	Bone	91,152	92,286	98.77	29,145	39,888	73.07	20,813	39,832	52.25
12	Soppeng	23,970	24,412	98.19	9,200	11,565	79.55	6,912	11,631	59.43
13	Wajo	40,124	40,633	98.75	13,962	19,241	72.56	8,769	19,633	44.66
14	Sidrap	29,876	30,259	98.73	11,638	16,155	72.04	7,945	14,700	54.05
15	Pinrang	45,321	45,728	99.11	14,711	20,707	71.04	12,253	19,258	63.63
16	Enrekang	26,483	26,497	99.95	10,261	12,048	85.17	8,037	11,303	71.11
17	Luwu	44,969	45,126	99.65	17,491	22,552	77.56	13,162	20,987	62.72
18	Tana Toraja	31,664	31,795	99.59	10,637	13,328	79.81	9,018	13,850	65.11
19	Luwu utara	39,148	39,527	99.04	15,576	20,147	77.31	10,442	17,020	61.35
20	Luwu Timur	30,185	30,358	99.43	11,357	13,409	84.70	9,116	13,887	65.64
21	Toraja utara	30,867	31,153	99.08	10,687	13,188	81.04	9,238	14,942	61.83
22	Kota Makassar	135,354	136,326	99.29	55,722	69,690	79.96	61,789	75,255	82.11
23	Kota Parepare	13,987	14,098	99.21	6,046	7,496	80.66	7,340	7,945	92.39
24	Kota Palopo	15,673	15,905	98.54	7,729	7,812	98.94	9,875	10,242	96.42
Sulawesi Selatan		956,812	977,136	97.92	357,228	457,105	78.15	287,229	467,190	61.48
Nasional				122.11			99.92			74.3

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.2.2.7. Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 824 kematian bayi dari 142.573 kelahiran hidup, menjadi 1.041 jumlah kematian bayi dari 167.225 kelahiran hidup pada

tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran ibu hamil dalam melakukan kunjungan kehamilan masih kurang.

Tabel 2.38
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kematian Bayi (Jiwa)	824	824	868	1.021	1.041
2	Kelahiran Hidup (Jiwa)	142.573	152.514	153.425	164.013	167.225
3	AKB	6	5	6	6	6
4	AKHB	994	995	994	994	994

Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.39
Angka Kematian Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

NO	KABUPATEN/KOTA	Tahun				
		2009 (Jiwa)	2010 (Jiwa)	2011 (Jiwa)	2012 (Jiwa)	2013 (Jiwa)
1	Kep.Selayar	23	22	28	21	12
2	Bulukumba	20	35	46	45	46
3	Bantaeng	39	37	23	37	44
4	Jeneponto	23	41	36	46	51
5	Takalar	18	21	7	28	14
6	Gowa	56	38	60	48	62
7	Sinjai	47	41	49	48	61
8	Maros	47	38	33	54	40
9	Pangkep	36	45	36	67	29
10	Barru	8	14	8	14	13
11	Bone	48	53	45	41	76
12	Soppeng	39	36	33	38	34
13	Wajo	41	30	35	61	52
14	Sidrap	29	64	51	36	31
15	Pinrang	83	27	44	41	47
16	Enrekang	67	56	54	53	58
17	Luwu	40	28	34	63	65
18	Tator	19	17	28	29	41
19	LuwuUtara	31	35	80	54	50
20	LuwuTimur	34	48	53	57	45
21	TorajaUtara	6	11	37	30	19
22	Makassar	30	40	18	72	111
23	Pare-Pare	10	12	19	22	21
24	Palopo	31	35	11	16	19
	Sulawesi Selatan	824	824	868	1.021	1.041

Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.2.2.8. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup yang terhitung dari sensus penduduk tahun 1970 adalah 43,2 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Dan bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yaitu 51,9 tahun, kemudian meningkatkan lagi menjadi 60 tahun, untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990,

selanjutnya bagi bayi yang dilahirkan tahun 2000 memiliki usia harapan hidup menjadi mencapai 63 tahun hingga tahun 2010 mencapai 70 tahun. Usia harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan selama 30 tahun sampai 40 tahun terakhir dari 1970 an sampai tahun 2010. Perkembangan angka usia harapan hidup Sulawesi Selatan berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40
Angka Usia Harapan Hidup Menurut Sensus Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil Sensus Penduduk												
Tahun 1971			Tahun 1980			Tahun 1990			Tahun 2000			Thn 2010
<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L+P</i>	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L+P</i>	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L+P</i>	<i>L</i>	<i>P</i>	<i>L+P</i>	<i>L + P</i>
41,7	44,6	43,2	50,3	53,3	51,9	58,3	61,8	60,0	61,1	64,8	63,0	75,01

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.41
Angka Usia Harapan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Indikator	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,80	70,00	70,20	70,45	70,60

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Sementara Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel menunjukkan usia Harapan Hidup atau rata-rata lama hidup penduduk di Kabupaten/Kota pada tahun 2013 mencapai umur diatas 70 tahun, kecuali Kabupaten Jeneponto (65,40 tahun), Kabupaten Selayar (68,08 tahun), Kabupaten Pangkep (69,16 tahun), dan Kabupaten Barru (69,52 tahun), yang berada dibawah rata-rata usia harapan hidup Nasional yaitu 70,07 tahun, sedangkan Kabupaten Enrekang (75,66 tahun) paling tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.42
Angka Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
01.	Kep.Selayar	67,6	67,7	67,88	68,02	68,08
02.	Bulukumba	71,6	71,9	72,13	72,32	72,62
03.	Bantaeng	73,1	73,6	73,96	74,32	74,59
04.	Jeneponto	64,9	65	65,15	65,31	65,40
05.	Takalar	69,2	69,5	69,89	70,24	70,30
06.	Gowa	71,4	71,6	71,78	71,96	72,04
07.	Sinjai	71,6	72	72,24	72,50	72,83
08.	Maros	71,7	72,3	72,76	73,22	73,55
09.	Pangkep	68,6	68,8	68,96	69,14	69,16
10.	Barru	68,5	68,9	69,05	69,24	69,52

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
11.	Bone	69,4	69,7	70	70,26	70,56
12.	Soppeng	71,5	71,6	71,74	71,85	71,93
13.	Wajo	70,4	70,9	71,37	71,79	72,11
14.	Sidrap	72,1	72,5	72,81	73,12	73,38
15.	Pinrang	71,7	72,1	72,28	72,50	72,81
16.	Enrekang	74,7	75	75,19	75,39	75,66
17.	Luwu	73,3	73,7	74,04	74,14	74,68
18.	Tator	74,1	74,2	74,22	74,26	74,28
19.	LuwuUtara	71,3	71,6	71,68	71,81	72,03
20.	LuwuTimur	70,8	70,9	71,06	71,29	71,29
21.	TorajaUtara	73,5	73,5	73,58	73,62	73,66
22.	Makassar	73,2	73,6	73,82	74,05	74,38
23.	Pare-Pare	73,9	74,3	74,49	74,71	75,04
24.	Palopo	72,3	72,5	72,59	72,72	72,93
	SulawesiSelatan	69,8	70	70,2	70,45	70,60
	Nasional	69,2	69,4	69,65	69,87	70,07

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014

Pada tahun 2014 terdapat perubahan metodologi perhitungan untuk angka harapan hidup saat lahir, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang menggunakan metode baru;

Tabel 2.43
Angka Harapan Hidup saat Lahir
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (Metode Baru)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
AHH saat Lahir Sulawesi Selatan	68,93	69,12	69,31	69,50	69,60

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat Sulawesi Selatan.

2.2.2.9. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk tahun 2009 adalah 0,01 persen dari seluruh jumlah balita yaitu 649.586 balita, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,04 persen dari seluruh jumlah balita yaitu 656.298 balita.

Tabel 2.44
persentase Balita Gizi Buruk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jml Balita Gizi Buruk	Jiwa	52	144	791	498	299
b.	Jumlah balita	Jiwa	649.586	812.839	753.611	737.615	656.298
	persentase Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,02	0,10	0,07	0,04

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014

Tabel 2.45
persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	% BALITA GIZI BURUK
1	Kep.Selayar	0.05
2	Bulukumba	0.00
3	Bantaeng	0.00
4	Jeneponto	0.03
5	Takalar	0.02
6	Gowa	0.00
7	Sinjai	0.03
8	Maros	0.09
9	Pangkep	0.11
10	Barru	0.06
11	Bone	0.03
12	Soppeng	0.10
13	Wajo	0.03
14	Sidrap	0.04
15	Pinrang	0.06
16	Enrekang	0.01
17	Luwu	0.00
18	Tator	0.03
19	LuwuUtara	0.00
20	LuwuTimur	0.00
21	TorajaUtara	0.00
22	Makassar	0.00
23	Pare-Pare	0.21
24	Palopo	0.00
	SULAWESI SELATAN	0,07

Sumber : Dinas KesehatanProv. Sul-Sel Tahun 2014

2.2.2.10. Persentase Penduduk yang memiliki Lahan Bersertifikat

Luas Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 sampai tahun 2011 yaitu 457.650.100 ha. Dari luas lahan tersebut, terdapat 233.250.496 ha lahan milik penduduk yang berstatus sertifikat. Sedangkan rasio penduduk memiliki lahan bersertifikat berkurang dari 38,36 persen pada tahun 2008 menjadi 26,88 persen pada tahun 2012.

Tabel 2.46
Persentase Penduduk yang memiliki Lahan Bersertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Tanah	457.650.100	457.650.100	457.650.100	457.650.100	457.650.100
2	Jumlah penduduk	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8b.306.848
3	Jumlah lahan yang bersertifikat	29.367.772	47.837.115	29.519.126	18.178.803	23.250.496
4	persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat	3,76	6,05	3,67	2,24	2,88

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013

2.2.2.11. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja tersebut selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2009 adalah 91,10 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2013 menjadi 88,57 persen. Dari angka tersebut, terdapat 94 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 6 persen masih mencari kerja atau pengangguran.

Tabel 2.47
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Penduduk yang bekerja	Jiwa	3,222,256.00	3,272,365.00	3,375,498.00	3,351,908.00	3.291.280
b.	Angkatan kerja	Jiwa	3,536,920.00	3,571,317.00	3,612,424.00	3,560,891.00	3.468.192
c.	Rasio penduduk yang bekerja	%	91,10	91,63	93,44	94,13	88,57

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.48
Rasio Penduduk Angkatan Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
15-19	183.833	50.758	234.591
20-24	303.535	54.600	358.135
25-29	420.527	30.440	450.967
30-34	487.940	18.504	506.444
35-39	411.456	5.486	416.942
40-44	447.316	9.466	456.782
45-49	322.419	3.317	325.736
50-54	262.895	2.232	265.127
55-59	177.698	1.656	179.354
60-64	273.661	453	274.114
65+	3.291.280	176.912	3.468.192
Total	183.833	50.758	234.591

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.2.3. Fokus Seni Budaya & Olahraga

2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian & Prasarana Penyelenggaraan Seni & budaya & Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan bidang olahraga di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2009 terdapat 1.311 klub olahraga dan pada tahun 2013 turun menjadi 1.126 klub olahraga, sementara jumlah sarana olahraga berupa

gedung dan lapangan olahraga pada tahun 2009 berjumlah 2.494 buah, dan menjadi 2.480 buah pada tahun 2012.

Tabel 2.49
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian.	102	177	203	290	291
2	Jumlah sarana gedung kesenian.	2	3	3	10	10
3	Jumlah klub olahraga .	1.311	1.251	1.394	1.532	1.126
4	Jumlah gedung/lap. olahraga.	2.494	2.357	2.305	2.480	2.480

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Pada tabel menunjukkan jumlah grup seni di Sulawesi Selatan sebanyak 290, jumlah sarana gedung kesenian sebanyak 10, jumlah gedung/lapangan olahraga sebanyak 2.480, dan jumlah klub olahraga sebanyak 1.126.

Tabel 2.50
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian	Jumlah sarana gedung kesenian	Jumlah gedung/lap. olahraga	Jumlah Klub olahraga
1	Kota Makassar	69	2	256	12
2	Kabupaten Gowa	21	1	8	103
3	Kab. Takalar	21	1	7	12
4	Kab. Jeneponto	12	1	32	12
5	Kab. Bantaeng	6	1	43	12
6	Kab. Bulukumba	24	-	4	12
7	Kab. Selayar	4	2	4	192
8	Kab. Sinjai	21	-	32	15
9	Kab. Bone	10	-	226	44
10	Kab. Soppeng	17	-	29	6
11	Kab. Maros	9	-	13	20
12	Kab. Pangkep	29	-	120	10
13	Kab. Barru	16	-	11	8
14	Kota. Pare – Pare	15	1	82	47
15	Kab. Pinrang	6	-	5	14
16	Kab. Sidrap	12	-	273	200

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian	Jumlah sarana gedung kesenian	Jumlah gedung/lap. olahraga	Jumlah Klub olahraga
17	Kab. Wajo	10	-	571	38
18	Kota. Palopo	8	1	68	38
19	Kab. Luwu	-	-	58	15
20	Kab. Luwu Utara	5	-	72	91
21	Kab. Luwu Timur	-	-	9	199
22	Kab. Enrekang	5	-	386	13
23	Kab. Tana Toraja	7	-	103	5
24	Kab. Toraja Utara	5	-	68	8
JUMLAH		290	10	2,480	1.126

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perencanaan pembangunan dll.,

2.3.1.1. Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

a.a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 96.53 pada tahun 2008 menjadi 98.25 pada tahun 2013, demikian pula APS SMP/MTs (13-15 tahun) meningkat dari 80.96 menjadi 87,43 pada tahun 2013.

Tabel 2.51

Tabel Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	1.003.790	1.011.337	1.051.750	1.043.273	956.812
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	1.039.874	1.042.615	1.082.493	1.064.347	977.136
1.3.	APS SD/MI	96.53	97.00	97.16	97.59	98.25
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	417,355	429,653	408.650	403.358	357.228
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	490,508	477,108	481,910	471.929	457.105

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
2.3.	APS SMP/MTs	80.96	82.63	84.04	87.69	87.43

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 berdasarkan kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI) dan kelompok umur 13-15 tahun (SMP/MTs). Kabupaten Kota dengan APS SD/MI yang telah mencapai 100 adalah Kabupaten Barru dan Kota Palopo

Selanjutnya Kab./Kota dengan APS SD/MI terendah adalah Kabupaten Bulukumba (97,07) Luwu (97,09) Toraja (97,49) Bone (97,50) Makassar (97,71)

Tabel 2.51

Tabel Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No.	Kab./Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid usia 7-12 tahun	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	APS	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	APS
1	Kep. Selayar	15,837	16,073	98.53	6,748	7,765	86.90
2	Bulukumba	47,315	48,741	97.07	20,024	23,015	87.00
3	Bantaeng	19,411	20,148	96.34	8,569	10,018	85.53
4	Jeneponto	45,498	46,608	97.62	17,979	21,121	85.12
5	Takalar	31,564	32,203	98.02	12,498	14,554	85.88
6	Gowa	78,004	79,290	98.38	31,016	34,665	89.47
7	Sinjai	26,657	27,118	98.30	13,703	16,025	85.51
8	Maros	40,917	41,512	98.57	15,119	17,214	87.83
9	Pangkep	40,093	40,703	98.50	12,899	14,204	90.81
10	Barru	20,637	20,637	100.00	10,260	11,298	90.81
11	Bone	89,978	92,286	97.50	33,585	39,888	84.20
12	Soppeng	24,188	24,412	99.08	10,345	11,565	89.45
13	Wajo	40,193	40,633	98.92	16,270	19,241	84.56
14	Sidrap	30,059	30,259	99.34	13,557	16,155	83.92
15	Pinrang	45,596	45,728	99.71	17,456	20,707	84.30
16	Enrekang	26,426	26,497	99.73	10,941	12,048	90.81
17	Luwu	43,814	45,126	97.09	19,596	22,552	86.89
18	Tana Toraja	30,997	31,795	97.49	11,797	13,328	88.51

No.	Kab./Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid usia 7-12 tahun	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	APS	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	APS
19	Luwu utara	38,918	39,527	98.46	17,507	20,147	86.90
20	Luwu Timur	30,171	30,358	99.39	12,177	13,409	90.81
21	Toraja utara	30,748	31,153	98.70	11,903	13,188	90.25
22	Kota Makassar	133,199	136,326	97.71	61,834	69,690	88.73
23	Kota Pare-pare	13,923	14,098	98.76	6,770	7,496	90.32
24	Kota Palopo	15,905	15,905	100.00	7,094	7,812	90.81
Sulawesi Selatan		960,047	977,136	98.25	399,647	457,105	87.43

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

a.b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 151,34 kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 139,69. Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 242,35 dan pada tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 183.16

Tabel 2.53
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	6.871	6.933	6.957	6.974	6.995
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	1.039.874	1.042.615	1.086.493	1.064.347	977.136
1.3.	Rasio	151,34	150,38	156,17	152,62	139.69
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	2.024	2.103	2.126	2.137	2.182
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	490.508	506.322	486.256	471.929	399.647
2.3.	Rasio	242,35	240,76	228,72	220,84	183.16

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013/4
Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.54
Rasio Ketersediaan Sekolah & Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No.	Nama Kab/Kota	SD/MI		Rasio	SMP/MTs		Rasio
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk 7-12 th		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk 13-15 th	
1	Selayar	153	16,073	105.05	60	6,748	112.46
2	Bulukumba	387	48,741	125.95	121	20,024	165.49
3	Bantaeng	154	20,148	130.83	55	8,569	155.79
4	Jeneponto	310	46,608	150.35	105	17,979	171.23
5	Takalar	246	32,203	130.91	63	12,498	198.39
6	Gowa	486	79,290	163.15	157	31,016	197.56
7	Sinjai	273	27,118	99.33	73	13,703	187.72
8	Bone	281	41,512	147.73	95	15,119	159.15
9	Maros	307	40,703	132.58	104	12,899	124.03
10	Pangkep	226	20,637	91.31	53	10,260	193.58
11	Barru	765	92,286	120.64	187	33,585	179.60
12	Soppeng	276	24,412	88.45	65	10,345	159.15
13	Wajo	437	40,633	92.98	99	16,270	164.34
14	Sidrap	245	30,259	123.51	70	13,557	193.67
15	Pinrang	346	45,728	132.16	73	17,456	239.12
16	Enrekang	236	26,497	112.28	65	10,941	168.32
17	Luwu	303	45,126	148.93	125	19,596	156.77
18	Tana Toraja	228	31,795	139.45	87	11,797	135.59
19	Luwu Utara	273	39,527	144.79	103	17,507	169.97
20	Luwu Timur	168	30,358	180.70	59	12,177	206.39
21	Toraja Utara	188	31,153	165.71	69	11,903	172.50
22	Makassar	531	136,326	256.73	234	61,834	264.25
23	Pare Pare	98	14,098	143.86	34	6,770	199.12
24	Palopo	78	15,905	203.91	26	7,094	272.85
Jumlah		6,995	977,136	139.69	2,182	399,647	183.16

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014
 Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

a.c.Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid di Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013 sedikit mengalami perbaikan. Tahun 2009, rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI sebesar 14,59 dan tahun 2013 turun menjadi 13,49, artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani 14 murid. Pada tingkat SMP/MTs tahun 2009 sebesar 9,59 dan mengalami penambahan menjadi 12,10 pada tahun 2013.

Rasio guru murid pada kedua jenjang tersebut rata-rata masih dibawah 25, yang berarti bahwa proses belajar mengajar masih berlangsung secara optimal, sebab rasio maksimal/ideal adalah 25 murid untuk seorang guru.

Tabel 2.55
Rasio Guru Terhadap Murid
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	76.069	68.288	65.024	79.821	72.174
1.2.	Jumlah Murid	1.117.812	1.131.992	1.109.215	1.096.840	973.286
1.3.	Rasio	14,59	16,58	17,06	13,74	13,49
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	39.122	30.678	46.209	63.577	29.456
2.2.	Jumlah Murid	375.115	379.977	423.756	466.974	356.409
2.3.	Rasio	9,59	12,39	9,17	7,35	12.10

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014
 - Dinas Pendidikan Prov. Sul- Sel Tahun 2014

Sedangkan rasio guru dengan murid menurut Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dapat digambarkan bahwa rasio guru dengan murid SD/MI pada Kab./Kota tertinggi adalah Kota Makassar 27,75 KabupatenJeneponto19,96; dan KabupatenLuwu Timur 17,01.

Sementara rasio guru dengan murid SMP/MTs tertinggi adalah Kabupaten sidrap 13,17 dan wajo 13,14. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berlangsung optimal karena rasio guru dengan murid diatas rasio ideal yaitu 25.

Tabel 2.56
Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No.	Nama Kab/Kota	SD/MI		Rasio	SMP/MTs		Rasio
		Jumlah Guru	Jumlah Murid		Jumlah Guru	Jumlah Murid	
1	Selayar	1,983	15,631	7.88	1,403	6,495	4.63
2	Bulukumba	4,497	53,978	12.00	1,842	21,893	11.89
3	Bantaeng	2,563	24,561	9.58	1,122	9,865	8.79
4	Jeneponto	2,892	57,721	19.96	2,428	25,128	10.35
5	Takalar	3,902	37,674	9.65	1,669	16,651	9.98
6	Gowa	4,667	78,532	16.83	5,021	33,783	6.73
7	Sinjai	3,070	32,085	10.45	2,551	13,014	5.10
8	Bone	8,421	101,913	12.10	7,250	40,271	5.55
9	Maros	3,275	44,048	13.45	1,947	18,303	9.40
10	Pangkep	3,262	49,926	15.31	2,768	19,310	6.98
11	Barru	2,642	22,956	8.69	1,871	9,918	5.30
12	Soppeng	2,841	29,011	10.21	1,379	12,371	8.97
13	Wajo	4,266	51,057	11.97	1,617	21,248	13.14
14	Sidrap	2,134	34,761	16.29	1,221	16,087	13.17
15	Pinrang	3,961	56,390	14.24	1,465	23,955	16.35
16	Enrekang	2,386	28,611	11.99	2,315	11,813	5.10
17	Luwu	3,716	46,398	12.49	3,511	19,240	5.48
18	Tana Toraja	3,739	49,196	13.16	3,868	19,092	4.94
19	Luwu Utara	3,435	30,736	8.95	3,646	14,173	3.89
20	Luwu Timur	2,044	34,766	17.01	1,834	15,142	8.26
21	Toraja Utara	2,114	33,719	15.95	1,388	14,768	10.64
22	Makassar	5,352	148,523	27.75	7,226	62,821	8.69
23	Pare Pare	1,510	16,930	11.21	2,058	6,716	3.26
24	Palopo	1,151	17,717	15.40	2,175	14,914	6.86
Jumlah		79,821	1,096,841	13.74	63,577	466,974	7.35

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013

- Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Tabel 2.57
Rasio Murid Per Kelas Rata-Rata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

NO.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI						
	Jumlah Guru	62,976	76,069	68,288	65,024	79,821	72,174
	Jumlah Kelas	36,254	38,541	40,230	40,270	40,890	43,209
	Rasio Guru/Kelas	1.74	1.97	1.70	1.61	1.95	1.67
	Jumlah Murid	1,145,592	1,117,812	1,131,992	1,109,215	1,096,840	973,286
	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	31.60	29.00	28.14	27.54	26.82	22.53
2	SMP/MTs						
	Jumlah Guru	31,743	39,122	30,678	46,209	63,577	29,456
	Jumlah Kelas	7,461	7,217	7,704	7,732	7,768	10,614
	Rasio Guru/Kelas	4.25	5.42	3.98	5.98	8.18	2.78
	Jumlah Murid	348,096	375,115	379,977	423,756	466,974	356,409
	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	46.66	51.98	49.32	54.81	60.12	33.58

Sumber : - BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014
 - Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

b. Pendidikan Menengah

b.a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga terjadi peningkatan pada kelompok umur 16-18 tahun (SMA/MA/SMK). Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS meningkat dari 51,67 persen tahun 2009 menjadi 65,25 persen pada tahun 2013, dan masih jauh diatas APS Nasional yaitu 57,85 persen.

Tabel 2.58
Tabel Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	SMA/SMU/MA/SMK					
1	Jumlah Murid Usia 16-19 th	254.455	259.306	272.589	272.589	304.841
2	Jumlah Penduduk Usia 16-19 th	465.805	471.487	477.239	457.735	467.190
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	51,67	53,00	56,66	61,66	65,25

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

b.b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK. Selama periode 2009-2013, daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk 446 orang, dan pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 512 orang.

Tabel 2.59
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Sekolah	966	1003	1041	1148	912
2	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	431.142	476.085	431.766	457.735	467.190
3	Rasio Ketersediaan Sekolah	446	475	415	399	512

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014

b.c. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru pada Tahun 2009, rasio guru terhadap murid pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 13 dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 11, artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani atau mengawasi 14 murid.

Tabel 2.60
Rasio Guru Terhadap Murid
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
SMA/MA/SMK						
1.	Jumlah Guru	20.926	21.574	22.064	22.168	25.855
2.	Jumlah Murid	271.087	321.957	285.684	319.253	294.429
3.	Rasio Guru Terhadap Murid	13	15	13	14	11

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014

b.d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/MA/SMK pada tahun 2008-2013 mengalami perbaikan. Tahun 2008, rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 3.29 dan pada tahun 2013 turun menjadi 2.64 artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani 3 kelas.

Tabel 2.61
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SMA/MA/SMK						
Jumlah Guru	20,182	20,926	21,574	22,064	22,168	25,855
Jumlah Kelas	6,128	5,768	7,521	8,060	8,388	9,134
Rasio Guru/Kelas	3.29	3.63	2.87	2.74	2.64	2.83
Jumlah Murid	228,556	271,087	321,957	285,684	319,253	295,429
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	37.30	47.00	42.81	35.44	38.06	32.34

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014

b.e. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Tabel 2.62

**Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	persentase Penduduk Usia >15 thn melek huruf	86.50	87.00	87.75	88.07	88.39
2	Jumlah Penduduk Usia 15 >Thn	4.809.182	4.942.743	4.885.570	4.946.636	5.008.398
3	Jumlah penduduk melek huruf	4.159.942	4.300.186	4.284.645	4.353.040	4.422.415

Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2013

c. Fasilitas Pendidikan**c.a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik**

Pada Tabel 2.43 Menunjukkan bahwa laju peningkatan kondisi Rg. Kelas dalam kondisi baik dari tahun 2008 sebesar 54 persen menjadi 60 persen di tahun 2012 sangatlah rendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari data menunjukkan bahwa kondisi bangunan baik untuk sekolah dasar masih minim, hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas belajar murid.

Tabel 2.63

**Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml Rg. Kelas SD Kondisi Baik	23.296	23.893	24.506	25.134	37.765
2.	Jml Rg. Kelas seluruh SD	41.675	41.675	41.675	41.675	43.209
3.	Sekolah SD Kondisi baik(%)	55,90	57,33	58,80	60,31	87,40

Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014

c.b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang KelasBaik

Sarana pendidikan memegang peranan penting, sehingga penyediaan sarana pendidikan diperlukan untuk tujuan pelaksanaan pendidikan seefektif mungkin. Kondisi Rg. Kelas baik untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2009-2013, persentase untuk jumlah sekolah kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 68.24% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 84.80%.

Tabel 2.64

**Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml Rg. Kelas SMP Kondisi Baik	26.001	28.413	29.717	31.567	9.001
2.	Jml Rg. Kelas seluruh SMP	38.103	39.726	40.337	40.837	10.614
3.	Sekolah SMP Kondisi baik (%)	68,24	71,52	73,67	77,30	84.80

Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014

c.c. Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Kondisi bangunan baik untuk jenjang SMA/SMK pada tahun 2009-2013, persentase untuk jumlah sekolah kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 64.00% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 77.00%.

Tabel 2.65

Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml SMP Kondisi Baik	436	491	560	631	702
2.	Jml seluruh SMP	682	712	789	842	912
3.	Sekolah SMP Kondisi baik (%)	64,00	69,00	71,00	75,00	77,00

Sumber :Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014

d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini diSulawesi Selatan pada taun 2009 -2013 khusus untuk APK, pada tahun 2009 mencapai sebesar 48.26% dan pada tahun 2013 sebesar 51,71%. mengalami kenaikan dari tahun ketahun seperti tabel berikut

Tabel 2.66

Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml siswa pada jenjang tk	525.347	557.560	600.747	648.030	562.204
2.	Jml anak usia 4-6 thn	1.095.025	1.155.246	1.218.760	1.285.786	1.098.699
3.	PAUD (%)	47.98	48.26	49.29	50.40	51.71

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah pada usia sekolah 7-12 tahun (SD/MI), usia 13-15 tahun (SMP/MTs), dan usia 16-18tahun (SMA/MA/SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 mengalami penurunan. Angka putus sekolah usia 7-12 tahun (SD/MI) pada tahun 2009 sebesar 2.10 persen, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,12 persen. Demikian halnya angka putus sekolah usia 13-15 tahun (SMP/MTs)mengalami penurunan dari 1.55 persen pada tahun 2009 menjadi 1.05 persen pada tahun 2013. Kemudian angka putus sekolah usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK) mengalami penurunan dari 2.16 persen pada tahun 2009 menjadi 1.18 persen di tahun 2013. Walaupun angka putus sekolah mengalami penurunan.

Tabel 2.67
Angka Putus Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	2.10	1.85	1.72	1.20	1,12
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1.55	1.45	1.38	1.09	1,05
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	2.16	2.07	1.63	1.30	1,18

Sumber : - BPSProv. Sul-Sel Tahun 2014

- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2009-2013 yaitu angka kelulusan SD pada tahun 2009 sebesar 95,12 persen dan selama tiga tahun berturut-turut (2010-2012) capaian angka kelulusan 100 persen, sedangkan angka kelulusan SMP sebesar 94,22 persen pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 99,85 persen atau mendekati 100 persen pada tahun 2013. Sementara angka kelulusan SMA dan SMK pada tahun 2009 sebesar 95,00 persen dan 96,36 persen, kemudian meningkat menjadi 99,48 persen dan 99,91 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.68
Angka Kelulusan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Kelulusan SD	95,12	100	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP	94,22	99,77	99,83	99,81	99,85
3.	Angka Kelulusan SMA	95,00	95,25	99,12	99,07	99,48
4.	Angka Kelulusan SMK	96,36	99,87	99,41	99,93	99,91

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

f.a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dan dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA

Berdasarkan data menunjukkan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang pendidikan SMP/MTs selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 98,52 persen, dari 93,00 persen pada tahun 2009.

Demikian pula angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan sebesar 96,08 persen pada tahun 2013 dari 92,00 persen pada tahun 2009. Kondisi tersebut mewujudkan bahwa masih terdapat kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI sudah melanjutkan ke jenjang SMP/MTs sebesar 2,18 persen dan sebesar 4,97 persen yang tidak melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012.

Tabel 2.69
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dan
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	93,00	95,65	97,22	97,84	98,52
2	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,00	93,95	94,83	95,03	96,08

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014
 - Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

f.b. Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2009-2013, pada tahun 2009 jumlah guru yang memenuhi sebanyak 45.344 guru kemudian naik pada tahun berikutnya.

Tabel 2.70
Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml guru ijazah s1-d4	65.864	63.667	75.624	86.769	54.706
2	Jml guru sd-sma	111.208	113.787	149.988	183.391	134.947
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1-Diploma 4	45.344	50.120	74.364	76.622	

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.1.2. Kesehatan

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2009-2013 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Provinsi Sulawesi Selatan relative meningkat.

Pada tahun 2009, jumlah posyandu sebanyak 8.944 unit, meningkat menjadi 9.414 unit pada tahun 2013. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2009 sebanyak 860.066 jiwa, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 656.298 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2009 adalah 78,41 dan 69,71 pada tahun 2013.

Tabel 2.71
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah posyandu	unit	8.642	8.944	9.068	9.268	9.758	9.414
b.	Jumlah balita	Jiwa	677.611	860.066	691.408	698.609	733.764	656.298
c.	Rasio Posyandu per 1000 balita		12,75	10,40	13,12	13,27	13,30	14,34

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.72
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten/kota	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Selayar	273	10.103	27,02
2	Bulukumba	539	32.758	16,45
3	Bantaeng	235	14.454	16,25
4	Jeneponto	463	27.732	17,28
5	Takalar	422	21.408	19,71
6	Gowa	686	51.229	13,39
7	Sinjai	327	18.946	17,26
8	Maros	394	25.451	16,11
9	Pangkep	376	24.788	15,17
10	Barru	244	13.526	18,04
11	Bone	956	59.065	16,19
12	Soppeng	316	19.149	16,50
13	Wajo	436	31.623	13,79
14	Sidrap	297	20.953	14,17
15	Pinrang	354	29.132	12,15
16	Enrekang	293	15.815	18,53
17	Luwu	419	27.234	15,38
18	Tator	277	19.937	13,89
19	Luwu Utara	350	26.720	13,09
20	Luwu Timur	264	19.697	13,40
21	Toraja Utara	277	19.011	14,57
22	Makassar	979	105.548	9,27
23	Parepare	119	9.862	12,06
24	Palopo	141	12.156	0,13
	Jumlah	9.414	656.298	14,34

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 adalah 0,22 dan pada tahun 2013 mengalami menjadi 0,23.

Tabel 2.73
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	1.751	1.807	1.823	2.134	1.938
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
c.	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk		0,22	0,22	0,22	0,21	0,23

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Ketersediaan pusat pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2012 di Kabupaten/Kota yaitu berupa Puskesmas sebanyak 440 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 1.257 unit. Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 5,27, sedangkan rasio Puskesmas Pembantu adalah 15,07.

Tabel 2.74
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Selayar	127.200	14	11,01	5	3,93	68	53,46
2	Bulukumba	404.900	19	4,69	8	1,98	61	15,07
3	Bantaeng	181.000	12	6,63	0	0	22	12,15
4	Jeneponto	353.100	18	5,13	1	0,28	55	15,67
5	Takalar	280.600	14	4,99	0	0	50	17,82
6	Gowa	696.100	25	3,59	19	2,73	115	16,52
7	Sinjai	234.900	16	6,81	0	0	62	26,39
8	Maros	331.800	14	4,22	8	2,41	27	8,14
9	Pangkep	317.100	23	7,25	1	0,32	60	18,92
10	Barru	169.300	10	5,91	0	0	33	19,49
11	Bone	734.100	38	5,18	8	1,09	78	10,63
12	Soppeng	225.500	17	7,54	0	0	44	19,51
13	Wajo	390.600	23	5,89	0	0	54	13,82
14	Sidrap	283.300	14	4,94	0	0	42	14,83
15	Pinrang	361.300	15	4,15	2	0,55	52	14,39
16	Enrekang	196.400	13	6,62	0	0	69	35,13
17	Luwu	343.800	21	6,11	6	1,75	108	31,41
18	Tator	226.200	21	9,28	0	0	31	13,70
19	Luwu Utara	297.300	13	4,37	0	0	62	20,85
20	Luwu Timur	263.000	15	5,70	0	0	60	22,81

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
21	Toraja Utara	222.400	25	11,24	0	0	27	12,14
22	Makassar	1.408.100	43	3,05	178	12,64	37	2,63
23	Parepare	135.200	6	4,44	1	0,74	19	14,05
24	Palopo	160.800	11	6,84	4	2,49	21	13,06
	Jumlah	8.342.000	440	5,27	241	2,89	1.257	15,07

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Pada tahun 2008, jumlah RS 89 unit dan pada tahun 2013 jumlah rumah sakit menjadi 91 unit. Sedangkan rasio rumah sakit persatuan penduduk selama lima tahun terakhir (2008-2013) mengalami fluktuasi yang rendah.

Tabel 2.75
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Uraian	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	2	2	2	2	2	3
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	6	6	6	6	6	6
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	7	7	7	7	7	7
4.	Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan Pemkab/Kota	29	30	31	32	32	32
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	45	45	45	46	49	43
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	89	90	91	93	95	91
7.	Jumlah Penduduk	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
8.	Rasio	1,14	1,14	1,13	1,15	1,14	1,09

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.76
Jumlah Rumah Sakit
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Thn 2011	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Selayar	127,200	0	0	0	0	0	0	1	0,79	0	0	1	0,79
2	Bulukumba	404,900	0	0	0	0	0	0	1	0,25	0	0	1	0,25

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Thn 2011	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
3	Bantaeng	181,000	0	0	0	0	0	0	1	0,55	0	0	1	0,55
4	Jeneponto	351,100	0	0	0	0	0	0	1	0,28	0	0	1	0,28
5	Takalar	280,600	0	0	0	0	0	0	1	0,36	0	0	1	0,36
6	Gowa	696,100	0	0	0	0	0	0	1	0,14	1	0,14	2	0,29
7	Sinjai	234,900	0	0	0	0	0	0	1	0,43	0	0	1	0,43
8	Maros	331,800	0	0	0	0	1	0,30	1	0,30	0	0	2	0,60
9	Pangkep	317,100	0	0	0	0	0	0	1	0,32	0	0	1	0,32
10	Barru	169,300	0	0	0	0	0	0	1	0,59	0	0	1	0,59
11	Bone	734,100	0	0	0	0	1	0,14	1	0,14	0	0	2	0,27
12	Soppeng	225,500	0	0	0	0	0	0	1	0,44	0	0	1	0,44
13	Wajo	390,600	0	0	0	0	0	0	2	0,51	1	0,26	3	0,77
14	Sidrap	283,300	0	0	0	0	0	0	2	0,71	1	0,35	3	1,06
15	Pinrang	361,300	0	0	0	0	0	0	1	0,28	2	0,55	3	0,83
16	Enrekang	196,400	0	0	0	0	0	0	2	1,02	0	0	2	1,02
17	Luwu	343,800	0	0	0	0	0	0	1	0,29	0	0	1	0,29
18	Tator	226,200	0	0	0	0	0	0	1	0,44	1	0,44	2	0,88
19	Luwu Utara	297,300	0	0	0	0	0	0	1	0,34	1	0,34	2	0,67
20	Luwu Timur	263,000	0	0	0	0	0	0	1	0,38	1	0,38	2	0,76
21	Toraja Utara	222,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,45	1	0,45
22	Makassar	1,408,100	4	0,28	0	0	3	0,21	7	0,50	31	2,20	45	3,20
23	Parepare	135,200	0	0	0	0	1	0,74	1	0,74	3	2,22	5	3,70
24	Palopo	160,800	0	0	0	0	1	0,62	1	0,62	3	1,87	5	3,11
	Jumlah	8,342,000	4	0,05	0	0	7	0,08	32	0,38	46	0,55	89	1,07

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2012

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2008 jumlah dokter 942 orang dengan rasio 0,12 dan pada tahun 2012 jumlah dokter meningkat menjadi 1.005 orang dokter dengan rasio 0,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2008-2012 tidak dibarengi dengan besarnya penduduk yang dilayani.

Tabel 2.77
Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah dokter Umum	Jiwa	942	1.215	1.212	1.005	1.005	1.186
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
c.	Rasio dokter persatuan penduduk		12,06	15,36	15,08	12,38	12,09	14,21

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.78
Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Selayar	127.200	52	40,88
2	Bulukumba	404.900	61	15,07
3	Bantaeng	181.000	44	24,31
4	Jeneponto	353.100	54	15,38
5	Takalar	280.600	78	27,80
6	Gowa	696.100	117	16,81
7	Sinjai	234.900	45	19,16
8	Maros	331.800	94	28,33
9	Pangkep	317.100	89	28,07
10	Barru	169.300	53	31,31
11	Bone	734.100	59	8,04
12	Soppeng	225.500	41	18,18
13	Wajo	390.600	23	5,89
14	Sidrap	283.300	73	25,77
15	Pinrang	361.300	66	18,27
16	Enrekang	196.400	55	28,00
17	Luwu	343.800	47	13,67
18	Tator	226.200	52	22,99
19	Luwu Utara	297.300	51	17,15
20	Luwu Timur	263.000	66	25,10
21	Toraja Utara	222.400	32	14,39
22	Makassar	1.408.100	703	49,93
23	Parepare	135.200	78	57,69
24	Palopo	160.800	64	39,80
	Jumlah	8.342.000	2.097	25,13

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2012 mengalami penurunan yaitu dari 2.024 orang pada tahun 2008 menjadi 1.592 orang pada tahun 2012. Penurunan jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami penurunan dari 0,26 persen pada tahun 2008 menjadi 0,19 persen pada tahun 2012.

Tabel 2.79
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah tenaga medis	Jiwa	2.024	2.675	2.736	1.592	1.592	2.097
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
c.	Rasio tenaga medis per 100.000Penduduk		25,93	33,82	34,05	19,61	19,16	25,13

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan dari Dinas Kesehatan tahun 2008-2012, menggambarkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive pada tahun 2008 sebanyak 20.062 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

sebesar 52,34 persen, sementara pada tahun 2012, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive 19.177 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 57,73 persen. Kondisi tersebut menunjukkan komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dan akan menyebabkan resiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu masih cukup besar.

Tabel 2.80
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	20.062	18.104	17.794	18.284	19.177	21.860
b.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	38.330	36.061	36.285	34.760	33.447	33.634
c.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	52,34	50,27	49,04	52,60	57,73	64,99

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 80,03 persen pada tahun 2008 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 145.796 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2012, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 94,00 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 149.572 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Sulawesi Selatan sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2.81
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	145.796	144.185	149.353	151.614	149.572	148.822
b.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	182.180	180.081	173.744	164.488	159.665	160.467
c.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	80,03	83,88	85,96	92,17	94,00	92,74

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

h. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Data menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2012. Pada tahun 2008, jumlah desa/kelurahan dari

2.898 desa/kelurahan dan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 81,78 persen. Sementara pada tahun 2012, jumlah desa/kelurahan UCI yaitu 2598 desa/kelurahan dari 2.984 desa/kelurahan dengan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 87,10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih cukup besarnya desa/kelurahan yang belum mencapai UCI.

Tabel 2.82
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang Urusan	Tahun						
		Satuan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah desa/kelurahan UCI	jml	2.370	2.459	2.841	2.507	2.598	2.720
b.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	jml	2.898	2.941	2.947	2.960	2.984	3.107
c.	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	%	81,78	83,60	84,20	84,70	87,10	90,16

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.83
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	jml	89	52	144	791	498	299
b.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	jml	95	52	144	791	498	299
c.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	93,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

j. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 17.138, sementara jumlah yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan sebanyak 6.170 penderita. Kemudian pada tahun 2012 jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) berjumlah 16.921 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan berjumlah 9.439 penderita.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) meningkat dari 36 persen pada tahun 2008 menjadi 55,78 persen di tahun 2012. Peningkatan tersebut masih jauh dari target angka keberhasilan penyembuhan TBC (Success Rate/SR).

Tabel 2.84
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Jml	6.170	6.428	7.783	9.162	9.439	8.929
b.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jml	17.138	16.070	16.214	16.620	16.921	12.208
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	36,00	40,00	48,00	55,13	55,78	73,14%

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

k. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2008 yaitu 3.546 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 1.920 kasus. Pada tahun 2012, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 2.333 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai 100 persen, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100 persen.

Tabel 2.85
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	jml	1.920	1.289	868	1.133	2.333	3.894
b.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilyayah dalam kurun waktu yang sama	jml	3.546	3.411	4.083	1.876	2.333	4.261
c.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	54,37	37,80	21,26	60,39	100,00	91,39%

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan dari 96,41 persen pada tahun 2008 menjadi 44,80 persen di tahun 2012. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I berkurang dari 2.361.838 pada tahun 2008 menjadi 1.097.539 pada tahun 2012.

Tabel 2.86
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata I	Jml	2.361.838	1.283.672	2.368.881	1.565.506	1.097.539	3.252.066
b.	Jumlah seluruh miskin di Kabupaten/Kota	Jml	2.449.737	2.449.737	2.449.737	2.449.737	2.449.737	2.944.969
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	96,41	52,40	96,69	63,91	44,80	110,43%

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

m. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2008-2012 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2008 jumlah kunjungan sebanyak 87,971 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 135.418 kunjungan. Cakupan kunjungan bagi pada tahun 2008 adalah 69,75 persen dan pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 99,46 persen

Tabel 2.87
Cakupan Kunjungan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	jml	87.971	92.653	128.003	145.381	135.418	145.633
b.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	jml	126.130	142.573	128.222	147.059	164.013	159.135
	Cakupan kunjungan bayi	%	69,75	64,99	99,83	98,86	99,46	91,52

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu dengan meningkatnya kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 24.307 Km pada tahun 2008 menjadi 32.486 Km pada Tahun 2012 dengan kondisi mantap mencapai 66,24% (17.332 Km), rusak ringan 4.236 Km (12,58%) dan rusak berat 6.167 Km (21,17%).

Tabel 2.88
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun									
			2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
1.	Kondisi Baik	Km	10.087,05	41,50	10.617,90	43,68	17.421	53,42	17.241	53,16	17.332	53,16
2.	Kondisi Sedang	Km	7.528,12	30,97	6.253,72	25,73	4.243	13,01	4.243	13,08	4.749	13,91
3.	Kondisi Rusak	Km	4.231,42	17,41	4.701,58	19,34	4.081	12,51	4.081	12,58	4.236	12,59
4.	Kondisi Rusak Berat	Km	2.460,54	10,12	2.733,93	11,25	6.867	21,06	6.867	21,17	6.167	21,17
5.	Jalan secara keseluruhan (Nasional, Provinsi dan Kab/Kota)	Km	24.307,13		24.307,13		32.612		32.432		32.486	

Sumber : Dinas Bina MargaProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.89
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

NO	Kabupaten/kota	Kondisi Baik			Kondisi Sedang			Kondisi Rusak Ringan			Kondisi Rusak Berat			Jalan secara keseluruhan		
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
1	Kepulauan Selayar	63,670	-	409,61	7,122	-	76,55	0,400	-	104,25	35,508	-	98,60	106,700	-	689,00
2	Bulukumba	93,029	31,35	498,67	7,117	28,99	273,02	0,785	6,24	294,65	0,796	1,30	276,66	101,727	67,88	1.343,00
3	Bantaeng	34,610	5,18	201,58	-	10,03	189,13	-	3,55	61,15	-	-	104,15	34,610	18,76	556,00
4	Jeneponto	32,140	11,10	628,08	0,404	27,45	392,95	-	2,27	235,50	-	0,03	190,47	32,544	40,85	1.468,00
5	Takalar	45,762	9,65	382,50	5,900	17,05	326,50	0,400	3,11	114,50	5,221	0,78	32,50	57,283	30,60	789,5
6	Gowa	21,806	87,69	902,81	0,700	103,86	82,00	0,100	13,48	280,39	0,300	3,15	1.203,79	22,906	208,18	2.469,00
7	Sinjai	41,049	37,75	310,48	3,581	26,57	221,98	-	4,58	337,36	2,445	2,70	448,18	47,075	71,60	1.318,00
8	Maros	85,279	-	536,50	1,900	-	104,50	0,400	-	268,50	0,300	-	482,50	87,879	-	1.392,00
9	Pangkep	40,818	-	571,73	0,213	-	125,08	0,100	-	55,09	-	-	38,11	41,131	-	790,00
10	Barru	21,102	14,64	493,50	-	14,05	97,50	-	4,69	64,50	-	-	195,50	21,102	33,38	851,00
11	Bone	160,384	52,31	871,32	22,600	78,04	263,70	5,400	15,19	524,38	7,703	22,23	844,58	196,087	167,76	2.504,00
12	Soppeng		61,91	444,06		38,89	68,95		12,22	139,22		7,77	166,79	-	120,79	819,00
13	Wajo	89,529	31,10	773,75	13,391	37,10	136,75	2,300	6,69	282,75	5,300	-	186,75	110,520	74,90	1.380,01
14	Sidrap	70,125	28,90	1.688,25	3,100	8,92	81,25	0,600	2,52	(347,75)	-	-	(26,75)	73,825	40,34	1.395,00
15	Pinrang	70,315	22,29	135,38		25,96	243,06		5,43	304,54		-	57,02	70,315	53,67	740,00
16	Enrekang	90,424	14,80	454,33	2,600	11,83	287,92	0,300	2,55	190,53	-	3,36	100,23	93,324	32,55	1.033,00
17	Luwu		-	500,08		-	387,54		-	453,52		-	112,86	-	-	1.454,00
18	Tana Toraja	107,698	15,50	(29,25)	10,844	8,50	150,05	1,100	-	387,35	-	2,98	915,85	119,642	26,98	1.424,00
19	Luwu Utara	69,978	27,20	2.045,75	0,700	70,30	378,75	-	8,00	127,75	-	41,00	7,75	70,678	146,50	2.560,01
20	Luwu Timur	171,546	-	2.366,00	1,447	-	-	-	-	-	-	-	-	172,993	-	2.366,00
21	Toraja Utara		-			-			-			-		-	-	-
22	Makassar	35,128	9,68	713,75	0,600	1,86	135,75	-	0,68	158,75	0,100	0,55	584,75	35,828	12,77	1.693,00
23	Pare Pare	80,321	-	191,00	0,589	-	33,00	-	-	87,00	-	-	-	80,910	-	311,00
24	Palopo	133,350		223,25	11,127		90,25	0,700		9,25	0,600		3,25	145,777	-	325,00
	Jumlah	1.558,063	461,06	15.313,13	93,935	509,40	4.146,18	12,585	91,21	4.133,17	58,273	85,84	6.023,54	1.722,856	1.147,51	29.616,02

Sumber Data : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel Tahun 2013

*SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.55 Tahun 2000

**SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 4650/XII/2008

***SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 4261/XII/2010

Sementara kondisi jalan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2011, masih banyak dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang/ringan. Jaringan jalan terbanyak yang kondisinya rusak berat terdapat di Kabupaten Bulukumba sepanjang 471 km, Kabupaten Maros sepanjang 504 km, Kabupaten Sidrap sepanjang 513 km, Kota Makassar sepanjang 597 km, Kabupaten Tana Toraja sepanjang 940 km, Kabupaten Bone sepanjang 978 km, dan Kabupaten Gowa sepanjang 1.313 km. Kemudian Jaringan jalan yang kondisinya lebih banyak yang rusak sedang dan ringan terdapat di Kabupaten Luwu sepanjang 843 km, Kabupaten Bone sepanjang 699 km, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 635 km, Kabupaten Sinjai sepanjang 596 km, kabupaten Pinrang sepanjang 561 km, Kabupaten Wajo sepanjang 526 km, Kabupaten Sidrap sepanjang 490 km, Kabupaten Enrekang sepanjang 465 km, Kabupaten Takalar sepanjang 456 km, Kabupaten Maros sepanjang 416 km, dan Kabupaten Tana Toraja sepanjang 414 km.

Tabel 2.90

**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				Jumlah Total
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kep. Selayar	506	80	107	101	794
2	Bulukumba	756	216	46	471	1.489
3	Bantaeng	376	65	63	107	611
4	Jeneponto	1.495	28	18	-	1.541
5	Takalar	390	334	122	40	886
6	Gowa	1.010	97	260	1.313	2.680
7	Sinjai	701	399	197	138	1.435
8	Maros	558	126	290	504	1.478
9	Pangkep	660	104	58	52	874
10	Barru	518	122	89	220	949
11	Bone	1.201	219	480	978	2.878
12	Soppeng	382	142	174	242	940
13	Wajo	827	190	336	240	1.593
14	Sidrap	497	294	196	513	1.500
15	Pinrang	239	256	305	61	861
16	Enrekang	593	325	140	91	1.149
17	Luwu	547	373	470	182	1.572
18	Tana Toraja	215	151	263	940	1.569
19	Luwu Utara	2.110	443	192	72	2.817
20	Luwu Timur	2.512	-	-	-	2.512
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	726	148	171	597	1.642
23	Pare-Pare	197	39	93	-	329
24	Palopo	225	92	11	5	333
	Sulawesi Selatan	17.241	4.243	4.081	6.867	32.432

Sumber : Dinas Bina MargaProv. Sul-Sel Tahun 2012

b. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau ber HPL/HGB dari tahu ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 1,73 dan pada tahun 2012 menjadi 17,73. Peningkatan rasio ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah yang meningkatkan status ruang terbuka hijau.

Tabel 2.91

**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	3,627	3,990	8,690	8,690	14,944.57
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	2,092	1,294	1,483	593	843.00
3	Luas Wilayah	45,707	45,707	45,707	45,707	45,707.44
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1/2)	1.73	3.08	5.86	14.65	17.73

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.92

**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Wilayah ber HPL/HGB (Km ²)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km ²)	Rasio RTH
1	Kepulauan Selayar	903.50		100.94	100.94
2	Bulukumba	1,154.67	116.00	113.35	0.98
3	Bantaeng	395.83		27.21	27.21
4	Jeneponto	903.40		90.98	90.98
5	Takalar	566.51	32.00	35.75	1.12
6	Gowa	1,883.33	176.00	266.35	1.51
7	Sinjai	819.96		117.20	117.20
8	Maros	1,619.12		564.50	564.50
9	Pangkep	1,112.30		511.16	511.16
10	Barru	1,174.72		512.26	512.26
11	Bone	4,559.00		438.47	438.47
12	Soppeng	1,359.50		358.59	358.59
13	Wajo	2,506.12		76.80	76.80
14	Sidrap	1,883.25		453.22	453.22
15	Pinrang	1,961.77	9.00	451.69	50.19
16	Enrekang	1,786.01		722.25	722.25
17	Luwu	3,000.25		853.72	853.72
18	Tana Toraja	2,054.30	124.00	928.26	7.49
19	Luwu Utara	7,502.58		3,622.15	3,622.15
20	Luwu Timur	6,944.90		4,073.70	4,073.70
21	Toraja Utara	1,151.47		502.77	502.77
22	Makassar	175.77	385.00	10.55	0.03
23	Pare Pare	99.33		20.04	20.04
24	Palopo	247.50		92.66	92.66

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

c. Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “overstock pangan” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi pada lahan seluas 476.141 hektar. Kinerja jaringan irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan rasio jaringan irigasi pada tahun 2008 sebesar 9,5 meningkat menjadi 13,23 pada akhir tahun 2014 dengan indeks efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi sebesar 0,75. Sehingga dengan adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas peningkatan pengelolaan jaringan irigasi melalui penambahan luasan lahan budidaya yang terairi, maka pencapaian target Sulawesi Selatan sebagai pendukung ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

Tabel 2.93

**Rasio Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jaringan Irigasi	329.291	329.291	329.291	1.164.918	1.164.918
2.	Jaringan Sekunder	1.194.074	1.194.074	1.194.074	2.257.440	2.257.440
3.	Jaringan Tersier	2.073.309	2.073.309	2.073.309	2.695.253	2.695.253
4.	Luas Lahan Budidaya	423.173	423.173	423.173	474.938	474.938
5.	Rasio	9,50	9,50	8,50	13,88	13,88

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.94

**Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi (M)			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Terairi /Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	2	3	4	5	(6 = 3 + 4 + 5)	7	(8 = 6 / 7)
1.	Kepulauan Selayar	-	-	-	0	3,880	0
2.	Bulukumba	19,185	80,297	1,754	101,236	28,252	3,58
3.	Bantaeng	54,678	4,233	84,393	143,304	13,672	10,48
4.	Jenepono	10,800	70,590	133,358	214,748	28,537	7,53
5.	Takalar	20,479	34,784	48,249	103,512	18,243	5,67
6.	Gowa	59,157	242,341	201,351	502,849	30,462	16,51
7.	Sinjai	19,460	22,403	16,950	58,813	15,369	3,83
8.	Maros	28,480	69,145	205,538	303,163	21,494	14,10
9.	Pangkep	15,518	120,418	276,290	412,226	16,186	25,47
10.	Barru	8,262	25,700	29,474	63,436	6,638	9,56
11.	Bone	91,322	186,163	314,548	592,033	50,970	11,62
12.	Soppeng	40,705	91,087	211,230	343,022	24,726	13,87
13.	Wajo	28,173	115,919	105,450	249,542	26,915	9,27
14.	Sidrap	153,958	527,243	219,357	900,558	40,206	22,40
15.	Pinrang	45,826	402,332	386,210	834,368	47,108	17,71
16.	Enrekang	24,035	5,858	-	29,893	13,914	2,15
17.	Luwu	443,520	132,774	148,050	724,344	33,468	21,64
18.	Tana Toraja	21,997	5,761	7,550	35,308	19,030	1,86
19.	Luwu Utara	27,160	16,451	102,230	145,841	14,531	10,04
20.	Luwu Timur	49,302	95,391	203,271	347,964	19,167	18,15
21.	Toraja Utara	-	-	-	0	-	-
22.	Makassar	-	-	-	0	-	-
23.	Pare - Pare	-	3,200	-	3,200	565	5,66

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi (M)			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Terairi /Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
24.	Palopo	2,901	5,350	-	8,251	1,605	5,14
*	Jumlah	1,164,918	2,257,440	2,695,253	6,117,611	474.938	12,88

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.95

**Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	PASOKAN IRIGASI	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasok Irigasi Per Area	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.	Pasok Irigasi Relatif	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
3.	Pasok Air Relatif	4	4	4	4	4
4.	Indek Luas Areal	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
5.	Rancangan Luas Areal	635.555	635.555	635.555	635.555	635.555

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2012

Tabel 2.96

**Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (Lt/dtk)	Pasok Air Irigasi Total (Lt/dtk)	Total Pasok Air (Lt/dtk)	PIA (Lt/dtk /Ha)	PIR (Lt/dtk /Ha)	PAR (Lt/dtk /Ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9 = 6 / 4)	(10 = 7 / 5)	(11 = 8 / 5)	(12 = 4 / 3)
1.	Kepulauan Selayar	3,880	3,880	1.25	4	1.4	5	0,0010	1.12	4	1.00
2.	Bulukumba	34,817	26,456	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.8
3.	Bantaeng	16,386	13,672	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	0.83
4.	Jeneponto	29,039	28,537	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.98
5.	Takalar	19,866	18,243	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.92
6.	Gowa	31,657	30,462	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.96
7.	Sinjai	18,710	15,369	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	0.82
8.	Maros	24,447	21,494	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.88
9.	Pangkep	18,284	16,186	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.89
10.	Barru	11,348	6,638	1.25	4	1.4	5	0,0006	1.12	4	0.58
11.	Bone	63,782	50,970	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.78
12.	Soppeng	34,883	24,726	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.71
13.	Wajo	39,918	26,915	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.67
14.	Sidrap	45,115	40,206	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.89
15.	Pinrang	54,277	47,108	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.87
16.	Enrekang	13,645	13,914	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	1,02
17.	Luwu	47,527	33,468	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.70
18.	Tana Toraja	19,082	19,030	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	1.00
19.	Luwu Utara	80,465	14,531	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	0.18
20.	Luwu Timur	25,822	19,167	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.74
21.	Toraja Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Pare - Pare	600	565	1.25	4	1	5	0,0069	-	4	0.94
24.	Palopo	2,005	1,605	1.25	4	1.44	5	0,0024	1.12	4	0.80
	Jumlah	635,555	474.938	1,25	4	1,4	5	0,001	1,12	4	0,75

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (Tps) Per Satuan Penduduk

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan kinerja yang memadai yang dindikasikan dengan meningkatnya rasio daya tampung TPS dari 0,48 pada tahun 2008 menjadi 0,53 pada tahun 2012.

Tabel 2.97**Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah TPS	219	224	233	238	268
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	1,543.80	1,575.45	1,639.47	1,672.30	1,883.27
3.	Jumlah Penduduk	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0.48	0.45	0.46	0.47	0.53

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.98**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
1	Kepulauan Selayar	121.853	2	14,45	0,27
2	Bulukumba	389.772	6	39,05	0,23
3	Bantaeng	178.176	2	16,40	0,21
4	Jeneponto	346.204	1	5,84	0,04
5	Takalar	267.114	3	23,56	0,20
6	Gowa	653.726	18	124,79	0,43
7	Sinjai	230.262	3	22,36	0,22
8	Maros	315.092	4	27,08	0,20
9	Pangkep	316.972	2	13,12	0,09
10	Barru	165.906	3	22,94	0,31
11	Bone	712.023	12	82,88	0,26
12	Soppeng	223.826	4	27,18	0,28
13	Wajo	380.979	7	52,66	0,31
14	Sidrap	291.272	7	49,90	0,39
15	Pinrang	350.973	7	49,19	0,32
16	Enrekang	193.946	1	7,24	0,08
17	Luwu	331.932	1	9,56	0,07
18	Tana Toraja	222.872	4	28,96	28,96
19	Luwu Utara	315.688	1	10,03	10,03
20	Luwu Timur	246.592	1	7,96	7,96
21	Toraja Utara	306.328	2	16,24	16,24

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
22	Makassar	1.288.178	150	1.058,65	1,87
23	Pare Pare	111.014	13	92,32	1,89
24	Palopo	148.526	11	80,92	1,24

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

e. Rasio Rumah Layak Huni

Berdasarkan luasan lantai bangunan, pada tahun 2008 jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan luasan 20 – 150 M² sebanyak 1.753.185 RT, sisanya sebanyak 68.926 menempati rumah dengan luasan <20 M². Walaupun mendapat penanganan jumlah rumah yang luasannya < 20 M², semakin bertambah yang ditunjukkan dengan rasio rumah layak huni yang mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2009 dengan rasio 0,17 dan pada tahun 2013 hanya meningkat menjadi 0,19.

Tabel 2.99

Rasio Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah rumah layak huni	1.391.124	1.375.838	1.409.557	1.522.034	1.586.023
b.	Jumlah penduduk	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.222.631	8.342.049
c.	Rasio Rumah Layak Huni	0,176	0,171	0,173	0,185	0,190

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

f. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2009 sebesar 0,61 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,86 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas area permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Tabel 2.100

Rasio Permukiman Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
a.	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	43.190	97.776	104.744	114.346
b.	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	70.246	122.579	125.368	132.790
c.	Rasio Permukiman Layak Huni (Ha)	0,61	0,80	0,84	0,86

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Tahun 2013

g. Tabel Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah bawah. Sebagaimana juga di kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,040 point.

Tabel 2.101
Lingkungan Permukiman Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
a.	Luas kawasan kumuh (Ha)	2.888,59	2.788	2.543	4.511	4.145
b.	Luas Wilayah Kota (Ha)	4.269.270	4.269.270	4.269.270	4.110.976	4.110.976
c.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,068	0,065	0,060	0,1097	0,101

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.102
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Km ²)
1	Kepulauan Selayar	903.50	182
2	Bulukumba	1,154.67	3.351
3	Bantaeng	395.83	6.997
4	Jeneponto	903.40	3.402
5	Takalar	566.51	4.205
6	Gowa	1,883.33	41.458
7	Sinjai	819.96	4.273
8	Maros	1,619.12	14.286
9	Pangkep	1,112.30	2.439
10	Barro	1,174.72	12.540
11	Bone	4,559.00	64.291
12	Soppeng	1,359.50	27.373
13	Wajo	2,506.12	11.961
14	Sidrap	1,883.25	2.651
15	Pinrang	1,961.77	3.465
16	Enrekang	1,786.01	8.873
17	Luwu	3,000.25	6.327
18	Tana Toraja	2,054.30	5.607
19	Luwu Utara	7,502.58	1.617
20	Luwu Timur	6,944.90	7.600
21	Toraja Utara	1,151.47	1.617
22	Makassar	175.77	8.985
23	Pare Pare	99.33	1.138
24	Palopo	247.50	93.585

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah didasarkan pada kriteria BPS yang menggolongkan Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan indikator kemiskinan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan perumahan antara lain; rumah dengan bahan lantai, dinding atau atap yang tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 20 m².

Tabel 2.103

**Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Kondisi Bahan
Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga MBR	Persentase
1	Kepulauan Selayar	30,849	365	1,18
2	Bulukumba	96,240	2.427	2,52
3	Bantaeng	44,103	2.405	5,45
4	Jeneponto	83,827	1.308	1,56
5	Takalar	63,599	14.887	23,41
6	Gowa	148,237	5.903	3,98
7	Sinjai	51,283	2.240	4,37
8	Maros	70,648	3.308	4,68
9	Pangkep	72,534	3.207	4,42
10	Barru	41,373	1.763	4,26
11	Bone	160,728	6.563	4,08
12	Soppeng	57,098	1.716	3,01
13	Wajo	95,007	10.530	11,08
14	Sidrap	70,356	2.240	3,18
15	Pinrang	81,432	2.900	3,56
16	Enrekang	44,999	1.252	2,78
17	Luwu	72,952	1.111	1,52
18	Tana Toraja	53,319	2.613	4,90
19	Luwu Utara	74,985	929	1,24
20	Luwu Timur	56,428	16.290	28,87
21	Toraja Utara	67,772	2.942	4,34
22	Makassar	293,435	12.295	4,19
23	Pare Pare	25,462	6.200	24,35
24	Palopo	33,988	10.201	30,01

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

b. Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. persentase rumah tangga yang bersanitasi dilihat dari data pada tahun 2009 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 62,37 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 81,08 persen dengan persentase terendah di Kabupaten Jeneponto, Maros, Barru, Bone, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Kabupaten Pangkep. Hal ini tentunya masih membutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai angka di atas 90 persen.

Tabel 2. 104
persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi	1,163,559	1,275,557	1,283,307	1,423,241	1,579,900
2	Jumlah Rumah Tangga	1,865,662	1,848,068	1,892,944	1,890,654	1,948,608
3	Persentase	62.37	69.02	67.79	75.28	81,08

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.105
persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase
1	Kepulauan Selayar	31,720	19,390	61.13
2	Bulukumba	99,726	79,212	79.43
3	Bantaeng	43,933	29,479	67.10
4	Jeneponto	83,009	42,210	50.85
5	Takalar	67,778	51,789	76.41
6	Gowa	161,514	139,112	86.13
7	Sinjai	51,282	39,846	77.70
8	Maros	73,732	57,076	77.41
9	Pangkep	74,794	52,244	69.85
10	Barru	40,997	33,675	82.14
11	Bone	167,989	112,699	67.09
12	Soppeng	57,969	54,439	93.91
13	Wajo	95,264	76,897	80.72
14	Sidrap	68,102	60,543	88.90
15	Pinrang	84,818	72,273	85.21
16	Enrekang	43,741	35,531	81.23
17	Luwu	74,412	43,159	58.00
18	Tana Toraja	54,508	50,463	92.58
19	Luwu Utara	70,113	51,869	73.98
20	Luwu Timur	62,919	52,166	82.91
21	Toraja Utara	48,769	44,511	91.27
22	Makassar	326,711	322,365	98.67
23	Pare Pare	30,452	28,942	95.04
24	Palopo	34,356	30,010	87.35

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

c. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 38,52 persen dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga

mencapai 13,98 persen. Penurunan persentase luas permukiman kumuh ini dibarengi dengan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 2.106

**Lingkungan Pemukiman Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012**

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
a.	Luas area permukiman Kumuh (Ha)	27.056	24.803	20.624	18.444
b.	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	70.246	122.579	125.368	132.790
	persentase luas permukiman kumuh	38.52	20.23	16.45	13.98

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Tahun 2013

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2008 sebesar 1,70 sampai tahun 2012 sebesar 2,09 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 1,99.

Tabel 2.107

**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah polisi pamong praja	orang	1.767	1.580	1.744	1.679	1.654
b.	Jumlah penduduk	orang	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.306.848	8.305.154
	Rasio jumlah polisi pamong Praja per 10.000 penduduk		2,23	1,97	2,17	2,09	1,99

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

Tabel 2.108
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio
I	Provinsi	111			111			116			112			107		
II	Kota															
1	Kota Makassar	113	1.271.870	0,89	113	1.338.663	0,84	107	1.352.136	0,79	97	1.368.902	0,71	93	1,383,711	0.67
2	Kota Pare-Pare	48	118.842	4,04	48	129.262	3,71	45	130.563	3,45	43	132.181	3,25	43	133,612	3.22
3	Kota Palopo	52	146.482	3,55	52	147.932	3,52	48	149.421	3,21	48	151.273	3,17	52	152,911	3.40
III	Kabupaten															
1	Maros	95	306.687	3,10	95	319.002	2,98	93	322.212	2,89	80	326.207	2,45	84	329,737	2.55
2	Pangkep	45	298.701	1,51	45	305.737	1,47	45	308.814	1,46	43	312.643	1,38	40	316,025	1.27
3	Barru	62	162.985	3,80	62	165.983	3,74	59	167.653	3,52	59	169.731	3,48	55	171,568	3.21
4	Pinrang	15	351.042	0,43	15	351.118	0,43	38	354.652	1,07	157	359.049	4,37	157	362,933	4.33
5	Sidrap	44	252.483	1,74	40	271.911	1,47	39	274.648	1,42	38	278.053	1,37	40	281,061	1.42
6	Wajo	68	381.066	1,78	43	385.109	1,12	54	388.985	1,39	54	393.808	1,37	51	398,068	1.28
7	Soppeng	69	230.744	2,99	81	223.826	3,62	81	226.079	3,58	75	231.919	3,23	71	231,358	3.07
8	Enrekang	49	190.576	2,57	49	190.248	2,58	30	192.163	1,56	30	194.545	1,54	30	196,650	1.53
9	Tana Toraja	40	240.249	1,66	55	221.081	2,49	52	223.306	2,33	52	226.074	2,30	53	228,521	2.32
10	Toraja utara	5	229.090	0,22	5	216.762	0,23	40	218.943	1,83	40	221.657	1,80	40	224,056	1.79
11	Luwu	40	328.180	1,22	38	332.482	1,14	36	335.828	1,07	33	339.992	0,97	32	343,670	0.93
12	Luwu Utara	65	321.979	2,02	69	287.472	2,40	77	290.365	2,65	78	293.965	2,65	74	297,146	2.49
13	Lumu timur	42	237.354	1,77	40	243.069	1,65	38	245.515	1,55	38	248.559	1,53	38	251,249	1.51
14	Bone	138	711.748	1,94	140	717.682	1,95	142	724.905	1,96	140	733.893	1,91	144	741,833	1.94

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio
15	Sinjai	68	228.304	2,98	68	228.879	2,97	71	231.182	3,07	69	231.182	2,98	58	236,581	2.45
16	Kep.Selayar	52	121.749	4,27	55	122.055	4,51	60	123.283	4,87	52	123.283	4,22	52	126,162	4.12
17	Bulukumba	89	394.746	2,25	84	394.560	2,13	82	398.531	2,06	71	398.531	1,78	65	407,837	1.59
18	Bantaeng	47	174.176	2,70	51	176.699	2,89	49	178.477	2,75	46	178.477	2,58	39	182,645	2.14
19	Jeneponto	66	334.175	1,98	89	342.700	2,60	84	346.149	2,43	84	346.149	2,43	84	354,232	2.37
20	Takalar	96	257.974	3,72	83	269.603	3,08	78	272.316	2,86	78	272.316	2,86	86	278,675	3.09
21	Gowa	63	617.317	1,02	60	652.941	0,92	63	659.512	0,96	66	659.512	1,00	66	674,913	0.98
	Sul-Sel	1.582	7.908.519	2,00	1.591	8.034.76	1,98	1.627	8.115.638	2,00	1.683	8.191.901	2,05	1,654	8,305,154	1.99

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

b. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Tabel 2.109
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio
II	Kota															
1	Kota Makassar	1430	1.271.870	11,24	1430	1.338.663	10,68	2145	1.352.136	15,86	2.145	1.368.902	15,67	2145	1,383,711	15.50
2	Kota Pare-Pare	220	118.842	18,51	220	129.262	17,02	308	130.563	23,59	286	132.181	21,64	584	133,612	43.71
3	Kota Palopo	480	146.482	32,77	480	147.932	32,45	672	149.421	44,97	672	151.273	44,42	586	152,911	38.32
III	Kabupaten															
1	Maros	1030	306.687	33,58	1030	319.002	32,29	1296	322.212	40,22	1404	326.207	43,04	1212	329,737	36.76

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio
2	Pangkep	1020	298.701	34,15	1020	305.737	33,36	1020	308.814	33,03	1122	312.643	35,89	1122	316,025	35.50
3	Barru	540	162.985	33,13	540	165.983	32,53	540	167.653	32,21	540	169.731	31,82	540	171,568	31.47
4	Pinrang	1040	351.042	29,63	1040	351.118	29,62	1040	354.652	29,32	1040	359.049	28,97	1040	362,933	28.66
5	Sidrap	1060	252.483	41,98	1060	271.911	38,98	1060	274.648	38,59	1060	278.053	38,12	1060	281,061	37.71
6	Wajo	1760	381.066	46,19	1760	385.109	45,70	1760	388.985	45,25	1760	393.808	44,69	1760	398,068	44.21
7	Soppeng	700	230.744	30,34	700	223.826	31,27	700	226.079	30,96	700	231.919	30,18	700	231,358	30.26
8	Enrekang	1290	190.576	67,69	1290	190.248	67,81	1290	192.163	67,13	1290	194.545	66,31	936	196,650	47.60
9	Tana Toraja	800	240.249	33,30	800	221.081	36,19	800	223.306	35,83	800	226.074	35,39	800	228,521	35.01
10	Toraja utara	800	229.090	34,92	800	216.762	36,91	800	218.943	36,54	800	221.657	36,09	800	224,056	35.71
11	Luwu	2270	328.180	69,17	2270	332.482	68,27	2270	335.828	67,59	2270	339.992	66,77	1850	343,670	53.83
12	Luwu Utara	1710	321.979	53,11	1710	287.472	59,48	1780	290.365	61,30	1780	293.965	60,55	1248	297,146	42.00
13	Lumu Timur	1070	237.354	45,08	1070	243.069	44,02	1070	245.515	43,58	1070	248.559	43,05	1070	251,249	42.59
14	Bone	3710	711.748	52,13	3710	717.682	51,69	4901	724.905	67,61	5278	733.893	71,92	2724	741,833	36.72
15	Sinjai	790	228.304	34,60	790	228.879	34,52	1106	231.182	47,84	1106	231.182	47,84	950	236,581	40.16
16	Kep.Selayar	740	121.749	60,78	740	122.055	60,63	740	123.283	60,02	740	123.283	60,02	592	126,162	46.92
17	Bulukumba	1260	394.746	31,92	1260	394.560	31,93	1260	398.531	31,62	1260	398.531	31,62	1000	407,837	24.52
18	Bantaeng	670	174.176	38,47	670	176.699	37,92	670	178.477	37,54	670	178.477	37,54	670	182,645	36.68
19	Peneponto	1130	334.175	33,81	1130	342.700	32,97	1130	346.149	32,64	1130	346.149	32,64	1130	354,232	31.90
20	Takalar	830	257.974	32,17	830	269.603	30,79	830	272.316	30,48	830	272.316	30,48	830	278,675	29.78
21	Gowa	1670	617.317	27,05	1670	652.941	25,58	2004	659.512	30,39	2004	659.512	30,39	2004	674,913	29.69
	Sul-Sel	28.020	7.908.519	35,43	28.020	8.034.776	34,87	31.192	8.115.638	38,43	31.757	8.191.901	38,77	27,353	8,305,154	32.93

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Tabel 2.110
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio
II	Kota															
1	Kota Makassar	1.001	143	7,00	1.001	143	7,00	1.001	143	7,00	1.001	143	7,00	572	143	4.00
2	Kota Pare-Pare	176	22	8,00	176	22	8,00	176	22	8,00	176	22	8,00	88	22	4.00
3	Kota Palopo	336	48	7,00	336	48	7,00	336	48	7,00	336	48	7,00	144	48	3.00
III	Kabupaten															
1	Maros	309	103	3,00	309	103	3,00	309	103	3,00	309	103	3,00	309	103	3.00
2	Pangkep	306	102	3,00	306	102	3,00	306	102	3,00	306	102	3,00	204	102	2.00
3	Barru	162	54	3,00	162	54	3,00	162	54	3,00	162	54	3,00	216	54	4.00
4	Pinrang	312	104	3,00	312	104	3,00	312	104	3,00	312	104	3,00	312	104	3.00
5	Sidrap	318	106	3,00	318	106	3,00	318	106	3,00	318	106	3,00	315	105	3.00
6	Wajo	528	176	3,00	528	176	3,00	528	176	3,00	528	176	3,00	528	176	3.00
7	Soppeng	210	70	3,00	210	70	3,00	210	70	3,00	210	70	3,00	210	70	3.00
8	Enrekang	387	129	3,00	387	129	3,00	387	129	3,00	387	129	3,00	387	129	3.00
9	Tana Toraja	480	160	3,00	480	160	3,00	480	160	3,00	489	163	3,00	477	159	3.00
10	Toraja utara	453	151	3,00	453	151	3,00	453	151	3,00	456	152	3,00	453	151	3.00
11	Luwu	681	227	3,00	681	227	3,00	681	227	3,00	681	227	3,00	681	227	3.00
12	Luwu Utara	531	177	3,00	531	177	3,00	531	177	3,00	531	177	3,00	528	176	3.00
13	Lumu Timur	321	107	3,00	321	107	3,00	321	107	3,00	321	107	3,00	306	102	3.00

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahn	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahn	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/Kelurahn	Rasio
14	Bone	1.113	371	3,00	1.113	371	3,00	1.116	372	3,00	1.116	372	3,00	1116	372	3.00
15	Sinjai	237	79	3,00	237	79	3,00	237	79	3,00	237	79	3,00	240	80	3.00
16	Kep.Selayar	222	74	3,00	222	74	3,00	222	74	3,00	222	74	3,00	222	74	3.00
17	Bulukumba	393	131	3,00	393	131	3,00	393	131	3,00	393	131	3,00	378	126	3.00
18	Bantaeng	201	67	3,00	201	67	3,00	201	67	3,00	201	67	3,00	201	67	3.00
19	Jeneponto	339	113	3,00	339	113	3,00	339	113	3,00	339	113	3,00	339	113	3.00
20	Takalar	249	83	3,00	249	83	3,00	249	83	3,00	249	83	3,00	249	83	3.00
21	Gowa	501	167	3,00	501	167	3,00	501	167	3,00	501	167	3,00	501	167	3.00
	Se Sul-Sel	9.766	2.964	3,2	9.766	2.964	3,2	9.769	2.965	3,2	9.781	2.969	3,2	8,986	2,953	3.04

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

d. Penegakan PERDA

Rasio penegakan PERDA mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2009 sebesar 100 persen namun pada tahun 2013 terjadi penurunan, dimana hanya sebesar 91 persen.

Tabel 2.111
Penegakan PERDA Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/ Kota	TARGET KINERJA TAHUN														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlang garan Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio
I	Provinsi	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	12	12	100%	5	25	20%
II	Kota															
1	Kota Makassar	152	152	100%	793	793	100%	48	48	100%	87	87	100%	83	85	98%
2	Kota Pare-Pare	0	0		321	427	75%	332	332	100%	332	332	100%	130	132	98%
3	Kota Palopo	6	6	100%	5	5	100%	97	97	100%	97	97	100%	85	87	98%
III	Kabupaten															
1	Maros	0	0		51	51	100%	51	51	100%	51	51	100%	51	52	98%
2	Pangkep				25	25	100%	26	26	100%	26	26	100%	28	31	90%
3	Barru	14	14	100%	14	14	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%
4	Pinrang	4	4	100%	14	14								29	29	100%
5	Sidrap	19	19	100%	24	61	39%	56	100	56%	56	100	56%	87	100	87%
6	Wajo				6	6	100%	17	17	100%	17	17	100%	17	17	100%
7	Soppeng	14	14	100%	1	2	50%	2	6	33%	2	6	33%	2	8	25%
8	Enrekang				3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	2	22	9%
9	Tana Toraja				5	5	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%

No	Kabupaten/ Kota	TARGET KINERJA TAHUN														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlangg aran Perda	Rasio
10	Toraja Utara					0		5	5	100%	5	5	100%	2	2	100%
11	Luwu				47	47	100%	2	18	11%	2	18	11%	4	8	50%
12	Luwu Utara	6	6	100%		0		51	63	81%	51	63	81%	60	63	95%
13	Luwu Timur				4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	8	50%
14	Bone				2	2	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
15	Sinjai	33	33	100%	8	8	100%	44	44	100%	100	124	81%	111	124	90%
16	Kep. Selayar				69	69	100%	209	209	100%	207	207	100%	200	207	97%
17	Bulukumba	18	18	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	34	88%
18	Bantaeng	3	3	100%	22	22	100%	47	74	64%	57	74	77%	47	47	100%
19	Jeneponto				22	22	100%									
20	Takalar				21	21	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
21	Gowa	14	14	100%	3	7	43%	327	327	100%	307	327	94%	27	27	100%
	Se Sul Sel	292	292	100%	1,499	1647	91%	1,385	1,479	94%	1,471	1,608	91%	1,029	1,133	91%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

e. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas satpol PP mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2009 jumlah patroli petugas satpol PP sebesar 385 petugas satpol PP, dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 2072 petugas patroli satpol PP, atau mengalami peningkatan sebesar 100 persen lebih dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.112
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 s.d 2013

No	Kabupaten / Kota	2009	2010	2011	2012	2013
		Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam
I	Provinsi	120	100	12	50	40
II	Kota					
1	Kota Makassar	152	793	580	931	950
2	Kota Pare-Pare	0	557	243	183	187
3	Kota Palopo	6	5	117	196	200
III	Kabupaten					
1	Maros	0	51	51	51	68
2	Pangkep		26	30	30	30
3	Barru	14	4	31	3	3
4	Pinrang	4	6	14	3	3
5	Sindrap	19	28	46	85	85
6	Wajo		2	19	12	12
7	Soppeng	14	12	17	7	7
8	Enrekang		20	65	66	66
9	Tana Toraja		4	35	10	10
10	Toraja Utara		12	97	65	65
11	Luwu		47	36	16	16
12	Luwu Utara	6	18	213	65	65
13	Luwu Timur		43	46	43	43
14	Bone		42	12	3	3
15	Sinjai	33	8	133	133	133
16	Kep.Selayar		27	21	12	12
17	Bulukumba		31	35		
18	Banteang	3	22	49	49	49
19	Jeneponto		43	35	22	22
20	Takalar		20	29	20	20
21	Gowa	14	506	17	17	17
	Se Sul-Sel	385	2427	1983	2072	2,106

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

f. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2008, persentase penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 52 persen dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 91 persen.

Tabel 2.113

**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten/kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio
I	Provinsi															
II	Kota															
1	Kota Makassar	97	97	100%	152	152	100%	163	217	75%	545	580	94%	931	931	100%
2	Kota Pare-Pare	-	-		0	0		418	557	75%	35	35	100%	169	183	92%
3	Kota Palopo	4	4	100%	6	6	100%	50	66	76%	98	117	84%	98	196	50%
III	Kabupaten															
1	Maros	6	6	100%	0	0		51	51	100%	51	51	100%	51	51	100%
2	Pangkep	13	13	100%				15	35	43%	13	30	43%	30	30	100%
3	Barru	16	16	100%	14	14	100%	7	7	100%	22	31	71%	3	3	100%
4	Pinrang	1	1	100%	4	4	100%	14	14	100%	14	14	100%	3	3	100%
5	Sidrap	-	-		19	19	100%	34	49	69%	46	46	100%	61	85	72%
6	Wajo	7	7	100%				8	8	100%	19	19	100%	12	12	100%
7	Soppeng	-	-		14	14	100%	6	6	100%	17	17	100%	7	7	100%
8	Enrekang	6	6	100%				26	52	50%	65	65	100%	64	66	97%
9	Tana Toraja	-	-					30	30	100%	35	35	100%	10	10	100%
10	Toraja utara	-	-					64	85	75%	97	97	100%	65	65	100%

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

No	Kabupaten/kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio
11	Luwu	-	-					30	40	75%	36	36	100%	16	16	100%
12	Luwu Utara	3	3	100%	6	6	100%	80	106	75%	23	213	11%	50	65	77%
13	Lumu Timur	-	-					10	46	22%	46	46	100%	43	43	100%
14	Bone	-	-					3	3	100%	12	12	100%	3	3	100%
15	Sinjai	178	178	100%	33	33	100%	8	8	100%	103	133	77%	133	133	100%
16	Kep.Selayar	4	4	100%				76	101	75%	21	21	100%	12	12	100%
17	Bulukumba	14	14	100%				25	25	100%	35	35	100%			
18	Bantaeng	4	4	100%	3	3	100%	23	23	100%	49	49	100%	39	49	80%
19	Jenepono	-	-					30	30	100%	35	35	100%	12	22	55%
20	Takalar	-	-					20	20	100%	29	29	100%	20	20	100%
21	Gowa	-	-		14	14	100%	7	7	100%	17	17	100%	12	17	71%
	Sul-Sel	353	353	52%	265	265	40%	1.198	1.586	76%	1.463	1.763	83%	1.844	2.022	91%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

g. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti terlihat pada table berikut.

Tabel 2.114

**Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten / Kota	2009	2010	2011	2012	2013
		Jumlah Linmas	Jumlah Linmas	Jumlah Linmas	Jumlah Linmas	Jumlah Linmas
II	Kota					
1	Kota Makassar	1430	1430	2145	2145	4599
2	Kota Pare-Pare	220	220	308	286	584
3	Kota Palopo	480	480	672	672	586
III	Kabupaten					
1	Maros	1030	1030	1296	1404	1212
2	Pangkep	1020	1020	1020	1122	1212
3	Barru	540	540	540	540	826
4	Pinrang	1040	1040	1040	1040	1446
5	Sindrap	1060	1060	1060	1060	1280
6	Wajo	1760	1760	1760	1760	1888
7	Soppeng	700	700	700	700	1004
8	Enrekang	1290	1290	1290	1290	936
9	Tana Toraja	800	800	800	800	1060
10	Toraja Utara	800	800	800	800	1042
11	Luwu	2270	2270	2270	2270	1850
12	Luwu Utara	1710	1710	1780	1780	1248
13	Luwu Timur	1070	1070	1070	1070	1030
14	Bone	3710	3710	4901	5278	2724
15	Sinjai	790	790	1106	1106	950
16	Kep.Selayar	740	740	740	740	592
17	Bulukumba	1260	1260	1260	1260	1000
18	Banteang	670	670	670	670	710
19	Jeneponto	1130	1130	1130	1130	1272
20	Takalar	830	830	830	830	856
21	Gowa	1670	1670	2004	2004	2388
	Se Sul-Sel	28.020	28.020	31.192	31.757	32,295

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

h. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 pembinaan dilakukan sebanyak 4 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 10.

Tabel 2.115

**Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Kegiatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pembinaan Terhadap LSM,	2	2	3	3	4

No.	Kegiatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Ormas Dan OKP					
2	Pembinaan Politik Daerah	2	5	5	3	5
3	Jumlah	4	7	8	6	9

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sul-Sel 2013

2.3.1.6. Sosial

a. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi

Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan.

Tabel 2.116

Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Jml	287	298	298	304	296

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.117

Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Makassar	84	83	83	87	90
2	Gowa	47	52	52	54	54
3	Takalar	4	3	3	4	4
4	Jeneponto	36	41	41	32	25
5	Bantaeng	9	10	10	9	9
6	Bulukumba	17	18	18	18	17
7	Sinjai	7	8	8	9	9
8	Pare-Pare	6	8	8	10	9
9	Sidrap	2	2	2	2	2
10	Soppeng	1	3	3	3	2
11	Enrekang	4	4	4	4	6
12	Tana Toraja	3	2	2	2	3
13	Palopo	6	6	6	6	7
14	Luwu	7	9	9	10	9
15	Luwu Timur	6	8	8	8	8
16	Luwu Utara	11	10	10	10	10
17	Barru	4	4	4	6	5
18	Pangkep	4	4	4	4	4
19	Maros	10	9	9	9	8
20	Bone	5	3	3	5	3
21	Selayar	1	1	1	2	2
22	Pinrang	11	6	6	6	6
23	Wajo	2	2	2	2	2
24	Toraja Utara	-	2	2	2	2
	Jumlah	287	298	298	304	296

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

b. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2009 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 27.388 jiwa atau 2,4 persen dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 2,16 persen.

Tabel 2.118

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	27.388	21.770	56.890	42.021	117.385
b.	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan	Jiwa	1.071.211	1.049.441	992.551	950.530	426.808
c.	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	1.098.599	1.071.211	1.049.441	992.551	544.193
	PMKS Memperoleh Bantuan Sosial	%	2,4	2,1	5,4	4,2	2,16

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

c. persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama lima tahun terakhir memperlihatkan rata-rata persentase yang cukup mengembirakan, yaitu sebesar 95 persen.

Tabel 2.119

Prsentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah PMKS yang tertangani	Jenis	24	18	18	18	18
b.	Jumlah PMKS yang ada	Jenis	24	24	18	18	18
	Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100	75	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius, dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Rata rata peningkatan jumlah penumpang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 1 juta penumpang.

Tabel 2.120
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penumpang Bis	-	-	-	-	99.648
2.	Jumlah penumpang Kereta api	-	-	-	-	-
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	632.783	688.830	512.469	823.177	823.177
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	4.700.000	5.400.000	6.500.000	7.300.000	8.400.000
5.	Total Jumlah Penumpang	5.323.783	6.088.830	7.012.469	8.123.177	9.322.825

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.121
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten/kota	Jumlah penumpang				Total Jumlah Penumpang (7=3+4+5+6)
		Bis	Kereta api	Kapal laut	Pesawat udara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	1662.755	-	-	-	1662.755
2	Bulukumba	5475.716	-	-	-	5475.716
3	Bantaeng	2435.937	-	-	-	2435.937
4	Jeneponto	4699.507	-	-	-	4699.507
5	Takalar	457.7606	-	-	-	457.7606
6	Gowa	8375.522	-	-	-	8375.522
7	Sinjai	3169.612	-	-	-	3169.612
8	Maros	4251.178	-	-	-	4251.178
9	Pangkep	4132.1	-	-	-	4132.1
10	Barru	2270.397	-	-	-	2270.397
11	Bone	9950.937	-	-	-	9950.937
12	Soppeng	324.4955	-	-	-	324.4955
13	Wajo	5341.685	-	-	-	5341.685
14	Sidrap	352.6187	-	-	-	352.6187
15	Pinrang	4858.905	-	-	-	4858.905
16	Enrekang	2626.087	-	-	-	2626.087
17	Luwu	4539.337	-	-	-	4539.337
18	Tana Toraja	2856.6	-	-	-	2856.6
19	Luwu Utara	4268.66	-	-	-	4268.66
20	Luwu Timur	3135.004	-	-	-	3135.004
21	Toraja Utara	3524.787	-	-	-	3524.787
22	Makassar	17475.68	-	823.177	8.400.000	9.240.652
23	Pare Pare	1643.63	-	-	-	1643.63
24	Palopo	1919.092	-	-	-	1919.092
	Jumlah	99.648	-	823.177	8.400.000	9.322.825

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota.

Tabel 2.122
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun.
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Angkutan Umum	Mobil penumpang umum			Mobil bus			Mobil barang			Kereta gandengan			Kereta tempelan			Jmlh Angkutan	Jmlh KIR	%
		Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)	(18)	(19)	(20=19/18)
1	Kepulauan Selayar	163	163	100%	17	17	100%	173	137	100%	-	-	-	-	-	-	317	317	
2	Bulukumba																		
3	Bantaeng																		
4	Jeneponto																		
5	Takalar	90	90	100%	-	-	-	150	150	100%	-	-	-	-	-	-	240	240	
6	Gowa	1754	1753	99%	49	49	100%	4247	4055	90%	-	-	-	-	-	-	6050	5857	
7	Sinjai	178	178	100%	1.208	1.208	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1368	1386	
8	Maros																		
9	Pangkep																		
10	Barru	20	40		744	1178		716	1374	-	-	-	-	-	-	-	1480	2592	
11	Bone	1077	1075		4543	1063		1571	2179	-	-	-	-	-	-	-	7137	4317	
12	Soppeng																		
13	Wajo																		
14	Sidrap																		
15	Pinrang																		
16	Enrekang																		
17	Luwu																		
18	TaTor																		
19	Luwu Utara																		
20	Luwu Timur																		
21	Torut																		
22	Makassar	12.316	5.410		293	189		35.710	26.488		-	-	-	212	237		48.531	32.324	
23	Pare Pare	64	64		169	169		1264	1264	-	-	-	-	14	14		1511	1511	
24	Palopo	3014	3012		1821	1816		593	590	-	-	-	-	-	-	-	5.428	5.418	
	Jumlah																		

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 96, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 101, peningkatan jumlah ini diakibatkan semakin meningkatnya jumlah penumpang yang melalui pelabuhan laut/udara/terminal, namun peningkatan jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun.

Tabel 2.123
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah pelabuhan laut	59	60	61	61	62
2.	Jumlah pelabuhan udara	11	11	11	12	13
3.	Jumlah terminal bis	26	26	26	26	26
	Jumlah	96	97	98	99	101

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.124
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kab/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten/kota	Jumlah		
		Pelabuhan laut	Pelabuhan udara	Terminal bis
1	Kepulauan Selayar	13	2	1
2	Bulukumba	3	-	1
3	Bantaeng	1	-	1
4	Jeneponto	1	-	1
5	Takalar	1	-	1
6	Gowa	-	-	1
7	Sinjai	3	-	1
8	Maros	-	-	1
9	Pangkep	5	-	1
10	Barru	4	-	1
11	Bone	7	1	1
12	Soppeng	-	-	1
13	Wajo	4	-	-
14	Sidrap	1	-	1
15	Pinrang	4	-	1
16	Enrekang	-	-	1
17	Luwu	4	1	1
18	Tana Toraja	-	2	1
19	Luwu Utara	1	3	1
20	Luwu Timur	5	1	1
21	Toraja Utara	-	-	1
22	Makassar	2	1	2
23	Palopo	1	1	1
24	Pare-pare	2	-	2
	Jumlah	62	13	26

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

2.3.1.2. Lingkungan Hidup

a. persentase Penanganan Sampah

Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2009 produksi sampah sebesar 2,3 juta M³ dan pada tahun 2013 menjadi 2,7 juta M³, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan jumlah sampah yang ditangani, persentase sampah yang ditangani dari tahun 2009 sebesar 84,80 persen, namun pada tahun 2013 menurun menjadi 81,85 persen.

Tabel 2.125
persentase Penanganan Sampah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah sampah yang ditangani (M ³ /Thn)	1,983,080	2,063,667	2,104,995	2,147,498	2.273,702

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
2	Jumlah produksi sampah (M3/Thn)	2,338,596	2,537,022	2,589,619	2,643,827	2,778,016
3	Persentase	84.80	81.34	81.29	81.23	81.85

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.126
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sampah yang Ditangani (M3/Thn)	Jumlah Volume Produksi Sampah (M3/Thn)	Persentase
1	Kepulauan Selayar	18,190	21,884	83.12
2	Bulukumba	55,264	61,785	100.00
3	Bantaeng	20,638	43,967	46.94
4	Jeneponto	14,037	21,535	100.00
5	Takalar	29,651	38,205	77.61
6	Gowa	145,858	191,916	76.00
7	Sinjai	42,705	76,121	56.10
8	Maros	34,091	59,115	57.67
9	Pangkep	33,950	52,470	73.68
10	Barru	28,873	41,597	69.41
11	Bone	70,419	113,190	62.21
12	Soppeng	88,239	112,145	76.27
13	Wajo	66,286	79,544	83.33
14	Sidrap	62,815	86,641	72.50
15	Pinrang	61,916	69,568	89.00
16	Enrekang	9,118	19,538	46.67
17	Luwu	21,989	27,595	82.43
18	Tana Toraja	33,849	65,582	51.61
19	Luwu Utara	12,620	16,042	78.67
20	Luwu Timur	8,683	43,413	20.00
21	Toraja Utara	20,440	44,548	45.88
22	Makassar	1,193,348	1,263,029	93.71
23	Pare Pare	100,713	106,128	94.90
24	Palopo	100,010	122,458	81.67

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Sulawesi Selatan Tahun 2014

b. persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum, pada tahun 2009 persentase penduduk terhadap akses air bersih sebesar 80,95 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 85,87 persen.

Tabel 2.127
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum	6,402,141	6,481,108	6,691,486	6,785,324	7,162,581
2	Jumlah penduduk	7,908,512	8,034,776	8,115,638	8,222,631	8,342,049
3	Persentase penduduk berakses air bersih	80.95	80.66	82.45	82.52	85.87

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.128
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses
Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persentase
1	Kepulauan Selayar	127,197	115,291	90.54
2	Bulukumba	404,886	327,675	80.85
3	Bantaeng	181,006	170,126	93.89
4	Jeneponto	351,127	305,095	86.92
5	Takalar	280,599	260,285	92.66
6	Gowa	696,124	645,308	92.61
7	Sinjai	234,873	162,414	69.08
8	Maros	331,795	285,210	85.87
9	Pangkep	317,126	222,020	69.93
10	Barru	169,319	159,683	94.21
11	Bone	734,114	613,424	83.47
12	Soppeng	225,501	216,231	95.79
13	Wajo	390,584	323,480	82.73
14	Sidrap	283,303	279,083	98.41
15	Pinrang	361,326	325,337	89.94
16	Enrekang	196,396	144,804	73.65
17	Luwu	343,784	258,559	75.08
18	Tana Toraja	226,210	116,791	51.57
19	Luwu Utara	297,278	227,627	76.33
20	Luwu Timur	263,002	205,036	77.88
21	Toraja Utara	222,387	112,016	50.31
22	Makassar	1,408,123	1,406,857	99.80
23	Pare Pare	135,205	132,692	98.04
24	Palopo	160,784	147,537	91.66

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

c. persentase Luas Permukiman Yang Tertata

persentase luas permukiman yang tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,11 persen, atau meningkat 25 persen dalam kurun waktu 4 tahun.

Tabel 2.129
persentase Luas Permukiman yang Tertata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas area permukiman tertata(Ha)	-	43,190	97,776	104,744	114,345.83
2	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	-	70,246.24	122,579.24	125,368.04	132,790.04
3	persentase luas permukiman yang tertata (Ha)	-	61.48	79.77	83.55	86.11

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.130
persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

No	Kabupaten / Kota	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	persentase
1	Kepulauan Selayar	872.15	690.15	79.13
2	Bulukumba	237,87	202.56	85.16
3	Bantaeng	7,253.00	6,553.30	90.35
4	Jeneponto	2,674.00	2,333.80	87.28
5	Takalar	1,929.00	1,508.50	78.20
6	Gowa	9,793.26	9,378.68	95.77
7	Sinjai	169.00	126.27	74.72
8	Maros	3,420.48	1,991.88	58.23
9	Pangkep	3,336.70	3,092.80	92.69
10	Barru	2,767.92	1,514.10	54.70
11	Bone	17,779.00	11,349.90	63.84
12	Soppeng	272.73	188.73	69.20
13	Wajo	150.00	138.04	92.03
14	Sidrap	21,395.22	21,130.11	98.76
15	Pinrang	508.20	473.55	93.18
16	Enrekang	3,351.00	2,463.70	73.52
17	Luwu	7,318.00	6,685.30	91.35
18	Tana Toraja	1,474.83	914.13	61.98
19	Luwu Utara	17,717.00	16,106.30	90.91
20	Luwu Timur	10,059.44	9,299.44	92.44

No	Kabupaten / Kota	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	persentase
21	Toraja Utara	9,865.00	9,706.50	98.39
22	Makassar	5,400.24	4,501.74	83.36
23	Pare Pare	424.00	310.20	73.16
24	Palopo	4,622.00	3,686.15	79.75

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2012

d. Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya

Pemantauan sumber air dilakukan pada sungai-singai yang ada Sulawesi Selatan, pada tahun 2008 dilakukan pemantauan pada 1 sungai dan menjadi 4 sungai pada tahun 2012. Pemantauan ini akan terus dilakukan pada sungai-sungai lainnya.

Tabel 2.131

Persentase Jumlah Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah sungai yang dipantau mutu airnya	1	1	2	3	4
2.	Jumlah sungai yang dipantau	27	27	27	27	27
3.	persentase Jumlah sumber air yang dipantau Mutu Airnya (1)/(2)	3.70 %	3.70 %	7.41 %	11.11 %	14.81 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib Amdal yang diawasi. persentase pengawasan pada tahun 2008 sebesar 94,94% meningkat menjadi 98,21% di tahun 2012.

Tabel 2.132

persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	225	242	267	298	329
2.	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	237	251	272	300	335
3.	persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)	94,94 %	96,41 %	98,16 %	99,33 %	98,21 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

f. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tabel terlihat bahwa rasio daya tampung TPS tahun 2008 sebesar 0,0015% menurun menjadi 0,0014% pada tahun 2012.

Tabel 2.133
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	122,24	122,24	122,24	122,24	122,24
2.	Jumlah Penduduk	7.700.255	7.908.519	8,034,776	8.115.638	8.199.999
3.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0015 %	0,0015 %	0,0015 %	0,0015 %	0,0014 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.134
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Daya Tampung TPS (Ton)	Rasio
1	Kepulauan Selayar	124.854	18.000,00	14,41 %
2	Bulukumba	399.785	29.040,00	7,26 %
3	Bantaeng	178.861	27.000,00	15,09 %
4	Jeneponto	346.894	-	-
5	Takalar	275.567	-	-
6	Gowa	677.456	43.920,00	6,48 %
7	Sinjai	231.910	46.800,00	20,18 %
8	Maros	325.994	23.400,00	7,18 %
9	Pangkep	311.821	28.800,00	9,23 %
10	Barru	167.580	25.051,20	14,95 %
11	Bone	725.743	126.000,00	17,36 %
12	Soppeng	224.184	98.280,00	43,84 %
13	Wajo	387.423	41.277,60	10,65 %
14	Sidrap	278.091	32.850,00	11,81 %
15	Pinrang	356.334	49.680,00	13,94 %
16	Enrekang	193.534	17.683,56	9,14 %
17	Luwu	338.494	9.000,00	2,66 %
18	Tana Toraja	223.653	12.045,00	5,39 %
19	Luwu Utara	292.670	11.340,00	3,87 %
20	Luwu Timur	254.080	4.200,00	1,65 %
21	Toraja Utara	219.676	-	-
22	Makassar	1.377.494	1.196.513,80	86,86 %
23	Pare Pare	132.540	164.520,00	124,13 %
24	Palopo	155.360	120.600,00	77,62 %
	Jumlah	8.199.999	2.126.001,16	

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

g. Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus lingkungan ditindaklanjuti secara menyeluruh kecuali pada tahun 2011 yang menindaklanjuti 15 dari 16 kasus lingkungan.

Tabel 2.135
persentase Penegakan Hukum Lingkungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	5	6	10	15	22
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	5	6	10	16	22
3.	persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)	100 %	100 %	100 %	93.75 %	100 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.3.1.3. Pertanahan

a. persentase Luas Lahan Bersertifikat

Lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGU), dan Hak Pengelolaan (HPL)

Tabel 2.136

**Luas Lahan Bersertifikat Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	KABUPATEN /KOTA	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
1	Makassar	5,703,483		225,346	51,439	1,992,613		708,424		545,822		628,712		473,885		424,490		459,524		385,471	
2	Gowa	8,507,650	491	1,026,243	4,186	4,248,694		334,168		10,183								80,604		176,052	
3	Takalar	2,998,656	7,733	3,747	39,790	2,524,087		5,358		5,605,881		634		285,778		10,787		1,086,873		32,540	
4	Jeneponto	2,208,071	1,420	423,686	6,714	2,257,362				1,116											
5	Maros	1,387,135	1,025	50,571	11,120	1,487,920		61,181													
6	Pangkep	31,966,321				6,458,008				601,992		124,793		1,800,774		154,094		663			
7	Barru																	49,012			
8	Luwu	2,289,090		102,587		2,433,045		12,031		10,442								24,848,000			
9	Tana Toraja	2,230,725	8,300	3,546	143	2,881,629		19,879		857,733		68,615		323,628	60	972		544,152		123,688	
10	Soppeng	99,049,471	1,231			3,041,456				208				3,504,680				8,890,000			
11	Sinjai	2,504,384			8,080	296,264		68,663		2,345,736		359,024		218,004				102,369			
12	Selayar	112,039,223				19,283				53,750		15,445						9,137			
13	Bone	2,726,966	18,170	9,305	42	683,667				1,153,000								530,253			
14	Wajo	608,436	11,528	12,629						2,678				5,548,670				420,232			
15	Pare-Pare	187,714				614,026															
16	Pinrang	5,184,060	1,244	5,250	10,020	3,320,953		14,212		2,130,070		2,048	360	1,265,240		1,512		919,411		9,052	
17	Sidrap	344,096	8,986	19,633	66,068									224,466				27,588			
18	Enrekang	2,312,079	7,005	403		165,202															
19	Bantaeng	473,860		9,166		3,942,789		41,640		5,881,014		30,392		104,134				14,705			

No.	KABUPATEN /KOTA	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
20	Bulukumba	3,479,244	6,194	15,941	106,259	884,407		4,866		858,729		111,215		3,695,774		1,247		8,111,403		116,433	
21	Luwu Utara	2,422,889	26,330	179,972		4,579,215		21,263		7,870,181		89,500		140,638				1,333,254			
22	Palopo	217,352	495	2,315		102,304				34,131								893,080			
23	Luwu Timur	1,135,581	14,337	1,549	6,881,047	4,637,511		1,995		73,446		52,276						174,087,000			
24	Toraja Utara																				
	Jumlah	289,976,486	114,489	2,091,889	7,184,908	46,543,435		1,293,680		28,036,112		1,482,654	360	17,585,641	60	593,102		222,407,260		843,236	

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.137
Rasio Luas Lahan Bersertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Kab/Kota	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
1	Makassar	4,616		225,346	51,439	1,567		708,424		408		470		350		314		334		280	
2	Gowa	14,042	1	1,694	7	6,883		334,168		16								120		262	
3	Takalar	11,752	30	15	156	9,784		5,358		20,793		2		1,049		40		3,933		118	
4	Jeneponto	6,644	4	1,275	20	6,755				3											
5	Maros	4,575	3	167	37	4,852		61,181													
6	Pangkep	108,310				21,620				1,969		408		5,831		499		2			
7	Barru																	290			
8	Luwu	7,060		316		14,928		12,031		31								73,308			
9	Tana Toraja	4,839	18	8	0	11,994		19,879		3,880		310		1,449	0	4		2,377		540	
10	Soppeng	431,584	1,231			13,064				1				15,502				39,250			

No.	Kab/Kota	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
11	Sinjai	11,084			36	1,298		68,663		10,249		1,569		943				440			
12	Selayar	935,133				158				440		127						73			
13	Bone	3,864	26	13	42	961				1,607								726			
14	Wajo	1,607	11,528	12,629						7				14,264				1,073			
15	Pare-Pare	1,596				5,167															
16	Pinrang	14,940	4	15	29	9,460		14,212		6,067		6	360	3,568		4		2,575		25	
17	Sidrap	1,373	36	78	264									817				99			
18	Enrekang	12,294	37	2		867															
19	Bantaeng	2,741		53		22,637		41,640		33,283		172		583				82			
20	Bulukumba	8,909	16	41	272	2,240		4,866		2,176		282		9,273		3		20,228		290	
21	Luwu Utara	7,724	84	574		14,222		21,263		27,377		311		484				4,544			
22	Palopo	1,531	495	2,315		698				231								5,884			
23	Luwu Timur	4,920	62	7	29,881	19,538		1,995		302		215						697,070			
24	Toraja Utara																				
	Jumlah	1,601,179	13,575	244,547	82,113	168,693		1,293,680		108,839		3,872	360	54,116	0	864		852,409		1,516	

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah penyelesaian kasus tanah negara dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 87,26 persen, namun hal tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 2.138
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	80	119	49	69	139
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar	100	131	49	78	169
3	Rasio Penyelesaian Kasus Tanah Negara	80	90,84	100	88,46	82

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.1.4. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP pada Tahun 2009 sebesar 0,38 dan menjadi 0,34 pada tahun 2014, dari data tersebut menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki KTP.

Tabel 2.139
Rasio penduduk br KTP per satuan penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml penduduk usia >17 yang ber KTP	1.098.314	1.432.484	1.729.846	2.580.551	1.129.708
2	Jml penduduk usia >17 telah menikah	2.899.394	3.182.705	4.003.715	4.168.185	4.162.610
3	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	0.38	0.45	0.43	0.62	0.27

Sumber : Biro Pemerintahan UmumProv. Sul-Sel Tahun 2014

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peurunan dari 1,69 pada tahun 2008 menjadi 0,66 pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait administrasi akte kelahiran sangat kurang Pemenuhan hak atas identitas anak melalui kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun di Sulawesi Selatan mencapai rata-rata 77.96% (tertinggi Kab. Selayar 71.76%, terendah Kab. Jeneponto 14.10%), namun hanya 54,01% yang dapat menunjukkan bukti akte kelahiran (Susenas, 2012). Akte kelahiran sangat penting untuk mencegah anak dari pemalsuan identitas dan eksploitasi. Banyak anak korban trafficking direkrut dengan dipalsukan umur dan identitasnya. Pada beberapa daerah, banyak anak yang tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki akte kelahiran.

Sebagian besar Kabupaten/Kota telah memiliki regulasi untuk penerbitan akte kelahiran gratis, namun ternyata belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Untuk itu upaya peningkatan kesadaran masyarakat/ orang tua untuk mengurus akte kelahiran serta perluasan akses pelayanan pendaftaran akte kelahiran perlu didekatkan ke masyarakat melalui kelurahan/desa dan kecamatan.

Tabel 2.140
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jml penduduk ber KK	98.641	57.565	38.478	92.791	64.132
2	Jml penduduk telah menikah	58.461	54.648	83.060	137.002	96.698
3	Rasio bayi br akte kelahiran	1,69	1,05	0,46	0,68	0,66

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2013

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2009 sebesar 0,17 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,05.

Tabel 2.141
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml pasangan nikah ber akte nikah	142.046	167.133	183.920	251.398	243.534
2	Jml keseluruhan pasangan nikah	841.584	945.172	938.483	1.140.387	4.162.610
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.17	0.18	0.20	0.22	0.05

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2014

d. Kepemilikan KTP

Jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 40,05 persen dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,20 persen.

Tabel 2.142
Kepemilikan KTP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml penduduk memiliki KTP	1.504.374	1.783.228	2.405.168	3.154.578	1.129.708
2	Jml penduduk wajib KTP	3.756.032	4.675.309	6.186.197	6.684.925	5.727.660
3	Kepemilikan KTP (%)	40.05	38.14	38.88	47.19	0.20

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2014

e. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Kepemilikan akte kelahiran dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari tahun 2009 sebesar 0,21 persen menjadi 0,29 persen pada tahun 2012, namun peningkatan tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Tabel 2.143
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				2013
		2009	2010	2011	2012	
1	Jml penduduk memiliki akte kelahiratan	1.539.708	1.752.094	2.154.038	2.509.234	1.219.742
2	Jml penduduk	5.752.167	7.142.984	8.486.264	8.710.299	9.414.387
3	Kepemilikan akte kelahiran (%)	0.27	0.25	0.25	0.29	0.13

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.144
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	Blm
1	Selayar	36.181	58.225	40.185	-	15.597	117.932	28.170	32.752
2	Bulukumba	64.995	270.841	109.142	64.596	1.221	433.510	1.234	223.563
3	Bantaeng	20.982	123.253			38.146	154.422	5.265	92.501
4	Jeneponto	54.699	252.262	86.789	64.596	20.122	385.370	618	210.668
5	Takalar	88.715	121.857			10.888	262.893	5.495	134.548
6	Gowa	99.160	437.521	126.535	108.114	3.487	742.826	6.191	353.543
7	Sinjai	103.568	78.120	75.548	33.511	73.369	182.162	5.050	108.108
8	Bone	59.331	569.020	156.091	76.280	32.210	826.703	1.053	384.918
9	Maros	44.175	242.620			1.956	393.104	83	181.188
10	Pangkajene Kepulauan	76.029	177.695	82.504	12.795	48.619	309.411	41.474	116.369
11	Barru	33.183	94.518			24.057	144.681	10.334	73.624
12	Soppeng	31.061	155.207			35.948	215.568	8.490	109.195
13	Wajo	48.943	312.607	122.935	19.028	56.679	418.923	2.501	218.754
14	Sidenreng Rappang	63.878	161.749			61.130	256.546	2.420	146.657
15	Pinrang	97.036	174.138	91.606	-	110.385	296.663	811	179.277
16	Enrekang	56.616	108.674	74.906	97.092	24.342	212.502	2.726	92.337
17	Luwu	46.222	203.739			33.699	337.239	13.802	136.390
18	Tana Toraja	45.854	146.899			3.489	245.183	1.322	94.232
19	Luwu Utara	65.372	182.752	105.768	1.026	58.753	294.084	3.969	151.369
20	Luwu Timur	24.511	169.991			44.061	246.659	11.444	117.141
21	Toraja Utara	34.016	119.033	63.955	357	44.929	188.960	25.027	65.550
22	Kota Makassar	189.934	1.045.085			201.428	1.449.263	19.568	678.627
23	Kota Parepare	32.049	95.078	38.257	10.741	19.918	155.117	17.139	58.907
24	Kota Palopo	36.895	92.933	45.487	6.408	34.977	145.149	17.139	59.839
	Jumlah se-provinsi	1.453.405	5.395.817	1.316.800	260.036	999.410	8.414.870	228.280	4.020.057

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.1.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan

persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tabel diatas, menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang, perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada di golongan ruang I-a sampai II-b yang mencapai hampir seperempat dari jumlah total. Hal menarik yang dapat dicermati dari tabel diatas adalah semakin tinggi golongan ruang, maka semakin kecil persentase atau jumlah perempuannya. Ini menunjukkan masih terdapat perbedaan peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang. Data dari Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan struktural pemerintah provinsi pada tahun 2012 baru mencapai 36 %, dimana hampir pada seluruh jenjang eselon jabatan struktural, dominasi laki-laki masih sangat menonjol. Jika hal ini dikaitkan dengan golongan ruang PNS, khususnya pada golongan

ruang III-a sampai III-d yang hanya selisih 1% antara laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan akses bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 2.145
persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Golongan Ruang	Tahun 2012			
		PNS Pria		PNS Wanita	
		Jumlah	ersentase	Jumlah	persentase
1	I/a	65	81%	15	19%
2	I/b	36	95%	2	5%
3	I/c	106	87%	16	13%
4	I/d	55	83%	11	17%
5	II/a	618	70%	263	30%
6	II/b	422	66%	216	34%
7	II/c	219	36%	395	64%
8	II/d	171	45%	207	55%
9	III/a	595	50%	604	50%
10	III/b	1106	55%	904	45%
11	III/c	530	51%	513	49%
12	III/d	730	48%	797	52%
13	IV/a	478	55%	398	45%
14	IV/b	186	68%	89	32%
15	IV/c	58	64%	33	36%
16	IV/d	48	72%	19	28%
17	IV/e	5	71%	2	29%
	Total	5428	55%	4484	45%

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

b. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta, menunjukkan persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini bermakna rendahnya partisipasi perempuan yang kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan di lapangan kerja swasta. Budaya patriarki masih menempatkan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan dalam kategori marginal, seperti buruh perusahaan dan pelayan toko. Peluang kerja yang ditawarkan oleh perusahaan swasta lebih banyak terbuka untuk laki-laki.

Tabel 2.146
persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	JENIS DATA	Tahun										
		2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	
1	Jenis Perusahaan	10.177		11.348		12.059		11.067		11.358		
2	Jumlah	153.492		174.166		175.783		190.736		186.345		
3	Jumlah Tenaga Kerja Formal	L	113.670	74	133.639	77	122.661	70	135.802	71	144.298	77
		W	39.822	26	40.527	23	53.122	30	54.934	29	44.047	24

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

c. Jumlah Laporan Penanganan KDRT

Penanganan kasus KDRT merupakan mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementerian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologis. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga dan kabupaten/kota sebagaimana tercermin dalam tabel di atas, nampak terjadi peningkatan jumlah aduan kasus yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata di provinsi dan kabupaten/kota yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu sesuai standar SPM dan peraturan perundangan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 2.147

Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan & Anak Tahun 2009 - 2012

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Laporan Penanganan Kasus KDRT	315	313	540	728

Sumber Data : Diolah dari Data UPPA Polda, LPA dan P2TP2A kab/Kota Tahun 2013

Tabel 2.148

Data Pelayanan TKTPA (Korban Kekerasan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-laki	0	0	56	40	28
Perempuan	0	0	90	26	85

Sumber Data : BPPKB Tahun 2014

d. Angkatan Kerja Dibawah Umur

Angkatan kerja dibawah umur di Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah. Namun demikian, data diatas memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja. Pada umumnya anak bekerja karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting maknanya dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan karena sebagian besar pekerja di bawah umur terlibat pada jenis-jenis pekerjaan terburuk. Di Sulawesi Selatan telah dibentuk Komite Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan sejak tahun 2011 yang lalu telah disusun Rencana Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dilegalkan melalui Peraturan Gubernur. Namun demikian, nampaknya kerja komite aksi ini masih harus lebih ditingkatkan dengan memperhatikan masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja.

Tabel 2.149
Angkatan Kerja Menurut Umur 15-19 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun	296.560	230.906	210.975	216.494	183.833

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Prov. Sul-Sel Tahun 2014

e. Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, namun pembangunan di Sulawesi Selatan belum memberikan kemanfaatan yang adil dan setara. Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan dalam bidang pembangunan lainnya keadaan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Sulawesi Selatan masih berada di papan bawah diantara 33 provinsi di Indonesia. Indeks pembangunan gender ini menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender dimana angka melek huruf laki-laki 92,67% dan perempuan 88,26%, rata-rata lama sekolah laki-laki 8,3 tahun dan perempuan 7,8 tahun, sumbangan pendapatan laki-laki 69,78 dan perempuan hanya 30,22.

Tabel 2.150
Indeks Pembangunan Gender
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013

No	Indeks Pembangunan Gender	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Sulawesi Selatan	62,75	63,50	64,57
2	Nasional	63,38	63,88	64,42

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Pada tahun 2013, IPG, yang merupakan pembangunan manusia berbasis gender, hanya berada di urutan ke 26. Nilai IPG di bawah nilai IPM menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. IDG yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, hanya berada di urutan ke 21. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Selatan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2.3.1.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Pembangunan berwawasan kependudukan dapat diperkuat melalui pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui upaya pengendali kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk dalam lingkungan hidup. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas

penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, jumlah penduduk Prov. Sulsel sebanyak **8.034.776** jiwa terdiri dari laki- laki sebanyak **3.924.431** jiwa dan perempuan sebanyak **4.110.345** jiwa. Mencermati hasil sensus penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulsel periode tahun 2000- 2010 rata-rata laju pertumbuhan adalah 1,17% pertahun dan dibawah rata-rata laju pertumbuhan nasional pada periode yang sama yakni 1,49 % pertahun. Rata-rata jumlah anak per keluarga mengindikasikan terhadap angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate). Berdasarkan data tahun 2008 sampai tahun 2012, menunjukkan adanya peningkatan jumlah anah per keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, karena akan berkorelasi positif terhadap peningkatan jumlah penduduk di daerah. Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga, juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Gambaran rata-rata jumlah anak per keluarga di Sulawesi Selatan secara rinci disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.151
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Anak	2.232.014	2.136.138	3.357.960	3.383.461	3.376.553
2	Jumlah Keluarga	1.869.608	1.914.890	1.956.436	2.041.425	2.008.646
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,19	1,12	1,72	1,66	1,68

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2008 sampai 2012 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan persentase. Namun demikian, secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB.

Tabel 2.152
Rasio Akseptor KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah Akseptor KB	Jml	254,738.00	312,494.00	342,660.00	385,636.00	381,469.00
b.	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jml	1,250,080.00	1,283,553.00	1,324,031.00	1,351,935.00	1,388,691.00

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
	Rasio Akseptor KB	%	20.38	24.35	25.88	28.52	27.47

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Selatan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel diatas. Namun angka peningkatannya di tahun 2011 ke tahun 2012 relatif rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

Tabel 2.153

**Tabel Cakupan Peserta KB Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Jml	775,049.00	825,220.00	932,461.00	980,883.00	1,020,312.00
b.	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jml	1,250,080.00	1,283,553.00	1,324,031.00	1,351,935.00	1,388,691.00
	Cakupan Peserta KB Aktif	%	62.00	64.29	70.43	72.55	73.47

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

d. Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara holistic. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 setiap tahunnya di Sulawesi Selatan, jika dirata-ratakan dari tahun 2008 sampai tahun 2012, hanya mampu pada kisaran 0,87%. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Tabel 2.154

**Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1	Jml	781,366.00	792,483.00	788,725.00	782,640.00	769,176.00
b.	Jumlah Keluarga	Jml	1,869,608.00	1,914,890.00	1,956,436.00	2,041,425.00	2,008,646.00
	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	41.79	41.39	40.31	38.34	38.29

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

e. Posyandu Aktif

persentase Jumlah Posyandu aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 98 persen tiap tahunnya, ini tentunya didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti kesehatan.

Tabel 2.156
Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	KABUPAT EN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyand u Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyand u Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyand u Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyand u Aktif	Posyandu Aktif (%)
1	2	3	4	5 = $4/3 \times 100\%$	6	7	$8=7/6 \times 100$ %	9	10	$11=10/9 \times$ 100%	12	13	$14=13/12$ $\times 100\%$	15	16	$17=16/15 \times 1$ 00%
1	Makassar	910	910	100.00	284	284	100.00	939	939	100.00	894	894	100.00	920	920	100.00
2	Gowa	577	577	100.00	655	655	100.00	688	668	97.09	492	492	100.00	613	613	100.00
3	Takalar	359	359	100.00	387	387	100.00	402	387	96.27	390	390	100.00	374	374	100.00
4	Jeneponto	428	428	100.00	381	363	95.28	411	355	86.37	365	365	100.00	328	323	98.48
5	Bantaeng	254	193	75.98	254	193	75.98	254	193	75.98	200	200	100.00	200	200	100.00
6	Bulukumba	471	436	92.57	482	482	100.00	511	511	100.00	472	472	100.00	454	454	100.00
7	Selayar	248	248	100.00	258	258	100.00	258	252	97.67	258	258	100.00	258	258	100.00
8	Sinjai	309	309	100.00	316	316	100.00	318	317	99.69	322	322	100.00	322	322	100.00
9	Maros	386	389	100.78	386	386	100.00	391	390	99.74	386	386	100.00	369	369	100.00
10	Pangkep	272	272	100.00	303	303	100.00	300	300	100.00	305	305	100.00	342	342	100.00
11	Barru	198	198	100.00	209	197	94.26	197	197	100.00	192	192	100.00	227	227	100.00
12	Pare-pare	112	110	98.21	114	110	96.49	115	112	97.39	115	112	97.39	115	112	97.39
13	Bone	783	783	100.00	915	915	100.00	3,491	3,491	100.00	875	875	100.00	875	875	100.00
14	Soppeng	311	298	95.82	196	170	86.73	324	324	100.00	309	271	87.70	302	302	100.00
15	Wajo	443	424	95.71	442	419	94.80	733	733	100.00	704	704	100.00	707	707	100.00

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	9	10	$11 = \frac{10}{9} \times 100\%$	12	13	$14 = \frac{13}{12} \times 100\%$	15	16	$17 = \frac{16}{15} \times 100\%$
16	Sidrap	278	255	91.73	315	315	100.00	308	308	100.00	309	309	100.00	310	310	100.00
17	Pinrang	338	338	100.00	353	319	90.37	354	349	98.59	363	342	94.21	353	342	96.88
18	Luwu	350	348	99.43	372	334	89.78	378	363	96.03	378	378	100.00	382	382	100.00
19	Luwu Utara	247	247	100.00	267	267	100.00	288	278	96.53	340	340	100.00	287	287	100.00
20	Luwu Timur	230	230	100.00	177	177	100.00	232	232	100.00	245	227	92.65	245	245	100.00
21	Palopo	131	128	97.71	139	139	100.00	136	136	100.00	198	127	64.14	206	127	61.65
22	Enrekang	360	275	76.39	257	257	100.00	279	267	95.70	225	225	100.00	228	228	100.00
23	Toraja	246	246	100.00	246	246	100.00	246	246	100.00	246	246	100.00	246	246	100.00
24	Toraja Utara	-	-	-	135	135	100.00	143	143	100.00	135	135	100.00	138	138	100.00
	JUMLAH	8,241	8,001	97.09	7,843	7,627	97.25	11,696	11,491	98.25	8,718	8,567	98.27	8,801	8,703	98.89

Sumber: BPPMDK Prov. Sul-Sel 2013

2.3.1.7. Tenaga Kerja

a. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerjadan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin.

Pada Tahun 2013 penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 80,47 persen dan angkatan kerja perempuan hanya sebesar 42,27 persen.

Tabel 2.157

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA	2.200.143	1.268.049	3.468.192
	Bekerja	2.093.498	1.197.782	3.291.280
	Pengangguran	106.645	70.267	176.912
2	BUKAN ANGKATAN KERJA	534.038	1.731.528	2.265.566
	Sekolah	242.585	269.349	511.934
	Mengurus RT	62.034	1.323.865	1.385.899
	Lainnya	229.419	138.314	367.733
	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	2.734.181	2.999.577	5.733.758
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	80,47	42,27	60,49
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	4,85	5,54	5,10

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

b. Penduduk Angkatan Kerja

Pada tabel penduduk angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk pada usia 20-24 tahun merupakan jumlah pencari pekerjaan terbesar, yaitu sebesar 54.600 orang atau 30,86% dari total pencari kerja, ini memperlihatkan bahwa masih banyaknya pencari pekerjaan yang berasal dari tamatan SMA.

Tabel 2.158

Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
15-19	183.833	50.758	234.591
20-24	303.535	54.600	358.135
25-29	420.527	30.440	450.967
30-34	487.940	18.504	506.444
35-39	411.456	5.486	416.942
40-44	447.316	9.466	456.782
45-49	322.419	3.317	325.736
50-54	262.895	2.232	265.127
55-59	177.698	1.656	179.354

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
60-64	273.661	453	274.114
Total	3.291.280	176.912	3.468.192

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

c. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Dari tabel penduduk bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa 44,02 persen penduduk bekerja di bidang pertanian, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja lainnya.

Tabel 2.159
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten /Kota	Lapangan Usaha									Jml
		Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri	Listrik, Gas dan Air Minum	Konstruksi	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	
1	Selayar	26.004	363	3.707	272	2.678	5.661	652	423	10.741	52.064
2	Bulukumba	88.679		10.447	267	8.097	30.198	8.244	463	21.303	188.255
3	Bantaeng	39.642	87	2.847		2.311	10.796	4.535	321	20.193	84.827
4	Jeneponto	96.663	937	683		8.280	13.539	10.616	218	14.544	156.601
5	Takalar	38.563	2.251	5.103	266	15.313	19.650	8.164	3.693	16.989	113.782
6	Gowa	142.509	695	21.324	499	20.425	52.638	12.343	5.413	41.501	273.211
7	Sinjai	72.562	559	1.443	393	464	13.963	1.621	800	18.544	112.493
8	Maros	42.328	1.891	9.764	233	9.072	29.848	.977	2.872	25.881	134.344
9	Pangkep	30.969	2.502	14.035	403	10.315	18.665	6.228	4.412	22.988	113.656
10	Barru	25.943	136	2.258	288	3.281	8.976	1.252	959	16.614	63.983
11	Bone	182.946	2.521	13.071		5.270	49.051	13.445	2.378	41.954	322.088
12	Soppeng	58.178	492	4.077		1.431	7.873	1.608	946	13.662	97.953
13	Wajo	78.569	210	17.843	2.941	7.641	26.144	6.030	2.421	18.159	168.455
14	Sidrap	43.556	819	5.537	144	2.351	20.871	7.939	1.906	12.953	104.710
15	Pinrang	63.389	685	6.792	168	6.349	21.541	3.248	2.641	19.160	126.724
16	Enrekang	56.521		2.967	111	2.383	7.789	2.022	953	13.994	90.720
17	Luwu	69.684	683	15.670		3.301	12.783	4.376	1.088	12.978	118.667
18	Tana Toraja	79.949	197	1.018	603	2.664	4.318	4.264	735	4.678	105.929
19	Luwu Utara	66.067		5.925		3.617	20.238	1.870	1.136	15.740	121.584
20	Luwu Timur	49.063	3.606	5.325	271	9.403	16.510	2.558	2.086	16.108	101.769
21	Toraja Utara	61.162	138	1.193	93	5.617	5.796	4.165	515	8.978	89.993
22	Makassar	1.082	276	3.105	130	5.589	17.692	6.145	2.120	14.931	502.308
23	Parepare	12.569	435	3.172	212	4.071	15.614	4.654	1.488	16.222	51.819
24	Palopo	1.554	2.298	39.026	1.052	51.823	173.650	46.031	32.151	180.180	55.973
	Total se provinsi	1.475.783	1.428.151	21.781	196.332	8.346	191.746	603.804	169.987	72.138	598.995

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

d. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja dalam kurun lima tahun terakhir relatif stagnan, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang.

Tabel 2.160
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Angkatan Kerja 15 Tahun keatas	Jiwa	3.536.920	3.571.317	3.612.424	3.560.891	3.468.192
b.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Jiwa	5.660.624	5.567.601	5.616.709	5.667.985	5.733.758
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		62,48	64,14	64,32	62,82	60,48

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

e. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa antara pengusaha dengan pekerja selama kurun waktu lima tahun rata-rata sebesar 8,47 persen, pada tahun 2013 jumlah perusahaan sebesar 11.452 perusahaan dengan jumlah sengketa sebanyak 155, hal ini tentunya perlu upaya pemerintah untuk dapat memfasilitasi sengketa antara pemilik perusahaan dan karyawan.

Tabel 2.161
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Jml	276	210	189	142	155
b.	Jumlah Perusahaan	Jml	11.348	12.059	11.067	11.358	11.452
c.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun		2,43	1,74	1,70	1,25	1,35

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

f. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 7,69 persen dan pada tahun 2013 menjadi 12,89 persen.

Tabel 2.162
Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	15.722	25.754	21.067	30.094	31.503
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Orang	204.373,00	225.371,00	232.496,00	235.115,00	244.300

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
c.	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	7,69	11,43	9,06	12,80	12,89

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2013

g. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 pengangguran terbuka sebesar 8,90 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 5,10 persen atau turun sebesar 3,80 point.

Tingkat 2.163

Pengangguran Terbuka

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	314,664	298,952	236,926	208,983	176.912
b.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	3,536,920	3,571,317	3,612,424	3,560,891	3.468.192
c.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.90	8.37	6.56	5.87	5,10

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

h. Keselamatan Dan Perlindungan

Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 100 persen.

Tabel 2.164

Keselamatan Dan Perlindungan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Jml	11.348	12.059	11.067	11.358	11.452
b.	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten	Jml	11.348	12.059	11.067	11.358	11.452
c.	Keselamatan dan Perlindungan	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

i. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

persentase penyelesaian perselisihan buruh dan Pengusaha terhadap pemerintah sebesar seratus persen tiap tahunnya.

Tabel 2.165
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	Jml	276	210	189	142	155
b.	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	Jml	276	210	189	142	155
c.	persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.1.8. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

a. persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota

Persentase koperasi aktif mengalami penurunan, dari tahun 2009 persentase koperasi aktif sebesar 67 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 69 persen.

Tabel 2.166
persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Koperasi Aktif	4.949	5.105	5.452	5.554	5.771
b.	Jumlah Koperasi	7.292	7.497	7.958	8.026	8.230
c.	persentase Koperasi Aktif	67	68	68	69	69

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

b. Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UMKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2009 jumlah umkm sebesar 820.324 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 901.563, atau meningkat sebesar 99.616 (12 persen).

Tabel 2.167
Jumlah UKM Non BPR/LKM
Provinsi Sualawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah seluruh UMKM	824.417	860.163	894.163	914.902	916.232
2	Jumlah BPR/LKM	22	22	22	22	22
3	Jumlah UMKM Non BPR/LKM	820.324	856.909	889.396	900.263	901.563

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.168
Jumlah UKM Non BPR/LKM Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Maros					
	Jumlah seluruh UMKM	27.998	29.210	30.113	30.526	30.554
	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	2	2
	Jumlah UMKM non BPR	27.858	29.063	29.962	30.037	30.401
2	Kabupaten Pangkep					
	Jumlah seluruh UMKM	29.951	31.253	31.904	32.352	32.372
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	29.801	31.096	31.744	31.834	32.210
3	Kabupaten Barru					
	Jumlah seluruh UMKM	16.990	17.717	18.098	18.350	18.358
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	16.905	17.628	18.007	18.056	18.266
4	Kota Pare-Pare					
	Jumlah seluruh UMKM	14.158	14.752	15.221	15.489	15.515
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	14.087	14.678	15.144	15.241	15.437
5	Kabupaten Pinrang					
	Jumlah seluruh UMKM	29.946	31.248	31.899	32.346	32.367
	Jumlah UMKM non BPR	-	-	-	-	-
	Jumlah UKM non BPR	29.796	31.091	31.729	32.828	32.205
6	Kabupaten Sidrap					
	Jumlah UMKM non BPR	26.535	27.689	28.269	28.677	28.952
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	26.402	27.550	28.127	28.218	28.807
7	Kabupaten Wajo					
	Jumlah seluruh UMKM	54.337	56.724	57.885	58.709	58.742
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	54.065	56.440	57,595	57.769	58.448
8	Kabupaten Soppeng					
	Jumlah seluruh UMKM	26.147	27.283	27.855	28.255	28.262
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	26.016	27.148	27.715	27.802	28.120
9	Kabupaten Luwu					
	Jumlah seluruh UMKM	29.543	30.832	31.475	31.920	31.936
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UKM non BPR	29.395	30.677	31.317	31.409	31.776
10	Kota Palopo					
	Jumlah seluruh UMKM	12.851	13.383	13.811	14.029	14.076
	Jumlah BPR/LKM					
	Jumlah UMKM non BPR	12.786	13.316	13.471	13.804	14.005
11	Kabupaten Luwu Utara					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah seluruh UMKM	22.569	23.543	24.040	24.364	24.390
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	22.456	23.425	23.919	23.974	24.268
12	Kabupaten Luwu Timur					
	Jumlah seluruh UMKM	18.532	19.324	19.737	19.992	20.022
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	18.439	19.227	19.638	19.672	19.921
13	Kabupaten Tana Toraja					
	Jumlah seluruh UMKM	19.962	14.298	14.754	14.940	14.964
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	19.862	14.226	14.680	14.700	14.889
14	Kabupaten Toraja Utara					
	Jumlah seluruh UMKM	14.323	21.459	22.130	22.450	22.461
	Jumlah BPR/LKM					
	Jumlah UMKM non BPR	14.251	21.351	22.019	22.337	22.348
15	Kabupaten Bone					
	Jumlah seluruh UMKM	77.889	81.325	85.418	87.372	87.372
	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3
	Jumlah UMKM non BPR	77.499	80.918	84.990	86.879	86.935
16	Kabupaten Sinjai					
	Jumlah seluruh UMKM	23.205	24.211	24.479	24.699	24.714
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	23.088	24.089	24,356	24.328	24.590
17	Kabupaten Bulukumba					
	Jumlah seluruh UMKM	41.090	42.871	44.184	44.752	44.836
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	40.884	42.656	43.963	44.528	44.611
18	Kabupaten Bantaeng					
	Jumlah seluruh UMKM	21.356	22.281	22.753	23.073	23.083
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	21.249	22.169	22.639	22.957	22.967
19	Kabupaten Selayar					
	Jumlah seluruh UMKM	14.215	14.822	15.145	15.354	15.361
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	14.143	14.747	15.069	15.277	15.284
20	Kabupaten Jeneponto					
	Jumlah seluruh UMKM	35.675	37.238	38.009	38.550	38.568
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	35.496	37.051	37.818	38.357	38.375
21	Kabupaten Takalar					
	Jumlah seluruh UMKM	34.420	35.922	36.667	37.177	37.206
	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	2	2
	Jumlah UMKM non BPR	34.247	35.742	36.483	37.991	37.019
22	Kabupaten Enrekang					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah seluruh UMKM	16.977	17.706	18.087	18.336	18.347
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	16.892	17.617	17.996	18.244	18.255
23	Kabupaten Gowa					
	Jumlah seluruh UMKM	74.327	77.613	79.971	81.127	81.157
	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3
	Jumlah UMKM non BPR	73.955	77.224	79.568	80.721	80.751
24	Kota Makassar					
	Jumlah seluruh UMKM	141.421	147.482	162.259	172.632	172.632
	Jumlah BPR/LKM	5	5	5	5	5
	Jumlah UMKM non BPR	140.712	146.744	161.447	169.210	171.768

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

c. Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil

persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 99,47 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,48 persen..

Tabel 2.169

Usaha Mikro Dan Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
A	Jumlah usaha mikro	jml	723,288	755,292	780,452	797,081	797,081
B	Jumlah usaha kecil	jml	96,760	101,205	109,323	112,657	114,656
C	Jumlah UKM	jml	824,416	860,810	894,160	916,500	916,500
d.	Usaha Mikro dan Kecil	%	99.47	99.50	99.51	99.26	99.48

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.170

Jumlah Usaha Mikro Dan Jumlah seluruh UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Maros					
	Jumlah Usaha Mikro	24.234	25.361	26.019	26.358	26.358
	Jumlah seluruh UMKM	27.998	29.236	30.113	30.565	30.554
2	Kabupaten Pangkep					
	Jumlah Usaha Mikro	26.851	28.082	28.551	28.910	28.910
	Jumlah seluruh UMKM	29.951	31.279	31.904	32.383	32.372
3	Kabupaten Barru					
	Jumlah Usaha Mikro	15.217	15.939	16.206	16.409	16.409
	Jumlah seluruh UMKM	16.990	17.743	18.098	18.369	18.358
4	Kota Pare-Pare					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah Usaha Mikro	11.741	12.267	12.600	12.828	12.828
	Jumlah seluruh UMKM	14.158	14.778	15.221	15.526	15.515
5	Kabupaten Pinrang					
	Jumlah Usaha Mikro	26.035	27.163	27.633	27.991	27.991
	Jumlah seluruh UMKM	29.946	31.274	31.899	32.378	32.367
6	Kabupaten Sidrap					
	Jumlah Usaha Mikro	23.782	24.784	25.200	25.518	25.518
	Jumlah seluruh UMKM	26.535	27.715	28.269	28.963	28.952
7	Kabupaten Wajo					
	Jumlah Usaha Mikro	48.778	50.828	51.679	52.331	52.331
	Jumlah seluruh UMKM	54.337	56.750	57.885	58.753	58.742
8	Kabupaten Soppeng					
	Jumlah Usaha Mikro	23.219	24.206	24.615	24.929	24.929
	Jumlah seluruh UMKM	26.147	27.309	27.855	28.273	28.262
9	Kabupaten Luwu					
	Jumlah Usaha Mikro	27.550	28.667	29.130	29.484	29.484
	Jumlah seluruh UMKM	29.543	30.858	31.475	31.947	31.936
10	Kota Palopo					
	Jumlah Usaha Mikro	10.116	10.590	10.892	11.099	11.099
	Jumlah seluruh UMKM	12.851	13.409	13.811	14.087	14.076
11	Kabupaten Luwu Utara					
	Jumlah Usaha Mikro	19.160	20.049	20.403	20.673	20.673
	Jumlah seluruh UMKM	22.569	23.569	24.040	24.401	24.390
12	Kabupaten Luwu Timur					
	Jumlah Usaha Mikro	16.284	16.978	17.268	17.490	17.490
	Jumlah seluruh UMKM	18.532	19.350	19.737	20.033	20.022
13	Kabupaten Tana Toraja					
	Jumlah Usaha Mikro	18.402	13.036	13.358	13.524	13.524
	Jumlah seluruh UMKM	19.962	14.324	14.754	14.975	14.964
14	Kabupaten Toraja Utara					
	Jumlah Usaha Mikro	12.165	18.247	18.730	18.979	18.979
	Jumlah seluruh UMKM	14.323	21.485	22.130	22.461	22.461
15	Kabupaten Bone					
	Jumlah Usaha Mikro	72.511	75.689	78.739	80.213	80.213
	Jumlah seluruh UMKM	77.889	81.351	85.418	87.383	87.372
16	Kabupaten Sinjai					
	Jumlah Usaha Mikro	21.288	22.280	22.462	22.645	22.645
	Jumlah seluruh UMKM	23.205	24.237	24.479	24.725	24.714
17	Kabupaten Bulukumba					
	Jumlah Usaha Mikro	38.104	39.833	40.926	41.490	41.490
	Jumlah seluruh UMKM	41.090	42.897	44.184	44.847	44.836
18	Kabupaten Bantaeng					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah Usaha Mikro	20.257	21.158	21.493	21.749	21.749
	Jumlah seluruh UMKM	21.356	22.307	22.753	23.094	23.083
19	Kabupaten Selayar					
	Jumlah Usaha Mikro	13.498	14.117	14.355	14.537	14.537
	Jumlah seluruh UMKM	14.215	14.848	15.145	15.372	15.361
20	Kabupaten Jenepono					
	Jumlah Usaha Mikro	32.625	34.169	34.728	35.155	35.155
	Jumlah seluruh UMKM	35.675	37.264	38.009	38.579	35.155
21	Kabupaten Takalar					
	Jumlah Usaha Mikro	30.390	31.834	32.373	32.786	32.876
	Jumlah seluruh UMKM	34.420	35.948	36.667	37.217	37.217
22	Kabupaten Enrekang					
	Jumlah Usaha Mikro	15.371	16.012	16.278	16.481	16.481
	Jumlah seluruh UMKM	16.977	17.732	18.087	18.358	18.358
23	Kabupaten Gowa					
	Jumlah Usaha Mikro	64.878	68.060	69.807	70.707	70.750
	Jumlah seluruh UMKM	74.327	77.639	79.968	81.168	81.168
24	Kota Makassar					
	Jumlah Usaha Mikro	110.772	115.943	127.007	134.795	134.795
	Jumlah seluruh UMKM	141.420	147.508	162.259	172.643	172.643

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.171
Jumlah Usaha Kecil Dan Jumlah seluruh UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kabupaten Maros					
	Jumlah Usaha Kecil	3.524	3.634	3.743	3.926	4.075
	Jumlah seluruh UMKM	26.761	27.998	29.236	30.113	30.565
2	Kabupaten Pangkep					
	Jumlah Usaha Kecil	2.896	2.992	3.086	3.245	3.365
	Jumlah seluruh UMKM	28.623	29.951	31.279	31.904	32.383
3	Kabupaten Barru					
	Jumlah Usaha Kecil	1.686	1.715	1.745	1.833	1.901
	Jumlah seluruh UMKM	16.238	16.990	17.743	18.098	18.369
4	Kota Pare-Pare					
	Jumlah Usaha Kecil	2.192	2.285	2.378	2.489	2.565
	Jumlah seluruh UMKM	13.538	14.158	14.778	15.221	15.526
5	Kabupaten Pinrang					
	Jumlah Usaha Kecil	3.595	3.794	3.993	4.150	4.269
	Jumlah seluruh UMKM	28.619	29.946	31.274	31.899	32.378
6	Kabupaten Sidrap					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Jumlah Usaha Kecil	2.499	2.676	2.853	2.992	3.098
	Jumlah seluruh UMKM	25.355	26.535	27.715	28.269	28.963
7	Kabupaten Wajo					
	Jumlah Usaha Kecil	4.995	5.357	5.719	6.003	6.220
	Jumlah seluruh UMKM	51.924	54.337	56.750	57.885	58.753
8	Kabupaten Soppeng					
	Jumlah Usaha Kecil	2.678	2.853	3.027	3.164	3.268
	Jumlah seluruh UMKM	24.984	26.147	27.309	27.855	28.273
9	Kabupaten Luwu					
	Jumlah Usaha Kecil	1.734	1.932	2.129	2.283	2.401
	Jumlah seluruh UMKM	28.228	29.543	30.858	31.475	31.947
10	Kota Palopo					
	Jumlah Usaha Kecil	2.501	2.584	2.668	2.769	2.838
	Jumlah seluruh UMKM	12.293	12.851	13.409	13.811	14.087
11	Kabupaten Luwu Utara					
	Jumlah Usaha Kecil	3.186	3.295	3.405	3.523	3.613
	Jumlah seluruh UMKM	21.569	22.569	23.569	24.040	24.401
12	Kabupaten Luwu Timur					
	Jumlah Usaha Kecil	1.998	2.120	2.243	2.340	2.414
	Jumlah seluruh UMKM	17.714	18.532	19.350	19.737	20.033
13	Kabupaten Tana Toraja					
	Jumlah Usaha Kecil	1.752	1.486	1.219	1.326	1.382
	Jumlah seluruh UMKM	25.600	19.962	14.324	14.754	14.975
14	Kab. Toraja Utara					
	Jumlah Usaha Kecil	1.074	2.149	3.223	3.384	3.467
	Jumlah seluruh UMKM	7.162	14.323	21.485	22.130	22.461
15	Kabupaten Bone					
	Jumlah Usaha Kecil	4.936	5.218	5.501	6.518	7.009
	Jumlah seluruh UMKM	74.427	77.889	81.351	85.418	87.383
16	Kabupaten Sinjai					
	Jumlah Usaha Kecil	1.814	1.854	1.894	1.955	2.016
	Jumlah seluruh UMKM	22.137	23.205	24.237	24.479	24.725
17	Kabupaten Bulukumba					
	Jumlah Usaha Kecil	2.689	2.767	2.844	3.037	3.137
	Jumlah seluruh UMKM	39.282	41.090	42.897	44.184	44.847
18	Kabupaten Bantaeng					
	Jumlah Usaha Kecil	1.010	1.060	1.109	1.220	1.306
	Jumlah seluruh UMKM	20.405	21.356	22.307	22.753	23.094
19	Kabupaten Selayar					
	Jumlah Usaha Kecil	665	679	692	751	797
	Jumlah seluruh UMKM	13.582	14.215	14.848	15.145	15.372
20	Kabupaten Jeneponto					
	Jumlah Usaha Kecil	2.976	3.021	3.207	3.350	3.350

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Jumlah seluruh UMKM	34.086	35.675	37.264	38.009	38.579
21	Kabupaten Takalar					
	Jumlah Usaha Kecil	3.848	3.933	4.017	4.196	4.334
	Jumlah seluruh UMKM	32.891	34.420	35.948	36.667	37.217
22	Kabupaten Enrekang					
	Jumlah Usaha Kecil	1.434	1.548	1.661	1.749	1.817
	Jumlah seluruh UMKM	16.222	16.977	17.732	18.087	18.358
23	Kabupaten Gowa					
	Jumlah Usaha Kecil	9.145	9.274	9.402	9.985	10.284
	Jumlah seluruh UMKM	71.016	74.327	77.639	79.968	81.168
24	Kota Makassar					
	Jumlah Usaha Kecil	27.621	28.534	29.447	33.135	33.731
	Jumlah seluruh UMKM	153.333	141.420	147.508	162.259	172.643

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.3.1.9. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Peningkatan tersebut sebesar 500 persen. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan dan kerjasama terhadap investor.

Tabel 2.172
Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jumlah Investor/Proyek	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	PMA	6	34	53	42	88
2	PMDN	6	23	49	54	57
3	Total	12	57	102	96	145

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, maka nilai investasi pun semakin meningkat, hingga akhir tahun 2013 nilai investasi sebesar 5,268 trilyun dimana pada tahun 2009 nilai investasi sebesar 1,918 trilyun.

Tabel 2.173
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jumlah Investasi	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Persetujuan					
	Jumlah Proyek	33	14	20	26
	Nilai Investasi	5.553.150.057.462	4.073.669.821.053	9.683.212.201.289	21.604.651.396.034	10.489.958.620.358
2.	Realisasi					
	Jumlah	12	57	102	96	145

No	Jumlah Investasi	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Proyek					
	Nilai Investasi	1.918.263.711.520	7.630.256.431.280	4.881.895.243.368	8.144.168.200.000	5.268.483.537.000

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Meningkatnya investor yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tentunya akan berdampak juga kepada penyediaan Lapangan Kerja, dari tahun 2009 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 91 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 301.

Tabel 2.174
Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Tenaga Kerja PMA/PMDN	1.096	5.211	22.025	82.879	43.622
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	12	57	102	96	145
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	91	91	216	863	301

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Dari tabel data sebahagian besar perusahaan pada tahun 2012 sudah melaksanakan IUT (Izin Usaha Tetap) pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 tersebut investasi di hitung berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Tabel 2.175
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

Rumus	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013
$\frac{\text{Realisasi PMDN Thn 2013} - \text{Realisasi PMDN Thn 2012}}{\text{Rp. 2.318.829.900.000}} \times 100\%$ <p>Realisasi PMDN Thn 2012 Rp. 2.318.829.900.000</p>	24,1%	-41,83%	127%

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

2.3.1.10. Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Tabel 2.176
Seni & Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Budaya				
		Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah Benda Situs dan Kawasan cagar budaya di daerah	Jumlah Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	% Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan
1	2	3	4	6	7	8 = 7/6*100%
a.	Kota					
1	Makassar	6	2	188	3	1,60
2	Pare-Pare	1	1	23	0	0,00
3	Palopo	1	1	3	1	33,33
	Jumlah (Kota)	8	4	214	4	1,87
b.	Kabupaten/Kota					
1	Maros	1	0	75	0	0,00
2	Pangkep	1	0	75	0	0,00
3	Baru	1	0	27	1	3,70
4	Sidrap	1	0	12	0	0,00
5	Pinrang	1	0	11	0	0,00
6	Soppeng	1	0	27	0	0,00
7	Bone	2	0	22	1	4,55
8	Wajo	1	0	25	0	0,00
9	Enrekang	1	0	21	0	0,00
10	Tana Toraja	1	0	11	0	0,00
11	Toraja Utara	1	0	19	3	15,79
12	Luwu	2	0	8	0	0,00
13	Luwu Utara	1	0	0	0	0,00
14	Luwu Timur	1	0	8	0	0,00
15	Gowa	5	1	25	0	0,00
16	Takalar	1	1	27	0	0,00
17	Jeneponto	1	1	23	1	4,35
18	Bantaeng	1	1	12	0	0,00
19	Sinjai	2		13	1	7,69
20	Bulikumba	1		43	1	2,33
21	Selayar	2	2	21	0	0,00
	Jumlah (Kabupaten)	29	6	505	8	1,58
	Jumlah se Provinsi (Kabupaten + Kota)	37	10	719	12	1,67

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013

2.3.1.11. Kepemudaan Dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dalam kurun waktu lima tahun rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12 persen tiap tahunnya.

Tabel 2.177
Jumlah Organisasi Pemuda Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

NO	KABUPATEN / KOTA	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Makassar	15	15	15	15	195
2	Kabupaten Gowa	32	32	32	32	36
3	Kab. Takalar	16	16	17	17	17
4	Kab. Jeneponto	43	43	43	43	43
5	Kab. Bantaeng	0	0	22	50	50
6	Kab. Bulukumba	11	11	11	11	11
7	Kab. Selayar	12	12	12	12	24
8	Kab. Sinjai	12	12	19	50	19
9	Kab. Bone	37	37	81	114	114
10	Kab. Soppeng	23	23	23	10	23
11	Kab. Maros	52	52	52	52	4
12	Kab. Pangkep	24	24	24	24	46
13	Kab. Barru	30	30	29	29	29
14	Kota Pare - Pare	11	11	11	11	10
15	Kab. Pinrang	20	20	20	20	4
16	Kab. Sidrap	28	28	28	28	28
17	Kab. Wajo	23	23	69	22	22
18	Kota Palopo	24	24	22	22	38
19	Kab. Luwu	6	6	6	6	3
20	Kab. Luwu Utara	25	25	27	27	26
21	Kab. Luwu Timur	17	17	16	16	18
22	Kab. Enrekang	9	9	9	9	10
23	Kab. Tana Toraja	15	15	14	14	14
24	Kab. Toraja Utara	17	17	17	17	17
	JUMLAH	502	502	619	651	836

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel Tahun 2014

b. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2009 jumlah organisasi olahraga sebesar 1.311, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.532 tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1.126.

Tabel 2.178
Jumlah Klub Olahraga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Makassar	71	71	71	71	12
2.	Kab. Gowa	103	103	103	103	103
3.	Kab. Takalar	12	11	10	10	12
4.	Kab. Jeneponto	51	50	51	51	12
5.	Kab. Bantaeng	46	33	11	11	12

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
6.	Kab. Bulukumba	8	8	8	8	12
7.	Kab. Selayar	192	192	192	192	192
8.	Kab. Sinjai	38	38	125	125	15
9.	Kab. Bone	62	62	12	39	44
10.	Kab. Soppeng	6	6	6	6	6
11.	Kab. Maros	10	10	10	10	20
12.	Kab. Pangkep	10	10	10	10	10
13.	Kab. Barru	6	6	51	51	8
14.	Kota Pare-Pare	47	47	59	59	47
15.	Kab. Pinrang	50	50	50	50	14
16.	Kab. Sidrap	168	168	200	200	200
17.	Kab. Wajo	49	49	36	31	38
18.	Kota Palopo	60	60	60	60	38
19.	Kab. Luwu	10	10	15	15	15
20.	Kab. Luwu Utara	91	91	91	91	91
21.	Kab. Luwu Timur	199	199	199	199	199
22.	Kab. Enrekang	9	9	11	11	13
23.	Kab. Tana Toraja	5	5	5	36	5
24.	Kab. Toraja Utara	8	8	8	93	8
	Jumlah	1.311	1.251	1.394	1.532	1.126

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel Tahun 2014

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 kegiatan kepemudaan sebanyak 105 dan meningkat menjadi 175 pada tahun 2013.

Tabel 2.179
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Makassar	7	7	7	7	41
2.	Kab. Gowa	3	3	3	3	5
3.	Kab. Takalar	6	6	6	6	5
4.	Kab. Jeneponto	4	4	4	4	3
5.	Kab. Bantaeng	3	3	3	2	3
6.	Kab. Bulukumba	3	3	3	3	2
7.	Kab. Selayar	12	12	12	11	5
8.	Kab. Sinjai	4	4	4	1	8
9.	Kab. Bone	3	3	3	16	32
10.	Kab. Soppeng	1	1	1	1	2
11.	Kab. Maros	4	4	4	16	5
12.	Kab. Pangkep	5	5	5	5	5
13.	Kab. Barru	2	2	2	2	2

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
14	Kota Pare-Pare	5	5	5	12	2
15	Kab. Pinrang	5	5	5	5	1
16	Kab. Sidrap	4	4	4	11	2
17	Kab. Wajo	9	9	9	11	9
18	Kota Palopo	6	6	6	8	5
19	Kab. Luwu	2	2	2	5	1
20	Kab. Luwu Utara	1	1	1	1	3
21	Kab. Luwu Timur	6	6	6	6	2
22	Kab. Enrekang	4	4	4	2	2
23	Kab. Tana Toraja	3	3	3	3	13
24	Kab. Toraja Utara	3	3	3	3	17
	Jumlah	105	105	105	144	175

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 kegiatan kepemudaan sebanyak 106 kegiatan dan meningkat menjadi 158 kegiatan pada tahun 2013.

Tabel 2.180

Jumlah Kegiatan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Makassar	7	7	7	7	17
2.	Kab. Gowa	1	1	1	1	5
3.	Kab. Takalar	1	1	1	1	4
4.	Kab. Jenepono	1	1	1	1	3
5.	Kab. Bantaeng	2	2	2	2	6
6.	Kab. Bulukumba	2	2	2	2	3
7.	Kab. Selayar	9	9	9	9	8
8.	Kab. Sinjai	2	2	2	2	1
9.	Kab. Bone	1	1	10	10	26
10	Kab. Soppeng	2	2	2	2	6
11	Kab. Maros	3	3	9	9	7
12	Kab. Pangkep	3	3	3	3	3
13	Kab. Barru	2	2	2	2	3
14	Kota Pare-Pare	5	5	12	12	2
15	Kab. Pinrang	5	5	11	11	1
16	Kab. Sidrap	7	7	9	9	2
17	Kab. Wajo	5	5	7	7	6
18	Kota Palopo	8	8	8	8	7
19	Kab. Luwu	3	3	6	6	2
20	Kab. Luwu Utara	1	1	3	3	8
21	Kab. Luwu Timur	1	1	1	1	3
22	Kab. Enrekang	5	5	5	5	1
23	Kab. Tana Toraja	15	15	15	15	23
24	Kab. Toraja Utara	15	15	15	15	11

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah	106	106	143	143	158

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

e. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja(Selain Milik Swasta)

Jumlah gelanggang olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah gelanggang olahraga sebanyak 41 dan meningkat menjadi 43 gelanggang olahraga pada tahun 2012 tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 35 gelanggang.

Tabel 2.181

Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah Gelanggang	41	42	42	43	35

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

f. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2009 jumlah lapangan olahraga sebanyak 2.494 dan turun menjadi 2.480 lapangan olahraga pada tahun 2013.

Tabel 2.182

Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Makassar	254	256	256	256	256
2	Kab. Gowa	8	8	8	8	8
3	Kab. Takalar	7	7	7	7	7
4	Kab. Jeneponto	49	32	32	32	32
5	Kab. Bantaeng	43	4	43	43	43
6	Kab. Bulukumba	4	4	4	4	4
7	Kab. Selayar	4	4	4	4	4
8	Kab. Sinjai	16	31	17	32	32
9	Kab. Bone	226	226	226	226	226
10	Kab. Soppeng	28	29	28	29	29
11	Kab. Maros	23	12	12	13	13
12	Kab. Pangkep	30	30	30	120	120
13	Kab. Barru	11	11	11	11	11
14	Kota Pare-Pare	155	92	82	82	82
15	Kab. Pinrang	5	5	5	5	5
16	Kab. Sidrap	273	273	273	273	273
17	Kab. Wajo	566	571	571	571	571
18	Kota Palopo	64	68	68	68	68
19	Kab. Luwu	56	56	56	58	58
20	Kab. Luwu Utara	55	72	6	72	72
21	Kab. Luwu Timur	159	9	9	9	9

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
22	Kab. Enrekang	248	386	386	386	386
23	Kab. Tana Toraja	90	103	103	103	103
24	Kab. Toraja Utara	120	68	68	68	68
	Jumlah	2.494	2.357	2.305	2.480	2.480

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

2.3.1.12. Ketahanan Pangan

a. Regulasi Ketahanan Pangan

Pada tahun 2009-2013 telah dikeluarkan 1 Perda dan 4 Pergub terkait dengan regulasi pada ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.183
Regulasi Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	1	1	2	1	1

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2014

b. Ketersediaan Pangan Utama

Dari data tabel memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (Beras) di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 masih tersedia (surplus) 2-3 kali lipat dari kebutuhan konsumsi penduduk Sulawesi Selatan.

Tabel 2.184
Ketersediaan Pangan Utama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rata rata konsumsi beras	Kg/Kap /Thn	114,4	111,9	109,7	106,4	104,5
2.	Konsumsi beras penduduk	Kg/Thn	892.894.746	884.963.276	881.414.927	863.503.883	855.878.199
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	258,63	274,70	279,49	293,76	352,67

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2013

Tabel 2.185
Ketersediaan Pangan Utama Menurut Kab/Kota (Beras)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) / Tahun (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Selayar	5.165	9.703	11.612	12.471	14.952
2	Bulukumba	106.478	111.860	128.769	126.172	124.846

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) / Tahun (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
3	Bantaeng	460.646	40.627	49.322	47.120	53.551
4	Jeneponto	47.576	63.852	71.209	66.775	71.662
5	Takalar	68.486	75.851	67.625	70.378	68.760
6	Gowa	139.982	150.550	124.695	152.946	178.120
7	Sinjai	56.638	72.821	64.149	65.168	67.491
8	Maros	122.668	140.816	145.545	137.881	140.243
9	Pangkep	72.313	73.553	67.268	77.726	81.306
10	Barru	54.757	56.344	51.787	56.469	61.249
11	Bone	335.646	387.177	361.946	409.206	361.363
12	Soppeng	160.187	142.127	146.436	151.826	154.690
13	Wajo	252.521	237.596	338.424	397.361	366.888
14	Sidrap	216.035	183.910	240.169	257.691	259.434
15	Pinrang	270.230	280.592	252.542	299.301	296.165
16	Enrekang	33.284	30.402	29.897	26.515	35.573
17	Luwu	182.735	147.023	110.395	138.147	172.294
18	Tana Toraja	85.169	44.787	50.005	51.848	37.927
19	Luwu Utara	74.979	78.706	84.094	89.031	104.067
20	Makassar	7.738	7.576	6.651	8.873	7.848
21	Pare - Pare	2.491	2.384	2.273	2.777	3.433
22	Palopo	13.382	12.243	11.938	14.693	15.944
23	Luwu Timur	81.870	66.060	80.091	79.568	105.393
24	Toraja Utara	-	46.891	39.767	72.962	45.285
	Jumlah (Sulsel	2.430.735	2.463.450	2.536.607	2.812.904	2.828.484

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2014

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dari data tabel memperlihatkan bahwa rata-rata peningkatan jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama periode tahun 2008-2012 sebesar 1,38 persen tiap tahunnya.

Tabel 2.186
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM
1	Selayar	74	148	2,00	74	148	2,00	74	222	3,00	74	222	3,00	88	256	2,91
2	Bulukumba	126	252	2,00	126	252	2,00	126	378	3,00	126	378	3,00	136	398	2,93
3	Bantaeng	67	201	3,00	67	201	3,00	67	201	3,00	67	201	3,00	67	201	3,00
4	Jeneponto	113	226	2,00	113	226	2,00	113	339	3,00	113	339	3,00	113	339	3,00
5	Takalar	77	154	2,00	83	166	2,00	83	249	3,00	83	249	3,00	100	283	2,83
6	Gowa	167	501	3,00	167	501	3,00	167	501	3,00	167	501	3,00	167	501	3,00
7	Sinjai	80	240	3,00	80	240	3,00	80	240	3,00	80	240	3,00	80	240	3,00
8	Bone	372	744	2,00	372	744	2,00	372	1116	3,00	372	1116	3,00	372	1116	3,00
9	Maros	103	206	2,00	103	206	2,00	103	309	3,00	103	309	3,00	103	309	3,00
10	Pangkep	102	204	2,00	102	204	2,00	102	306	3,00	102	306	3,00	103	308	2,99
11	Barru	54	108	2,00	54	108	2,00	54	162	3,00	54	162	3,00	55	164	2,98
12	Soppeng	70	140	2,00	70	140	2,00	70	210	3,00	70	210	3,00	70	210	3,00
13	Wajo	176	352	2,00	176	352	2,00	176	528	3,00	176	528	3,00	176	528	3,00
14	Sidrap	105	210	2,00	106	212	2,00	106	318	3,00	106	318	3,00	106	318	3,00
15	Pinrang	104	208	2,00	104	208	2,00	104	312	3,00	104	312	3,00	108	320	2,96
16	Enrekang	112	224	2,00	129	258	2,00	129	387	3,00	129	387	3,00	129	387	3,00
17	Luwu	192	384	2,00	227	454	2,00	227	681	3,00	227	681	3,00	227	681	3,00
18	Tator	310	620	2,00	159	318	2,00	159	477	3,00	160	478	2,99	160	478	2,99
19	Luwu Utara	171	342	2,00	171	342	2,00	171	513	3,00	171	513	3,00	173	517	2,99
20	Luwu Timur	99	198	2,00	99	198	2,00	99	297	3,00	107	305	2,85	127	361	2,84

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM
21	Toraja Utara	0	0	0,00	151	302	2,00	151	453	3,00	151	453	3,00	151	453	3,00
22	Makassar	143	429	3,00	143	429	3,00	143	572	4,00	143	572	4,00	143	572	4,00
23	Pare-Pare	22	66	3,00	22	66	3,00	22	88	4,00	22	88	4,00	22	88	4,00
24	Palopo	48	144	3,00	48	144	3,00	48	192	4,00	48	192	4,00	48	192	4,00
	JUMLAH	2.887	6301	2,18	2.946	6419	2,18	2.946	9051	3,07	2.955	9060	3,07	3.024	9220	3,05

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 sebesar 3,24 dan pada tahun 2012 menjadi 1,48.

Tabel 2.187
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9	12	13	14 = 13/12	15	16	17 = 16/15
1	BANTAENG	2.177	4.865	2,23	2.180	4.871	2,23	2.177	4.596	2,11	2.183	14.912	6,83	2.260	13.473	5,96
2	BULUKUMBA	3.121	7.147	2,29	3.434	6.880	2,00	3.470	6.339	1,83	7.317	12.152	1,66	3.236	3.121	0,96
3	BARRU	876	4.141	4,73	359	2.814	7,84	983	6.756	6,87	901	5.111	5,67	901	1.950	2,16
4	BONE	8.704	24.909	2,86	7.739	38.787	5,01	7.783	49.982	6,42	6.691	24.158	3,61	6.691	8.441	1,26
5	ENREKANG	1.691	7.276	4,30	1.698	7.733	4,55	816	7.475	9,16	1.043	6.798	6,52	990	2.289	2,31
6	GOWA	5.911	19.823	3,35	29.758	22.281	0,75	5.808	16.880	2,91	4.755	15.289	3,22	6.071	6.462	1,06

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
7	JENEPONTO	2.666	24.235	9,09	2.806	17.787	6,34	3.591	14.993	4,18	2.981	16.354	5,49	2.586	5.735	2,22
8	LUWU	6.730	12.385	1,84	6.730	11.994	1,78	6.730	12.458	1,85	4.799	6.813	1,42	3.338	4.387	1,31
9	LUWU UTARA	1.487	7.194	4,84	1.502	7.111	4,73	1.591	6.260	3,93	1.145	4.817	4,21	1.454	2.438	1,68
10	LUWU TIMUR	1.825	5.635	3,09	530	5.471	10,32	2.574	6.678	2,59	3.665	5.636	1,54	3.665	3.069	0,84
11	MAKASSAR	5.737	14.302	2,49	5.849	14.544	2,49	5.804	14.666	2,53	5.808	13.965	2,40	5.960	6.914	1,16
12	MAROS	2.132	5.301	2,49	2.132	5.275	2,47	2.091	5.138	2,46	1.683	4.214	2,50	1.663	2.314	1,39
13	PALOPO	865	5.918	6,84	1.129	5.011	4,44	1.090	4.526	4,15	3.322	8.734	2,63	1.007	5.897	5,86
14	PARE - PARE	514	2.468	4,80	453	1.707	3,77	419	1.736	4,14	419	1.739	4,15	419	1.585	3,78
15	PANGKEP	2.032	4.582	2,25	2.082	4.946	2,38	2.120	4.600	2,17	1.603	4.786	2,99	1.669	1.318	0,79
16	PINRANG	2.215	5.590	2,52	2.297	8.874	3,86	2.152	9.326	4,33	2.344	8.098	3,45	2.344	4.160	1,77
17	SELAYAR	787	3.691	4,69	1.043	3.680	3,53	950	3.651	3,84	600	4.191	6,99	600	1.992	3,32
18	SINJAI	2.442	5.629	2,31	2.345	6.155	2,62	2.345	5.909	2,52	5.352	4.615	0,86	5.352	3.268	0,61
19	SIDRAP	1.935	4.498	2,32	2.040	4.962	2,43	2.040	5.042	2,47	1.806	6.008	3,33	1.806	3.716	2,06
20	SOPPENG	2.068	8.683	4,20	939	4.640	4,94	1.874	7.737	4,13	2.110	5.197	2,46	1.926	2.383	1,24
21	TANA TORAJA	4.383	15.478	3,53	4.083	15.477	3,79	4.083	15.460	3,79	4.083	9.566	2,34	4.083	2.869	0,70
22	TORAJA UTARA	-	-	-	1.995	9.894	4,96	1.994	10.025	5,03	1.995	7.645	3,83	1.966	2.707	1,38
23	TAKALAR	1.714	2.878	1,68	2.031	3.448	1,70	2.122	4.482	2,11	1.947	4.676	2,40	1.631	2.015	1,24
24	WAJO	3.450	15.211	4,41	3.454	14.918	4,32	3.419	11.174	3,27	2.798	10.121	3,62	2.804	3.043	1,09

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
	J U M L A H	65.462	211.839	3,24	88.608	229.260	2,59	68.026	235.889	3,47	71.350	205.595	2,88	64.422	95.562	1,48

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

c. Jumlah LPM Berprestasi

persentase jumlah LPM Berprestasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak mengalami perubahan yang berarti, selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata persentase LPM berprestasi hanya tumbuh 0,1 persen.

Tabel 2.188
Jumlah LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)
1	Selayar	74	12	16,22	74	12	16,22	74	12	16,22	74	12	16,22	88	12	13,64
2	Bulukumba	126	12	9,52	126	12	9,52	126	12	9,52	126	12	9,52	136	12	8,82
3	Bantaeng	67	12	17,91	67	12	17,91	67	12	17,91	67	12	17,91	67	12	17,91
4	Jeneponto	113	12	10,62	113	12	10,62	113	12	10,62	113	12	10,62	113	12	10,62
5	Takalar	77	12	15,58	83	12	14,46	83	12	14,46	83	12	14,46	100	12	12,00
6	Gowa	167	12	7,19	167	12	7,19	167	12	7,19	167	12	7,19	167	12	7,19
7	Sinjai	80	12	15,00	80	12	15,00	80	12	15,00	80	12	15,00	80	12	15,00

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)
8	Bone	372	12	3,23	372	12	3,23	372	12	3,23	372	12	3,23	372	12	3,23
9	Maros	103	12	11,65	103	12	11,65	103	12	11,65	103	12	11,65	103	12	11,65
10	Pangkep	102	12	11,76	102	12	11,76	102	12	11,76	102	12	11,76	103	12	11,65
11	Barru	54	12	22,22	54	12	22,22	54	12	22,22	54	12	22,22	55	12	21,82
12	Soppeng	70	12	17,14	70	12	17,14	70	12	17,14	70	12	17,14	70	12	17,14
13	Wajo	176	12	6,82	176	12	6,82	176	12	6,82	176	12	6,82	176	12	6,82
14	Sidrap	105	12	11,43	106	12	11,32	106	12	11,32	106	12	11,32	106	12	11,32
15	Pinrang	104	12	11,54	104	12	11,54	104	12	11,54	104	12	11,54	108	12	11,11
16	Enrekang	112	12	10,71	129	12	9,30	129	12	9,30	129	12	9,30	129	12	9,30
17	Luwu	192	12	6,25	227	12	5,29	227	12	5,29	227	12	5,29	227	12	5,29
18	Tator	310	12	3,87	159	12	7,55	159	12	7,55	160	12	7,50	160	12	7,50
19	Luwu Utara	171	12	7,02	171	12	7,02	171	12	7,02	171	12	7,02	173	12	6,94
20	Luwu Timur	99	12	12,12	99	12	12,12	99	12	12,12	107	12	11,21	127	12	9,45
21	Toraja Utara	0	0	0,00	151	12	7,95	151	12	7,95	151	12	7,95	151	12	7,95
22	Makassar	143	12	8,39	143	12	8,39	143	12	8,39	143	12	8,39	143	12	8,39
23	Pare-Pare	22	12	54,55	22	12	54,55	22	12	54,55	22	12	54,55	22	12	54,55
24	Palopo	48	12	25,00	48	12	25,00	48	12	25,00	48	12	25,00	48	12	25,00
	JUMLAH	2.887	276	9,56	2.946	288	9,78	2.946	288	9,78	2.955	288	9,75	3.024	288	9,52

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

d. PKK Aktif

Persentase Jumlah PKK aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 97 persen tiap tahunnya, hal ini tentunya suatu prestasi yang membanggakan dikarenakan hampir semua jumlah PKK yang ada merupakan PKK yang aktif.

Tabel 2.189
PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)
1	2	3	4	$\frac{5}{4/3 \times 100\%}$	6	7	$\frac{8}{7/6 \times 100\%}$	9	10	$\frac{11}{10/9 \times 100\%}$	12	13	$\frac{14}{13/12 \times 100\%}$	15	16	$\frac{17}{16/15 \times 100\%}$
1	BANTAENG	2.177	2.177	100,00	2.180	2.180	100,00	2.177	2.177	100,00	2.183	2.183	100,00	2.260	2.260	100,00
2	BULUKUMBA	3.121	3.059	98,00	3.434	3.365	98,00	3.470	3.401	98,00	7.317	7.171	98,00	3.236	3.203	99,00
3	BARRU	876	867	99,00	359	355	99,00	983	973	99,00	901	892	99,00	901	892	99,00
4	BONE	8.704	8.530	98,00	7.739	7.584	98,00	7.783	7.627	98,00	6.691	6.557	98,00	6.691	6.557	98,00
5	ENREKANG	1.691	1.657	98,00	1.698	1.664	98,00	816	800	98,00	1.043	1.022	98,00	990	980	99,03
6	GOWA	5.911	5.793	98,00	29.758	29.163	98,00	5.808	5.692	98,00	4.755	4.660	98,00	6.071	5.950	98,00
7	JENEPONTO	2.666	2.133	80,00	2.806	2.245	80,00	3.591	2.909	81,00	2.981	2.444	82,00	2.586	2.146	83,00
8	Luwu	6.730	6.326	94,00	6.730	6.326	94,00	6.730	6.394	95,00	4.799	4.607	96,00	3.338	3.204	96,00
9	Luwu Utara	1.487	1.457	98,00	1.502	1.472	98,00	1.591	1.559	98,00	1.145	1.122	98,00	1.454	1.425	98,00
10	Luwu Timur	1.825	1.789	98,00	530	519	98,00	2.574	2.523	98,00	3.665	3.592	98,00	3.665	3.592	98,00
11	MAKASSAR	5.737	5.622	98,00	5.849	5.732	98,00	5.804	5.688	98,00	5.808	5.750	99,00	5.960	5.900	99,00
12	MAROS	2.132	2.132	100,00	2.132	2.132	100,00	2.091	2.091	100,00	1.683	1.683	100,00	1.663	1.663	100,00
13	PALOPO	865	848	98,00	1.129	1.106	98,00	1.090	1.068	98,00	3.322	3.256	98,00	1.007	987	98,00
14	PARE - PARE	514	504	98,00	453	448	99,00	419	419	100,00	419	411	98,00	419	411	98,00
15	PANGKEP	2.032	1.991	98,00	2.082	2.040	98,00	2.120	2.078	98,00	1.603	1.571	98,00	1.669	1.636	98,00
16	PINRANG	2.215	1.750	79,00	2.297	1.838	80,00	2.152	1.722	80,00	2.344	1.899	81,00	2.344	1.899	81,00
17	SELAYAR	787	771	98,00	1.043	1.022	98,00	950	931	98,00	600	588	98,00	600	588	98,00

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)
18	SINJAI	2.442	2.393	98,00	2.345	2.298	98,00	2.345	2.298	98,00	5.352	5.245	98,00	5.352	5.245	98,00
19	SIDRAP	1.935	1.742	90,00	2.040	1.836	90,00	2.040	1.856	91,00	1.806	1.662	92,00	1.806	1.680	93,00
20	SOPPENG	2.068	2.027	98,00	939	920	98,00	1.874	1.837	98,00	2.110	2.068	98,00	1.926	1.887	98,00
21	TANA TORAJA	4.383	4.383	100,00	4.083	4.083	100,00	4.083	4.083	100,00	4.083	4.083	100,00	4.083	4.083	100,00
22	TORAJA UTARA	-	-	0,00	1.995	1.955	98,00	1.994	1.954	98,00	1.995	1.955	98,00	1.966	1.927	98,00
23	TAKALAR	1.714	1.680	98,00	2.031	1.990	98,00	2.122	2.080	98,00	1.947	1.908	98,00	1.631	1.598	98,00
24	WAJO	3.450	3.381	98,00	3.454	3.385	98,00	3.419	3.351	98,00	2.798	2.742	98,00	2.804	2.748	98,00
	J U M L A H	65.462	69.146	94,67	88.608	85.661	96,67	68.026	65.508	96,30	71.350	69.069	96,80	64.422	62.792	97,47

Sumber: BPPMDK Prov. Sul-Sel 2013

e. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan tiap tahunnya, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan cukup pesat, dimana pada tahun 2008 sebesar 4,41 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 36,31 persen.

Tabel 2.190
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Kabupaten	Nilai Swadaya Masyarakat				
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
1	Selayar	4.77%	2.28%	1.53%	1.32%	2.72%
2	Bulukumba	0.37%	0.35%	0.15%	1.42%	1.26%
3	Bantaeng	0.00%	0.00%	6.91%	3.32%	7.74%
4	Jeneponto	7.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Takalar	0.48%	0.11%	5.10%	0.00%	0.98%
6	Gowa	1.56%	1.97%	1.22%	0.17%	0.07%
7	Sinjai	0.44%	1.66%	2.77%	3.01%	0.69%
8	Maros	6.32%	8.75%	6.30%	6.16%	5.85%
9	Pangkajene Kepulauan	9.38%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%
10	Barru	3.76%	10.51%	6.42%	5.36%	6.06%
11	Bone	10.93%	0.35%	0.54%	1.17%	0.13%
12	Soppeng	0.17%	1.59%	0.21%	1.57%	0.44%
13	Wajo	1.45%	4.51%	2.08%	2.01%	1.88%
14	Sidenreng Rappang	4.38%	3.78%	2.88%	2.07%	1.30%
15	Pinrang	6.53%	17.60%	4.08%	2.50%	2.02%
16	Enrekang	13.70%	12.86%	26.62%	17.76%	12.08%
17	Luwu	2.64%	13.22%	5.35%	9.65%	5.41%
18	Tana Toraja	10.69%	0.00%	1.87%	9.13%	11.85%
19	Luwu Utara	10.58%	9.14%	4.24%	2.11%	3.21%
20	Luwu Timur	4.41%	11.32%	21.72%	31.22%	36.31%

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

f. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.191
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Kabupaten	Nilai Swadaya Masyarakat				
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
1	Selayar	4.77%	2.24%	1.52%	1.31%	2.69%
2	Bulukumba	0.37%	0.34%	0.15%	1.41%	1.25%

No	Kabupaten	Nilai Swadaya Masyarakat				
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
3	Bantaeng	0.00%	0.00%	6.89%	3.29%	7.65%
4	Jeneponto	7.46%	0.43%	0.36%	0.45%	0.60%
5	Takalar	0.48%	0.10%	5.08%	0.32%	0.96%
6	Gowa	1.56%	1.94%	1.22%	0.17%	0.07%
7	Sinjai	0.44%	1.63%	2.76%	2.99%	0.68%
8	Maros	6.32%	8.61%	6.27%	6.11%	5.78%
9	Pangkajene Kepulauan	9.38%	0.54%	0.00%	0.03%	0.60%
10	Barru	3.76%	10.34%	6.40%	5.32%	5.99%
11	Bone	10.93%	0.35%	0.54%	1.16%	0.12%
12	Soppeng	0.17%	1.57%	0.21%	1.56%	0.44%
13	Wajo	1.45%	4.44%	2.07%	1.99%	1.86%
14	Sidenreng Rappang	4.38%	3.72%	2.87%	2.05%	1.28%
15	Pinrang	6.53%	17.32%	4.06%	2.48%	1.99%
16	Enrekang	13.70%	12.66%	26.52%	17.63%	11.94%
17	Luwu	2.64%	13.01%	5.34%	9.58%	5.34%
18	Tana Toraja	10.69%	0.61%	1.87%	9.06%	11.71%
19	Luwu Utara	10.58%	9.00%	4.22%	2.10%	3.17%
20	Luwu Timur	4.41%	11.14%	21.65%	30.98%	35.88%

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

2.3.1.14. Kearsipan

a. Tabel Peningkatan Sdm Pengelola Kearsipan

Tabel 2.192
Pengelolaan Arsip & Peningkatan SDM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	32	46	54	58,5	64,6
b.	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	500	700	1.000	1.500	2.340

Sumber: Sekretariat KPID Prov. Sul-Sel 2013

2.3.1.15. Komunikasi Dan Informatika

a. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Tabel 2.193
Jumlah Lembaga Penyiaran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
a.	Televisi	10	17	23	13	4

No	Bidang Urusan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
b.	Radio Swasta	7	1	1	9	4
c.	Radio Publik	-	2	2	3	2
d.	Radio Komunitas	1	3	1	4	7
	Jumlah	18	24	30	31	17

Sumber: Sekretariat KPID Prov. Sul-Sel 2013

2.3.1.16. Perpustakaan

Tabel 2.194

**Jumlah Perpustakaan, Pengunjung & Koleksi Buku Perpustakaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jml Perpustakaan	746	910	1.393	1.595	1.728
b.	Jml Pengunjung Perpustakaan	236.913	236.913	249.716	308.305	310.953
c.	Jml Koleksi Buku	219.052	219.052	230.375	234.166	236.672

Sumber Data : Badan Arsip & Perpustakaan Prov. Sul-Sel 2013

2.3.3. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah di Perdakan sangat diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan, ketersediaan dokumen tersebut berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPDP.

Tabel 2.195

**Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD
(Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028					
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028					
3	Tersedianya Dokumen RKPDP	Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2007	Peraturan Gubernur No. 28 tahun 2008	Peraturan Gubernur No. 104 tahun 2009	Peraturan Gubernur No. 43 tahun 2010	Peraturan Gubernur No. 29 tahun 2011	Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012
4	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	55	55	55	55	55	56

Sumber : Bappeda Sulawesi Selatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan diarahkan pada urusan pertanian, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.3.2.1. Pertanian

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Data tabel di bawah menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi dan jagung pada tahun 2010 karena pada tahun 2010 terjadi perubahan iklim dimana hampir sepanjang tahun terjadi hujan.

Tabel 2.196
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Padi	Kw/Ha	50,16	49,44	50,74	50,98	51,22
b.	Jagung	Kw/Ha	46,58	44,27	47,80	46,58	45,62
c.	Kedelai	Kw/Ha	16,00	15,11	15,73	15,00	14,77

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sul-Sel 2014

b. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

Tabel 2.197
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Sektor Pertanian	%	28,02	25,83	25,32	24,79	23,90
b.	Sektor Perkebunan	%	6,05	5,35	5,05	4,48	

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sul-Sel 2013

c. Produksi Daging (Kg) dari berbagai komoditas ternak di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Peningkatan produksi daging terjadi pada semua komoditas ternak di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan peternakan dalam kurun 5 tahun terakhir (2009-2013). Produksi daging sapi dan ayam ras pedaging yang merupakan sumber utama dalam penyediaan daging merupakan komoditas paling konsisten, yakni tanpa pernah mengalami penurunan produksi dengan rata-rata masing-masing 11,49% dan 13,64%, ini merupakan dampak dari Program Sejuta Sapi Tahun 2007-2013. Komoditas lain umumnya sempat mengalami penurunan produksi pada kurun waktu tahun 2009-2011, namun demikian secara keseluruhan pertumbuhan produksi dicapai pada semua komoditas, dengan pertumbuhan tertinggi pada komoditas daging kambing dan daging ayam petelur yang masing-masing mencapai 21,26% dan 19,00%. pertumbuhan terendah dicapai pada produksi daging itik dan kerbau yang hanya 4,29% dan 4,74%. Konsistensi dan laju pertumbuhan yang rendah pada komoditas kerbau dan domba terjadi karena minat peternak dan produktifitas reproduksi yang rendah. Sementara pertumbuhan produksi daging unggas (ayam dan itik) yang tinggi didorong oleh siklus produksi yang pendek dan penguasaan teknologi budidaya yang baik.

Tabel 1.198
Produksi Daging (Kg) dari Berbagai Komoditas Ternak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jenis Ternak	Tahun					R2 (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Sapi	8.215.598	9.055.961	11.025.604	12.724.604	15.715.945	17,7
2	Kerbau	2.169.070	1.546.125	1.825.745	2.689.851	3.495.332	16,9
3	Kuda	420.250	805.375	868.375	1.108.305	810.975	25,1
4	Kambing	583.347	885.785	1.631.941	1.675.451	1.590.559	33,4
5	Domba	1.286	1.399	935	1.460	1.126	4,5
6	Babi	1.699.042	1.863.357	2.541.143	2.397.305	3.938.117	26,2
7	Ayam Buras	5.127.604	5.373.582	5.483.403	6.261.320	23.553.115	74,3
8	Ayam Ras Petelur	2.999.102	1.371.055	1.440.884	1.823.570	6.082.872	52,7
9	Ayam Ras Pedaging	10.709.824	10.692.339	11.594.378	11.072.667	24.378.434	31,0
10	Itik	844.807	765.238	668.170	742.176	1.954.521	38,1

Sumber ; Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.2.2. Kehutanan

a. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 1.183.017 Ha tahun 2008 menjadi 615.056 Ha tahun 2012. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.199
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	17.920,00	32.831,00	68.398,33	147.389,28	115.628,91
b.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	1.183.007	682.784	669.652	642.293	615.065
	Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis	%	1,51	4,81	10,21	22,94	18,80

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

Berdasarkan data, jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan, yakni dari 17,92 ribu ha tahun 2008 meningkat menjadi 115,63 ribu ha tahun 2012 atau dari 1,51 persen menjadi 18,80 persen. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan kondisi hutan yang telah rusak sehingga bisa menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

Tabel 2.200
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Makassar		926	252	929	881
2	Gowa	975	2,075	3,752	7,206	6,872
3	Takalar	350	675	1,026	3,839	2,942
4	Jenepono	750	775	2,027	11,225	3,610
5	Bantaeng	378	400	2,277	4,731	3,204
6	Bulukumba	529	475	3,401	4,307	6,237
7	Selayar	359	1,175	1,875	2,743	1,832
8	Sinjai	775	725	4,003	8,381	3,579
9	Maros	775	875	3,000	12,465	3,997
10	Pangkep	1,100	1,350	2,775	6,977	1,997
11	Barru	800	925	1,727	4,859	8,890
12	Pare-Pare	-	20	1,054	914	120
13	Sidrap	175	600	1,400	4,314	2,576
14	Soppeng	600	1,125	5,001	8,583	10,783
15	Wajo	1,025	600	3,747	15,566	3,816
16	Bone	300	2,480	3,502	7,324	6,420
17	Pinrang	540	3,300	3,140	3,687	4,058
18	Enrekang	2,186	2,850	1,317	4,266	5,974
19	Tana Toraja	3,200	3,700	3,739	5,338	8,500
20	Luwu	-	745	11,496	14,836	6,756
21	Palopo	1,520	1,335	1,142	2,007	2,217
22	Luwu Utara	533	3,600	3,913	3,837	13,344
23	Luwu Timur	1,050	2,100	1,453	3,627	2,999
24	Toraja Utara	-	-	1,377	5,428	4,026
Jumlah		17,920	32,831	68,398	147,389	115,628

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2008-2012 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 336.346 ha atau sebesar 15,94 persen tahun 2008 menurun menjadi 271.399 ha atau sebesar 10,75 persen tahun 2012. Penurunan luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat mengingat hutan merupakan salah satu sumber daya pembangunan Sulawesi Selatan..

Tabel 2.201
Kerusakan Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Luas kerusakan kawasan hutan	Ha	336.346	366.793	380.603	349.696	271.399
b.	Luas kawasan hutan	Ha	2.109.612	2.109.612	2.523.494	2.523.494	2.523.494
	Kerusakan Kawasan Hutan	%	15,94	17,39	15,08	13,86	10,75

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

Tabel 2.202
Kerusakan Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Kabupaten / Kota	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Makassar	-	-	-	-	-	-
2	Gowa	73,321	31,674	30,699	28,624	26,549	19,343
3	Takalar	7,536	5,612	5,262	4,587	3,912	73
4	Jeneponto	9,600	2,659	1,909	1,134	359	359
5	Bantaeng	5,792	1,468	1,090	790	390	390
6	Bulukumba	12,793	294	235	235	235	235
7	Selayar	450,836	162	162	162	162	162
8	Sinjai	18,913	1,036	775	725	725	725
9	Maros	65,323	17,852	17,077	16,202	15,327	2,862
10	Pangkep	27,558	11,962	10,862	9,512	8,162	1,185
11	Barru	68,180	20,469	19,669	18,744	17,819	12,960
12	Pare-Pare	2,313	2,107	2,107	2,087	2,067	1,153
13	Sidrap	69,721	9,893	9,718	9,118	8,518	4,204
14	Soppeng	47,275	5,328	4,728	3,603	2,478	2,478
15	Wajo	24,149	6,024	4,999	4,399	3,799	3,816
16	Bone	140,135	41,838	41,538	39,058	36,578	29,254
17	Pinrang	71,605	26,577	26,037	22,737	19,437	15,750
18	Enrekang	82,089	20,717	18,531	15,681	12,831	8,565
19	Tana Toraja	113,000	51,138	47,938	44,238	40,538	35,200
20	Luwu	259,944	10,472	10,472	9,727	8,982	6,756
21	Palopo	10,290	2,217	7,285	5,950	4,615	2,608
22	Luwu Utara	378,901	39,917	39,384	35,784	32,184	28,347
23	Luwu Timur	533,943	26,932	66,316	64,216	62,116	58,489
24	Toraja Utara	50,277	-	-	43,290	41,913	36,485
JUMLAH		2,523,494	336,346	366,793	380,603	349,696	271,399

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

c. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Tabel 2.203
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	Milyar	98,05	112,51	122,50	138,05	138,05
b.	Jumlah PDRB	Milyar	85.143,19	99.954,59	117.862,21	137.389,98	137.389,98
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

2.3.2.3. Energi Dan Sumber Daya Mineral

a. Pertambangan Tanpa Ijin

Sampai saat ini, izin pertambangan di Sulawesi Selatan semakin diperketat dengan maksud untuk menghindari terjadinya penambang-penambang liar dan apabila masih ada yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi tegas. Selama periode 2008-2012, pertambangan tanpa izin sebesar 53,33 persen tahun 2008 cenderung mengalami penurunan menjadi 46,83 persen tahun 2012. Begitu pula luas penambangan liar yang ditertibkan dan luas area penambangan liar juga mengalami penurunan.

Tabel 2.204
Pertambangan Tanpa Ijin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Luas penambangan liar yang ditertibkan	Ha	60,00		31,93		12,160
b.	Luas area penambangan liar	Ha	112,50		76,45		25,97
	Pertambangan Tanpa Ijin	%	53,33		41,77		46,83

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sul-Sel 2013

Sesuai data, jumlah luas penambangan liar yang ditertibkan pada tahun 2008 sebanyak 60,00 ha menurun menjadi 12,16 ha pada tahun 2012. Sementara luas area penambangan liar pada tahun 2008 sebanyak 122,50 ha juga mengalami penurunan menjadi 25,97 ha pada tahun 2012.

b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni dari 7,26 persen tahun 2008 menurun menjadi 5,63 persen tahun 2012. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan.

Tabel 2.205
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	7,26	5,51	5,63	5,51	5,63

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel 2013

2.3.2.4. Pariwisata

a. Kunjungan Pariwisata

Potensi pariwisata di Sulawesi Selatan sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap nasional mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Selama periode 2009-2013, kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan

mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 24,37 persen, yakni dari 2,7 juta orang tahun 2008 meningkat menjadi 5,49 juta jiwa tahun 2013.

Tabel 2.206
Kunjungan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Kunjungan Wisata	orang	2,751,427	3,810,623	4,523,381	4,936,567	5,492,411

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan PariwisataProv. Sul-Sel 2014

Hal ini tentu tidak terlepas dari Program Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata setiap tahunnya antara lain Lovely December, Expedition Takabonerate Island, dan berbagai event kepariwisataan lainnya.

b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Tabel 2.207
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Lapangan usaha	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Wisata (per Tahun)					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
a.	Hotel	171.496,12	201.694,68	247.744,46	294.242,65	358.047,59	1.273.225,50
b.	Restoran	1.082.522,41	1.282.431,48	1.504.949,82	1.751.934,80	2.045.051,21	7.666.889,72
c.	Hiburan dan Rekreasi	55.455,54	74.816,49	99.166,58	117.579,84	141.679,95	488.698,40
Total (Juta Rp.)		1.309.474,07	1.558.942,65	1.851.860,86	2.163.757,29	2.544.778,75	9.428.813,62
Total (%)		1,54	1,56	1,57	1,57	1,60	1,57

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan PariwisataProv. Sul-Sel 2013

2.3.2.5. Perikanan & Kelautan

a. Produksi Perikanan

Selama kurun waktu 2009-2013, produksi perikanan di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2013, produksi ikan berhasil melampaui target sebesar 194,68 persen atau selisih sebesar 1,40 juta ton, dimana produksi ikan yang dicapai sebesar 2,88 juta ton sementara target hanya sebesar 1,48 juta ton. Pada tahun 2014, peningkatan produksi perikanan dari target mencapai 113,28 persen hal ini disebabkan karena penyesuaian target produksi sesuai dengan target RPJMD 2013-2018. Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dimana untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi. Capaian kinerja produksi perikanan dapat melampaui target karena tingginya produksi Rumput Laut selain itu juga dukungan prasarana, pengawasan dan konservasi sumber daya ikan serta peningkatan dan pembinaan mutu produksi perikanan.

Tabel 2.208
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah produksi ikan	ton	1.142.376,20	1.852.336,10	2.036.522,70	2.495.576,20	2.884.006,7
b.	Target daerah	ton	1.223.292,80	1.316.443,80	1.363.245,00	1.416.629,00	1.481.387,2
	Produksi Perikanan	%	93,40	140,70	149,40	176,20	194,68
c.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	226.476,50	223.807,90	237.807,90	259.881,00	277.894
d.	Target daerah	ton	316.176,00	324.578,00	332.891,8	341.632,00	262.480,3
	Produksi Perikanan Tangkap	%	71,63	68,87	71,44	76,07	105,87
e.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	915.899,70	1.629.077,80	1.798.714,80	2.235.654,80	2.591.769,10
f.	Target Daerah	ton	907.117,00	991.865,50	1.030.353,00	1.074.997,00	1.313.004,20
	Produksi Perikanan Budidaya	%	100,97	164,24	117,13	210,83	197,39

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

b. Komoditi Unggulan

Komoditi unggulan udang, bandeng dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan propinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2010 sampai tahun 2014, produksi komoditi unggulan secara fluktuatif mengalami peningkatan, dan pada tahun 2013 dilakukan penyesuaian target produksi komoditi unggulan sesuai RPJMD 2013-2018. Sejalan hal tersebut masih terdapat permasalahan dalam pengembangan komoditi unggulan yaitu lahan tambak yang pemanfaatannya masih terbatas dibandingkan dengan potensi daerah dan adanya wabah penyakit ikan atau virus yang sering terjadi pada usaha pembudidaya.

Tabel 2.209
Produksi Komoditi Unggulan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
I.	UDANG						
a.	Jumlah produksi Udang	Ton	17.829	22.840	26.825	28.145,6	34.420,7
b.	Target daerah	Ton	21.490,0	23.918,9	26.772,9	30.714,0	33.200,0
	Produksi Udang	%	82,96	95,49	100,19	91,64	103,67
II.	BANDENG						
a.	Jumlah produksi Bandneg	ton	64.790	78.188	83.309	89.708	119.887,1
b.	Target daerah	ton	63.928,9	71.881,0	73.318,6	76.984,5	91.502,30
	Produksi Bandeng	%	93,4	140,7	149,4	176,2	131,02
III	RUMPUT LAUT						
e.	Jumlah produksi Rumput Laut	Ton	824.027	1.517.690	1.675.807	2.104.446	2.422.154,2
f.	Target Daerah	Ton	810.640,0	880.577	915.161	951.876	2.233.259,7
	Produksi R.Laut	%	93,4	140,7	149,4	176,2	108,46

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan strategi pengembangan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pembudidaya dalam menghadapi virus penyakit udang dan penerapan Cara

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Kemudian hal yang masih perlu dilakukan yaitu dukungan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan produksi, mutu dan distribusi produksi dari hulu ke hilir.

c. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun sehingga pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar 105,47 persen, dimana konsumsi ikan yang dicapai sebesar 44,30kg sementara target daerah hanya sebesar 42,00 kg.

Tabel 2.210

Konsumsi Ikan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	35,60	37,70	40,30	41,80	44,30
b.	Target daerah	Kg	40,70	40,90	41,20	41,40	42,00
	Konsumsi Ikan	%	87,50	92,20	97,80	100,90	105,47

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Capaian kinerja konsumsi ikan berhasil melampaui target karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan program gemar makan ikan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat konsumsi protein asal ikan.

d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapat bantuan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, yakni 0,35 persen tahun 2009 meningkat menjadi 0,54 persen tahun 2013 atau dari 163 kelompok menjadi 544 kelompok.

Tabel 2.211

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	Jml	163	383	342	551	544
b.	Jumlah Kelompok Nelayan	Jml	47.214	55.448	56.000	98.411	99.395
c.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0,35	0,69	0,61	0,56	0,54

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Apabila dibandingkan dengan jumlah kelompok nelayan yang ada, tentu sangat sedikit yang mendapat bantuan. Dari hasil analisis terlihat bahwa terlihat bahwa peningkatan jumlah kelompok nelayan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan sebesar **21,24** persen. Jika hal ini tidak mendapat perhatian, maka jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan akan semakin mengecil setiap tahunnya.

e. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Sesuai data terlihat bahwa kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2009 sebesar \pm 394 ton meningkat menjadi \pm 1,4juta ton pada

tahun 2014. Begitu pula bila dibandingkan dengan jumlah produksi ikan di Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan, maka kontribusi produksi ikan dari kelompok nelayan rata-rata sebesar **57,83** persen tiap tahun. Selain itu jumlah produksi ikan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar **21,97** persen.

Tabel 2.212
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (pembudidaya)	Ton	394.348	1.279.409	1.243.704	1.402.741	1.475.608
b.	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	1.093.367	1.142.376	2.036.523	2.495.536	2.884.006
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	34,52	69,07	61,07	56,21	51,16

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Namun dari data tersebut dapat dikatakan bahwa persentase antara jumlah produksi ikan di daerah terdiri atas kontribusi produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan cenderung menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bantuan pemerintah lebih ditingkatkan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan akan berimplikasi terhadap kontribusinya terhadap total produksi ikan di daerah.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah produksi ikan di daerah terdiri atas kontribusi produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bantuan pemerintah lebih ditingkatkan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan akan berimplikasi terhadap kontribusinya terhadap total produksi ikan di daerah.

2.3.2.6. Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Tabel 2.213
Kontribusi Sektor Perdagangan& Industri Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%
1.	Perdagangan, Hotel & Restoran	13.913,80	16,34	16.690,29	0,17	20.434,95	0,17	20.434,95	0,17	24.136,35	0,18
2.	Industri Pengolahan	11.060,44	12,99	12.514,89	0,13	14.457,26	0,13	14.457,26	0,12	16.789,29	0,12
3.	Pertambangan	6.201,50	0,07	5.503,78	0,06	7.168,66	0,06	8.345,80	0,07	8.803,04	6,42
4.	Konsumsi Rumah tangga	47.393,16	0,56	52.780,92	0,53	59.616,78	0,51	66.264,06	0,48	75.278,70	0,47

Sumber : Dinas Perindustrian &Perdagangan Prov. Sul-Sel 2013

b. Tabel Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.214
Ekspor Bersih Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

Kegiatan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
EKSPOR (Juta US\$)	1.892,92	1.344,32	2.016,91	1.773,57	1.446,19
IMPOR (Juta US\$)	871,56	649,11	987,32	1.305,41	1.302,41
SURPLUS (Juta US\$)	1021,4	695,21	1029,6	468,16	143,78

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Sul-Sel 2013

c. Rasio Tempat Ibadah

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,48 dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 1,5.

Tabel 2.215
Rasio Tempat Ibadah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No.	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Tempat Ibadah	unit	20.408	17.098	19.295	20.147	20.147	18.051
	Mesjid	unit	11.562	10.403	12.670	13.424	13.424	13.103
	Langgar	unit	563	747	747	747	747	747
	Musholah	unit	1.001	1.351	1.351	1.400	1.400	1.400
	Gereja Katholik	unit	387	300	2.064	422	422	407
	Gereja Protestan	unit	2.053	2.050	372	2.064	2.064	2.134
	Pura Hindu	unit	4.819	2024	2.065	2.064	2.064	229
	Wihara Budha	unit	23	23	26	26	26	31
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.115.638	8.342.047
	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk		1,48	1,32	1,58	1,65	1,65	1,5

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 2.216
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kepulauan Selayar	157.516	1	29	143	-	-
2	Bulukumba	317.033	394	178	17	176	-
3	Bantaeng	148.837	266	173	5	29	-
4	Jeneponto	297.906	37	16	2	-	-
5	Takalar	229.956	71	-	8	4	-
6	Gowa	648.344	2.021	1.125	128	223	-
7	Sinjai	206.265	56	17	6	-	-
8	Maros	264.345	471	-	54	51	-
9	Pangkep	264.465	387	441	42	-	-
10	Barru	137.718	61	-	-	-	-
11	Bone	678.843	1.058	834	37	138	-
12	Soppeng	194.357	525	62	17	7	-

No	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
13	Wajo	317.827	82	-	-	-	-
14	Sidrap	269.973	1.000	137	22.238	32	-
15	Pinrang	281.438	4.505	3.447	-	-	-
16	Enrekang	175.665	435	64	4	-	-
17	Luwu	285.483	8.604	8.965	86	14	-
18	Tana Toraja	44.623	290.653	82.840	11.144	16	-
19	Luwu Utara	216.808	30.804	2.337	7.428	10	-
20	Luwu Timur	179.887	38.536	4.909	13.204	10	-
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-	-
22	Makassar	1.833.735	181.546	43.377	8.038	11.673	-
23	Pare Pare	102.030	5.296	2.627	1.131	777	-
24	Palopo	122.521	5.741	13.058	220	349	-
Sulawesi Selatan		7.375.573	572.551	164.635	63.954	13.509	-

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang strategis karena merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan bahkan nasional.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik selama kurun waktu 2008-2012 dengan rata-rata pertumbuhan 7,60 persen per tahun. Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 85,14 triliun pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 159,43 triliun pada tahun 2012. PDRB per kapita pada tahun 2008 mencapai Rp 10,83 juta mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu Rp 19,19 juta pada tahun 2012.

Dari sisi penggunaan perekonomian Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2012 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga mencapai 55,66 persen tahun 2008 mengalami penurunan kontribusi hingga mencapai 47,22 persen tahun 2012 dan konsumsi pemerintah pada kurun waktu yang sama terus mengalami peningkatan kontribusi, yakni dari sebesar 17,29 persen menjadi 31,99 persen. Sementara untuk komponen lainnya yang memiliki peran yang cukup besar adalah komponen ekspor dan impor. Komponen ekspor pada tahun 2008 sebesar 37,76 persen menurun menjadi 19,73 persen tahun 2012, sementara impor sebesar 33,15 persen menjadi 19,73 persen. Sedangkan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun waktu yang sama mencapai 20,25 persen mencapai 27,61 persen dan Lembaga Swasta Nirlaba hanya sebesar 0,67 persen menjadi 0,79 persen.

2.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pengeluaran makanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar 51,40 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,31 poin jika dibandingkan dengan tahun 2010. Kalau diamati perbedaan pengeluaran pada kedua golongan pengeluaran tersebut (makanan dan non makanan) maka terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih digunakan untuk keperluan konsumsi makanan tetapi untuk saat ini cenderung bergeser. Masih

dominannya pengeluaran konsumsi makanan dibanding pengeluaran konsumsi non makanan merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan akan tetapi tahun 2011 sudah terlihat ada perubahan pergeseran pola hidup masyarakat yang mengarah ke konsumsi non makanan yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.217
persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT Pangan	1,134,554	1,727,885	1,726,021	2,048,77
2	Jumlah RT	1,783,932	1,865,662	1,848,068	1,892,944
3	J u m l a h	63.60	92.62	93.40	108.23

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel 2013

Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami pergeseran. Jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah 200 ribu rupiah cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah rumahtangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari 200 ribu rupiah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan pendapatan di tingkat rumah tangga.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Selama periode 2008-2011, persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kelompok bahan pangan yang persentasenya cenderung menurun sehingga berbanding terbalik dengan persentase kelompok bahan non pangan yang cenderung meningkat.

Tabel 2.218
persentase Konsumsi RT non-Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	438,601	746,327	729,903	995,636
2	Total Pengeluaran	1,134,554	1,727,885	1,726,021	2,048,777
3	Rasio (1/2)	38,66	63,19	42,29	48,60

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013

persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Sulawesi Selatan untuk kelompok bahan pangan selama periode 2008-2011 cenderung menurun, yakni dari 61.34 persen menjadi 51.40 persen. Sementara persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk kelompok bahan non pangan cenderung meningkat dan hampir berimbang, yakni dari 38.66 persen menjadi 48.60 persen.

Selama kurun waktu 2008-2011, data pengeluaran konsumsi makanan menunjukkan kecenderungan menurun sebaliknya untuk non makanan kecenderungannya meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola konsumsi dari makanan ke non makanan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

c. Produktivitas Total Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Sulawesi Selatan. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari Sembilan sektor, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.219

Produktivitas Per Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Kabupaten/Kota	2 0 0 8		2 0 0 9		2 0 1 0		2 0 1 1		2 0 1 2	
		(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%
1	P D R B (Atas Dasar Harga Berlaku)	85.143,20		99.954,61		117.862,20		137.389,88		159.427,10	
	Pertanian	25.071,81	29,45	28.008,21	28,02	30.442,43	25,83	34.788,23	25,32	39.518,40	24,79
	Pertambangan dan Penggalian	6.201,50	7,28	5.503,78	5,51	7.119,68	6,04	8.345,85	6,07	8.803,00	5,52
	Industri Pengolahan	11.060,44	12,99	12.514,89	12,52	14.457,26	12,27	16.789,29	12,22	19.492,50	12,23
	Listrik, Gas, dan Air Bersih	838,10	0,98	949,24	0,95	1.087,97	0,92	1.245,91	0,91	1.439,20	0,90
	K o n s t r u k s i	4.253,53	5,00	5.387,79	5,39	6.534,51	5,54	7.760,90	5,65	9.109,80	5,71
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13.913,80	16,34	16.690,29	16,70	20.434,95	17,34	24.236,35	17,64	28.349,60	17,78
	Pengangkutan dan Komunikasi	6.972,02	8,19	7.953,95	7,96	9.445,57	8,01	10.849,84	7,90	12.982,90	8,14
	Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	5.203,00	6,11	6.241,52	6,24	7.810,11	6,63	9.513,69	6,92	11.803,30	7,40
	Jasa-Jasa	11.629,00	13,66	16.704,94	16,71	20.529,72	17,42	23.859,82	17,37	27.928,40	17,52
2	Jumlah Angkatan Kerja	3.447.879	100	3.536.920	100	3.571.317	100	3.612.424	100	3.642.426	100

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013

d. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diukur dengan cara membandingkan antara indeks yang diterima petani dengan jumlah indeks yang diterima petani. Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa Nilai Tukar Petani di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2009 sebesar 100,65 meningkat menjadi 107,43 pada tahun 2013.

Tabel 2.220
Nilai Tukar Petani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Indeks yang diterima petani (It)	123,10	130,31	142,43	148,52	155,74
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	122,30	128,22	132,99	137,45	144,97
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,65	101,63	107,09	108,05	107,43

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013

Dilihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP), menunjukkan bahwa NTP mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2012, yaitu sebesar 100,65 meningkat nilainya menjadi 107,43. meningkat nyata pada tahun 2012 dimana saat itu nilainya sebesar 108,05. peningkatan disebabkan oleh produksi komoditas pertanian khususnya padi sawah yang cukup tinggi, sementara harga sarana produksi pertanian terutama pupuk serta harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani, saat itu relatif stabil. Kondisi ini menjadikan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat menikmati keuntungan dari usahatani serta mencapai perbaikan daya beli. Hal ini memperlihatkan bahwa NTP bertahan di atas angka 100, artinya petani masih menikmati keuntungan dari usahatannya, meskipun produksi agak mengalami gangguan karena cuaca dan iklim.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2008 sebesar 0,015 persen dan pada tahun 2012 menjadi 0,013 persen, ini menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada.

Tabel 2.221
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan	24.307,13	24.307,13	32.432	32.432	32.486,391
2.	Jumlah Kendaraan	1.613.240	1.742.861	1.874.851	2.186.263	2.446.819
3.	Rasio	0.015	0.0139	0.017	0.014	0.0132

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel 2013

Tabel 2.222
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

No	Kabupaten/kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
1	2	3	4	5
1	Kepulauan Selayar	795,700	10,446	0,076

No	Kabupaten/kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
2	Bulukumba	1.512,611	70,171	0,021
3	Bantaeng	609,371	21,292	0,028
4	Jeneponto	1.520,390	26,752	0,056
5	Takalar	943,885	58,373	0,016
6	Gowa	2.700,090	177,793	0,015
7	Sinjai	1.436,676	33,091	0,043
8	Maros	1.479,881	35,084	0,042
9	Pangkep	831,133	70,877	0,011
10	Barru	905,481	27,773	0,032
11	Bone	2.867,842	126,311	0,022
12	Soppeng	939,793	45,809	0,020
13	Wajo	1.565,425	97,803	0,016
14	Sidrap	1.509,164	57,673	0,026
15	Pinrang	863,983	121,715	0,007
16	Enrekang	1.158,879	25,041	0,046
17	Luwu	1.453,999	65,796	0,022
18	Tana Toraja	1.570,627	42,472	0,036
19	Luwu Utara	2.777,185	49,031	0,056
20	Luwu Timur	2.538,993	59,807	0,042
21	Toraja Utara	-	-	
22	Makassar	1.628,827	1,067,351	0,0015
23	Pare Pare	391,909	85,668	0,0045
24	Palopo	484,546	70,690	0,0068
	Jumlah	32.486,391	2,446,819	0,0132

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel Tahun 2012

2.4.2.2. Penataan Ruang

a. Ketaatan Terhadap RTRW

Persentase realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 0,35 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,52.

Tabel 2.223

Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Realisasi RTRW	93	120	128	138
2.	Rencana Peruntukan RTRW	266	266	266	266
3.	Rasio (1./2.)	0,35	0,45	0,48	0,52

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

b. Wilayah Produktif

Persentase luas wilayah produktif terhadap luas seluruh wilayah budidaya sebesar 0,40 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,35.

Tabel 2.224
persentase Luas Wilayah Produktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Luas Wilayah produktif	1.241.313	1.241.313	1.816.757	1.816.757
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	2.551.072	2.551.072	2.551.072	2.551.072
3.	Rasio (1./2.)	0,40	0,49	0,35	0,35

Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013

c. Luas Wilayah Industri

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel menetapkan luasan kawasan budidaya seluas 2.551.072 hektar yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan pada pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada pengembangan agroindustri komoditas unggulan. Luas wilayah industri di Sulawesi Selatan yang merupakan realisasi luas wilayah industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW sampai tahun 2012 baru mencapai 0,03 dengan membangun industri dan kawasan industri seluas 7,92 Km².

Tabel 2.225
persentase Luas Wilayah Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Wilayah Industri	6.92	6.92	6.92	7.92	7.92
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511
3.	Rasio	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013

Tabel 2.226
persentase Luas Wilayah Industri Menurut Kab/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Industri (Km2)	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Km2)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kepulauan Selayar	2.14	440.10	0.49
2	Bulukumba	1.09	676.63	0.16
3	Bantaeng	2.89	224.00	1.29
4	Jeneponto	0.78	605.03	0.13
5	Takalar	1.00	365.53	0.27
6	Gowa	0.90	782.56	0.12
7	Sinjai	2.89	393.14	0.74
8	Maros	3.33	1,019.54	0.33
9	Pangkep	1.89	659.18	0.29

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Industri (Km2)	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Km2)	Rasio
10	Barru	5.00	673.76	0.74
11	Bone	6.51	2,274.01	0.29
12	Soppeng	0.00	927.42	0.00
13	Wajo	0.00	1,592.30	0.00
14	Sidrap	1.40	1,2545.68	0.11
15	Pinrang	1.17	1,051.34	0.11
16	Enrekang	0.00	1,026.46	0.00
17	Luwu	35.78	1,822.92	1.96
18	Tana Toraja	0.00	1,128.23	0.00
19	Luwu Utara	0.00	4,305.62	0.00
20	Luwu Timur	29.86	3,625.92	0.82
21	Toraja Utara	0.00	378.89	0.00
22	Makassar	2.44	122.63	1.99
23	Pare-Pare	1.73	52.86	3.27
24	Palopo	1.09	117.76	0.93

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

d. Luas Wilayah Banjir

Persentase Luas wilayah kebanjiran sebesar 20,20 Ha dari seluruh wilayah budidaya, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 persentase wilayah banjir tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.227
Persentase Luas Wilayah Banjir
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	25,511	25,511	25,511	25,511	25,511
3.	Rasio	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20

Sumber : Dinas Tata Ruang & Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.228
Persentase Luas Wilayah Banjir Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Kebanjiran	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kepulauan Selayar	0.00	440.10	0.00
2	Bulukumba	332.26	676.63	49.11
3	Bantaeng	110.59	24.00	49.37
4	Jenepono	338.80	605.03	56.00
5	Takalar	48.38	365.53	13.23
6	Gowa	187.11	782.56	23.91
7	Sinjai	125.24	393.14	31.86
8	Maros	534.31	1,019.54	52.41

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Kebanjiran	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
9	Pangkep	235.97	659.18	35.80
10	Barru	27.96	673.76	4.15
11	Bone	457.99	2,274.01	20.14
12	Soppeng	90.20	927.42	9.73
13	Wajo	32.47	1,592.30	2.04
14	Sidrap	297.97	1,245.68	23.92
15	Pinrang	145.91	1,051.34	13.88
16	Enrekang	9.72	1,026.46	0.95
17	Luwu	1,185.69	1,822.92	65.04
18	Tana Toraja	9.11	1,128.23	0.81
19	Luwu Utara	596.40	4,305.62	13.85
20	Luwu Timur	277.76	3,625.92	7.66
21	Toraja Utara	16.36	378.89	4.32
22	Makassar	51.00	122.63	41.59
23	Pare-Pare	7.49	52.86	14.17
24	Palopo	35.33	117.76	30.00

Sumber : Dinas Tata Ruang & Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel menetapkan luasan kawasan budidaya seluas 2.551.072 hektar yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20,20, yang pada umumnya melanda wilayah yang memang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana ditetapkan pada RTRWP Sulsel dan merupakan kawasan sentra produksi pangan sehingga jika tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat menurunkan produktifitas komoditas pertanian dan perikanan di Sulawesi Selatan.

e. Luas Wilayah Perkotaan

Persentase luas wilayah perkotaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata mengalami meningkat sebesar 15,96 persen dari luas seluruh wilayah budidaya.

Tabel 2.229
persentase Luas Wilayah Perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Perkotaan	4,072.	4,072	4,072	4,072	4,072
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	25,511	25,511	25,511	25,511	25,511
13	Rasio	15.96	15.96	15.06	15.96	15.96

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.230
persentase Luas Wilayah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Perkotaan (Km ²)	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Km ²)	Rasio
1	Kepulauan Selayar	136.87	440.10	31.10
2	Bulukumba	187.95	676.63	27.78
3	Bantaeng	28.85	224.00	12.88
4	Jeneponto	69.49	605.03	11.49
5	Takalar	51.24	365.53	14.02
6	Gowa	28.09	782.56	3.59
7	Sinjai	65.51	393.14	16.66
8	Maros	108.24	1,019.54	10.62
9	Pangkep	83.20	659.18	11.62
10	Barru	199.32	673.76	29.58
11	Bone	126.35	2,274.01	2.68
12	Soppeng	278.00	927.42	5.29
13	Wajo	42.67	1,592.30	9.16
14	Sidrap	65.90	1,245.68	4.99
15	Pinrang	96.26	1,051.34	9.16
16	Enrekang	51.24	1,026.46	4.99
17	Luwu	59.26	1,822.92	3.25
18	Tana Toraja	39.75	1,128.23	3.52
19	Luwu Utara	1,088.85	4,305.62	25.29
20	Luwu Timur	721.80	3,625.92	19.91
21	Toraja Utara	10.29	378.89	2.72
22	Makassar	175.77	122.63	143.33
23	Pare Pare	99.33	52.86	187.91
24	Palopo	258.17	117.76	219.23

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

a. Tabel Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan jenisnya, bank di Sulawesi Selatan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang masing-masing terdiri Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 2.231
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Bank Umum	155	168	176	207	233
	Konvensional	147	158	164	188	210
	Syariah	8	10	12	19	23
2	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	35	37	39	39	40
	Konvensional	21	23	25	25	26
	Syariah	14	14	14	14	14
	T o t a l	190	205	215	246	273

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2013

Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tersebar di kabupaten/kota, namun masih didominasi oleh Bank Umum Konvensional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.232
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten / Kota	Bank Umum		BPR	
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
1	Kepulauan Selayar	2	0	1	0
2	Bulukumba	8	1	1	0
3	Bantaeng	7	0	0	0
4	Jeneponto	6	0	0	0
5	Takalar	6	0	1	1
6	Gowa	13	4	3	3
7	Sinjai	6	0	0	0
8	Maros	8	1	0	1
9	Pangkep	8	1	0	0

No	Kabupaten / Kota	Bank Umum		BPR	
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
10	Barru	7	0	0	0
11	Bone	10	2	1	1
12	Soppeng	7	0	0	1
13	Wajo	10	3	1	2
14	Sidrap	8	0	0	0
15	Pinrang	8	0	0	0
16	Enrekang	6	0	0	0
17	Luwu	9	0	1	0
18	Tana Toraja	5	0	2	0
19	Luwu Utara	7	0	1	0
20	Luwu Timur	6	0	2	0
21	Toraja Utara	5	0	0	0
22	Makassar	35	6	9	4
23	Pare Pare	12	3	0	0
24	Palopo	11	2	3	1
	Jumlah	210	23	28	14

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2013

Jumlah bank dan cabangnya di kabupaten/kota mengalami peningkatan selama tahun 2012. Bank umum masih mendominasi jumlah bank di kabupaten/kota, yakni sebesar 233 buah bank yang terdiri dari 210 bank konvensional dan 23 bank syariah, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sebesar 40 buah bank yang terdiri dari 26 bank konvensional dan 14 bank syariah. Jumlah bank dan cabangnya terbanyak di Kota Makassar, yakni sebanyak 54 bank umum yang terdiri dari 35 bank konvensional dan 6 bank syariah serta 13 buah BPR yang terdiri dari 9 bank konvensional dan 4 bank syariah. Sementara terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya 3 buah bank yang terdiri dari 2 Bank Umum dan 1 Bank Perkreditan Rakyat.

b. Tabel Jenis Kelas Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel selama ini terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian bahwa bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung sehingga bisa membuat pencitraan yang lebih baik. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari jumlah hotel yang ada tetapi juga diukur dari jumlah ketersediaan kamar dan jumlah tempat tidur.

Tabel 2.233
Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Hotel (Unit)	487	509	552	412
2	Jumlah Kamar (Unit)	9.835	10.114	8.176	6.562
3	Jumlah Tempat Tidur (Buah)	18.222	16.295	16.087	11.013

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2012

2.4.2.4. Lingkungan Hidup

a. persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Ketersediaan air bersih sangat esensial untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk untuk bisa hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Oleh karena itu, ketersediaan sumber air bersih bagi rumah tangga saat ini belum sebanding dengan jumlah rumah tangga yang ada. Berdasarkan tabel berikut ini, sumber-sumber air air bersih berasal dari leding, sumur, mata air, sungai/danau/waduk, pompa air, air hujan, dan air kemasan.

Tabel 2.234
persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011

No	Sumber Air Bersih	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Leding (Perpipaan)	371,160	399,228	329,032	274,911
2	Sumur Terlindungi	442,192	452,209	436,422	409,721
3	Sumur Tidak Terlindungi	220,158	193,040	153,474	159,018
4	Mata Air Terlindungi	131,190	180,886	204,126	176,798
5	Mata Air Tidak Terlindungi	128,131	114,798	68,426	100,337
6	Sungai /Danau/Waduk	33,391	28,969	25,878	27,421
7	Pompa air	307,835	318,625	289,025	326,793
8	Air Hujan	10,997	14,381	24,659	22,480
9	Air Kemasan	126,122	158,991	323,259	394,872
10	Lainnya	5,261	4,535	1,901	593
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	1.468.602	1.544.403	1.569.811	1.566.153
12	Jumlah Rumah Tangga	1.776.419	1.865.662	1.803.764	1.892.944
13	persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	82,67	82,78	87,03	82,74

Sumber : Dinas Tata Ruang & Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2012

2.4.2.5. Komunikasi Dan Informatika

a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Selama periode 2008-2012, ketersediaan daya listrik di Sulawesi Selatan masih mencukupi. Hal ini terlihat kebutuhan dan ketersediaan produksi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa kebutuhan daya listrik tahun 2008 sebesar 2.873 GWH meningkat menjadi 3.758 GWH tahun 2012. Di sisi lain ketersediaan produksi listrik juga mengalami peningkatan sebesar 3.304 GWH tahun 2008 menjadi 4.307 GWH tahun 2012. Kebutuhan listrik masih didominasi di tingkat rumah tangga yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dari 1.441 GWH tahun 2008 menjadi 1.803 GWH. Apabila dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan listrik, terlihat bahwa ketersediaan listrik masih surplus sebesar 549 GWH tahun 2012. Tentu hal ini

peluang untuk berinvestasi di bidang industri masih bisa kita kembangkan di Sulawesi Selatan.

Tabel 2.235
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1. Kebutuhan	GWH	2.873	3.071	3.282	3.512	3.758
- Rumah tangga	GWH	1.441	1.532	1.622	1.712	1.803
- Komersial	GWH	438	438	533	588	650
- Publik	GWH	285	309	336	368	403
- Industri	GWH	709	746	791	843	903
2. Susut & losses (I&D)	%	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6
3. Susut pemakaian sendiri	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Total susut & losses	%	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6
5. Faktor beban	%	55	55	55	55	55
6. Produksi	GWH	3.304	3.528	3.768	4.028	4.307
7. Beban puncak	MW	686	732	782	836	894
8. Kapasitas terpasang (Existing)	MW	479	470	460	451	442
9. Kapasitas dibutuhkan	MW	960	1.205	1.095	1.170	1.251
10. Total Kapasitas Sistem	MW	1.439	1.675	1.555	1.621	1.693
11. Daya Tambahan	MW	190	556	635	719	809

Sumber : Rencana Umum Kelistrikan Nasional Tahun 2008-2027

b. persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Listrik

Penggunaan listrik rumah tangga di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai jumlah rumah tangga yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di tingkat rumah tangga, Pemerintah Daerah masih berupaya mencari potensi sumber listrik, baik pembangkit listrik tenaga air maupun pembangkit listrik lainnya.

Tabel 2.236
Rumah Tangga Pengguna Listrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2008	2009	2010	2011
a.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	jml	1.572.637	1.683.033	1.716.768	1.758.212
b.	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	jml	1.776.419	1.865.662	1.856.204	1.892.944
	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	88,53	90,21	92,49	92,88

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2012

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

a. Tabel Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.237
Angka Kriminalitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	Jenis Kriminal	TAHUN									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Jml Kasus Narkoba	387	463	460	479	634	577	734	798	743	757
2	Jml Kasus Pembunuhan	110	95	101	92	114	105	94	80	99	79
3	Jml Kasus Seksual	469	344	438	333	523	435	529	433	444	405
4	Jml Kasus Penganiayaan	3,674	2,564	3,896	2,879	4,613	3,307	4,338	3,131	3562	2935
5	Jml Kasus Pencurian	5,310	1,782	6,275	1,964	6,832	1,902	6,830	2,000	7027	4115
6	jml Kasus Penipuan	1,224	678	1,437	789	1,850	609	1,649	883	7160	4137
7	Jml Kasus Pemalsuan Uang	16	18	8	7	23	20	14	10	7	10
8	Total Jml Tindak Kriminal Selama 1 (Satu) Tahun	17,832	5,944	19,276	6,543	22,051	6,955	21,852	7,335	19042	12438
9	Jml Penduduk	7,908,519		8,034,776		8,115,638		8,733,745			
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	225		240		272		250			

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Jumlah tindak kriminalitas di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan, yakni sebesar 15.137 kasus tahun 2008 menjadi 21.852 kasus tahun 2012 atau meningkat sebesar 9,61 persen. Dari seratus ribu penduduk terjadi 194 kasus tahun 2008 menjadi 263 kasus tahun 2012.

Angka kriminalitas di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 juga mengalami peningkatan kecuali kasus pembunuhan dan kasus pemalsuan uang yang mengalami penurunan. Angka kriminalitas masih didominasi kasus pencurian, yakni sebesar 4.350 kasus tahun 2008 meningkat menjadi 6.830 kasus tahun 2012 atau meningkat sebesar 11,94 persen.

b. Jumlah Demo

Selama periode 2009-2013, jumlah demonstrasi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 902 demosntrasi tahun 2009 meningkat menjadi 1.315 demonstrasi tahun 2012 atau meningkat sebesar 13,88 persen. Untuk tahun 2012, demostrasi tertinggi terjadi pada bidang politik, yakni sebanyak 98 kali, disusul demonstrasi di bidang ekonomi sebanyak 79 kali, dan demonstrasi terkecil terjadi pada kasus pemogokan kerja sebanyak 6 kali.

Tabel 2.238
Jumlah Demo
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

NO	JENIS KRIMINAL	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bidang Politik	264	187	47	98	153
2	Bidang Ekonomi	75	128	106	79	93
3	Kasus Pemogokan Kerja	25	11	2	6	60
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	902	1.377	1.183	1.315	523

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Ketengakerjaan

a. Tabel Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Usia ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia < 15 Tahun dan > 64 Tahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.239
Rasio Ketergantungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	2.449.556	2.423.540	2.482.509	2.507.465	2.487.874
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	448.705	476.104	442.073	445.856	464.894
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	2.898.261	2.899.644	2.924.582	2.953.321	2.952.768
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	4.873.410	5.008.875	5.110.194	5.162.317	5.354.080
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	59,47	57,89	57,23	57,21	55,15

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Rasio ketergantungan pada periode 2008-2012 mengalami penurunan, yakni dari 59.47 persen pada tahun 2008 menjadi 55.15 persen pada tahun 2012 atau menurun sebesar 1.90 persen. artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 59 orang pada tahun 2008 menurun menjadi 55 orang tahun 2012 yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

Tabel 2.240
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	6,23	8,19	7,61	8,37			>
1.1.1.2	Laju inflasi	3,39	6,56	2,88	4,41	8,36		>
1.1.1.3	PDRB per kapita (Ribuan)	12,567	14,669	16,929	19,472	22,150		>
1.1.1.4	Indeks Gini Ratio	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41		
1.1.1.5	Penduduk Miskin (Ribuan)	963,60	913,40	832,91	805,90	863,20		<
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
	IPM	70,9	71,62	72,14	72,70	73,28		
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	87,00	87,75	88,07	88,73	89,69	92	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	7,41	7,84	7,92	7,95	8,01	8,5	<
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar							
1.2.1.4	SD	107,49	108,57	102,09	103,05			
	SMP	76,54	75,05	87,15	98,95			
	SMA	62,78	67,71	66,17	69,75			
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni							
1.2.1.6	SD	92.27%	92.86%	97.54%	97.90%			
1.2.1.7	SMP	61.74%	62.32%	65.29%	68.27%			
	SMA	42.03%	42.75%	47.89%	47.92%			
1.2.1.8	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	994	995	994	994	994		
1.2.1.9	Angka Usia Harapan Hidup	69,80	70,00	70,20	70,45	70,60	73,7	<
1.2.1.10	Persentase Balita Gizi Buruk	0,01	0,02	0,10	0,07	0,04	0,05	<
1.2.1.11	Rasio Penduduk yang Bekerja	91,10	91,63	93,44	94,13	88,57		
2	Pelayanan Umum							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	Angka Partisipasi Sekolah							
	SD/MI	96,53	97,00	97,16	97,59	98,25		
	SMP/MTs	80,96	82,63	84,04	87,69	87,43		
	SMA/SMU/SMK/MA	51,67	53,00	56,66	61,66	65,25		
2.1.2	Angka Putus Sekolah							
	SD/MI	2,10	1,85	1,75	1,20	1,12		
	SMP/MTs	1,55	1,45	1,38	1,09	1,05		
	SMA/SMU/SMK/MA	2,16	2,07	1,63	1,30	1,18		
2.1.3	Angka Kelulusan							
	SD/MI	95,12	100	100	100	100		
	SMP/MTs	94,22	99,77	99,83	99,81	99,85		
	SMA/SMU/SMK/MA	95,00	95,25	99,12	99,07	99,48		
2.2	Kunjungan Pariwisata	2,7	3,8	4,5	4,9	5,4		
2.3	Perikanan dan Kelautan							
2.3.1	Produksi Perikanan	93,40	140,70	149,70	176,20	194,68		
2.3.2	Komoditi Unggulan							
	Udang	82,96	95,49	100,19	91,64	103,67		
	Bandeng	93,40	140,70	149,40	176,20	131,02		
	Rumput Laut	93,40	140,70	149,40	176,20	108,46		
3	Daya Saing Daerah							
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,65	101,65	107,09	107,09	107,43		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2009	2010	2011	2012	2013		
3.2	Produksi Daging							
	Sapi	8.215	9.055	11.025	12.724	15.715		
	Kerbau	2.169	1.546	1.825	2.689	3.495		
	Kuda	420	805	868	1.108	810		
	Kambing	583	885	1.631	1.675	1.590		
	Domba	1,286	1,399	0,935	1,460	1,126		
	Babi	1.699	1.863	2.541	2.397	3.938		
	Ayam Buras	5.127	5.373	5.483	6.261	23.553		
	Ayam Ras Petelur	2.999	1.371	1.440	1.823	6.082		
	Ayam Ras Pedaging	10.709	10.692	11.594	11.072	24.378		
	Itik	844	765	668	742	1.954		

2.5. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

2.5.1. keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN, dan RPJMD

Tabel 2.241
Keterkaitan Dokumen Perencanaan

RPJPN 2005–2025	RPJMN 2015 – 2019	RPJPD SULSEL 2008 – 2028
VISI	VISI	VISI
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”	“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”	“WILAYAH TERKEMUKA DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEMANDIRIAN LOKAL YANG BERNAFASKAN KEAGAMAAN”
MISI	MISI	MISI
<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari Meningkatnya kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara

<p>menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional</p> <p>8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional</p>	<p>maju, dan sejahtera.</p> <p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p>6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan</p>	<p>kepulauan yang mandiri, maju dan kuat</p>
--	--	--

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang secara efektif dimulai sejak Tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi semakin besarnya tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang terdiri atas pelayanan publik, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin besar, maka dibutuhkan anggaran yang lebih besar pula untuk dapat memenuhi kebutuhan terutama untuk membiayai urusan yang menjadi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan tersebut, diikuti dengan desentralisasi fiskal yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, di mana Pemerintah Pusat memberikan bagian dana bagi hasil yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dari sumber-sumber penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penguatan fiskal daerah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dengan regulasi tersebut, secara perlahan-lahan penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekalipun pada awalnya sempat mengalami penurunan akibat dipangkasnya beberapa jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggap kontra produktif dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Hasil pengelolaan pendapatan daerah yang terus membaik, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan Negara/Daerah. Karena itu, upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan tidak boleh menghambat arus lalu lintas barang/jasa/penduduk dari satu Daerah ke Daerah yang lainnya.

Selanjutnya berkaitan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga

Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penggunaan Penganggaran Belanja Tidak Terduga sesuai Peraturan Gubernur no 151 tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 tahun 2012.

Aturan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan tersebut, ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan acuan didalam penetapan APBD yang merupakan instrument yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Sulawesi Selatan terdiri dari : (1) penerimaan daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sejalan dengan alokasi dana transfer Pemerintah yang sebagian besar telah diberikan diskresi sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang menjadi hak dan kewajiban harus diadministrasikan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah selain dilakukan secara efektif dan efisien yang diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, responsivitas, efisien, efektif, akuntabilitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, responsif gender dan berwawasan lingkungan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sepanjang Tahun Anggaran 2009-2013, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun dari sisi kuantitas, pendapatan daerah tidak pernah bertumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Pendapatan Daerah

Secara garis besar, Akun Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari: (1) Bagi Hasil Pajak; (2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA); (3) Dana Alokasi Umum; dan (4) Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari: (1) Bantuan/Hibah; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Dana Darurat.

Sepanjang Tahun Anggaran 2009-2013, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp2,175 Trilyun lebih pada Tahun 2009, menjadi Rp 4,996 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Hal ini berarti dalam lima tahun terakhir, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar Rp2,7 Trilyun lebih.

Di antara ketiga kelompok pendapatan, terlihat bahwa Lain-Lain Penerimaan yang Sah mengalami peningkatan yang paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Rekening Pemerintah Provinsi sejak Tahun 2012.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009-2013
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	JENIS PENDAPATAN	PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH					Ket
		TA. 2009	TA. 2010	TA. 2011	TA. 2012	TA. 2013 (APBD Perubahan)	
I.	PAD	1.242.766.168.254,16	1.545.589.709.031,25	1.959.515.902.109,82	2.198.776.396.284,65	2.641.160.646.495,00	
A.	PAJAK DAERAH	1.044.931.821.166,00	1.334.804.020.758,00	1.729.075.998.236,50	1.949.194.027.676,00	2.336.516.471.172,00	
B	RETRIBUSI DAERAH	100.604.092.641,06	108.560.876.582,73	111.624.999.823,98	113.058.779.473,62	69.783.226.700,00	
C	HASIL PERUSDA DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	59.350.545.027,24	51.551.621.433,00	62.366.615.388,00	67.557.464.992,35	71.344.948.623,00	
D	LAIN-2 PAD YG SAH	37.879.709.419,86	50.673.190.257,52	56.448.288.661,34	68.966.124.142,68	163.516.000,00	
II.	DANA PERIMBANGAN	914.502.833.938,07	959.942.494.138,00	1.106.989.189.303,00	1.349.192.580.666,00	1.464.742.120.541,00	
A.	BAGI HASIL	206.231.439.938,07	224.389.792.670,00	248.345.220.303,00	309.478.526.666,00	310.706.342.541,00	
B	DANA ALOKASI UMUM	663.422.394.000,00	706.276.399.000,00	816.757.969.000,00	996.939.584.000,00	1.089.771.438.000,00	
C	DANA ALOKASI KHUSUS	44.849.000.000,00	29.276.302.468,00	41.886.000.000,00	42.774.470.000,00	64.264.340.000,00	
III.	LAIN2 PENDAPATAN YG SAH	18.481.139.000,00	58.543.731.728,00	44.061.750.000,00	885.994.042.700,00	890.596.560.000,00	
	TOTAL PENDAPATAN	2.175.750.141.192,23	2.564.075.934.897,25	3.110.566.841.412,82	4.433.963.019.650,65	4.996.499.327.036,00	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Pendapatan Asli Daerah

Dalam lima tahun anggaran terakhir, penerimaan PAD meningkat dari Tahun 2009 sebesar Rp. 1,242 Trilyun lebih menjadi 2,641 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Peningkatan terbesar disumbang oleh Penerimaan pajak daerah yang bertumbuh sebesar Rp 1 Trilyun lebih pada Tahun 2009 menjadi Rp2,336 Trilyun lebih pada Tahun 2013. Hal ini merupakan dampak atas pemberlakuan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang berlaku pada tahun 2011 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan, PAD mampu memberi kontribusi rata-rata sebesar 57,61 % per Tahun. Kontribusi PAD mengalami penurunan pada tahun 2012 karena meningkatnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah sejak disalurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah BOS melalui rekening Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dana Perimbangan:

Untuk Dana Perimbangan, terjadi peningkatan dari Rp. 914 Milyar lebih pada Tahun 2009 menjadi Rp1,464 Trilyun lebih pada Tahun 2013.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah TA.2009-2013 pada Tabel 3.1. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima alokasi kurang bayar dari Dana Bagi Hasil PPH dan PBB tahun 2010 yang dialokasikan dalam APBNP 2012. Selain itu, penerimaan DAU yang selama ini meningkat rata-rata sebesar 8% per tahun, khusus pada tahun 2012 meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah TA. 2009-2013 pada Tabel 3.1. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah sangat fluktuatif karena penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimiliki oleh Daerah, melainkan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.

b. Belanja Daerah

Berdasarkan kinerja pendapatan daerah yang telah dicapai tahun 2009-2013 menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan terbukti dari tahun 2009 realisasi pendapatan sebesar Rp.2.175.750.141.192,23 dan pada tahun 2012 realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp.4.433.963.019.650,65. Pertumbuhan pendapatan yang telah dicapai menjadi dasar di dalam pengelolaan belanja daerah, baik belanja langsung (BL) maupun belanja tidak langsung (BTL). Besarnya realisasi belanjatersebut diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui program-program yang berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integrasi perencanaan terhadap penganggaran daerah, serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sesuai agenda strategis yang akan tertuang dalam RPJMD 2013-2018.

Analisis Belanja Daerah adalah instrumen penting untuk mengetahui kecenderungan belanja daerah pada periode tahun 2009-2013 dan kearah mana yang diinginkan selama lima tahun ke depan (2013-2018) sesuai pencapaian visi, misi pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 3.2. Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 yang menunjukkan klasifikasi Belanja Daerah nampak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp.2,12 Trilyun lebih pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.4,9 Trilyun lebih pada Tahun 2013.

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2009 Rp.	Tahun Anggaran 2010 Rp.	Tahun Anggaran 2011 Rp.	Tahun Anggaran 2012 Rp.	Tahun Anggaran 2013 (APBD Perubahan) Rp.	Rata-Rata Pertu mbuhan (%)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.236.898.964.802,02	1.500.511.909.700,10	1.820.969.739.157,10	3.135.433.892.531,82	3,305,527,771,105.27	22.04
		58,28	60,35	57,32	68,11	64.85	
1	Belanja Pegawai	481.693.703.701,00	500.173.239.646,00	609.703.853.472,44	713.658.235.159,00	758,336,052,217,63.00	12.49
2	Belanja Bunga	229.376.483,02	146.029.132,12	65.198.380,42	-	12,500,000,000.00	(43.92)
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	-	79.196.000.580,00	97.116.151.746,00	1.205.710.313.175,00	1,039,279,401,033.00	229.89
5	Belanja Bantuan Sosial	73.519.402.054,00	25.016.900.000,00	19.510.369.538,00	-	-	
6	Belanja Bagi Hasil	362.740.343.517,00	503.954.302.768,98	630.352.515.085,24	676.635.862.601,82	891,841,585,570.64	16.31
7	Belanja Bantuan Keuangan	318.120.459.047,00	389.647.140.573,00	463.265.650.935,00	538.874.428.596,00	588,570,732,284.00	12.09
8	Belanja Tidak Terduga	595.680.000,00	2.378.297.000,00	956.000.000,00	555.053.000,00	15,000,000,000.00	136.14
B.	BELANJA LANGSUNG	885.292.826.573,20	985.647.855.797,44	1.356.073.570.598,19	1.468.214.387.895,34	2,024,544,3114,976.00	16.82
		41,72	39,65	42,68	31,89	35.15	
1	Belanja Pegawai	121.502.604.306,20	122.037.635.222,44	146.363.313.814,10	157.196.580.444,34	203,692,523,322.00	13.17
2	Belanja Barang dan Jasa	467.927.553.833,00	559.961.996.677,00	742.024.939.855,09	933.865.895.538,00	1,096,154,011,667.00	19.70
3	Belanja Modal	295.862.668.434,00	303.648.223.898,00	467.685.316.929,00	377.151.911.913,00	724,697,779,987.00	14.96
	TOTAL	2.122.191.791.375,22	2.486.159.765.497,54	3.177.043.309.755,29	4.603.648.280.427,16	5,330,072,086,081.27	19.25

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Selama periode Tahun 2009-2013, pelaksanaan APBD khususnya aspek Belanja Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi antara lain :

- (i) Proses perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sesuai jadwal yang ditetapkan, meskipun penetapan APBD masih bisa tepat waktu.
 - (ii) Realisasi belanja yang belum sesuai dengan target anggaran kas.
 - (iii) Realisasi DAK yang masih terkendala dalam pelaksanaannya.
 - (iv) Proses pengadaan barang yang masih perlu pembenahan pada SKPD/UPTD/Biro.
- Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi catatan perbaikan di masa mendatang dalam rangkai penyelenggaraan pemerintah yang baik.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisa neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu Tahun 2008-2013 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Neraca Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 - 2013

URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata-Rata
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	(%)
ASET						
ASET LANCAR	283.163.115.215,12	540.753.844.459,96	569.748.060.528,92	503.606.857.122,43	707,615,730,834.21	25,30
Kas	237.768.715.506,77	296.306.163.817,18	213.671.118.427,78	44.083.247.181,52	92,818,569,412.76	(17,91)
Kas di Kas Daerah	224.407.958.105,45	282.820.884.249,41	210.780.723.710,11	39.190.667.574,27	82,295,400,579.22	-
Kas di Bendahara Penerimaan	6.485.623.772,00	4.787.392.871,27	1.175.126.201,00	973.037.840,25	362,604,605.00	(23,16)
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.875.133.629,32	8.697.886.696,50	1.715.268.516,67	3.919.541.767,00	895,351,090.00	(3,84)
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-		
Investasi dalam Saham	-	-	-	-		
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-		
Piutang	29.032.368.336,98	195.334.598.993,72	244.458.119.830,72	280.656.799.277,38	330,337,247,002.65	171,38
Piutang Pajak	5.925.285.535,00	172.838.082.796,00	222.281.957.525,00	257.255.261.376,00	282,922,621,157.00	-
Piutang Retribusi	860.614.529,26	443.027.000,00	401.271.883,00	1.320.533.951,00	14,500,454,893.51	22,22
Piutang Dana Baqi Hasil	604.633.531,00	664.933.024,00	604.633.531,00	604.633.531,00	604,633,531.00	
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	-		
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-		
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	-	-	-	-		
Bagian Lancar Taqihan Penjualan Anqsuran	326.181.188,00	197.522.500,00	178.127.550,00	109.627.865,00	102,486,615.00	(18,14)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	
Piutang Lain-lain	21.315.653.553,72	21.191.033.673,72	20.992.129.341,72	21.366.742.554,38	20,875,113,554.00	185,37

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaannya

URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata-Rata
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	(%)
Persediaan	16.362.031.371,37	49.113.081.649,06	111.618.822.270,42	178.866.810.663,53	284.459.914.418.80	105,86
Persediaan	16.362.031.371,37	12.469.602.699,06	19.656.635.820,42	8.449.456.813,53	11,322,849,074.80	3,15
Persediaan Hibah		36.643.478.950,00	91.962.186.450,00	170.417.353.850,00	273,137,065,344.00	
INVESTASI JANGKA PANJANG	233.531.627.500,00	251.776.364.773,00	262.776.364.773,00	464.703.766.610,65	549.722.036.290.22	23,08
Investasi Nonpermanen	11.454.224.500,00	16.647.206.100,00	16.647.206.100,00	-		12,31
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-		
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-		
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-		
Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-		
Investasi Nonpermanen Lainnya	11.454.224.500,00	16.647.206.100,00	16.647.206.100,00	-		12,31
Investasi Permanen	222.077.403.000,00	235.129.158.673,00	246.129.158.673,00	464.703.766.610,65	549.722.036.290.22	25,03
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	222.077.403.000,00	235.129.158.673,00	246.129.158.673,00	464.703.766.610,65	549,722,036,290.22	25,03
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-		
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-		
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-		
ASET TETAP	9.291.203.209.395,80	9.558.319.645.633,80	9.966.822.272.086,80	10.277.171.458.032,10	10,028,608,148,936.00	2,55
Tanah	3.988.241.433.259,00	3.994.504.533.259,00	3.989.728.282.799,00	3.991.013.523.434,00	3,986,329,522,489.89	(1,63)
Tanah	3.988.241.433.259,00	3.994.504.533.259,00	3.989.728.282.799,00	3.991.013.523.434,00	3,986,329,522,489.89	(1,63)
Peralatan dan Mesin	506.745.871.400,00	594.657.340.226,00	666.350.988.614,00	723.917.411.576,00	787,247,987,802.00	12,44
Alat-alat Berat	21.092.820.000,00	25.420.409.250,00	25.570.151.750,00	27.770.816.750,00	31,420,641,750.00	13,31

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaannya

URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata-Rata
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	(%)
Alat-alat Angkutan	130.741.650.808,00	137.878.975.787,00	167.059.389.775,00	178.793.558.424,00	199,873,315,645.00	10,47
Alat Benqkel	3.535.306.483,00	5.325.023.454,00	6.949.263.954,00	8.955.616.692,00	12,422,207,954.00	45,41
Alat Pertanian dan Peternakan	12.756.753.874,00	24.383.347.874,00	27.142.054.174,00	27.336.044.174,00	28,964,419,174.00	30,03
Alat-aiat Kantor dan Rumah Tangga	209.773.595.683,00	232.753.152.243,00	249.148.789.932,00	267.131.967.363,00	282,348,390,890.00	9,29
Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.226.707.189,00	18.725.727.385,00	22.904.588.378,00	27.398.855.272,00	30,862,495,337.00	18,76
Alat Ukur	5.578.888.620,00	5.828.828.620,00	5.972.793.370,00	6.002.543.370,00	6,207,489,370.00	5,99
Alat-alat Kedokteran	61.881.182.345,00	93.939.541.295,00	107.079.757.265,00	119.719.844.415,00	129,698,634,966.00	21,99
Alat Laboratorium	44.400.586.898,00	49.479.025.818,00	53.354.657.516,00	59.154.622.616,00	63,360,366,616.00	10,17
Alat Keamanan	758.379.500,00	923.308.500,00	1.169.542.500,00	1.653.542.500,00	2,090,026,100.00	30,17
Gedung dan Bangunan	668.592.541.916,48	693.773.751.276,48	717.410.930.901,48	749.055.350.561,48	782,550,283,561.48	4,14
Banqunan Gedung	659.457.422.916,48	684.264.832.276,48	707.902.011.901,48	739.546.431.561,48	773,041,364,561.48	4,14
Bangunan Monumen	9.135.119.000,00	9.508.919.000,00	9.508.919.000,00	9.508.919.000,00	9,508,919,000.00	3,84
URAIAN	Tahun 2009 (Audited) Rp.	Tahun 2010 (Audited) Rp.	Tahun 2011 (Audited) Rp.	Tahun 2012 (Audited) Rp.	Tahun 2013 (Audited) Rp.	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.093.524.086.010,32	4.223.172.899.091,32	4.504.935.357.409,32	4.777.434.115.606,59	5,038,871,031,140.57	5,15
Jalan dan Jembatan	3.898.835.155.958,32	3.999.023.121.343,32	4.273.262.320.307,32	4.511.774.772.004,59	4,733,634,576,538.57	4,71
Banqunan Air (Irigasi}	114.420.672.855,00	141.893.175.301,00	169.227.539.855,00	179.051.289.855,00	217,875,907,855.00	20,94
Instalasi	38.214.154.347,00	39.441.924.597,00	41.493.313.597,00	42.503.743.097,00	43,152,319,097.00	5,80
Jarinqan	42.054.102.850,00	42.814.677.850,00	20.952.183.650,00	44.104.310.650,00	44,208,227,650.00	20,90
Aset Tetap Lainnya	18.055.625.066,00	19.176.395.266,00	20.969.289.191,00	22.305.631.691,00	24,490,047,766.00	7,36
Buku dan Perpustakaan	12.318.757.006,00	12.793.211.406,00	13.242.141.831,00	13.796.844.331,00	14,185,107,406.00	4,53
Baranq Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1.646.350.350,00	1.901.006.150,00	2.093.004.650,00	2.365.364.650,00	2,484,074,650.00	12,50

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaannya

URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata-Rata
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	(%)
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	4.090.517.710,00	4.482.177.710,00	5.634.142.710,00	5.634.142.710,00	6,114,642,710.00	<i>11,03</i>
Aset Tetap Renovasi			210.680.000,00	509.280.000,00	1,706,223,000.00	<i>35,43</i>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.043.651.744,00	33.034.726.515,00	67.427.423.172,00	13.445.425.163,00	261,187,317,079.47	<i>37,92</i>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.043.651.744,00	33.034.726.515,00	67.427.423.172,00	13.445.425.163,00	261,187,317,079.47	<i>37,92</i>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	(852,068,040,903.40)	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...	-	-	-	-	(852,068,040,903.40)	
DANA CADANGAN	-	-	-	-		
Dana Cadangan	-	-	-	-		
ASET LAINNYA	7.648.631.639,00	10.393.650.244,00	12.354.201.444,00	14.349.958.694,00		<i>30,85</i>
Taqihan Penjualan Angsuran	-	104.933.540,00	64.653.740,00	18.943.140,00	9,475,000.00	
Taqihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	56,000,000,000.00	
Aset Tak Berwujud	7.286.672.089,00	9.715.385.989,00	11.716.216.989,00	14.112.966.989,00	14,562,681,989.00	<i>29,91</i>
Aset Lain-Lain	361.959.550,00	573.330.715,00	573.330.715,00	218.048.565,00		
JUMLAH ASET	9.815.546.583.749,92	10.361.243.505.110,80	10.811.700.898.832,70	11.259.832.040.459,20	11,356,518,073,049.40	<i>3,62</i>
KEWAJIBAN	3.975.214.558,88	14.989.953.390,53	25.748.413.554,70	251.455.026.045,61	498,688,656,149.21	<i>296,01</i>
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.275.592.353,22	14.989.953.390,53	25.748.413.554,70	251.455.026.045,61	391,984,332,403.21	<i>316,70</i>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	1.000.480.800,00	11.603.067.055,68	25.164.608.377,25	122,243,414,284.85	
Utang Bunga	61.683.357,00	30.841.678,89	-	-	130,242,105.63	
Utang Pajak	616.773.155,00	-	38.273.116,00	336.937.881,00		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	699.622.205,66	699.622.205,66	-	-		
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-		

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaannya

URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata-Rata
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	(%)
Utang Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota			11.300.408.250,14	219.499.700.404,36	257.028.227.762,34	
Utang Janjka Pendek Lainnya	1.897.513.635,56	13.259.008.705,98	2.806.665.132,88	6.453.779.383,00	12.218.827.266,39	175,23
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	699.622.205,66	-	-	-	106.704.323.746,00	
Utang Dalam Neqeri	699.622.205,66	-	-	-	106.704.323.746,00	
Utang Luar Neqeri	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
EKUITAS DANA	9.811.571.369.190,24	10.346.253.551.720,23	10.786.163.165.278,00	11.008.377.014.413,50	10,857,829,416,900.20	3,06
Ekuitas Dana Lancar	279.887.522.861,10	525.763.891.069,43	543.999.646.974,22	252.151.831.076,82	315,631,398,431.00	13,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anqgaran (SILPA)	230.666.318.579,77	290.514.746.369,91	212.455.096.589,78	42.653.395.045,27	92,048,275,313.76	(16,96)
Pendapatan yang ditangguhkan	6.485.623.772,00	4.790.936.647,27	1.177.748.722,00	1.092.914.255,25	363,123,115.00	(28,18)
Cadangan Piutang	29.032.368.336,98	195.334.598.993,72	244.458.119.830,72	280.656.799.277,38	330,337,247,002.65	171,38
Cadangan Persediaan	16.362.031.371,37	49.113.081.649,06	111.618.822.270,42	178.866.810.663,53	284,459,914,418.80	105,86
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(2.658.819.199,02)	(13.989.472.590,53)	(25.710.140.438,70)	(251.118.088.164,61)	(391,577,161,419.21)	354,08
Ekuitas Dana Investasi	9.531.683.846.329,14	9.820.489.660.650,80	10.242.163.518.303,80	10.756.225.183.336,70	10,542,198,018,469.20	3,09
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	233.531.627.500,00	251.776.364.773,00	262.776.364.773,00	464.703.766.610,65	549,722,036,290.22	23,08
Diinvestasikan dalam Aset Tetap lainnya	9.291.203.209.395,80	9.558.319.645.633,80	9.967.032.952.086,80	10.277.171.458.032,00	10,028,608,148,936.00	2,55
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	7.648.631.639,00	10.393.650.244,00	12.354.201.444,00	14.349.958.694,00	70,572,156,989.00	30,85
Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(699.622.205,66)	-	-	-	(106,704,323,746.00)	

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaannya

URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata-Rata
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	(%)
Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.815.546.583.749,12	10.361.243.505.110,76	10.811.911.578.832,72	11.259.832.040.459,15	11.356.518.073.049,44	3,62

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Dari aspek kewajiban daerah, terlihat bahwa kewajiban pemerintah daerah semakin menurun dari tahun ke tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Untuk equitas dana lancar memperlihatkan posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu cukup signifikan peningkatan dari tahun 2008 sd tahun 2010, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2011 dan 2012.

Berdasarkan data neraca daerah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.3. serta hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4. Analisa terhadap Keuangan Daerah (Neraca dan Rasio) Provinsi Sulsel, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh Neraca serta rasio-rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas dan aktivitas) Tahun 2008 -2012 yang hasilnya menunjukkan kondisi positif.

Tabel 3.4.
Analisa Rasio Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	URAIAN	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	2	3	4	5	6	7
A.	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	4512.71%	8034.06%	3607.44%	2212.75%	200.28%
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	4288.95%	7534.55%	3279.80%	1779.25%	129.14%
B.	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0.07%	0.04%	0.14%	0.24%	2.23%
2	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas	0.07%	0.04%	0.14%	0.24%	2.28%
C.	Rasio Aktivitas					
1	Rata-rata Umur Piutang	7.88	3.84	15.97	25.80	21.61
2	Rata-rata Umur Persediaan	1.52	2.38	4.66	9.43	11.96

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Rasio lancar adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk aset lancar untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang hasilnya lebih dari 150% - 300% menunjukkan kondisi keuangan yang baik).

Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang hasilnya lebih dari 100% - 200% menunjukkan kondisi keuangan yang baik).

Rasio lancar dan rasio cepat Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek Provinsi Sulsel dalam periode tersebut dapat didanai dari aset lancar dalam periode yang sama, apabila kewajiban jangka pendek tersebut telah jatuh tempo.

Rasio Total Hutang/Kewajiban terhadap Total Aset adalah rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah daerah (makin kecil dari 1%, maka rasio ini makin baik).

Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa apabila keseluruhan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Provinsi Sulsel dalam periode tersebut telah jatuh tempo maka dapat didanai dari total aset dalam periode yang sama.

Rasio Total kewajiban terhadap ekuitas dana/modal adalah rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana pemerintah daerah (makin kecil dari 1%, maka rasio ini makin baik).

Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas Dana/Modal Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa apabila keseluruhan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Provinsi Sulsel dalam periode tersebut telah jatuh tempo, maka dapat didanai dari Ekuitas Dana/Modal dalam periode yang sama.

Rata-rata umur piutang adalah pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu beberapa hari oleh pemerintah daerah.

Rata-rata umur piutang Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa piutang Provinsi Sulsel dapat terealisasi menjadi kas dalam waktu 8 (delapan) hari pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 22 (dua puluh dua) hari.

Rata-rata umur persediaan adalah pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata persediaan dapat digunakan dalam waktu beberapa hari pada kegiatan pemerintah daerah.

Rata-rata persediaan Provinsi Sulsel tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa persediaan barang Provinsi Sulsel secara umum baru dapat digunakan setelah tersimpan sebagai persediaan selama waktu 2 (dua) hari pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 12 (dua belas) hari.

Tabel 3.5
Hasil Analisa Neraca Keuangan Pemerintah
Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Rasio Likuiditas		
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>) (%)	> 1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>) (%)	> 1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat
B	Rasio Solvabilitas		
1	Rasio total hutang terhadap total asset (<i>total debt to total asset</i>)(%)	> 1	Mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia
2	Rasio hutang terhadap modal (<i>total debt to equity</i>) (%)	> 1	Mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia
C	Rasio Aktivitas		
1	Rata-rata umur piutang (hari) (<i>Average Days</i>)	> 1	Dibutuhkan waktu 5,99 hari untuk merubah piutang menjadi Kas

NO.	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
	<i>Inventory)</i>		
2	Rata-rata umur persediaan (hari) (<i>Average Days Receivable</i>)	> 1	Dibutuhkan waktu sekitar 15,02 hari dalam penggunaan persediaan untuk pelayanan publik
NO.	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Rasio Likuiditas		
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>) (%)	150 - 300%	pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk aset lancar untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>) (%)	100 - 200%	pengukuran kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca
B	Rasio Solvabilitas		
1	Rasio total hutang terhadap total asset (<i>total debt to total asset</i>)(%)	< 1%	rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah daerah
2	Rasio hutang terhadap ekuitas (<i>total debt to equity</i>) (%)	< 1%	rasio keuangan yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana pemerintah daerah
C	Rasio Aktivitas		
1	Rata-rata umur piutang (hari) (<i>Average Days Inventory</i>)	hari	pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu beberapa hari oleh pemerintah daerah
2	Rata-rata umur persediaan (hari) (<i>Average Days Receivable</i>)	hari	pengukuran aktivitas keuangan yang menyajikan bahwa secara rata-rata persediaan dapat digunakan dalam waktu beberapa hari pada kegiatan pemerintah daerah

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kemampuan fiskal daerah (*fiscal capacity*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah secara umum. Karena itu, upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu dan sinergi antar-SKPD/unit kerja pengelola pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini, yakni pmulai tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012 telah memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan memperoleh predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut ini merupakan prestasi yang baru pertama kali diperoleh oleh suatu penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan prioritas pertama dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah sepanjang tahun 2008-2012 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penggalian potensi pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aspek kewenangan, aspek potensi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa kegiatan strategis yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:

- a. Pada tahapan ekstensifikasi, telah dilakukan penyusunan Peraturan Daerah di bidang pendapatan, masing-masing:
 - i. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - ii. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - iii. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - iv. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - v. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - vi. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - vii. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - viii. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pada tahapan intensifikasi, upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan meng-intensifkan dan meng-efektifkan kegiatan:
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah (perbaikan/renovasi tempat pelayanan, penambahan akses pelayanan pajak dan retribusi daerah);
 - ii. Penguatan kelembagaan (s.d akhir tahun 2012, UPTD Dispenda telah terbentuk pada seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan beberapa UPTD di instansi teknis untuk pelayanan Retribusi Daerah);
 - iii. Peningkatan kualitas SDM;

- iv. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah, lintas Pemerintah Daerah/sector/SKPD.
- v. Peningkatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- vi. Penegakan Sanksi;
- vii. Penyederhanaan birokrasi pelayanan (penerapan on line sistem pelayanan pajak, penerapan standar ISO 9001-2000 di kantor Samsat, Samsat Keliling, Drive Thru Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Gerai Samsat di pusat perbelanjaan);
- viii. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan public (SMS info pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan PT. Bank Sulselbar, pembentukan website)
- ix. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- x. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di sector Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Melihat perkembangan realisasi Belanja Daerah pada periode tahun 2008-2012, menunjukkan bahwa realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung lebih besar dari pada alokasi Belanja Langsung atau rata-rata sekitar 61,21 persen dari total Belanja Daerah. Realisasi Belanja Tidak Langsung menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar Rp.1,32 Trilyun lebih pada Tahun 2008 meningkat menjadi Rp.3,13 Trilyun lebih pada tahun 2012. Peningkatan Belanja Tidak Langsung tidak hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan aparatur, namun juga adanya belanja transfer yang terus meningkat yang menjadi bagian dari komponen Belanja Tidak Langsung. Bagian dari belanja tidak langsung yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2008 – 2012 adalah belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pemberian layanan dasar kepada masyarakat Provinsi Sulsel dalam bentuk program pendidikan gratis, kesehatan gratis, serta membangun dan memelihara infrastruktur.

Proporsi Belanja Modal menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar Rp.275,18 Milyar lebih pada Tahun 2008 meningkat menjadi Rp.377,15 Milyar lebih pada tahun 2012.

Tabel 3.6 dibawah ini akan menampilkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.6.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur(Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran)(Rp.)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x 100%
1	Tahun 2008	542.009.127.213,00	1.801.022.167.079,87	30,09
2	Tahun 2009	644.259.538.396,59	1.814.559.888.358,52	35,51
3	Tahun 2010	651.917.321.842,50	2.072.364.882.071,95	1,46
4	Tahun 2011	781.538.861.604,45	2.615.875.448.949,66	29,88
5	Tahun 2012	892.058.473.626,62	3.985.495.621.514,46	22,38
			Rata-rata %	29,86

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Berdasarkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan pada Tabel 3.6 di atas, menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur rata-rata pertahun sekitar 29,86 persen, hal ini berarti ada sekitar 70,14 persen pendapatan daerah diperuntukkan untuk kegiatan lain yang menunjang pencapaian visi, misi Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan porsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang secara rata-rata sebesar 29,86 persen per tahun, hal itu masih dibawah batas toleransi yaitu sebesar 30 persen dari Total Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun pemerintah Provinsi Sulsel sangat mengutamakan kepentingan anggaran pelayanan publik terbukti secara rata-rata selama lima tahun total pengeluaran sebesar 70,14 persen per tahun dari Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam analisis ini kebutuhan belanja untuk aparatur dipandang ekuivalen dengan kebutuhan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tersedia tidak berkaitan langsung dengan program ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Terkait dengan ini maka pada periode pemerintah lima tahun kedepan, peningkatan pendapatan daerah diupayakan meningkat lebih tinggi dibanding periode yang lalu.

Kebijakan Belanja Daerah untuk lima tahun kedepan secara umum diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja daerah wajib berupa gaji dan tunjangan pegawai lainnya sekira 10-20 persen per tahun.
- 2) Meningkatkan terus proporsi belanja yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar pada masyarakat seperti; pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pengalokasian anggarannya melalui kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung. Khusus Belanja Modal pengalokasian anggarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Memenuhi proporsi Belanja Daerah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah, Prioritas Pembangunan dan Urusan pemerintahan.

Arahan kebijakan Belanja Daerah yang dilaksanakan pada masa lalu tetap menjadi acuan kebijakan pada periode Tahun 2013-2018, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Prioritisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Belanja untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Alokasi penggunaan dana perimbangan diperuntukkan sesuai dengan sasarannya seperti (i) penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemukiman, irigasi, jalan, jembatan dan drainase; (ii) dana alokasi umum diprioritaskan untuk membiayai gaji dan tunjangan pns lainnya, alokasi anggaran fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan, sosial, pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum bagi masyarakat; (iv) alokasi penggunaan dana alokasi khusus dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Alokasi Belanja Pegawai diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, belanja DPRD yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dialokasikan pula anggaran tambahan penghasilan bagi pegawai.
- 5) Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa meliputi penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dengan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pemberian Hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib.
- 7) Belanja Bantuan sosial kepada Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan

untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari antara lain :

- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dispisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
- f. Penerimaan Piutang Daerah;
- g. Penerimaan Pembayaran Askes;
- h. Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga;
- i. Penerimaan Piutang Pihak Ketiga;

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari antara lain:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- c. Pembayaran Pokok Utang;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah;
- e. Pembayaran Utang Belanja.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2013-2018 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu.

a. Surplus/Defisit

Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah periode lalu, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Kondisi anggaran defisit/ surplus tidak selalu sama dengan realisasi anggaran. Pada periode pemerintahan sebelumnya Realisasi APBD berada posisi defisit dan/atau surplus. Posisi realisasi anggaran defisit terjadi pada Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012, sedangkan posisi realisasi anggaran surplus terjadi pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Posisi realisasi anggaran defisit Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.895 Juta lebih, dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.66,47 Milyar lebih dan Tahun Anggaran 2012 defisit anggaran sebesar Rp.169,68 Milyar lebih. Sedangkan posisi surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.53,55 Milyar lebih dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.77,91 Milyar lebih.

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Tahun 2008 Rp.	Tahun 2009 Rp.	Tahun 2010 Rp.	Tahun 2011 Rp.	Tahun 2012 Rp.	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN	2.133.624.782.881,42	2.175.750.141.192,23	2.564.075.934.897,33	3.110.566.841.412,82	4.433.963.019.650,65	20,92
1.1.	PAD	1.238.690.401.106,42	1.242.766.168.254,16	1.545.589.709.031,33	1.959.515.902.109,82	2.198.776.396.284,65	15,92
1.2.	Pendapatan Transfer	894.934.381.775,00	914.502.833.938,07	959.942.494.138,00	1.106.989.189.303,00	1.349.192.580.666,00	11,09
1.3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	18.481.139.000,00	58.543.731.728,00	44.061.750.000,00	885.994.042.700,00	
2	BELANJA	2.134.520.570.348,66	2.122.191.791.375,22	2.486.159.765.497,54	3.177.043.309.755,29	4.603.648.280.427,16	22,32
2.1.	Belanja Operasi	1.855.588.427.133,66	1.825.733.442.941,22	2.180.133.244.599,54	2.708.401.992.826,29	4.225.941.315.514,16	24,52
2.2.	Belanja Modal	275.180.935.215,00	295.862.668.434,00	303.648.223.898,00	467.685.316.929,00	377.151.911.913,00	11,20
2.3.	Belanja Tidak Terduga	3.751.208.000,00	595.680.000,00	2.378.297.000,00	956.000.000,00	555.053.000,00	28,35
	Surplus/Defisit	(895.787.467,24)	53.558.349.817,01	77.916.169.399,79	(66.476.468.342,47)	(169.685.260.776,51)	

Sumber : BPKD dan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Defisit anggaran ditutup dengan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Surplus anggaran Provinsi Sulsel ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dengan rasio antara defisit dengan nilai PDRB berlaku transaksi keuangan Provinsi Sulsel pada masa pemerintahan sebelumnya masih cukup baik. Jika dihubungkan dengan ketentuan batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan yang memberi batasan maksimal defisit adalah 3 persen kecuali tahun 2012 keatas dengan batas maksimal defisit adalah 6 persen maka defisit anggaran Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2008 sebesar 0,04 persen, Tahun Anggaran sebesar 2011 sebesar 2,14 persen dan Tahun Anggaran 2012 sebesar 3,83 persen, masih tergolong baik.

Pada Tabel 3.7 diatas nampak bahwa perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah menghasilkan data surplus/defisit. Data defisit atau surplus pada tahun anggaran ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga pada akhirnya diperoleh defisit atau surplus secara riil. Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012 APBD Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan data defisit, sedangkan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 APBD Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan data surplus. Posisi surplus dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan belanja daerah, sedangkan posisi defisit dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan belanja daerah.

b. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam APBD Provinsi Sulsel periode Tahun Anggaran 2008-2012 diperoleh gambaran bahwa Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012 mengalami defisit dan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 mengalami surplus. Tingkat realisasi penerimaan pembiayaan berfluktuasi dengan kisaran anggaran diatas Rp.200 Milyar lebih kecuali realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp.183 Milyar lebih, dengan rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan

selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.225 Milyar lebih, yang didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagai penyumbang terbesar dari angka realisasi penerimaan pembiayaan.

Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sangat berfluktuasi dengan rata-rata realisasi pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.7,8 Milyar lebih, yang didominasi oleh Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Pembiayaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Tahun 2008 Rp.	Tahun 2009 Rp.	Tahun 2010 Rp.	Tahun 2011 Rp.	Tahun 2012 Rp.
3.	PEMBIAYAAN					
3.1.	Penerimaan Daerah	208.259.976.519,38	183.706.090.468,42	230.448.199.175,77	290.514.746.369,91	212.338.655.821,78
3.2.	Pengeluaran Daerah	3.245.853.966,00	6.598.121.705,66	17.849.622.205,65	11.699.622.205,66	-
	Pembiayaan Netto	205.014.122.553,38	177.107.968.762,76	212.598.576.970,12	278.815.124.164,25	212.338.655.821,78
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	204.118.335.086,14	230.666.318.579,77	290.514.746.369,91	212.338.655.821,78	42.653.395.045,27

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 3.9 memperlihatkan defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2008-2012. Pada tabel terdahulu nampak bahwa posisi defisit anggaran terjadi pada APBD Tahun Anggaran 2008, 2011 dan 2012, yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri yaitu maksimal 3 persen, kecuali Tahun Anggaran 2012 ditetapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 6 persen.

Tabel 3.9.
Defisit Riil Anggaran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.133.624.782.881,42	2.175.750.141.192,23	2.564.075.934.897,33	3.110.566.841.412,82	4.433.963.019.650,65
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	2.134.520.570.348,66	2.122.191.791.375,22	2.486.159.765.497,54	3.177.043.309.755,29	4.604.089.225.379,16
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.245.853.966,00	6.598.121.705,66	17.849.622.205,65	11.699.622.205,66	-
A	Defisit Riil	(4.141.641.433,24)	46.960.228.111,35	60.066.547.194,14	(78.176.090.548,13)	(170.126.205.728,51)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	208.233.768.425,38	183.232.856.332,42	230.447.065.415,77	290.514.746.369,91	212.338.655.821,78
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaannya

NO.	URAIAN	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
	Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pembayaran ASKES	26.208.094,00	-	-	-	-
8	Penerimaan Pembayaran Pihak ke III	-	78.006.136,00	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Pihak ke III	-	395.228.000,00	1.133.760,00	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	208.259.976.519,38	183.706.090.468,42	230.448.199.175,77	290.514.746.369,91	212.338.655.821,78
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	204.118.335.086,14	230.666.318.579,77	290.514.746.369,91	212.338.655.821,78	42.212.450.093,27

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah dana yang dapat dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya. Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2008 sebesar Rp.204 Milyar lebih meningkat menjadi Rp.230 Milyar lebih pada tahun 2009 atau naik 13,01 persen dari tahun sebelumnya, selanjutnya meningkat lagi menjadi sebesar Rp.290 Milyar pada Tahun 2010 atau naik 25,95 persen, namun pada Tahun Anggaran 2011 mengalami penurunan sebesar Rp.212 Milyar lebih atau turun -26,91 persen dan pada Tahun Anggaran 2012 menurun lagi menjadi sebesar Rp.42 milyar lebih atau menurun -80,12 persen.

Dengan mencermati tabel tersebut diatas, komponen terbesar dalam menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SiLPA dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan, kebijakan penutup defisit diupayakan secara bertahap pada sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya, artinya pemerintah provinsi Sulsel perlu terus meningkatkan upaya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. SiLPA yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain : (i) sisa penghematan belanja atau efisiensi anggaran belanja; (ii) sisa anggaran karena kegiatan yang tertunda yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; (iii) yang pelampauan penerimaan pendapatn asli daerah.

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Proporsi dari total defisit riil				
		Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	(5.027,81)	390,19	383,65	(371,62)	(124,81)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	Proporsi dari total defisit riil				
		Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
	dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pembayaran ASKES	(0,63)	-	-	-	-
8	Penerimaan Pembayaran Pihak ke III	-	0,17	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Pihak ke III	-	0,84	0,00	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(5.028,44)	391,20	383,65	(371,62)	(124,81)

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Dari tabel 3.10 nampak item-item penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulsel tahun Anggaran 2008-2012, yang hanya terdiri dari dua komponen yaitu SiLPA dan komponen penerimaan pembiayaan lainnya.

Komponen SiLPA menempati posisi terbesar dalam menutup defisit riil yaitu menutup defisit pada Tahun 2008 sebesar 5.027,81 persen, dan pada tahun 2011 menurun sebesar 371,62 persen selanjutnya menurun lagi pada tahun 2012 sebesar 124,81 persen.

Tabel 3.11.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil
Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Rata-rata Pertum- buhan %
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	204.118.335.086,14	100,00	230.666.318.579,77	100,00	290.514.746.369,91	100,00	212.338.655.821,78	100,00	42.653.395.045,27	100,00	(16,97)
2	Pelampauan penerimaan PAD	16.793.275.015,33	8,23	(76.978.082.563,81)	(33,37)	85.543.798.098,65	29,45	(12.202.551.854,38)	(5,75)	(168.973.716.007,65)	(396,16)	100,24
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(13.966.018.001,40)	(6,84)	(2.407.867.912,93)	(1,04)	(14.660.748.536,00)	(5,05)	15.869.829.083,00	7,47	21.720.883.639,00	50,92	63,68
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(4.000.000.000,00)	(1,96)	435.000.000,00	0,19	(423.000.000,00)	(0,15)	-	-	(83.999.587.300,00)	(196,94)	(102,03)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	205.310.723.944,21	100,58	333.366.235.379,89	144,52	220.272.438.416,91	75,82	208.671.000.798,82	98,27	273.905.814.713,92	642,17	13,61
6	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	26.208.094,00	0,01	(20.412.244.617,72)	(8,85)	(218.119.404,00)	(0,08)	-	-	-	-	(19.546,05)
7	Sisa Pengeluaran Pembiayaan	45.853.966,00	0,02	(3.336.721.705,66)	(1,45)	377.794,35	0,00	377.794,34	0,00	-	-	(1.894,21)

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 3.11 memperlihatkan SiLPA yang terjadi selama periode tahun 2008-2012 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (i) pelampauan penerimaan PAD dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 100,24 persen pertahun; (ii) pelampauan penerimaan dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 63,68 persen pertahun; (iii) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (102,03) persen pertahun; (iv) sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,61 persen pertahun; (v) pelampauan penerimaan pembiayaan dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (19.546,06) persen pertahun; dan (vi) sisa pengeluaran pembiayaan dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (1.894,21) persen pertahun;

Faktor penyumbang terbesar dalam posisi SiLPA selama periode tahun 2008-2012 adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,61 persen pertahun, dan data terbesar adalah pada Tahun 2009 yaitu sebesar Rp.333 Milyar lebih, selanjutnya pada Tahun 2012 sebesar Rp.273 Milyar lebih, dan pada Tahun 2010 sebesar Rp.220 milyar lebih lalu selanjutnya pada tahun 2008 dan 2011 sebesar rata-rata diatas Rp.200 Milyar lebih.

Tabel 3.12.

**Sisa Lebih Riil pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012**

NO.	URAIAN	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	204.164.189.052,14	234.003.040.285,43	290.514.368.575,68	212.338.278.027,44	42.212.450.093,27
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	45.853.966	3.336.721.705,66	377.794,35	(377.794,34)	
3	Kegiatan Lanjutan					
	<i>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i>	<i>204.118.335.086,14</i>	<i>230.666.318.579,77</i>	<i>290.514.746.369,91</i>	<i>212.338.655.821,78</i>	<i>42.212.450.093,27</i>

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya aspek analisis pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- (i) Realisasi kebijakan anggaran surplus khususnya pada Tahun 2009 dan 2010, sementara kebijakan anggaran defisit terjadi pada Tahun 2008, 2011 dan 2012.

Pada kondisi anggaran defisit, kebijakan penerimaan pembiayaan lebih diutamakan dari SiLPA daripada sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

3.3. Kerangka pendanaan Tahun 2013-2018

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari Anggaran Pemerintah Daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yakni 2013-2018. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang harus dianggarkan setiap tahun anggaran. Untuk belanja tidak langsung, secara absolute meningkat setiap tahun dari Rp.921 Milyar lebih pada Tahun 2008 menjadi Rp.1,70 Trilyun lebih pada Tahun 2012 dengan pertumbuhan yang cukup fluktuatif rata-rata 17,05 persen pertahun. Pada tahun 2012, keuangan daerah mengalami defisit anggaran. Komponen belanja wajib pada belanja tidak langsung terbesar adalah belanja bagi hasil kab/kota dengan rata-rata Rp.727,98 milyar lebih per tahun atau rata-rata pertumbuhan 10,90 persen dari total belanja wajib tidak langsung. Untuk belanja tambahan penghasilan bertumbuh cukup signifikan pada tahun 2012 dan diprediksikan mengalami peningkatan setiap tahun pada lima tahun ke depan.

Tabel 3.13.
Pengeluaran Periodik, Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	Tahun 2008 (real)	Tahun 2009 (real)	Tahun 2010 (real)	Tahun 2011 (real)	Tahun 2012 (real)	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	921.963.532.851,87	1.048.412.288.733,03	1.066.954.540.817,45	1.311.647.249.308,86	1.702.462.073.961,84	17,05
		95,37	96,07	95,47	96,22	97,17	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	345.198.327.147,49	389.226.920.452,08	404.177.948.017,00	441.267.307.431,81	463.253.625.759,00	7,69
2	Tambahan Penghasilan PNSD	21.112.127.000,00	52.935.650.000,00	73.184.625.272,00	133.103.182.844,65	197.301.378.273,00	79,77
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	10.464.726.270,00	10.010.501.509,00	10.267.872.402,00	11.037.647.614,01	11.643.140.190,00	2,80
4	Biaya Pungut PBB	3.142.888.693,00	1.814.924.846,00	2.193.134.920,00	2.174.007.413,00	-	-
5	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	2.460.000.000,00	1.062.000.000,00	738.000.000,00	(21,83)
6	Insentif Pajak Daerah	54.625.748.167,51	61.095.656.580,51	30.114.628.106,50	40.611.219.358,98	55.129.469.859,62	7,93
7	Insentif Retribusi Daerah	-	-	-	245.059.020,00	599.990.689,00	36,21
8	Insentif Komisioner	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Bunga	400.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	(32,29)
10	Belanja Hibah PILKADA	-	-	-	-	245.758.368.075,00	-
11	Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	487.019.715.573,87	532.928.635.345,44	544.406.332.099,95	681.996.825.626,41	727.988.101.116,22	10,90
							-
B	BELANJA LANGSUNG	44.757.459.149,22	42.881.694.946,00	50.673.022.109,20	51.574.415.415,00	49.548.226.295,00	2,96
		4,63	3,93	4,53	3,78	2,83	
1	Belanja telepon	4.185.938.891,00	4.041.587.823,00	4.126.851.386,00	3.936.199.743,00	3.628.278.700,00	(3,45)
2	Belanja air	2.139.695.400,00	2.300.844.235,00	2.094.901.609,96	2.453.326.450,00	2.693.226.000,00	6,37
3	Belanja listrik	9.550.444.500,00	10.447.697.186,00	13.439.902.176,04	14.267.429.702,00	14.312.827.592,00	11,13
4	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	89.650.000,00	90.000.000,00	280.222.626,00	166.215.626,00	257.241.504,00	56,46
5	Belanja Premi Asuransi	1.953.084.750,00	1.843.177.000,00	2.067.660.000,00	2.183.100.000,00	2.018.160.000,00	1,14
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.981.756.108,22	21.483.971.702,00	26.260.884.311,20	25.949.371.394,00	24.688.239.499,00	2,42
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.152.839.500,00	1.517.367.000,00	1.777.100.000,00	2.203.822.500,00	1.566.653.000,00	(4,33)
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.704.050.000,00	1.157.050.000,00	625.500.000,00	414.950.000,00	383.600.000,00	(29,81)
							-
C	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	700.000.000,00	761.400.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-	0,18
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	700.000.000,00	761.400.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-	0,18
							-
	TOTAL (A+B+C)	967.420.992.001,09	1.092.055.383.679,03	1.118.327.562.926,65	1.363.921.664.723,86	1.752.010.300.256,84	16,43

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel sebelumnya, secara umum disimpulkan mengenai analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain :

- (i) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung) dalam APBD setiap tahunnya rata-rata 29,86 persen dari total belanja daerah yang berarti masih tergolong rendah sehingga kondisi ini masih searah yang diinginkan oleh nasional mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur berkisar 71,42 persen.
- (ii) Faktor penyebab yang melatarbelakangi besaran proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung) antara lain karena didalam belanja tidak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah serta belum diterapkannya sistem penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standar Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.

3.3.2. Proyeksi Data

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2013-2018. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu : (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapitadan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti perkiraan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Tabel 3.14
Asumsi APBD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

No	Asumsi	Tahun					
		2013 APBD Perubahan	2014 APBD Perubahan	2015 APBD Perubahan	2016	2017	2018
I.	Ekonomi Makro Daerah						
A.	Pertumbuhan Ekonomi	7,63	7,57	7,70	7,80	8,10	8,30
B.	Penduduk Miskin (Persen)	10,32	9,54	9,34	8,86	8,38	7,92
C.	Pengangguran Terbuka (Persen)	5,10	5,10	5,0	5,0	4,9	4,8
D.	Angka Melek Huruf	88,69	90	90,41	90,65	90,87	91,20
E.	Pendapatan Per	30,67	35,97	40,56	46,25	52,79	60,20

No	Asumsi	Tahun					
		2013 APBD Perubahan	2014 APBD Perubahan	2015 APBD Perubahan	2016	2017	2018
	Kapita (Juta)						
II.	Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal						
A.	PAD (Rp. Juta)	2.641.160	3.128.864	3.432.698	3.566.647	3.811.465	4.084.430
B.	Dana Perimbangan (Rp. Juta)	1.464.742	1.575.574	1.740.160	1.940.800	2.908.000	3.335.000
C.	Pendapatan lain- lain yang sah (Rp Juta)	890.596	942.136	1.258.021	1.285.000	1.302.250	1.333.000

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Pertumbuhan pendapatan diharapkan semakin membaik, dengan asumsi kegiatan ekonomi sektor riil juga meningkat sehingga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam periode Tahun 2013-2018, total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat sebesar 58%, dimana PAD diharapkan meningkat sebesar 71%, Dana Perimbangan 42 % dan Pendapatan lain-lain yang sah 44%.

a. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaansumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai dengan akhir periode RPJMD ini, ditargetkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 57%.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal Daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena mampu memberi kontribusi sekitar 89% terhadap PAD atau 49 % terhadap APBD. Mengingat dampaknya yang begitu besar, maka pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;

- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, Samsat Keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
 - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
 - e) membentuk system pembayaran pajak melalui *electronic payment(e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan system pembayaran pajak yang *face to face* dengan *fiscus*.
 - f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

b. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013-2018

Beberapa kondisi yang mempengaruhi pendapatan daerah secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, regulasi, iklim usaha yang kondusif, keamanan dan stabilitas sosial politik, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan asumsi semua kondisi tersebut di atas berada pada tingkat yang optimum, dan tidak ada perubahan regulasi atau regulasi baru yang bersifat kontraproduktif dengan kelancaran pengelolaan pendapatan daerah, maka dipredikasi pendapatan daerah akan terus meningkat secara signifikan sebagaimana dalam tabel berikut ini.

c. Belanja Daerah pada tahun 2013 - 2018

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka Pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/ mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan (2013-2018) dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan public terutama masyarakat miskin yang kurang beruntung (Pro-Poor Planning, Budgeting, dan Monitoring), percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas (decent job) serta peningkatan kualitas lingkungan hidup (enviroment).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

URAIAN PENDAPATAN		APBD Perubahan 2013	APBD Perubahan 2014	APBD Perubahan 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018
I	Pendapatan Asli Daerah	2,641,160,646,495	3,128,864,413,870	3,432,698,249,296	3,566,647,750,000	3,811,465,000,000	4,084,430,000,000
a	Pajak Daerah	2,336,516,471,172	2,807,473,546,589	3,067,502,651,500	3,133,600,500,000	3,332,705,000,000	3,543,000,000,000
b	Retribusi Daerah	69,783,226,700	84,296,297,700	93,119,020,200	118,725,250,000	126,460,000,000	137,180,000,000
c	Hasil Pengerjaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	71,344,948,623	74,599,105,137	89,014,306,746	99,000,000,000	112,100,000,000	132,500,000,000
d	Lain-lain PAD yg Sah	163,516,000,000	162,495,464,444	183,062,270,850	215,322,000,000	240,200,000,000	271,750,000,000
II	Dana Perimbangan	1,464,742,120,541	1,575,574,370,734	1,740,160,455,000	1,940,800,900,000	2,908,000,000,000	3,335,000,000,000
a	Dana Bagi Hasil (DBH)	310,706,342,541	292,999,149,734	281,792,298,000	290,800,900,000	308,000,000,000	335,000,000,000
b	Dana Alokasi Umum	1,089,771,438,000	1,209,598,741,000	1,180,010,167,000	1,250,000,000,000	2,100,000,000,000	2,400,000,000,000
c	Dana Alokasi Khusus	64,264,340,000	72,976,480,000	278,357,990,000	400,000,000,000	500,000,000,000	600,000,000,000
III	Lain2 Pendapatan Yang Sah	890,596,560,000	946,136,777,000	1,258,021,585,000	1,285,000,000,000	1,302,250,000,000	1,333,000,000,000
a	Hibah	9,329,710,000	13,517,291,000	9,765,155,000	9,500,000,000	7,250,000,000	7,500,000,000
b	Dana Penyesuaian	881,266,850,000	932,619,486,000	1,248,256,430,000	1,275,500,000,000	1,295,000,000,000	1,325,500,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		4,996,499,327,036	5,650,575,561,604	6,430,880,289,296	6,792,448,650,000	8,021,715,000,000	8,752,430,000,000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Kebijakan belanja daerah tahun 2013-2018 diarahkan untuk mendukung *pencapaian* sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu : Gratis Lima juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan, Gratis modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa, Pembangunan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kab/Kota di Sulawesi Selatan, membuka 500 ribu lapangan kerja baru dalam rangka penurunan presentase jumlah pengangguran dan Gratis Paket kualitas Rumah Rakyat Miskin, Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3, Gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding Scholl untuk Guru SD, SMP, SMA, Guru mnegaji, Muballig, Khatib dan Alim Ulama serta mengentaskan 4 Kabupaten Daerah Tertinggal (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Toraja Utara, Jenepono dan Kepulauan Selayar). Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk mendukung pengembangan aktifitas ekonomi yang kesemuanya berujung pada peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp. 30 juta per tahun.

Serta program pendidikan dan kesehatan gratis adalah suatu program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan yang termasuk dalam program prioritas yang harus dilaksanakan dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban dari peraturan perundang-undangan. Proyeksi SiLPA Riil Tahun 2013-2018 diperkirakan mengalami kenaikan minimal 10% seaperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Proyeksi SiLPA Riil Pemerintah
Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018

URAIAN	Realisasi Tahun Dasar 2012	Tahun Proyeksi					
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	42.212.450.093,	46.433.695.102,	51.077.064.612,	56.184.771.074,	61.803.248.181,	67.983.572.999,	74.781.930.299,68

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Berdasarkan data-data diatas maka perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan dalam jangka waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2013-2018 disajikan sebagai berikut :

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2012-2017) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2013 – 2018

NO	URAIAN	Tahun Proyeksi					
		Tahun 2013 APBD Perubahan	Tahun 2014 APBD Perubahan	Tahun 2015 APBD Perubahan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan	4.996.499.327.036,00	5.650.575.561.606,00	6.430.880.289.296,00	6.792.448.650.000,00	8.021.715.000.000	8.752.430.000.000
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	46.433.695.102,60	51.077.064.612,86	-	-	-	-
4	Total Penerimaan	5.330.072.086.081,00	6.084.919.513.173,00	6.604.614.596.360,82	7.072.616.164.609,96	8.185.751.462.673,29	9.046.304.629.630,17
	Dikurangi :						
5	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.920.816.230.608,16	2.083.734.310.778,23	2.415.853.722.183,59	2.635.374.876.055,16	3.109.351.937.024,86	3.190.016.672.065,75
6	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.148.183.063.023,44	3.601.894.381.834,62	3.735.271.898.890,55	3.991.407.172.126,39	4.026.913.135.974,86	4.489.024.258.233,93

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulsel Tahun 2013 – 2018

NO.	URAIAN	Proyeksi					
		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017	Tahun 2018 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.148.183.063.023,44	3.601.894.381.834,62	3.735.271.898.890,55	3.991.407.172.126,39	4.026.913.135.974,86	4.489.024.258.233,93
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	2.071.809.060.121,00	2.251.837.963.362,59	2.288.625.023.850,75	2.494.235.820.021,32	2.528.245.283.388,52	2.846.633.051.328,05
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Dikurangi :						
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	62.612.735.559,22	60.717.058.933,00	71.393.224.908,20	78.823.659.915,00	83.467.541.955,00	87.586.706.959,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.630.000.000,00	-	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	92.000.000.000,00
II	Total rencana pengeluaran prioritas (IIa+IIb-IIc-IId)	2.007.566.324.561,78	2.191.120.904.429,59	2.081.231.798.942,55	2.279.412.160.106,32	2.308.777.741.433,52	2.667.046.344.369,05
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I+II)	5.155.749.387.585,22	5.793.015.286.264,21	5.816.503.697.833,10	6.270.819.332.232,72	6.335.690.877.408,38	7.156.070.602.602,98
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	3.572.588.057.332,94	3.621.572.333.983,04	3.840.314.290.001,92	4.129.059.074.547,68	4.618.168.172.969,12	4.793.461.148.839,08
	Dikurangi :						
III.b	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.858.203.495.048,94	2.023.017.251.845,23	2.208.460.497.275,39	2.420.551.216.140,16	2.889.884.395.069,86	3.010.429.965.106,75
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	1.714.384.562.284,00	1.598.555.082.137,80	1.631.853.792.726,53	1.708.507.858.407,52	1.728.283.777.899,27	1.783.031.183.732,33
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	(573.767.823.822,34)	(187.781.604.732,77)	22.186.307.221,48	3.487.153.612,55	(10.148.383.357,94)	38.946.730.132,55

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Berdasarkan kebijakan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II, Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapat Prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapat alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.19
Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran
Provinsi Sulawesi Selatan

KELOMPOK PRIORITAS	KETENTUAN UMUM
1	2
PRIORITAS I (KP I)	<p>Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku.</p> <p>Program KP I terdiri dari kebijakan prioritas yaitu Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS, Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan, Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa, dukungan untuk fasilitasi dan regulasi pembangunan/pengembangan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kab/Kota di Sulawesi Selatan, Membuka 500 ribu lapangan kerja baru, Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin, Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA, Melanjutkan kesehatan gratis, Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas, Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama.</p> <p>Program KP I juga memuat kebijakan strategis antara lain Program Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, dan Keolahragaan; Program Kapasitas Infrastruktur Daerah; Program Pengembangan Kawasan Strategis; dan Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi. KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan.</p>
PRIORITAS II (KP II)	Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran

KELOMPOK PRIORITAS	KETENTUAN UMUM
	<p>dari analisis per urusan.</p> <p>KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu</p>
<p>PRIORITAS III (KP III)</p>	<p>KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga.</p> <p>Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.</p>

Berdasarkan uraian ketentuan umum dan pertimbangan-pertimbangan pada Tabel 3.19, maka jumlah alokasi anggaran pembangunan masing-masing prioritas seperti dituangkan pada Tabel 3.19

Tabel 3.20
Jumlah Anggaran Berdasarkan Kelompok Prioritas
Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2013-2018

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN					
		APBD Perubahan 2013	APBD Perubahan 2014	APBD Perubahan 2015	2016	2017	2018
1	KP I	1.633.267.401.694,00	2.028.565.531.625,00	2.101.639.395.081,67	2.079.840.976.288,56	2.211.200.838.015,74	2.320.333.729.916,53
2	KP II	391.276.913.282,00	479.284.808.185,00	492.635.237.956,11	562.859.609.440,40	554.922.589.912,42	584.968.719.408,04
3	KP III	3.305.527.771.105,00	3.574.931.948.363,00	4.010.339.963.323,04	4.429.915.578.881,00	5.419.628.034.745,13	6.141.002.180.305,60
		5.330.072.086.081,00	6.084.919.513.173,00	6.604.614.596.360,82	7.072.616.164.609,96	8.185.751.462.673,29	9.046.304.629.630,17

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 3.21
Jumlah Anggaran Berdasarkan Belanja Lansung dan Tidak Lansung
Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2013-2018

NO.	BELANJA	TAHUN					
		APBD Perubahan 2013	APBD Perubahan 2014	APBD Perubahan 2015	2016	2017	2018
1	BELANJA LANGSUNG	2.024.544.314.976,00	2.509.987.564.810,00	2.594.274.633.037,78	2.642.700.585.728,96	2.766.123.427.928,16	2.906.302.449.324,57
		37,98	41,25	39,28	37,37	33,79	32,12
2	BELANJA TDK LANGSUNG	3.305.527.771.105,00	3.574.931.948.363,00	4.010.339.963.323,04	4.429.915.578.881,00	5.419.628.034.745,13	6.141.002.180.305,60
		62,02	58,75	60,72	62,63	66,21	67,88
		5.330.072.086.081,00	6.084.919.513.173,00	6.604.614.596.360,82	7.072.616.164.609,96	8.185.751.462.673,29	9.046.304.629.630,17

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 3.22
KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
		APBD Perubahan	APBD Perubahan	APBD Perubahan	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
				-			
	KELOMPOK PRIORITAS I	1,633,267,401,694.00	2,028,565,531,625.00	2,101,639,395,081.67	2,079,840,976,288.56	2,211,200,838,015.74	2,320,333,729,916.53
1	Dinas Pendidikan	40,291,775,000.00	98,848,978,800.00	84,261,464,251.00	136,001,830,005.00	155,107,996,918.00	162,863,396,763.90
						-	-
2	Dinas Kesehatan + BKOM	9,046,246,000.00	17,081,946,416.00	23,751,991,189.00	24,198,674,836.49	25,408,608,578.31	26,679,039,007.22
						-	-
						-	-
3	UPTD PUS. PLYN KESH. GIGI & MULUT	4,350,000,000.00	5,988,259,334.00	7,182,688,382.00	7,253,394,732.43	7,616,064,469.06	7,996,867,692.51
4	UPTD AKPER ANGING MAMMIRI	10,550,000,000.00	10,383,977,000.00	8,198,750,000.00	11,700,675,000.00	12,285,708,750.00	12,899,994,187.50
5	UPTD BALAI KES. KULIT, KLMN & KSMTK	3,150,000,000.00	3,765,000,000.00	4,481,479,186.00	4,937,562,500.00	5,184,440,625.00	5,443,662,656.25
6	UPTD BALAI KESH KERJA MASY.	2,009,473,000.00	2,857,129,868.00	2,853,576,394.76	2,826,626,323.45	3,467,957,639.63	3,641,355,521.61
7	UPTD BALAI PELAYANAN KESEHATAN	1,750,000,000.00	2,009,406,749.00	2,999,393,529.00	2,961,128,139.58	3,609,184,546.56	3,789,643,773.89
8	UPTD TRANFUSI DARAH	6,150,000,000.00	7,938,007,651.00	9,669,894,197.00	8,633,208,015.44	9,064,868,416.21	9,868,111,837.02
9	UPTD RS SAYANG RAKYAT	12,715,408,900.00	17,838,824,622.00	18,147,901,562.00	16,549,619,208.85	17,377,100,169.30	18,245,955,177.76
						-	-
10	RSUD Labuang Baji	51,191,498,449.00	55,446,286,484.00	75,104,266,934.00	72,941,511,165.85	75,088,586,724.15	77,918,016,060.35
						-	-
11	RSKD	38,982,857,409.00	41,314,363,698.00	69,843,619,649.48	61,496,146,246.71	62,570,953,559.04	64,799,501,236.99
						-	-
12	RSU. Haji Makasar	30,523,488,600.00	38,596,726,089.00	65,287,981,886.00	57,051,308,506.22	63,353,873,931.53	68,821,567,628.11
						-	-
13	RSIA Sitti Fatimah	17,668,517,900.00	17,708,256,250.00	25,681,226,310.57	26,089,304,331.87	26,893,769,548.46	27,763,458,025.88
						-	-
14	Rumah Sakit Bersalin Pertiwi	15,434,191,400.00	22,871,182,300.00	40,949,398,916.00	36,266,935,459.65	40,330,282,232.63	43,496,796,344.27
						-	-
15	Dinas Bina Marga	624,378,360,293.00	715,032,532,729.00	592,332,481,051.00	422,181,131,120.33	452,290,187,676.35	475,954,697,060.16
						-	-
16	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	122,821,557,500.00	111,059,991,942.00	154,550,999,817.00	173,740,987,900.29	182,228,037,295.30	187,049,439,160.07
						-	-
10	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	98,361,825,000.00	141,942,419,500.00	158,591,685,000.00	161,763,518,700.00	169,851,694,635.00	173,344,279,366.75
						-	-

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
		APBD Perubahan	APBD Perubahan	APBD Perubahan	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
17	BAPPEDA	29,176,000,000.00	34,889,025,000.00	31,995,593,832.00	33,692,223,626.42	37,376,834,807.74	39,245,676,548.13
						-	-
18	Dinas Perhubungan, Kom & Informatika	24,138,278,000.00	85,547,939,920.00	137,511,300,000.00	125,141,656,380.00	133,093,739,199.00	142,163,426,158.95
						-	-
19	Badan Lingkungan Hidup Daerah	14,380,000,000.00	14,504,692,895.00	12,290,792,137.00	16,011,450,000.00	16,812,022,500.00	17,652,623,625.00
						-	-
20	Badan Pemb. Perempuan dan KB	4,981,593,000.00	6,116,000,000.00	6,418,827,140.00	7,345,800,000.00	7,713,090,000.00	8,098,744,500.00
						-	-
21	Dinas Sosial	17,483,420,000.00	24,088,121,000.00	14,335,000,000.00	15,939,000,000.00	17,457,000,000.00	19,202,700,000.00
						-	-
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,700,000,000.00	13,749,300,000.00	16,690,349,963.00	14,101,552,500.00	14,806,630,125.00	15,546,961,631.25
						-	-
23	Dinas Koperasi dan UMKM	13,405,675,000.00	24,395,213,000.00	26,040,327,331.00	45,240,000,000.00	47,502,000,000.00	49,877,100,000.00
						-	-
24	Badan Koord Penanaman Modal Daerah	15,795,815,600.00	14,510,182,175.00	15,919,841,218.00	19,002,600,000.00	19,952,730,000.00	20,950,366,500.00
						-	-
25	Dinas Kebudayaan & Kepariwisata	42,014,100,000.00	27,263,748,300.00	25,590,385,702.00	37,036,250,000.00	41,658,750,000.00	43,741,687,500.00
						-	-
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	16,831,202,861.00	33,113,328,000.00	41,343,275,314.00	55,000,000,000.00	57,750,000,000.00	58,637,500,000.00
						-	-
27	Badan Pemberdayaan Masy. PD & K	25,575,000,000.00	23,378,864,802.00	23,580,894,991.00	26,180,500,000.00	28,014,525,000.00	29,415,251,250.00
						-	-
28	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	18,186,000,000.00	15,480,000,000.00	22,327,018,013.00	16,127,825,568.05	16,934,216,846.45	17,780,927,688.78
						-	-
29	Dinas Pertanian T.Pangan & Horti	119,925,716,000.00	132,544,000,000.00	118,030,818,200.00	145,263,826,360.00	150,877,017,678.00	160,820,868,561.90
						-	-
30	Dinas Perkebunan	29,811,272,050.00	43,774,618,500.00	45,004,532,342.09	48,981,111,133.00	51,430,166,689.65	54,001,675,024.13
						-	-
31	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	28,257,377,000.00	34,240,694,520.00	41,443,763,665.00	46,681,365,514.93	49,015,433,790.68	51,466,205,480.21
						-	-
32	Sekretariat Badan Koord. Penyuluhan	16,335,000,000.00	20,910,000,000.00	19,603,343,564.00	20,224,050,000.00	21,235,252,500.00	22,297,015,125.00
						-	-
33	Dinas Kehutanan	17,711,978,000.00	26,038,970,000.00	24,504,015,830.00	29,993,008,030.00	30,992,658,431.50	33,067,291,353.08
						-	-
34	Dinas Energi & Sumberdaya Mineral	27,474,240,000.00	45,790,634,681.00	30,630,830,489.77	30,712,375,000.00	31,247,993,750.00	33,860,393,437.50
						-	-
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	35,944,485,714.00	59,716,846,500.00	57,364,337,664.00	70,000,000,000.00	73,500,000,000.00	76,175,000,000.00

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
		APBD Perubahan	APBD Perubahan	APBD Perubahan	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
11	Sekretariat KPID	1,371,000,000.00	1,915,500,000.00	1,972,503,910.00	3,820,625,000.00	3,486,656,250.00	3,660,989,062.50
						-	-
12	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	1,980,000,000.00	2,976,647,580.00	2,750,000,000.00	6,169,687,500.00	6,478,171,875.00	6,802,080,468.75
						-	-
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,685,000,000.00	17,900,000,000.00	12,339,012,513.00	14,164,000,000.00	14,872,200,000.00	15,115,810,000.00
						-	-
14	Badan Ketahanan Pangan Daerah	8,793,301,500.00	12,626,714,750.00	12,639,402,638.00	13,819,837,500.00	14,510,829,375.00	15,236,370,843.75
						-	-
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,587,125,802.00	20,620,000,000.00	19,640,825,000.00	19,212,500,000.00	20,018,125,000.00	21,269,031,250.00
						-	-
16	Satuan Polisi Pamong Praja	3,150,000,000.00	4,004,000,000.00	9,573,000,000.00	9,943,218,750.00	10,595,379,687.50	10,875,148,671.88
	BELANJA LANGSUNG	2,024,544,314,976.00	2,509,987,564,810.00	2,594,274,633,037.78	2,642,700,585,728.96	2,766,123,427,928.16	2,905,302,449,324.57
	BELANJA TDK LANGSUNG	3,305,527,771,105.00	3,574,931,948,363.00	4,010,339,963,323.04	4,429,915,578,881.00	5,419,628,034,745.13	6,141,002,180,305.60
	TOTAL BELANJA	5,330,072,086,081.00	6,084,919,513,173.00	6,604,614,596,360.82	7,072,616,164,609.96	8,185,751,462,673.29	9,046,304,629,630.17
	TOTAL PENDAPATAN	4,996,499,327,036.00	5,650,575,561,606.00	6,430,880,289,296.00	6,792,448,650,000.00	8,021,715,000,000.00	8,752,430,000,000.00
	DEFISIT	(333,572,759,045.00)	(434,343,951,567.00)	(173,734,307,064.82)	(280,167,514,609.96)	(164,036,462,673.29)	(293,874,629,630.17)
	PERSENTASE DEFISIT	(6.68)	(7.69)	(2.70)	(4.12)	(2.04)	(3.36)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	335,202,759,045.00	485,343,951,567.00	309,734,307,064.82	456,167,514,609.96	345,036,462,673.29	430,874,629,630.17
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,630,000,000.00	51,000,000,000.00	136,000,000,000.00	176,000,000,000.00	181,000,000,000.00	137,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	333,572,759,045.00	434,343,951,567.00	173,734,307,064.82	280,167,514,609.96	164,036,462,673.29	293,874,629,630.17
	SILPA TAHUN BERKENAAN	-	-	(0.00)	(0.00)	0.00	0.00

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian berikut.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan urusan pemerintah sebagai berikut :

Tabel IV.I
Permasalahan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,5, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi.	Pertumbuhan ekonomi masih didominasi faktor konsumsi ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat. • Terbukanya kesempatan kerja. • Berkurangnya jumlah penduduk miskin • Peningkatan kegiatan ekonomi.
1.2.	Laju inflasi provinsi	Menekan laju inflasi di bawah rata-rata nasional	Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya, khususnya barang impor)	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat • Kebijakan Fiskal (menaikkan pajak) • Pengendalian harga dan distribusi barang
1.3.	PDRB per kapita	Pendapatan perkapita signifikan meningkat, namun masih dibawah rata-rata nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk • Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing-masing kelompok usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka lapangan kerja • Meningkatkan nilai tambah
1.4.	Indeks Gini	0,4	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan pada lapisan bawah dan percepatan pembangunan pada wilayah dengan kinerja pembangunan (kemiskinan, PDRB/kapita, IPM paling terendah)
1.5.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Hingga September 2012, penduduk miskin mencapai 805,92 ribu orang atau 9,82%, yang berada di bawah rata-rata nasional (11,66%)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan • Rendahnya tingkat keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah; • Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.6.	Angka kriminalitas yang tertangani	Penurunan angka kriminalitas guna mendukung Sulsel wilayah yang aman untuk berinvestasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan laporan masyarakat yang memakan waktu yang lama. • Rasio polisi dengan jumlah penduduk masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi; • Peningkatan penanganan laporan tindak kriminal
II Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1. Pendidikan				
1.1.	Angka melek huruf : Pola lama Pola Baru : Harapan Lama Sekolah	HLS tahun 2014 = 68,49 masih berada dibawah Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan-kegiatan pelestarian seperti program koran ibu, kelompok belajar masyarakat (KBM), kelompok belajar usaha (KBU), frekuensinya masih sangat rendah. • Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kab./kota untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat; memfasilitasi kab/kota untuk mengoptimalkan kelompok belajar usaha; peningkatan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan.
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2015 menggunakan metode baru)	Angka rata-rata lama sekolah berada dibawah target nasional RLS 2014 = 7,49, nasional sebesar 7,94	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan • Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan • Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah
1.3.	Angka partisipasi kasar SD/MI	Menurun dari tahun 2007- 2011 (110,80-102,09)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses dan layanan Pendidikan di jenjang SD/MI 	<ul style="list-style-type: none"> • dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada perluasan akses dan layanan pendidikan
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SD Semakin lama semakin menurun presentasinya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1.5.	Angka Partisipasi Murni			
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	APM SD/MI/Paket A diatas rata-rata nasional tahun 2013 Nasional = 95.42% .Sulawesi Selatan 97.90%	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi layanan pendidikan dasar antar kabupaten / kota belum berimbang; 	<ul style="list-style-type: none"> • Difasililitasi Kab./Kota. untuk disamakan angka disparitasnya terutama menyangkut sarana prasarana

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	APM sejak tahun 2008 – 2012 masih dibawah rata-rata national th 2008 Nas = 71,98% Prov. 70,14. Pada tahun 2012 Nas 82,69% Prov = 76,74%	Banyak usia sekolah SD (12 tahun) sudah dijenjang SMP dan Usia Sekolah SMP (13 Th) sudah dijenjang SMA	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penerapan Standa Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang disatuan pendidikan
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	APM sejak tahun 2008 – 2012 masih dibawah rata-rata Nasional Tahun 2008 Nas = 49,85% Prov 48,29 dan pada tahun 2012 Nasional 77,87% Prov 62,37%	<ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan permasalahan di jenjang SMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Penerapan Standa Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang disatuan pendidikan
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kematian bayi	AKB Mengalami penurunan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya angka kematian bayi. • Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil • Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibu dan anak. • Memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap ibu hamil dan menyusui.
2.2.	Angka usia harapan hidup (Tahun 2015 menggunakan metode baru)	Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Angka harapan hidup masih dibawah rata-rata nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.3.	Persentase balita gizi buruk	Terjadi peningkatan persentase gixi buruk, dari tahun 2008-2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Balita Gizi Buruk yang meningkat tiap tahunnya. • Sistim survailans yang kurang berjalan baik untuk mendeteksi mereka yang rentang gizi buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu; • Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan anak • Pembuatan regulasi dalam rangka penguatan koordinasi/kerjasama dengan Lintas Sektor terkait untuk penanganan kasus gizi buruk
3.	Pertanahan			
3.1.	Persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat	2,88% (pada tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya legalitas kepemilikan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya PRONA sertifikasi lahan
4.	Ketenagakerjaan			

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena tidak kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Latihan Kerja (LLK) baik yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah maupun Swasta dengan melakukan berbagai jenis pelatihan guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan menitikberatkan pada pelatihan berbasis kompetensi • Penataan kembali “ link and match “ kurikulum diklat kebutuhan jabatan pasar kerja sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalisir • Pengembangan sistem kerjasama kemitraan antara dunia usaha dengan lembaga pelatihan agar dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja yang terlatih dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan • Optimalisasi sistem informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja lokal, dalam dan luar negeri
III	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
1.	Kebudayaan			
1.1.	Jumlah grup kesenian	291 grup kesenian tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya manajemen grup kesenian • Masih terbatasnya kegiatan pertunjukan kesenian 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis pengelolaan manajerial grup kesenian • Pelaksanaan inventarisasi grup kesenian di kabupaten/kota • Perlu dilakukan pembinaan sanggar seni se Sulawesi Selatan.
1.2.	Jumlah gedung	4 gedung kesenian tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya gedung kesenian yang representatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif.
2.	Pemuda dan Olahraga			

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.1.	Jumlah klub olahraga	Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga; • Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga; • Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga
2.2.	Jumlah gedung olahraga	Jumlah gedung olahraga diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan • Belum maksimalnya sinkronisasi program dan kegiatan antar Pemprov dan kab/kota dalam rangka pembinaan pengembangan potensi kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi baik antara pusat maupun daerah • Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana gedung olahraga
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
I	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan			
1.1.	Pendidikan dasar:			
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2007-2011. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 95,40 persen pada tahun 2007 menjadi 97,16 persen pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen partisipasi sekolah di atas rata-rata nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Angka partisipasi sekolah masih dibawah rata-rata karena masih kurnag pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama di wilayah pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Pada tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pemerataan pembangunan sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil, tertinggal, terbelakang

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		142,5 kemudian pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 133,8.		
1.1.3.	Rasio guru/murid	Rasio dari tahun 2008 ke 2012 mengalami penurunan dan lebih rendah dari rasio ideal 1 : 25 Begitu pula untuk SMP/MT's terlihat rasio menurun bahkan lebih rendah dibanding rasio SD	<ul style="list-style-type: none"> • Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati calon pendidik. • Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik. • Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik. • Peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan khusus, disesuaikan dengan kondisi daerah
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standar ideal 1 : 32 Namun demikian rasio murid/kelas SMP melampaui standar ideal dan tertinggi ditahun 2012 untuk SMP mencapai 1 : 60	<ul style="list-style-type: none"> • Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati calon pendidik. • Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik. • Kurang ruang kelas untuk memperbanyak rombongan belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik. • Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik. • Difasilitasi satuan pendidikan khususnya di SMA untuk menambah ruang kelas baru atau teori.
1.2.	Pendidikan menengah:			
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	Capaian APS Masih dibawah rata2 Nasional tahun 2012 = 60.78% Sulawesi Selatan 59,55% Ditargetkan capaian indikatornya minimal sama dengan capaian nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Kab./kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis type sekolah yang perlu ditempuh dalam suatu wilayah • Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa misikin dan unit cost BOS SMA
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung menurun . Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa lokasi/pemukiman penduduk, geografisnya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 , sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekoahnya, 	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi bangun RKB yang dilengkapi dengan asrama siswa • Perlu dibuka kelas jauh didaerah terpencil

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		2007 = 506, tahun 2012 424		
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	capaian rasio guru terhadap siswa untuk jenjang pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1 : 25 Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hanya mencapai 1 : 13	<ul style="list-style-type: none"> • Ditribusi penempatan dan pemerataan guru belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Diintensifkan koordinasi dan konsultasi pusat, provinsi dan daerah
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata selama periode 2008-2013 menunjukkan rasio yang memadai walaupun masih bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2008 sd 2012 semuanya melampaui standar ideal 1 : 32 sesuai standar pelayanan minimal pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ruang kelas unruk memperbanyak rombongan belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	88.39% pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Gratis
1.3.	Fasilitas Pendidikan:			
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD mencapai 97% kondisi baik. Tahun 2012 kondisi ruang kelas yang rusak mencapai 39.69% atau yang baik mencapai 60,31%	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordiansi antara daerah, provinsi dan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penempatan/aturan lebih awal diterima di Kab./Kota. diintensifkan penggunaan DAK lebih banyakke perbaikan sarana kelas • Peninjauan prioritas/strong point usulan daerah/provinsi ke musrembang lebih fokus ke perbaikan sarana kelas
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan perbaikan sarana. Dari tahun 2008 kondisi baik untuk SMP 67.63% naik menjadi 77.30% ditahun 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD • Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota pedrlu ditingkatkan.

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Begitu pula unuk SMA dari 60% tahun 2008 naik/ ada perbaikan sehingga menjadi 75%		
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):			
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Sulawesi Selatan mengaami peningkatan. Tahun 2008 (47,69) sampai 2012 (50,40). Namun demikian masih dibawah rata-rata nasional tahun 2008 (50,84) dan tahun 2012 (55,24)	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat kurang minat menyekolahkan anaknya di usia dini • Biaya penyelenggaraan pendidikan di lembaga PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang pendidikan bagi anak usia dini diberbagai media dan dakwah - Mendorong kab/kota dan masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD - Fasilitasi bantuan subsidi kepada lembaga PAUD
1.5.	Angka Putus Sekolah:			
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Rasio menunjukkan adanya penurunan daru tahun 2008 untuk SD = 2.35 menjadi 1.20 pada tahun 2012. Namun demikian baik untuk SD, SMP dan SM angka putus sekoah diupayakan dibawah 1 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak optimalnya pendataan dan anailisisnya terhadap penyebab putus sekoah • Bantuan subsidi belum memenuhi target 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan pendataan pendidikan terutama penyebab putus sekolah • Program retrival perlu dikembangkan, diupayakan kembali.
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MT's	Menurunnya angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Menurunnya angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan
1.6.	AngkaKelulusan:			
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah dasar (SD) Mencapai 100%		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik; • Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MT's	Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik; • Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		pertama (SMP) Mencapai 100%		fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) Mencapai 100%		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik; • Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari tahun 2008 mencapai 91,31% menjadi 97,48% pada tahun 2012. Namun harus diupayakan mencapai standar ideal 98%	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 	Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase guru berkualifikasi dari SD ke SM mengalami peningkatan baik dijenjang SD maupun SM. Dari tahun 2008 jumlah guru yang disertifikasi 33.380 pada tahun 2008, naik menjadi 76.622 pada tahun 2012 atau naik 129.54%	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school
2.	Kesehatan			
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemerataan posyandu
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio Puskesmas tahun 2012 sebesar 5/100.000 penduduk, berarti 1 PKM melayani 20.000 Penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan; • Koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Rasio Pustu tahun 2012 sebesar 15/100.000 penduduk, berarti 1 Pustu melayani 6.667 Penduduk		
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio RS tahun 2012 sebesar 1,14/100.000 penduduk. Artinya 1 RS sudah melayani kurang dari 100.000 Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dilihat dari rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah Tempat Tidur kelas III masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan Kelas Rumah Sakit • Peningkatan jumlah Tempat Tidur Kelas III
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Capaian Rasio Tenaga 2013 : dr. Spesialis 5/100.000 Penduduk dr. Umum 15/100.000 Pddk dr. Gigi 7/100.000 Pddk	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak meratanya persebaran dokter didaerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan • Perlu ada aturan tersendiri untuk penempatan Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten/Kota
2.5.	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Meningkatkan jumlah tenaga medis terutama di daerah-daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya minat tenaga medis untuk ditempatkan didaerah terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya didaerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Capaian tahun 2012 sebesar 57,33%, masih dibawah target (65%)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi komplikasi masih rendah • Puskesmas PONED belum mampu melakukan penatalaksanaan pelayanan PONED standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Bidan • Penguatan Puskesmas PONED
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Capaian tahun 2012 sebesar 93,68%, sudah melebihi target (89%).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua Bidan Desa menetap di wilayah kerjanya • ANC (Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal • Tidak semua persalinan oleh nakes dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan regulasi tentang Bidan Desa • Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan • Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Tahun 2012 Target UCI sebesar 90 persen, realisasi hanya 87,1 persen	<ul style="list-style-type: none"> • Pergantian petugas membawa dampak ketrampilan petugas terlatih • Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dan Menganalisis data hingga merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas, identifikasi masalah dan mencari solusi • Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi • Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberian Imunisasi 	<p>pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor terkait, Lembaga pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan untuk menjamin ketersediaan petugas yang terampil dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat pemberian imunisasi
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Capaian 2012 sebesar 100%, sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dari jumlah yang dirawat tidak seluruhnya sembuh/pulih. Hal ini disebabkan : • Adanya penyakit penyerta • Pasien Pulang Paksa • Mutasi tenaga terlatih di Kabupaten/Kota cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Medis secara intensif • Penanganan Gizi Buruk di tingkat Rumah Tangga (Pasca Rawat) • Perlu regulasi tentang Ketenangaan • Penyediaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB Gizi Buruk
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Terjadi peningkatan penemuan penderita TB per 100.000 Penduduk (Tahun 2012 : 153/100.000 Penduduk)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan Program TB DOTS (Directly Observed Treatment Short/Pengobatan Jangka Pendek) • Pemahaman masyarakat tentang TB belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan intervensi ke Rumah Sakit untuk melakukan Program TB DOTS • Mengefektifkan AKMS (Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial) Program TB
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Capaian Tahun 2012 sebesar 67,12% telah melebihi target (60%).	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Bebas jentik masih rendah • Masih terjadi KLB DBD di beberapa lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Capaian 2008-2012 telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan obat di Rumah Sakit/Balai Kesehatan Masyarakat • Membuat jejaring antara Rumah Sakit dengan Penyedia Layanan Darah
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	Indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 87% dan pada tahun 2012 telah berhasil dicapai sebesar 99,45%		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.14.	Cakupan puskesmas	Indikator Kunjungan Rawat Jalan sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 15% dan pada tahun 2012 telah berhasil dicapai sebesar 23,60% dan Kunjungan Rawat Inap ditargetkan 1,5% dan pada tahun 2012 cakupan Rawat Inap 0,25%	<ul style="list-style-type: none"> • Akses keterjangkauan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan Ketersediaan Infrastruktur dan SDM
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	Peningkatan jumlah dan cakupan pelayanan PUSTU pada wilayah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh infrastruktur dan SDM yang memadai
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	kinerja transportasi jalan ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 24.307 Km pada tahun 2008 menjadi 32.486 Km pada Tahun 2012 dengan kondisi Baik mencapai 53,16% (17.332 Km), sedang rusak 4.749 Km (13,09%) dan rusak berat 6.167 Km (21,17%).	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kinerja jaringan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritisasi pembangunan dan preservasi jalan pada kawasan strategis
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	Meningkatkan rasio jaringan irigasi, dan efektifitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi saat ini 1 Km jaringan irigasi mengairi lahan budidaya seluas 0,90 km ² , tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 81% yang	<ul style="list-style-type: none"> • Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		menunjukkan bahwa masih terdapat 19% luas lahan budidaya yang belum terairi, sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan		
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	403 pada tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya tempat ibadah 	
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 75,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 24% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.
3.5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk adalah 0,23, yang menunjukkan bahwa TPS hanya dapat menampung sampah terhadap 23 orang setiap 1.000 penduduk di Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional; Mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
3.6.	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,77 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;
3.7.	Rasio permukiman layak huni	Rasio permukiman layak huni	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat 13,89% luasan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		menunjukkan bahwa 86,11 % dari luas kawasan permukiman di Sulawesi Selatan merupakan kawasan permukiman layak huni.	permukiman yang belum layak huni.	melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
3.8.	Lingkungan Pemukiman	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya cakupan pelayanan dan jumlah prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman.
3.9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio RTH per satuan luas wilayah berHPL adalah 17,73 menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang ber HPL/HGB luasannya masih besar	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan
4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 84,75% yang menunjukkan bahwa 1.556.153 sudah terlayani oleh air bersih baik dari PDAM maupun sumber lainnya yang terlindungi.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
4.2.	Rumah tanggapengguna listrik Jumlah desa berlistrik	Rumah tangga pengguna listrik sudah mencapai 70,63% yang sumber utamanya adalah listrik PLN sebesar 66,51%. Rumah tangga yang menggunakan listrik di Sulawesi Selatan didominasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan untuk meningkatkan kedaulatan Energi. • Pembangunan Instalasi Bio Energi dengan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		oleh RT pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 46,44%. Jumlah desa Sulawesi Selatan sebanyak 3.032 yang belum terjangkau listrik sebesar 316 desa dengan kata lain Rasio Desa Berlistrik sebesar 89,6% di Tahun 2014.		pemanfaatan limbah ternak dan pertanian.
4.3.	Rumah tanggaberSanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 75,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 24% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
4.4.	Lingkungan pemukimankumuh	Rasio Luas pemukiman yang tertata 13,98 persen	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh; • Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh; • Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.
4.5.	Rumah layak huni	Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,77 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			
5.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4 kegiatan pada tahun 2012		
	Kegiatan pembinaan politik daerah	5 kegiatan pada tahun 2012		
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2 pada tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan polisi pamong praja secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
	Rasio jumlah Linmas Per 10.000 penduduk	32,93 pada tahun 2013	Belum berimbangnya jumlah Linmas dengan jumlah Penduduk	Penempatan Polisi Pamong Praja secara berimbang sesuai kebutuhan
	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	2,97 pada tahun 2013	Belum optimalnya peran Masyarakat dalam memanfaatkan pos siskamling	Perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
	Pertumbuhan ekonomi	8,37% pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur yang baik • Keamanan yang kondusif • Iklim investasi yang semakin baik
	Kemiskinan	805.92 ribu jiwa pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaran penduduk miskin pada wilayah-wilayah terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kordinasi sektoral dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan, perbaikan akses infrastruktur, dan distribusi pangan
	Penegakan PERDA	91% pada tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya PPNS penegak PERDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2.116 pada tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya intensitas cakupan patroli petugas Satpol PP • Masih kurangnya sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di	91% pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tenaga penyidik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan tenaga penyidik

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	Kabupaten			
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	27.353 pada tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berimbangnya jumlah Linmas dengan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan Linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
6.	Sosial			
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Semakin meningkat dari tahun ke tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan. • Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
	PMKS yg memperoleh bantuan social	Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS. • Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat; • Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat • Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan.
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Berfluktuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan sosial. • Kompleksitas penyandang masalah semakin bertambah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. • Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
Non Pelayanan Dasar				
6.	Perhubungan			
6.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	kinerja pelayanan transportasi udara pada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dimana jumlah pergerakan penumpang sebesar 8.594.339 penumpang. Kinerja pelayanan transportasi laut, khususnya pada pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta (Makassar) juga	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi umum masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan dan kapasitas transportasi umum melalui peningkatan keterpaduan transportasi antar moda dan antar wilayah

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		berkinerja baik yang ditunjukkan dengan jumlah peningkatan penumpang tiap tahunnya sebesar 8% yang pada tahun 2012 berjumlah 1.317.814 orang, dan peningkatan bongkar muat tiap tahun sebesar 11,19% yang pada tahun 2012 telah mencapai 15.73 Ton/TEU		
6.2.	Jumlah uji kir angkutan umum	Tersedia data KIR kendaraan di beberapa kabupaten/kota	•	•
6.3.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah pelabuhan laut adalah 62, pelabuhan udara berjumlah 13, dan jumlah terminal bis 26.	• Belum terintegrasinya transportasi antar moda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal	• Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal dan penerapan sistem transportasi multimoda serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan
7.	Lingkungan Hidup			
7.1.	Persentase penanganan sampah	Timbulan sampah pada tahun 2012 sudah mencapai 2,6 Juta M ³ /tahun yang meningkat dari tahun 2008 yang timbulan sampahnya sebesar 2,4 juta M ³ /tahun	• Penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya	• Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan
7.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	Cakupan air bersih di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sudah mencapai 82,52%, dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai 84,75%..	• Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	• Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
				lingkungan
7.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	rasio luas permukiman yang tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 meningkat menjadi 86,11 pada akhir tahun 2012. luasannya meningkat, menjadi 114.346 hektar pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat 13,89% luasan kawasan permukiman yang belum layak huni. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
7.4.	Pencemaran status mutu air	Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai lintas kab/kota dari 27 sungai lintas kab/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. dan diharapkan pada akhir tahun perencanaan telah dilakukan pemantauan pada 27 sungai dan 2 danau prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi
7.5.	Pencemaran status mutu udara ambient	Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan kualitas udara ambient pada 10 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan diharapkan pada akhir tahun perencanaan telah dilakukan pemantauan pada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimal dan meratanya pemantauan kualitas udara ambient Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi
7.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	Pelaksanaan AMDAL pada tahun 2012 sudah mencapai 98,21% dari 335 perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL terhadap kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas dan mutu dokumen AMDAL masih memerlukan peningkatan guna mengoptimalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL
7.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk yang sampai	<ul style="list-style-type: none"> Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		pada tahun 2012 belum mencapai 0,01.	sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.	jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional; dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
7.8.	Penegakan hukum lingkungan	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari 22 kasus di tahun 2012 semuanya sudah mendapat penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait perusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi dan SOP pengaduan perusakan lingkungan kepada pemangku kepentingan
8.	Pertanahan			
8.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Sampai dengan tahun 2012, jumlah tanah yang telah disertifikasi seluas 223.387.225 M2 dengan jumlah bidang sebanyak 39.514 bidang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan rencana tata ruang
8.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	88,46% dari 78 total kasus pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya administrasi pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> •
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil			
9.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	63% dari total yang menikah pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan 	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
9.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	66% dari total kelahiran pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan 	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
9.3.	Rasio pasangan berakte nikah	17% dari total yang menikah pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan 	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
9.4.	Kepemilikan KTP	49,71% dari total penduduk wajib KTP	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan 	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
9.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	31,52% dari total jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan 	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
9.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tersedia database kependudukan skala provinsi yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			SIAK) secara terpadu terkendala dengan belum adanya jaringan komunikasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada server yang ada di Provinsi, sehingga proses penyediaan database di Provinsi dilakukan server manual melalui back up data kependudukan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masing-masing kabupaten/kota	kependudukan yang berkualitas dan akura; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dan database kependudukan.
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
10.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	% partisipasi perempuan di lembaga legislative baru mencapai 14, 23% % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi = 45% % partisipasi perempuan di jabatan struktural pemerintah (eksekutif) baru mencapai 34,53%	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif • Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di lembaga pemerintah (eksekutif) • Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan di jabatan strategis lembaga pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat dan lembaga • Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan, aktifis organisasi perempuan, dan tokoh perempuan (toma, toga, toda) • Kebijakan afirmasi untuk memberi ruang yang setara antara aparatur perempuan dan laki-laki dalam menduduki jabatan struktural lembaga pemerintah
10.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	24% dari jumlah total tenaga kerja swasta pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses dan partisipasi perempuan di lembaga swasta yg disebabkan adanya persyaratan perusahaan • Rendahnya persentase perempuan di jabatan strategis pada lembaga swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan tindakan teknis yang bersifat afirmasi untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan di ranah publik • Peningkatan kapasitas/skill manajemen pekerja perempuan di lembaga swasta

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
10.3.	Rasio KDRT	Semakin tahun terjadi peningkatan. Tahun 2012 mencapai 728 kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin tingginya jumlah korban KDRT di kalangan perempuan dan anak • Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kab/kota dalam lembaga terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan keluarga • Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT • Optimalisasi penerapan SPM bidang Layanan terpadu Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak
10.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Tahun 2012 mencapai 264.971 pekerja anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak • Tidak ada jaminan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja di bawah umur • Kemiskinan rumah tangga dan rendahnya pendidikan menjadi pemicu meningkatnya jumlah tenaga kerja di bawah umur 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Aksi Pemberantasan Pekerjaan terburuk bagi Anak harus lebih maksimal bekerja • Peningkatan akses dan jaminan kesehatan dan pendidikan secara khusus bagi tenaga kerja di bawah umur /anak yang “terpaksa” bekerja • Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga • Jaminan memperoleh hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu
10.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena terbatasnya akses perempuan di sektor publik sebagai akibat dari budaya patriarkhi • Rendahnya komitmen perusahaan dalam menerapkan hak perlindungan perempuan • Terdapat perbedaan upah tenaga kerja laki dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor strategis • Memperketat pengawasan penerapan hak perlindungan bagi pekerja perempuan di perusahaan/lembaga swasta • Kebijakan afirmasi untuk mendorong kesetaraan upah tenaga kerja laki dan perempuan
10.6.	Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari	Penyelesaian kasus pengaduan pada tahun 2012 mencapai 728 kasus, dan terjadi trend	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pengaduan melalui layanan terpadu belum berjalan maksimal • Masih banyak kab/kota yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki mekanisme layanan terpadu di provinsi dan kab/kota • Meningkatkan kapasitas lembaga layanan lintas

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	tindakan kekerasan	peningkatan kasus KDRT setiap tahun	menyediakan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	sektor • Komitmen SKPD dan lembaga terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,68 anak dari jumlah keluarga pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran tanggungjawab kependudukan di kalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah • Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor • Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak • Penyebarluasan KIE Genre (Generasi Berencana)
11.2.	Rasio akseptor KB	Tahun 2012 mencapai 27,47 persen	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya di daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	73,47 persen di tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya partisipasi KB Pria • Akses berKB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan kepulauan) masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kepesertaan KB pria • Membangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat.
11.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Tahun 2012 = 38,29 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I • Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ketahanan ekonomi keluarga • Peningkatan partisipasi berKB • Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negatif pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga;
12.	Ketenagakerjaan			
12.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Peningkatan angka partisipasi kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya keterampilan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skill maupun kemampuan manajemen
12.2.	Angka sengketa pengusaha-	Penurunan angka sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya kesepakatan tentang upah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan upah minimum regional yang disesuaikan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	pekerja per tahun	pengusaha-pekerja	antara pengusaha dengan tenaga pekerja	dengan kemampuan dari perusahaan
12.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Peningkatan partisipasi angkatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan balai latihan yang bertaraf internasional
12.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	Peningkatan jumlah angka pencari kerja yang ditempatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakesesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja
12.5.	Tingkat pengangguran terbuka	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. • Informasi pasar kerja masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru. • Pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem
12.6.	Keselamatan dan perlindungan	Peningkatan upaya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jamsostek bagi tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menerima jamsostek.
12.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan jumlah perselisihan buruh dan pengusaha yang tertangani akibat kebijakan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran lembaga penyelesaian perselisihan
13.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
13.1	Persentase koperasi aktif	Total jumlah Koperasi 8.026 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi - Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi di wilayahnya - Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi
13.2	Persentase Koperasi Besar	Meningkatnya jumlah Koperasi besar sebanyak 55 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki kemampuan (akreditasi) manajerial 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan manajerial pengelola usaha melalui lembaga yang terakreditasi
13.3	Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah	Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 158.718 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas - Wawasan kewirausahaan masih kurang - Skim kredit khusus untuk UMK yang murah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan teknis manajerial pengelola UMK - Penyediaan skim khusus bagi UMK - Ada regulasi usaha yang berpihak pada UMK

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			dan mudah tidak tersedia - Tidak adanya regulasi untuk pengembangan UMK	
13.4	Persentase jumlah Usaha menengah menjadi usaha besar	Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar sebanyak 3.503 unit	- Kurangnya kemitraan usaha - Tidak tersedia reward bagi pelaku usaha yang berhasil	- Mendorong terciptanya kerjasama usaha - Penyediaan reward bagi pelaku UMK
14.	Penanaman Modal			
14.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 29 Triliun,- (2008-2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki pelayanan perizinan, penyusunan regulasi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan penanaman modal. • Sarana dan infrastruktur daerah • Informasi peluang dan potensi investasi Sulsel yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) yang cepat, tepat dan efisien. • Regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi • Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap.
14.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 23.956.798.051.423,-	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat.
14.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 115.087 orang	-	-
14.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi investasi tahun 2012 Rp. 2.318.829.900.000,- menurun bila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2011 Rp. 3.986.302.703.368,-	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat.
15.	Kebudayaan			
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya 37 kali pertahunnya yang sudah sesuai dengan agenda event budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya event daerah yang belum teragendakan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu inventarisasi event daerah yang belum teragendakan untuk dimasukkan ke dalam event daerah

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ada 4 gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya gedung kesenian yang representatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif.
15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah 72 situs	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya warisan budaya khususnya Benda Cagar Budaya (BCB)/situs/kawasan cagar budaya yang belum terdaftar 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya inventarisasi warisan budaya khususnya Benda Cagar Budaya (BCB)/situs/kawasan cagar budaya.
16.	Kepemudaan dan Olahraga			
16.1.	Jumlah organisasi pemuda	Optimalisasi dukungan organisasi pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpolanya pemberdayaan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
16.2.	Jumlah organisasi olahraga	Peningkatan jumlah organisasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpolanya pemassalan dan pembibitan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlet melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar
16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktifitas dan prestasi
16.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Peningkatan jumlah kegiatan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	43 gelanggang pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlibatan pihak swasta
16.6.	Lapangan olahraga	2.480 lapangan		<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan • Perlibatan pihak swasta
17.	Ketahanan Pangan			
17.1.	Regulasi ketahanan pangan	Tersedia regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan Hak atas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Ketahanan Pangan masih kurang • Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Keamanan Pangan belum Optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi Ketahanan Pangan secara Optimal
17.2.	Ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Laju peningkatan produksi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Produksi utama (beras)

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		(beras) tersedia sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk	cenderung melandai sedangkan pertambahan penduduk lebih besar dari 1 %. • Belum Optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam.	• Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
18.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
18.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan	Masih Rendahnya Kelompok Binaan Pada Setiap Desa (Hanya 1 Binaan Kelompok Pada Masing-masing LPM)	Pembinaan Terhadap Kelompok Binaan Agar meningkatkan Jumlah Kelompok Binaan Pada Masing-Masing LPM pada setiap Desa (menjadikan 2 Kelompok Binaan Pada Masing-Masing LPM)
18.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan	Masih ada PKK di Desa Dan Kelurahan yang belum membina Kelompok sesuai dengan jumlah Kelompok Binaan Yang Harus Di Bina.	Pengoptimalan Fungsi dan Tanggung Jawab Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar Rutin membina Kelompok Binaan PKK pada Masing-masing POKJA.
18.3.	Jumlah LSM	49,51% (759 LSM Aktif dari 1.533 Total LSM)	Data LSM Aktif belum terinventaris dengan baik pada setiap Kabupaten/Kota Khususnya LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat	Pendataan dan Inventarisasi Data LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat di Setiap Kabupaten/Kota.
18.4.	LPM Berprestasi	0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020 Total LPM)	Masih Rendahnya aktivitas penghargaan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten dalam menilai Kinerja Kelembagaan LSM di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pemberian Penilaian Kinerja kepada LPM yang dilakukan setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPM
18.5.	PKK aktif	97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 PKK)	Desa/Kelurahan yang letaknya terpencil (Daerah Pegunungan dan Kepulauan) sulit dilakukan pembinaan oleh TP-PKK Desa, Kecamatan, Kabupaten Dan Provinsi	Memperlancar Akses Transportasi Dan Komunikasi Pada Setiap Desa/Kelurahan yang letaknya terpencil agar rutin dilakukan pembinaan pada PKK Desa.
18.6.	Posyandu aktif	98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu)	Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kader Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana Dan Prasarana yang Layak kepada Posyandu Didasa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil.

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
18.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sebesar 65,50%	Masih rendahnya Program-Program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat serta Belum terdatanya dengan Baik Kontribusi Swadaya Masyarakat terhadap kegiatan pembangunan khususnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Mengiatkan Program-Program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta melakukan Pendataan secara rutin Kegiatan Pembangunan yang dilakukan secara swadaya.
18.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase peran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun sebesar 65,92%	Kurang Berfungsinya Kelompok Masyarakat pemelihara Pembangunan yang di Desa/Kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.	Mengaktifkan dan memfungsikan Kembali Kelopok-Kelompok Pemelihara Pasca Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan Serta mengaggarkan pada APBDes Kegiatan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
19.	Kearsipan			
19.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasaran pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang. • Arsip-arsip yang berada di SKPD masih masuk dalam kategori kacau, belum tertata sesuai kaidah kearsipan. • Tidak tersedianya sarana dan prasarana dan belum terlaksananya system kearsipan yang baku di setiap SKPD. • Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip. • Belum terwujudnya Unit Kearsipan di setiap SKPD, sesuai amanah UU No. 43 Tahun Tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas; • Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip; • kurangnya komitmen para pimpinan SKPD akan pentingnya arsip • Peningkatan pemahaman aparat akan pentingnya pengelolaan arsip; • Penyediaan unit pengelolaan arsip pada tiap SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai, • Belum optimalnya pembinaan kearsipan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan minat minat aparat tentang kepentingan penglolaan kearsipan; • Peningkatan kesejahteraan aparat

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis).	fungsionalkearsipan.
20.	Komunikasi dan Informatika			
20.1.	Jumlah jaringan komunikasi	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas jaringan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi
20.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Masih rendahnya rasio wartel dan warnet terhadap jumlag penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi; Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi
20.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas surat kabar nasional/lokal	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date terutama terkait dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah, kualitas dan kapasitas media cetak lokal yang ada di daerah; Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas media cetak lokal
20.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas penyiaran radio/TV lokal	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan stasiun televisi dan siaran radio lokal yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah; Kurangnya tenaga komisioner yang memantau konten penyiaran, terutama penyiaran TV lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan jangkauan penyiaran radio lokal; Peningkatan peran masyarakat dalam memacu peningkatan jangkauan penyiaran radio/TV lokal.
21.	Perpustakaan			
21.1.	Jumlah perpustakaan	Jumlah perpustakaan belum memenuhi dapat kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai; Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan yang berkualitas; Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan. • Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (Pustakawan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman masyarakat akan peran profesi pustakawan
21.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu; • Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
22.	Perencanaan Pembangunan			
22.6.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	24 kab/kota telah memiliki RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RPJPD tidak tersedia (Kab.Sinjai & Palopo) • Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan • Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
22.7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Semua Kab/Kota telah memiliki RPJMD yang ditetapkan dengan Perda		<ul style="list-style-type: none"> • Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan • Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
22.8.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Semua SKPD Provinsi dan Kab/kota memiliki RKPD yang ditetapkan oleh Perkada		<ul style="list-style-type: none"> • Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan
22.9.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Konsistensi antara Dokumen RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya konsistensi penjabaran RPJMD dan RTR dalam dokumen RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten pada dokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produktifitas padi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 1,58 % tetapi peningkatan luas panen leebih besar sebesar 5,02 % sehingga capaian peningkatan produksi setiap tahun didominasi oleh penambahan luas panen	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana produksi spt benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga) • Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana perhubungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T • Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi • Pembangunan dan rehabilitasidan jaringan irigasi • Pengembangan sumber air irigasi alternatif seperti embung dll. • Fasilitasi penyediaan alsintan dan lembaga penyedia alsintan • Fasilitas permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB paling tinggi dibanding sektor lainnya • Kontribusi sector Perkebunan terhadap PDRB 4,56 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari 29,45 5 tahun 2008 menjadi 24,79 % pada thn 2012 • Nilai tambah dan mutu hasil perkebunan masih belum optimal.(Dinas Perkebunan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan agroinput memenuhi prinsip 5 T • Peningkatan jalan penghubung dari kantong produksi ke pasar dan industri • Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya • Penyediaan sarana pengolahan yang memadai di sektor Perkebunan • Perbaikan dan Peningkatan Mutu hasil Perkebunan.

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.3.	Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB	Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB paling tinggi dibanding sub sektor lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 13,94 % tahun 2008 menjadi 12,08 % pada thn 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan agroinput memenuhi prinsip 5 T • Peningkatan jalan penghubung dari kantong produksi ke pasar dan industri • Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB 4,56 %	<ul style="list-style-type: none"> • Produktifitas tanaman Perkebunan belum optimal, masih di bawah potensi kemampuan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan tanaman secara intensif yang berkelanjutan • Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai • Perbaikan tanaman melalui peremajaan dan rehabilitasi serta pemilihan tanaman yang unggul yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan anomali iklim.
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB belum teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya data dan informasi terkait produksi kelompok petani terhadap PDRB • Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam peningkatan pendapatan; • Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memacu peningkatan produksi kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dan informasi kontribusi kelompok petani terhadap PDRB; • Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani agar dapat berkontribusi optimal dalam PDRB • Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan kontribusi kelompok petani.
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	Cakupan kelompok petani yang menjalankan usaha melalui pembinaan masih sangat rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian; • Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian; • Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.7.	Produksi daging	Target produksi daging diharapkan tahun 2013 sebesar 11,3%	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi daging tinggi mencapai 20,1 %, namun kualitas daging masih rendah • Harga daging lokal relatif tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana, menerapkan teknologi produksi, manajemen produksi, dan penanganan pasca panen
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan, yakni dari 17,92 ribu ha tahun 2008 meningkat menjadi 115,63 ribu ha tahun 2012 atau dari 2,62 persen menjadi 21,98 persen	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya laju deforestasi dan degradasi hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan multipihak dalam rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan dan penyuluhan kehutanan
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	Kerusakan hutan masih 12% dibandingkan dengan luas	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya perambahan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor kehutanan masih di bawah 1 %,	<ul style="list-style-type: none"> • Secara ekonomi kontribusi sektor kehutanan masih rendah namun kontribusi intangiblenya tidak dihitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa izin Pengawasan produksi mineral dan batu bara	Penanganan pertambangan tanpa izin masih dibawah 47%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi masih pada tahun 2012 5,63% masih dibawah capaian tahun 2008 namun cenderung stabil di angka tersebut selama 4 tahun berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reencana tata ruang • belum terlaksananya pengawasan operasional pertambangan yang baik. • Belum tercapainya ketaatan pemegang izin pertambangan terhadap pelaporan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan pertambangan
4.	Pariwisata			

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4.1.	Kunjungan wisata	Kunjungan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 25,94 persen, yakni dari 2,75 juta orang tahun 2009 meningkat menjadi 5,5 juta jiwa tahun 2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW) • Masih banyak DTW baru yang belum terjangkau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW • Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur.
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi terhadap PDRB rata-rata 1,56 persen selama lima tahun (Harga berlaku Tahun dasar 2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya promosi pada segmen pasar internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri.
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan	Jumlah produksi ikan pada 2013 sebesar 2.884.006,7 Ton atau 194,68 persen dari target produksi perikanan sebesar 1.481.387,2 Ton. Jumlah produksi Udang Tahun 2013 sebesar 34.420,7 Ton. Produksi Rumput Laut tahun 2013 2.422.154,2 Ton. Produk Bandeng Tahun 2013 sebesar 119.887,7 Ton.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir • Armada kapal penangkap ikan masih didominasi oleh kapal penangkap skala kecil • Kualitas SDM • Masih maraknya Illegal Fishing 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan • Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi • Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan dan kelautan • Rasionalisasi armada penangkap ikan
5.2.	Konsumsi ikan	Pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar 105,47 persen, dimana konsumsi ikan yang dicapai sebesar 44,30 kg/Kapita sementara target daerah hanya sebesar 42,00 kg/Kapita.	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan Konsumsi protein asal hewani • Kualitas produk tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama (tambahan) • Pola distribusi dan konsumsi ikan belum merata. • Sebagian besar produk hasil perikanan diperdagangkan antar pulau dan ekspor (tambahan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan • Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan • Komoditas perikanan dimasukkan dalam UU pangan Strategis
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah	Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapat bantuan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, yakni 0,37 persen tahun 2008 meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kelembagaan kelompok nelayan belum optimal • Masih kuatnya relasi punggawa-sawi 	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi teknologi pada kelompok perikanan • Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta membenahan sistem dan manajemen

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		menjadi 0,72 persen tahun 2013 atau dari 383 kelompok menjadi 1.030 kelompok.		usaha kelembagaan
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah	Jumlah produk kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah sebesar 57,83 persen dari produk daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan • Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan • Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan). • Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah • Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Rata-rata 17 persen selama lima tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap peningkatan PDRB Sulsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB; • Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	Ekspor bersih sebesar US1.446,19 juta pada tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kontribusi ekspor terhadap pembangunan Sulsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran dan kontribusi ekspor terhadap pembangunan; • Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya memacu nilai ekspor sektor perdagangan
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persentase usaha informal dan kelompok pedagang yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Masih bersarnya jumlah kelompok pedagang dan usaha informal yang aktif dan mandiri; • Masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pembinaan dan fasilitasi kelompok pedagang dan usaha informal; • Peningkatan keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor Industri	Pertumbuhan sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya investasi sektor industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi yang semakin baik

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	terhadap PDRB	12,23 persen	pengolahan	
7.2.	Pertumbuhan Industri.	Pertumbuhan industri 9,32 persen (ADHK)	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya investasi sektor industri pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> Iklm investasi yang semakin baik
8.	Ketransmigrasian			
8.1.	Transmigran swakarsa Mandiri (TSM)	Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Program sudah tidak ada 	<ul style="list-style-type: none">
8.2.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB belum dapat digambarkan	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya data dan informasi kontribusi transmigrasi terhadap PDRB akibat pelaksanaan transmigrasi belum bersinergi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program transmigrasi; Penyediaan data dan informasi yang berkualitas dan bersinergi antar tingkatan pemerintahan terkait transmigrasi
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
I	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pengeluaran makanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar 51,40 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,31 poin jika dibandingkan dengan tahun 2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi rumah tangga per kapita masih didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	<ul style="list-style-type: none"> persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita meningkat dan hampir berimbang, yakni dari 38.66 persen menjadi 48.60 persen. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi non pangan lebih rendah dibanding konsumsi pangan per kapita 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
1.3.	Produktivitas total daerah	PDRB meningkat signifikan dari tahun ketahun	<ul style="list-style-type: none"> Masih didominasi sektor pertanian yang pemasarannya dalam bentuk komoditi primer 	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan pertanian meningkat Sarana produksi pertanian meningkat

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.	Pertanian			
2.1.	Nilai tukar petani	Nilai tukar petani di Sulsel berada di atas rata-rata provinsi tetangga dari semula pada tahun 2008 sebesar 100,20 meningkat menjadi 108,11 pada tahun 2012.	Meskipun NTP telah berada diatas 100 namun belum bisa dikatakan bahwa petani telah sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan daya beli masyarakat meningkat • Jumlah produksi hasil pertanian meningkat
II	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1.	Perhubungan			
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Pertambahan jumlah kendaraan lebih tinggi dibanding peetambahan panjang jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembangunan infrstruktur jalan baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan baru
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah arus barang dan orang semakin meningkat		<ul style="list-style-type: none"> • Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi kedaerah
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penumpang domestik sebesar 8.481.423 penumpang dan Internasional sebesar 112.916 penumpang di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2012, total sebesar 8.594.339 penumpang. • Pelabuhan Makassar mengalami peningkatan, dengan jumlah peningkatan penumpang tiap tahunnya sebesar 8% yang pada tahun 2012 berjumlah 1.317.814 orang, dan peningkatan bongkar muat tiap tahun sebesar 11,19% yang pada tahun 2012 telah mencapai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya transportasi antar moda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal • Penerapan sistem transportasi multimoda serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		15.73 Ton/TEU.		
2.	Penataan Ruang			
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRWP sudah mencapai 0,52 yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya 138 program pembangunan utama pada indikasi program utama RTRWP	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang • Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan • Upaya Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
2.2.	Luas wilayah produktif	Luas wilayah produktif Sulawesi Selatan berdasarkan RTRWP Sulawesi Selatan sudah mencapai 0,35 dengan mengembangkan kawasan produktif seluas 1.816.757 hektar.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang • Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang, • Adanya pengembangan kawasan permukiman Kota Baru Mamminasata • Adanya pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Center Point of Indonesia
2.3.	Luas wilayah industri	Luas wilayah industry di Sulawesi Selatan sesuai dengan RTRW sampai tahun 2012 baru mencapai 0,03 dengan membangun industry dan kawasan industry seluas 7,92 Km ²	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang • Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan
2.4.	Luas wilayah banjir	Persentase luas wilayah banjir terhadap luas wilayah budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20,20 persen.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang • Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan
2.5.	Luas wilayah perkotaan	Realisasi luas kawasan perkotaan terhadap luas rencana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan kawasan perkotaan yang mengacu pada RTR;

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		budidaya sesuai RTRWP Sulsel saat ini mencapai 15,96.	mengacu pada rencana tata ruang <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Peningkatan dan pemerataan jumlah dan jenis bank	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kesadaran masyarakat menggunakan jasa perbankan • Jumlah tabungan dan nasabah meningkat
3.2.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha restoran • Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan restoran yang sehat, dan halal; • Masih terbatasnya jumlah restoran yang terdaftar dan tersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan restoran yang sehat dan halal; • Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan restoran yang sehat dan halal.
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha penginapan/hotel; • Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas penginapan/hotel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan penginapan/hotel; • Masih terdapat beberapa penginapan/hotel yang sesuai dengan syarat dan persyaratan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan penginapan/hotel; • Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait syarat dan persyaratan pendirian penginapan/hotel..
4.	Lingkungan Hidup			
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Cakupan pengguna air bersih sebesar 83,63% dengan total rumah tangga sebesar 1.583.095 RT yang menggunakan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya cakupan RT yang menggunakan air bersih dari sumber yang aman; • Makin berkurangnya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan RT 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan pelayanan air bersih di tingkat rumah tangga; • Peningkatan upaya konservasi sumber air baku
5.	Komunikas dan Informatika			
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik	Kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemanfaatan energi baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		3.758 GWH didominasi oleh kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 48%, disusul oleh kebutuhan untuk industry sebesar 24%, untuk komersial sebesar 17,3%, dan sisanya untuk kebutuhan publik.	terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik • Laju pertumbuhan permintaan energy didominasi oleh kebutuhan komersial sebesar 32% dan pertumbuhan kebutuhan industry sebesar 21%, 	lokal khususnya energi baru terbarukan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan Desa Mandiri Energi.
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Sulawesi Selatan didominasi oleh pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 44% dari seluruh rumah tangga pengguna listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah • Semakin tinggi permintaan sambungan baru untuk RT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan Desa Mandiri Energi.
III	Fokus Iklim Berinvestasi			
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.	Angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2008-2012), Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 15.137 kasus menjadi 22.051 kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya angka kriminal akibat sosialisasi hukum yang kurang • Masih rendahnya pendidikan • Kurangnya jumlah aparat penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan frekwensi pelaksanaan sosialisasi perangkat hukum; • Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat • Mengaktifkan Kantibmas
1.2.	Jumlah demo	Tingginya jumlah demonstrasi dan meningkat dari tahun ketahun	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rentang aksi demonstrasi • Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi yang benar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi; • Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa

No	URUSAN/IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.3.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola Pemda telah ditetapkan secara <i>Close List</i> berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat pungutan di tingkat Kabupaten/kota yang bersifat kontra produktif dengan iklim investasi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan atas implementasi Perda Pajak dan retribusi daerah di Tingkat Kabupaten/Kota
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda yang berkaitan dengan investasi masih belum mendukung pengembangan iklim usaha di Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya dukungan legislasi yang mendukung pengembangan investasi sehingga mempengaruhi jumlah investasi yang terealisasi di Sulsel 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah perda yang mendukung iklim usaha
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Desa swasembada sebesar 500 desa dari sejumlah 2.192 desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya peran, kapasitas dan kemampuan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa
IV	Fokus Sumber Daya Manusia			
1.	Ketenagakerjaan	Jumlah angkatan kerja 3.560.891 Penduduk yg bekerja 3.351.908 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,9% (208.980 org)	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya urbanisasi ke kota Kurangnya keterampilan bekerja Pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kegiatan agro industri Meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor perkebunan dari negara tetangga
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Perbandingan lulusan S1, S2 dan S3 masih dibawah nasional	Masih mahal biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi	Fasilitasi peningkatan rasio lulusan siswa dan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan biaya/beasiswa
1.2.	Rasio ketergantungan	Perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun).	<ul style="list-style-type: none"> Naiknya persentase penduduk yang belum dan tidak produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, program Keluarga Berencana (KB).

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu global. Penyelenggaraan urusan pemerintahan selama beberapa tahun ke depan juga akan dipengaruhi dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai perubahan mendasar di dalam pembagian urusan pemerintahan.

4.2.1. Isu Global

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah.

Perubahan Iklim dan Bencana Alam, paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian

dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.

Eksplorasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya setempat secara optimal. Sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut.

Terorisme global, Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam memerangi terorisme internasional.

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.

Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antaragama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.

Perdagangan Bebas, Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (*linkage*), dan saling ketergantungan (*interdependence*). Skenario liberalisasi

melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.

Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplier effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kanchah perekonomian global.

Demokrasi dan HAM, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintah-pemerintah otoriter di dunia walaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Bahkan negara-negara demokrasi maju sekalipun sedang mengalami dinamika-dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.

Trafficking, Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam *human trafficking*. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.

Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana dua komponen yang saling memperkuat yakni antara kurangnya

lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya ketrampilan yang dimiliki. Sulawesi Selatan dapat mengambil peran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

4.2.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu global.

Selain isu global, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan, seperti yang telah diamanahkan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan:

1. Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL / RPL maupun UKL / UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2. Pada sektor pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan antara lain dengan pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk anorganik, pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan secara terintegrasi dalam masing-masing program atau dengan membuat kegiatan berupa Sosialisasi dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan. Disamping itu disarankan pula dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan sistem SRI (sistem of rice intensification) yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta mengembangkan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif.
3. Pada Sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka direkomendasikan pula untuk memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk an-organik dan mengembangkan biogas yang dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaian energi fosil.
4. Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya, maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah pesisir.
5. Hal lain yang sangat penting adalah pemantapan moral dan akhlak masyarakat dalam menjamin keseimbangan pembangunan.

Isu lain yang dianalisis dalam penyusunan RPJMD ini adalah isu pengarusutamaan gender. Sehingga dalam penentuan kebijakan dan program-program yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu kaitannya dan atau pengaruhnya terhadap isu-isu gender yang analisisnya secara lengkap diulampirkan secara terpisah dengan dokumen ini.

Adapun daftar isu strategis secara keseluruhan daerah ini disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Pendekatan

urusan akan lebih mempermudah didalam menentukan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi isu strategis tersebut

4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- Masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah cenderung menurun;
- Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
- Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat;

b. Urusan Kesehatan

- Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif,
- Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;
- Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan.
- Pembinaan Gizi Masyarakat;

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi
- Belum optimalnya kinerja sarana dan prasana sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan Sulsel
- Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
- Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih tinggi
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Belum semua wilayah mempunyai Rencana Dasar Tata Ruang, produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.
- Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.
- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
- Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, serta Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;

f. Urusan Sosial

- Masih cukup tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadian bencana alam.
- Panti-panti sosial kurang diberdayakan
- Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Non Pelayanan Dasar**g. Urusan Lingkungan Hidup**

- Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
- Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku
- Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- Dampak pemanasan global semakin meningkat

h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga.
- Masih kurangnya pembinaan kepemudaan,
- Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga,

i. Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya pengelolaan investasi.
- Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan; Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Pemberdayakan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,
- Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;
- Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;

k. Urusan Kependudukan dan catatan Sipil

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.
- Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk

l. Urusan Ketenagakerjaan

- Masih terbatasnya lapangan kerja,
- Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar

m. Urusan Ketahanan Pangan

- Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,
- Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah,
- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
- Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak,
- Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- Tingginya bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah pada anak dan perempuan

o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi,
- Jumlah penduduk Indonesia naik dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir, diprediksi mencapai 254,4 juta - 255,8 juta jiwa tahun 2015 (BPS dan lembaga demografi UI) bila pertambahan penduduk masih 1,49% (Rata-Rata dunia 1,16%)

p. Urusan Perhubungan

- Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
- Daya tampung infrastruktur transportasi
- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi
- Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang

q. Urusan Komunikasi dan Informasi

- Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.
- Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat.

r. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan.
- SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional;
- Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi keuangan daerah (Pembiayaan, pendapatan dan belanja daerah) dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- Penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undang yang masih lemah
- Perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis.
- Peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi yang diharapkan,
- Lemahnya infrastruktur pendukung pelaksanaan birokrasi.
- Penataan kelembagaan instansi Pemerintah yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya

- Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik
- Pengembangan dan penerapan E-Government
- Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang;
- Pengalokasian pegawai pada setiap SKPD tidak merata
- Perangkat daerah yang cenderung terlalu gemuk (banyaknya pada setiap SKPD)
- Munculnya berbagai masalah pertanahan termasuk asset Pemda yang bermasalah

s. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
- Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan
- Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, pemkab/pemkot dan desa .
Perlu nya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM

t. Urusan Kebudayaan

- Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya.
- Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- Terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan local

u. Urusan Statistik

- Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.
- Pembiayaan, sarana dan prasarana yang kurang

v. Urusan Kearsipan

- Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan.
- Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah.
- Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal.
- Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat provinsi dan kab/kota.

w. Urusan Perpustakaan

- Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan.
- Masih rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak sekolah.
- Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional
- Bahan bacaan perpustakaan yang masih minim

x. Urusan Perencanaan Pembangunan

- Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan,
- Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya;

4.2.2.2. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya
- Ekonomi kelautan, tatakelautan dan keamanan laut
- Peningkatan produksi kelautan dan perikanan & pembangunan sentra perikanan terpadu
- Pemberantasan UU fishing
- Keterbatasan infrastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan
- Produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan

b. Urusan Pertanian

- Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan, perikanan serta teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas;
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
- Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis.
- Pengembangan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil perkebunan
- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
- Ternak ruminansia betina produktif berdasarkan UU No. 41 tahun 2014 (perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Produktivitas yang diharapkan dari ternak ruminansia betina yakni dapat menambah jumlah populasi.

c. Urusan Kehutanan

- Degradasi hutan dan lahan;
- Alih fungsi lahan;
- Luas hutanselalu berkurang akibat dari kegiatan penambangan;
- Luas lahan kritis masih cukup banyak

d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- Terbatasnya pasokan listrik untuk industri dan rumah tangga
- Masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan.
- Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal

e. Urusan Pariwisata

- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.
- Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

f. Urusan Industri

- Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM,
- Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata
- Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

g. Urusan Perdagangan

- Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis,
- Kurang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015
- Kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional.

h. Urusan Ketransmigrasian

- Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relative rendah dan ketidaksiapan lokasi transmigrasi;
- Semakin rendahnya Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM);

4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya hal-hal terkait dengan SPM seperti indikator, target dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
 - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025);
 - b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025);
 - c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% pada tahun 2025).

- 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008)
 - a. Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
 - b. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015);
 - c. Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
 - d. Persentase panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial (60% pada tahun 2015);
 - e. Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (80% pada tahun 2015);
 - f. Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015).

- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)
 - a. Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutunya dan diinformasikan status mutu airnya (70% pada tahun 2013);
 - b. Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan informasikan mutu udara ambiennya (100% pada tahun 2013);
 - c. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (100% pada tahun 2013).

- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)
 - a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (100% pada tahun 2014);
 - b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% pada tahun 2014);
 - c. Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
 - d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
 - e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% pada tahun 2014);
 - f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50% pada tahun 2014);
 - g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% pada tahun 2014);

- h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% pada tahun 2014).
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
- Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (50% pada tahun 2016);
 - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (60% pada tahun 2016);
 - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (60% pada tahun 2016).
- 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010)
- Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015);
 - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015);
 - Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015);
 - Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015).
- 7) SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010)
- Cakupan kajian seni (50% pada tahun 2014);
 - Cakupan fasilitas seni (30% pada tahun 2014);
 - Cakupan gelar seni (75% pada tahun 2014);
 - Cakupan misi kesenian (100% pada tahun 2014);
 - Cakupan SDM kesenian (25% pada tahun 2014);
 - Cakupan tempat (100% pada tahun 2014);
 - Cakupan organisasi (34% pada tahun 2014).
- 8) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
 - Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2014);
 - Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
 - Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun 2014);
 - Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (75% pada tahun 2014);
 - Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada

- wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (60% pada tahun 2014);
- h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - i. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau (100% pada tahun 2014);
 - j. Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan (75% pada tahun 2014);
 - k. Tersedianya pelabuhan bagi setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan (75% pada tahun 2014);
 - l. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014);
 - m. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan (100% pada tahun 2014);
 - n. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (100% pada tahun 2014);
 - o. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - p. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014).
- 9) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)
- a. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : -Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih 1 kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi (100% pada tahun 2014);
 - b. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - b. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (1 sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2014);
 - c. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - d. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - e. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100% pada tahun 2014);
 - f. Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (100% pada tahun 2014);

- g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014).

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka undang-undang tersebut mengamanatkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Kebijakan pelaksanaan SPM yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membatasi jumlah SPM hanya pada 6 (enam) bidang urusan yaitu pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014)
 - a. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan (70% pada tahun 2019);
 - b. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (60% pada tahun 2019);
 - c. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah produksi (100% pada tahun 2019);
 - d. Persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) (100% pada tahun 2019);
 - e. Meningkatnya ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (100% pada tahun 2019).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018. Proses perumusan lahirnya visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penjelasan visi dijabarkan kedalam tiga pokok kalimat yang menjadi batasan pengertian visi. Berdasarkan hal tersebut, maka visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut.

“ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “

Dalam rumusan visi ini ada **tiga** pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional, simpul jejaring dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 60,2 juta angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

5.2. Misi

Misi dalam Perubahan RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 dan menjadi acuan melahirkan arah kebijakan pembangunan. Penjelasan 7 (tujuh) Misi tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan antar umat beragama.

Kebahagiaan (*happiness*) adalah pencapaian puncak dari seluruh upaya pembangunan. Misi Ini terkait dengan penciptaan kondisi bagi pemenuhan kehidupan rohaniyah dan spiritualitas masyarakat sebagai salah satu landasan bagi pencapaian kebahagiaan yang hakiki. Dalam upaya umum ini tercakup penciptaan dukungan untuk kehidupan ummat beragama, baik laki-maupun perempuan, bagi terpenuhinya situasi yang kondusif dalam penyelenggaraan ibadah, kecukupan tempat beribadah, kapasitas penceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama.

(2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pencapaian kesejahteraan umum merupakan misi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya umum ini terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan. Ini diupayakan seiring dengan akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri, pengembangan wirausaha, penanganan masalah kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Misi ini menyeimbangkan antara upaya pertumbuhan kesejahteraan di satu sisi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di sisi lainnya, serta memperhatikan kesempatan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan penerimaan manfaatnya.

(3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Misi ini mencakupi upaya-upaya untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul bagi pelayanan pendidikan, kesehatan dan perhubungan di luar Jawa, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tercakup di dalamnya upaya untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul bagi pendidikan tinggi selain semakin memantapkan partisipasi wajib belajar 12 tahun, juga upaya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai simpul layanan kesehatan seiring dengan pengembangan layanan rumah sakit berskala internasional sambil semakin memantapkan layanan kesehatan untuk lapisan bawah dan rumah tangga miskin. Pada misi ini juga tercakup upaya untuk semakin memajukan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta sarana/prasarana transportasi guna memposisikan Sulawesi sebagai simpul perhubungan dan transportasi di Kawasan Timur Indonesia dan luar Jawa umumnya.

(4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

Peran pemerintah provinsi amat urgen dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memberi energi kepada daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan sinergi dalam mendorong pusat-pusat kemajuan. Misi ini mencakup upaya-upaya mengefektifkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota intra Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan kerjasama pembangunan antar provinsi regional Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia, serta mendinamiskan sinergitas global dengan lembaga internasional. Selain itu, misi ini

juga berfokus pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

(5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

Kemajuan tatanan menuju peradaban yang baik mempersyaratkan terpatuhinya norma-norma kehidupan. Ini akan beriring dengan perwujudan kesetaraan dan *fairness* di dalam berbagai aspek tatanan. Misi ini mencakup upaya-upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, penciptaan iklim bagi persaingan usaha, serta pensubstansian demokrasi dalam tatanan. Selain itu, tercakup upaya-upaya perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

(6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

Perwujudan ketertiban umum dan jaminan keamanan untuk semua (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan esensi dari penyelenggaraan pembangunan. Tentu saja ini harus seiring dengan upaya untuk terus menerus memvitalkan manifestasi kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendukung perwujudan ketertiban dan ketenteraman, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemeliharaan harmoni sosial, penegakan pilar berbangsa dan bernegara, serta penegakan implementasi regulasi daerah.

(7) Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi dorongan perubahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok atas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Keadaan demikian akan mendorong pengembangan relasi yang baik antara pemerintah, civil society dan dunia usaha.

Setiap misi ini mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5-1:
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi PRPJMD**

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Visi: Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018			
1.	Pilar Utama Pembangunan Nasional	Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama. (Misi 1)	Mendukung terpenuhinya situasi kondusif untuk umat dalam pelaksanaan ibadah, keterpenuhan tempat beribadah, kapasitas pen-ceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama.
		Meningkatkan kualitas ke-makmuran ekonomi, kese-	Meningkatkan produktivitas dan produksi perekonomian; peningkatan dan

		jahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. (Misi 2)	pemerataan pendapatan; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; pengembangan industri, pengembangan wirausaha lokal; pembangunan pariwisata, penanganan masalah kesejahteraan sosial; pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.
		Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum. (Misi 5)	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum; pendidikan demokrasi; perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dukungan informasi dan komunikasi.
		Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa. (Misi 6)	Meningkatkan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemeliharaan harmoni sosial, penegakan pilar kebangsaan dan bernegara, penegakan implementasi regulasi daerah.
2.	Pusat Jejaring	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah. (Misi 3)	Meningkatkan pemberantasan buta huruf, akselerasi akses pendidikan tinggi dan pemantapan wajib belajar 12 tahun; mengembangkan layanan rumah sakit berskala internasional dan memantapkan layanan kesehatan lapisan bawah dan rumah tangga miskin; memajukan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta sarana/prasarana transportasi;
		Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. (Misi 4)	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendorong berkembangnya nilai tambah produksi dan kawasan andalan, inkubator dan cluster industri strategis, meningkatkan kerjasama antar Kabupaten/Kota Regional Sulawesi dan Indonesia Timur serta mendinamiskan sinergitas global.
3.	Akselerasi Kesejahteraan	Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. (Misi 2)	Meningkatkan produktivitas dan produksi perekonomian; peningkatan dan pemerataan pendapatan; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; pengembangan industri, pembangunan pariwisata, pengembangan wirausaha lokal; penanganan masalah kesejahteraan sosial; pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;
		Meningkatkan perwujudan	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi;

	keperintahan yang baik. (Misi 7)	perbaikan sistem pelayan-an; perencanaan pembangunan; pengawasan dan pengendalian pembangunan; peningkatanakuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan daerah (pembiayaan, pendapatandanbelanja) dan asset daerah;
--	-------------------------------------	--

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuandalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari misi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran RPJMD ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018

Misi	Tujuan	Sasaran
Mendorong semakinberkembangnyamasyarakatreligiusedankerukunanummatberagama.	Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1)
		Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2)
Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem.	Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (3)
		Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4)
		Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM (5)
		Berkembangnya daya saing pariwisata daerah (6)
		Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7)
		Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9)
	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10)
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (11)
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber-daya alam	Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.(12)
Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13)		
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat (14)
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15)
		Berkembangnya pendidikan tinggi (16)
		Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17)
		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18)
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Berkembangnya layanan RS. terakreditasi Internasional (19)
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20)
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21)
		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan (22)
		Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23)
Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnyakapasitasjalangunamendukung Sulawesi Selatan sebagaisimpul transportasi luar	

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>Jawa (24)</p> <p>Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25)</p> <p>Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26)</p> <p>Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27)</p> <p>Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan air tanah (28)</p> <p>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah (29)</p> <p>Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir pulau-pulau kecil (30)</p> <p>Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana (31)</p>
<p>Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.</p>	<p>Meningkatkan daya saing daerah</p> <p>Meningkatkan kerjasama</p>	<p>Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (32)</p> <p>Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (33)</p> <p>Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (34)</p> <p>Efektifnya peran Sulawesi Selatan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
	antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global	dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. (35)
		Meningkatnya percepatan pembangunan kawasanandalan (36)
Meningkatkankualita sdemokrasi dankepasti-anhukum.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial (37)
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)
	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya keberdayaanperempuan dan perlindungan anak (39)
Meningkatkankualita sketertiban, keamananandankesatu anbangsa.	Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	Terpeliharanyaketertiban, ketenteramandankenyamanandala mmasyarakat (40)
	Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa	Berkembangnyawawasan, kesadaranperilakumasyarakat yang mendukungkesatuanbangsadanhar monisosialdalamwadah NKRI (41)
Meningkatkanperwu jud-anpemerintahan yang baik.	Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42)
		Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan (43)
		Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44)
		Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45)
	Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan

Misi	Tujuan	Sasaran
	pemerintahan desa	masyarakat (46)
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (47)

Tabel 5.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan

RPJMN 2015 – 2019	RPJMD SULSEL 2013 – 2018
VISI	VISI
‘TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG’	“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”
MISI	MISI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Semakin Berkembangnya Masyarakat yang Religius Dan Kerukunan intra dan antar Ummat Beragama. 2. Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan. 3. Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur Wilayah. 4. Meningkatkan Daya Saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. 5. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Kepastian Hukum. 6. Meningkatkan Kualitas Ketertiban, Keamanan Dan Kesatuan Bangsa. 7. Meningkatkan Perwujudan Pemerintahan yang baik

RPJMN 2015 – 2019	RPJMD SULSEL 2013 – 2018

RPJMN 2015 – 2019	RPJMD SULSEL 2013 – 2018
9 AGENDA PRIORITAS	TUJUAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas ke-hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama 2. Meningkatkan kualitas ke-makmuran ekonomi 3. Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan social 4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber-daya alam 5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan 6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan 7. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur 8. Meningkatkan daya saing daerah 9. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global 10. Meningkatkan kualitas pe-nyelenggaraan demokrasi dan penegakan hokum 11. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak 12. Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masya-rakat 13. Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa 14. Mewujudkan kepemerin-tahan yang baik dan bersih 15. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

6.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Visi: Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018			
Misi 1: Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama (2 sasaran)			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas ke-hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1)	Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama
		Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama (2)	
Misi 2: Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (16 sasaran)			
2.	Meningkatkan kualitas ke-makmuran ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (3)	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan
		Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4)	Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru

		Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM (5)	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai dengan peningkatan daya saing pasar
		Berkembangnya daya saing pariwisata daerah (6)	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru
		Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7)	Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru
		Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)	Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan level provinsi dan kabupaten/kota
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9)	Peningkatan koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan panganserta pengembangan pangan hutan dan pangan laut.
3.	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10)	Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (11)	Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS
4.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (12)	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta	Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta

		pelestarian keanekaragaman hayati (13)	pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
Misi 3:			
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur			
5.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat (14)	Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15)	Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis
		Berkembangnya pendidikan tinggi (16)	Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama
		Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17)	Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif-kreatif terhadap perubahan global
		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18)	Pengembangan prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung
6.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional (19)	Kerjasama pihak swasta dan fasilitasi kabupaten/kota dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20)	Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21)	Penanganan komprehensif usia 1.000 hari kehidupan (SUN)

		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan (22)	Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan
		Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23)	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan
7.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24)	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis
		Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25)	Penguatan konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam pengembangan tol laut.
		Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26)	Mendorong peningkatan literasi TIK dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27)	Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah (28)	Penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung	Pengembangan sumber-sumber energi alternatif terbarukan dan optimalisasi pengelolaan

		peningkatan perekonomian wilayah (29)	sumberdaya mineral
		Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir pulau-pulau kecil(30)	Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil
		Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana (31)	Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan
Misi 4:			
Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global			
8.	Meningkatkan daya saing daerah	Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (32)	Pengembangan kerjasama pembangunan dan penguatan daya saing daerah
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (33)	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat internasional
		Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (34)	Membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha
9.	Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global	Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. (35)	Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global

		Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan (36)	Peningkatan kualitas interkoneksi fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage
Misi 5: Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum			
10.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial (37)	Memperkuat kordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horizontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan norma sosial
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)	Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih substantif
11	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (39)	Memperkuat keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan
Misi 6: Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa			
12.	Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat (40)	Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan.
13.	Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa	Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI (41)	Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa
Misi 7: Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih			

14.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42)	Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan
		Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan (43)	Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah peningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional
		Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44)	Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara seiring dengan pembelanjaan yang efektif dan efisien berbasis pada inovasi administratif dan teknis
		Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45)	Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dengan memperhatikan penuh kearifan lokal
15.	Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat (46)	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (47)	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat mempertahankan predikat WTP dari tahun ketahun.

Arah kebijakan pembangunan lima tahun Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Pembangunan tahun 2013 merupakan transisi dari periode RPJMD sebelumnya. Fokus pembangunan selain melanjutkan pencapaian periode RPJMD sebelumnya, juga meletakkan dasar-dasar bagi fokus pembangunan periode RPJMD saat ini. Kebijakan pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan:
 - (1) Peningkatan produksi tanaman pangan;
 - (2) Peningkatan populasi ternak;
 - (3) Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - (4) Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - (5) Pengembangan komoditas garam;
 - (6) Pengembangan industri lokal;
 - (7) Penguatan permodalan dan manajerial UKM serta koperasi;
 - (8) Penumbuhan wirausaha baru;
 - (9) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
 - (10) Pengembangan obyek wisata unggulan dan promosi wisata;
 - (11) Penegakan regulasi lahan pangan berkelanjutan;
 - (12) Penguatan penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - (13) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
 - (14) Peningkatan bantuan dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - (15) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
2. Pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
 - (1) Pemberian bantuan SPP kepada mahasiswa baru;

- (2) Peningkatan akses dan jenjang layanan pendidikan gratis;
 - (3) Penuntasan buta huruf;
 - (4) Pengembangan kekakayaan dan keragaman budaya;
 - (5) Pengembangan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pembangunan bidang Kesehatan:
 - (1) Dukungan pengembangan rumah sakit berakreditasi nasional;
 - (2) Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis;
 - (3) Penguatan jaminan kesehatan masyarakat;
 - (4) Penanganan komprehensif ibu dan anak 1.000 hari pertama kehidupan;
 - (5) Peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif;
 - (6) Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
 4. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa:
 - (1) Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan;
 - (2) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa;
 - (3) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
 - (4) Penanggulangan kemiskinan.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari berlakunya RPJMN 2010-2014. Karena itu, prioritas RPJMN menjadi perhatian. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun demokrasi dan politik, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden, sehingga perhatian juga perlu diberikan terkait hal tersebut. Kebijakan pembangunan tahun 2014 diarahkan kepada:

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
 - a) Penegakan hukum dan norma sosial;
 - b) Dukungan penyelenggaraan pemilu;
 - c) Pembinaan partai politik;
 - d) Pemberdayaan perempuan;
 - e) Perlindungan anak;
 - f) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
 - g) Penguatan wawasan kesatuan bangsa.
2. Pemantapan kehidupan beragama:
 - a) Pemenuhan sarana/prasarana ibadah;
 - b) Pemeliharaan kerukunan beragama.
3. Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu:
 - a) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
 - b) Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah:
 - a) Dukungan pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi;
 - b) Peningkatan kapasitas jalan;
 - c) Pengembangan Kawasan Strategis;
 - d) Peningkatan kapasitas bandara;
 - e) Peningkatan kapasitas pelabuhan;

- f) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - g) Pengembangan perumahan dan pemukiman;
 - h) Pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
 - i) Penguatan kapasitas listrik;
 - j) Pengembangan energi terbarukan;
 - k) Pembangunan pertambangan;
 - l) Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan pulau;
 - m) Peningkatan kapasitas penanganan bencana.
5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Governance:
- a) Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - b) Peningkatan kompetensi aparatur ;
 - c) Pengembangan transparansi birokrasi;
 - d) Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang;
 - e) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - f) Perbaikan administrasi pemerintahan umum;
 - g) Penguatan dukungan pemerintahan kewilayahan.
6. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
- a) Perlindungan fungsi lingkungan;
 - b) Penanganan dampak lingkungan;
 - c) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan;
9. Pembangunan kesehatan

c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015

Pada tahun 2015 legislatif baru dan kabinet baru mulai berjalan. Karena itu, sebagian dari kebijakan akan menyesuaikan diri dengan arahan dari kabinet baru tersebut. Kebijakan yang diprioritaskan pada tahun ini adalah::

1. Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing daerah:
 - a) Pengembangan kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Luar Negeri;
 - b) Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri;
 - c) Pengembangan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah;
 - d) Pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis;
 - e) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
 - f) Penguatan sistem inovasi daerah;
 - g) Penguatan dukungan pada poros maritim
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
3. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan
Pembangunan kesehatan;
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
5. Pengembangan Kawasan Strategis;

6. Pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
7. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Pada tahun 2016 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Hasil review RPJMD perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespon arah kebijakan NAWACITA RPJM Nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, Pembangunan kesehatan;
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
4. Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri;
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
6. Peningkatan produksi pangan, , termasuk pengembangan pangan hutan dan laut;
7. Penguatan poros maritim;

e. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Pada tahun 2017 akselerasi dilakukan pada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Adapun prioritas kebijakan pada tahun ini adalah:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, Pembangunan kesehatan;
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wiayah;
4. Pengembangan Kawasan Strategis;
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
6. Penguatan ketahanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut ;

f. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari perode RPJMD 2013-2018. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Gubernur secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2018. Selain itu, priorotas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2017. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah:

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan;

3. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, Pembangunan kesehatan;
4. Pengembangan Kawasan Strategis;
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
6. Peningkatan daya saing pasar internasional;

Tabel 6.2
Arah kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Misi 1:										
Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama										
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama	<p>Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1)</p> <p>Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama (2)</p>	<p>Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama</p>					Aksele-rasi pemantapan kehidupan beragama	Akse-lerasi pencapaian target-target pemantapan kehidupan beragama yang tertinggal	Penyelesaian target-target pemantapan kehidupan beragama yang terting-gal
Misi 2:										
Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem										
2.	Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura,	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan				Peningkatan produksi pangan, , termasuk pengemba	Penguatan Ketahanan Pangan, termasuk pangan		

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		peternakan, perkebunan dan perikanan (3)	dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan				ngan pangan hutan dan laut;	hutan dan laut	
		Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4)	Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru						
		Meningkatnya kualitas dan peran Koperasi dan UMKM (5)	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai daya saing pasar	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Aksele-rasi pengembangan ekonomi kerakyatan	Akselerasi target-target pengembangan ekonomi kerakyatan yang tertinggal	Penyelesaian target-target pengembangan ekonomi kerakyatan yang
		Berkembangnya daya saing	Peningkatan kualitas daya tarik						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		pariwisata daerah (6)	wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru.							terting-gal dan peningkat an daya saing pasar internasio nal
		Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7)	Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru							
		Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)	Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis koordinasi kelembagaan							

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
			penyuluhan level provinsi dan Kab.Kota						
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9)	Peningkatan koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan panganserta pengembangan pangan hutan dan pangan laut.						
3.	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10)	Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin		Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu		Akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu	Akselerasi target-target pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu yang tertinggal	Penyelesaian target pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (11)	Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
									yang tertinggal
4.	Meningkatkan kelestarian lingkunganhidu p dan sumberdaya alam	Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (12)	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup		Peningkatan kelestari-an dan penanga-nan dampak lingkung-an				
		Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13)	Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati						
Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur									

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat (14)	Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca	Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan	Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan	Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan	Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan	Akselerasi target-target pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan yang tertinggal	Penyelesaian target-target pembangunan bidang pendidikan yang tertinggal
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15)	Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis						
		Berkembangnya pendidikan tinggi (16)	Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama						
		Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17)	Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif-kreatif terhadap perubahan global						
		Meningkatnya	Pengembangan						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18)	prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung						
6.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional (19)	Kerjasama pihak swasta dan fasilitasi kabupaten dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit	Pembangunan bidang kesehatan	Pembangunan bidang kesehatan	Pembangunan bidang kesehatan	Akselerasi pembangunan bidang kesehatan	Akselerasi target-target pembangunan bidang kesehatan yang	Penyelesaian target-target pembangunan bidang kesehatan
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20)	Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional						
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu,	Penanganan komprehensif usia 1.000 hari						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		anak dan gizi (21)	pertama kelahiran					tertinggal	an yang terting-gal
		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan (22)	Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan						
		Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23)	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan						
7.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24)	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis			Pengemba ngan Kawasan Strategis	Pengemba ngan Kawasan Strategis	Pengemba ngan Kawasan Strategis	Pengemb angan Kawasan Strategis
		Tersedianya	Penguatan						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<p>jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25)</p> <p>Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan</p>	<p>konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam pengembangan tol laut</p> <p>Mendorong peningkatan literasi TIK dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk</p>		<p>Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah</p>	<p>Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah</p>	<p>Aksele-rasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah</p>	<p>Akselerasi target-target peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah yang tertinggal</p>	<p>Penyelesaian target-target peningkatan kapasitas infrastruktur yang tertinggal</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26)	peningkatan kualitas pelayanan publik						
		Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27)	Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat						
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah (28)	Keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi						
		Meningkatnya ketersediaan	Pengembangan sumber-sumber						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah (29)	energi alternatif terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya mineral						
		Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pulau-pulau kecil (30)	Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil dan terluar						
		Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana (31)	Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
			lembaga lain dalam penanganan kebencanaan						
Misi 4: Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global									
8.	Meningkatkan daya saing daerah	Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (32)	Pengembangan kerjasama pembangunan dan penguatan daya saing daerah						
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa. (33)	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat internasional						
		Berkembangnya	Membangun						
						Pengembangan kerjasama dan daya saing daerah	Aksele-rasi pengembangan kerja-sama dan daya saing daerah	Akelerasi target-target kerjasama dan daya saing daerah yang tertinggal	Penyelesaian target-target pengembangan kerjasama dan daya saing daerah yang

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Sistem Inovasi Daerah (SIDA) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (34)	sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha							terting-gal
9.	Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global	Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. (35)	Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global							
		Meningkatnya percepatan	Peningkatan kualitas							

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		pembangunan kawasan andalan (36)	interkoneksi fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage						
Misi 5: Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum									
10.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial (37)	Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horizontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan norma sosial						
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)	Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi		Pemeliharaan ketertiban dan demokrasi		Akselerasi pemeliharaan ketertiban	Akselerasi target-target pencapaian	Penyelesaian target-target

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
			perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih substantif				dan pencapaian demokrasi	an demokrasi yang tertinggal	penca-paian demokrasi yang terting-gal
11	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak (39)	Memperkuat keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan						
Misi 6: Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa									
12.	Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan ke-nyamanan dalam masyarakat (40)	Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketenteraman dan ke-		Pemeli-haraan ketertiban		Akselerasi pemeliha-raan ketertiban dan	Akselerasi target-target ketertiban dan	Penyele-saian target-target pemeli-

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
			nyamanan.						
13.	Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa	Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI (41)	Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa		dan demokrasi		pencapaian demokrasi	kesatuan bangsa yang tertinggal	haraan ketertiban dan kesatuan bangsa yang tertinggal
Misi 7: Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih									
14.	Mewujudkan pemerintahan yang baik	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42)	Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan						
		Terwujudnya peningkatan	Mensinergikan pendidikan dan						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan (43)	pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah penningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional		Reformasi birokrasi dan penguatan governance	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas birokrasi dan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas birokrasi dan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas birokrasi dan Kelembagaan
		Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel dan inovatif dan tertib (44)	Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara seiring dengan pembelanjaan yang efektif dan efisien berbasis pada inovasi administratif dan teknis						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45)	Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up dalam pengarusutamaan gender yang makin signifikan dan memperhatikan penuh kearifan local						
15.	Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat (46)	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa			Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa	Akselerasi target-target pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Penyelesaian target-target pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan						

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
		pemerintahan desa (47)	kerangka otonomi desa					yang tertinggal	dirian desa yang terting-gal

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan ditampilkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
1.	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Penguatan Kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Fasilitasi sarana /prasarana ibadah dan pembinaan pemuka agama	Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan fasilitas/pembinaan	200 org pemuka agama/perwakilan lembaga keagamaan	3410 org pemuka agama/perwakilan lembaga keagamaan	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Mensprit
2.	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama	kehidupan beragama	Pemeliharaan kerukunan beragama	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan	Jumlah dai dan pemuka agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan	Dai dan pemuka agama lainnya: 700 org	Dai dan pemuka agama lainnya: 5700 org	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Mensprit
3	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan,	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura,	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan	Tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan utama dan hortikultura Produksi : Padi Jagung	5.035.830 Ton 1.250.202 ton	6.739.078 ton 1.712.886 ton	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	peternakan, perkebunan, Kehutanan dan perikanan.	peternakan, perkebunan, Kehutanan dan perikanan melalui pengembangan pangan hutan dan pangan laut.			Kedelai dan Palawija lainnya Produktivitas : Padi Jagung Kedelai dan Palawija lainnya	45.693 ton 51,22 Kw/Ha 45.62 Kw/Ha 14,77 Kw/Ha	58.317 Ton 56,56 Kw/Ha 50,43 Kw/Ha 15,91 Kw/Ha		
			Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Hortikultura	ProduksiHortikultura :	134.691 Ton	142.977 Ton	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hor-tikultura	
			Peningkatan Produksi Ternak	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi dan Populasi Ternak	Sapi Potong 1.128.306, ekor, Sapi Perah 1.426, ekor Kerbau 100.831, ekor Kuda 156.545, ekor Ternak Kecil 1.175.924, ekor Unggas 53.377.612 ekor, Produksi Daging 41.742.926 Kg Produksi Telur 82.654.476 Kg Produksi Susu 2.897.820 Kg.	Sapi Potong 1.870.542 ekor Sapi Perah3.708 ekor Kerbau 125.830 ekor Kuda 209.785 ekor Ternak Kecil 1.452.681 ekor Unggas 80.228.191 ekor Produksi Daging 59,964,362 Kg Produksi Telur 154.250.005 Kg Produksi Susu 5.673.240 Kg	Pertanian	Dinas Peternak-an
			Peningkatan Produksi Tanaman	Peningkatan Produksi, dan Produktivitas	Volume dan produktivitas serta nilai produksi komoditi perkebunan ;			Pertanian	Dinas Perkebunan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
			Perkebunan	Tanaman Perkebunan	1. Kakao 2. Tebu 3. Kelapa Dalam 4. Kopi	Produksi : 176.587 Ton Produktivitas : 1.038 kg/ha Nilai Produktivitas : Rp. 4.440.000.000 Produksi : 33.155 Ton Produktivitas : 2,779 kg/ha Nilai produksi : Rp. 497.325.000.000 Produksi : 77.656 ton Produktivitas : 898 kg/ha Nilai Produksi : Rp. 417.320.000.000 Produksi : 33.075 ton Produktivitas : 673 kg/ha Nilai produktivitas : Rp. 984.008.000.000	300.000 Ton 1,055kg/ha 9.600.000.000.000 36.791 ton 2.789 kg/ha Rp. 551.865.000.000 83.113 Ton 911 kg/ha Rp. 482.055.000.000 41.580 ton 678 kg/ha Rp. 1.177.000.000		
			Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	a. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan b. Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (mendukung pangan laut)	Produksi Perikanan : 2.884.007 ton Perikanan tangkap: 292.237,6 ton Perikanan Budidaya : 2.591.769 ton	Produksi Perikanan: 4.906.673 ton Perikanan tangkap: 307.145 ton Perikanan Budidaya : 4.599.528 ton	Pertanian	Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
						Produksi udang: 34.420,7 ton Produksi rumput laut: 2.422.154 ton Produksi Bandeng: 119.887 ton	Produksi udang 47.615 ton Produksi rumput laut: 4.280.366 ton Produksi Bandeng: 240.780 ton		
			Peningkatan produksi kehutanan termasuk pangan hutan	Peningkatan Usaha Kehutanan	Produksi Hasil Hutan Produksi Pangan Dalam Hutan sebesar 50 ton	Hasil hutan kayu olahan 175.326,99 m ³ dan hasil hutan bukan kayu sebanyak 2.309,28 kg - Produksi 0	Hasil hutan kayu olahan 282.365,87 m ³ dan hasil hutan bukan kayu sebanyak 2.947,29 kg - 50 ton	Kehutanan	Dinas Kehutanan
4	Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah	Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru	Pengembangan dukungan, fasilitasi dan insentif bagi industri daerah	Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri lokal kecil dan menengah yang berkembang baik dari industri yang sudah ada maupun yang baru	Enam unit industri lokal pada enam kabupaten/kota	24 unit industri lokal pada 24 kabupaten/kota	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan	Memperkuat permodalan dan manajerial UMKM serta koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi aktif	Total koperasi 8.026 unit. Koperasi aktif 5.554 unit. Koperasi tidak aktif 2.472 unit. (30,79%)	total Koperasi 8.026 unit Koperasi Aktif 8.026 unit koperasi tdk aktif (5%)	Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
		UKM disertai dengan peningkatan daya saing pasar.			Jumlah koperasi besar	Koperasi besar sebanyak 5 unit	Koperasi besar sebanyak 30 unit		
			Meningkatnya peran dan jumlah koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah		jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah usaha kecil 113.370 unit	Terjadi peningkatan jumlah usaha kecil 8% sehingga kondisi akhir jumlah usaha kecil sebanyak 158.718 unit	Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
					jumlah usaha menengah menjadi usaha besar	Jumlah usaha menengah sebanyak 3.185 unit	Terjadi peningkatan jumlah usaha menengah sebesar 5% per tahun sehingga kondisi akhir jumlah usaha menengah sebesar 3.503 unit	Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
			Penumbuhan wirausaha baru	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru sesuai binaan sebanyak 12.045 orang 34.745 orang (2013-2014)	Jumlah wirausaha baru sebanyak 313.845 orang.	Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
6	Berkembangnya daya saing pariwisata daerah	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan	Peningkatan kualitas obyek wisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah wi-satawan nusantara	5.385.809 orang	9.500.000 orang	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
		destiasi wisata unggulan baru			Jumlah wisatawan manca-negara	106.584 orang	153.000 orang	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
			Pengembang-an destinasi wisata unggulan	Pengembang-an destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan	2 destinasi wisata	4destinasi wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
7	Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional	Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru	Penegakan regulasi lahan pangan berkelanjutan	Program pengendalian lahan pangan berkelanjutan	Jumlah Perda yang mengatur pemanfaatan Lahan Pertanian	0 Perda	1 Perda	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hor-tikultura
8	Meningkatnya kapa-sitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan kordinasi penyuluhan	Pemberdayaa n kelembagaan penyuluh dan petani	Jumlah kecamatan yang memiliki balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K)berbasis teknologi informasi dan demplot pertanian, perikanan dan kehutana	117 BP3K	280 BP3K	Pertanian	Sekretariat Bakorluh

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
		berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan, level provinsi dan kabupaten/kota							
9	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan koordinasi sinergis lintas sector dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan pangan serta pengembangan pangan hutan dan pangan laut.	Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak katas pangan	Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar	Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman (skor pola pangan harapan /pph)	80,9	85,3	Pertanian	BKPD
					Penurunan kasus ketidaknyamanan pangan dari cemaran biologis, kimis, dan fisik pada pangan segar (% dari BMR)	80%	80%	pertanian	BKPD
10	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota	Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin	Kordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulanga	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kegiatan SKPD yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah	9,82 % (Desa: 4,44% dan Kota: 12,93%)	7,5%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
			n kemiskinan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	2.120 RTM	6.370 RTM	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
				Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan	Jumlah rumah tangga tani yang keluar dari kemiskinan melalui paket kreatif penyuluhan	0 rumah tangga tani	1.800 rumah tangga tani	Pertanian	Sekretariat Bakorluh
				Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	2.446 Jiwa	6.751 Jiwa	Sosial	Dinas Sosial
				Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Memperluas kesempatan kerja yang terbuka bagi anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri,	880 orang	6500 orang	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
					kelompok wirausahaproduktif dan padat karya, serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan tenaga kerja putus sekolah.				
11	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mendapat pembinaan, bantuan dan pelayanan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan pemenuhan kebutuhan ▪ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▪ kesejahteraan anak ▪ penyandang disabilitas dan trauma ▪ penghuni panti asuhan/panti jomp ▪ Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.446 Jiwa ▪ 582 Jiwa ▪ 459 Jiwa ▪ 245 Jiwa ▪ 155 Jiwa ▪ 238 Jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> 6.751 Jiwa 3.072 Jiwa 2.607 Jiwa 1.650 Jiwa 792 Jiwa 2.587 Jiwa 	Sosial	Dinas Sosial
12	Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi perlindungan konservasi sumber daya alam	6 lokasi	60 lokasi	Lingkungan Hidup	BLHD
			Pengendalian	Program Pengendalian	Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton)	3,39	30,43	Lingkungan Hidup	BLHD

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					
			Pengendalian perubahan iklim	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	2,78	3,37	Lingkungan Hidup	BLHD
13	Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati	Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat	Luas lahan kritis (Ha)	525.885,28 Ha	395.885,28 Ha	Kehutanan	Dishut
				Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Luas kebakaran hutan yang dikendalikan (Ha)	399,76 Ha	309.33 Ha		
					Jumlah illegal logging yang tertangani (M ³)	111,19 M ³	86,04 M ³		

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
14	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat	Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca	Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan gender pada 10 kabupaten terendah	Intensifikasi dan Perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional	Pencapaian Pembinaan Keaksaraan Fungsional a. Angka melek huruf b. Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA	88.73%, (2012) 15,100 Org (2012)	Huruf 95,00%, 386.700 Org	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan gemar membaca masyarakat	Peningkatan Pendidikan Nonformal dan Informal	Taman bacaan masyarakat.	310 Paket	120 Paket	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Penguatan fungsi perpustakaan dalam gerakan masyarakat membaca	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	<400.000 orang	2 Juta orang	Perpustakaan	Badan Arsip & Perpustakaan
15	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun	Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis	Pendidikan Gratis SD hingga SLTA	Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	103,05	104.03	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	97,90%	104,10%		
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	97.59%	99.50%		
					Angka Partisipasi Kasar SMP	98,95%	113,5%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni SMP;	68,27%	78,00%							
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	87,69%	95,00%			

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
					Angka Partisipasi Kasar SMA; Angka Partisipasi Murni SMA; Angka Partisipasi Sekolah SMA	69,75% 47,92% 61,66%	99,50% 64,25% 64,25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Persentase Pendidik PAUD yang berkualifikasi	50,40%	97%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Gratis Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pengajar Melalui Boarding School untuk Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib, dan Alim Ulama	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik : a. SD b. SMP c. SMA d. SMK 2. Persentase Pendidik yang Bersertifikasi S1/D4 bagi a. SD b. SMP c. SMA d. SMK	35,00% 68,50% 70,00% 72,00%	45,00 % 77,00 % 80,00 % 83,50 %	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
				Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	1. Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang sudah Terakreditasi pada Jenjang : a. SD Akreditasi B b. SMP – Akreditasi A - Akreditasi B c. SMA – Akreditasi A - Akreditasi B d. SMK – Akreditasi A - Akreditasi B	66,10 % 16,00 % 35,00 % 22,00 % 41,00 % 24,00 % 37,00 %	70,00 % 19,00 % 40,00 % 30,00 % 50,00 % 34,00 % 50,00 %	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					2. Jumlah Tenaga Pengajar Keagamaan yang Menerima Bantuan Intensif bagi Guru Mengaji, Mubalig, Khatib, Alim Ulama	3.100 Org	15.500 Org	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Biro Mensprit
16	Berkembangnya pendidikan tinggi	Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama	SPP Gratis Mahasiswa tahun Pertama-program studi akredita-si A, B dan C	Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tinggi	Angka melanjutkan (AM) tamatan SM ke perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa Penerima SPP Gratis PTN/PTS Terakreditasi A, B, dan C	46,14% (2013) 22.000 org	49,72% 133.639 org	Pendidikan	Dinas Pendidikan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
					Selektif dan Proporsional				
			Gratis biaya Pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (Penerbangan, Pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan beasiswa S1, S2 & S3)	Pengembangan pendidikan vokasional	1. Jumlah SDM yang menerima pembiayaan pendidikan ; a. penerbangan b. pramugari c. pertanian d. perkebunan e. perikanan 2. Jumlah Mahasiswa Melanjutkan Pendidikan a. S1 b. S2 c. S3	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1000 Org 500 org 250 org	5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1650 orang 500 Org 450 Org	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Badan Diklat dan SKPD Pendukung
17	Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman	Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif-kreatif terhadap perubahan global	Penggalian dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal serta mengkaji nilai-nilai baru yang dibawa oleh pergaulan	Pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kawasan budaya yang dilestarikan	5 kawasan	33 kawasan	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pengkajian, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai	Jumlah kajian budaya lokal dan jumlah pendokumentasian serta penyebarluasan naskah sejarah budaya lokal	(Belum ada data)	24 kajian budaya lokal berdasarkan kabupaten/kota yang dihasilkan dan 24 naskah sejarah budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
			global	Budaya (Pengelolaan keragaman budaya)			lokal berdasarkan kabupaten/kota yang disebarluaskan		
				Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan penyelenggaraan festival seni tradisi serumpun; cakupan pengembangan kesenian kontemporer berbasis tradisi masyarakat Sulawesi Selatan; cakupan penyelenggaraan festival kesenian daerah Sulawesi Selatan		Satu kali setahun penyelenggaraan festival seni tradisi serumpun; 100% seni tradisi yang menonjol mengalami pengembangan menjadi kesenian kontemporer; satu kali setahun penyelenggaraan festival kesenian daerah	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelestarian dan pengembangan budaya maritim	Pengembangan Budaya Maritim Berbasis Budaya Lokal Sulawesi Selatan	Cakupan pengkajian dan pengembangan komunitas spesifik maritim (komunitas adat Bajo dan komunitas konjo pembuat perahu tradisional pinisi); cakupan pendokumentasian ritual masyarakat pesisir dan kepulauan; dan cakupan pengembangan	0%	100% pengkajian dan pengembangan komunitas adat Bajo dan komunitas konjo pembuat perahu tradisional pinisi; 100% pendokumentasian ritual masyarakat	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
					museum budaya maritim		pesisir dan kepulauan; 100% pengembangan museum budaya maritim		
18	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan	Pengembangan prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Peningkatan partisipasi pemuda	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Presentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	97,26%	100%	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
19	Berkembangnya layanan rumah sakit terakreditasi Internasional	Kerjasama dengan pihak swasta dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit.	Pemerataan layanan kesehatan berkualitas di daerah	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS yang terakreditasi Nasional, Jumlah PKM terakreditasi, Jumlah Regulasi/Standirasi Pelayanan	0 rumah sakit terakreditasi internasional dan 1 terakreditasi nasional	4 unit rumah sakit terakreditasi internasional dan 22 terakreditasi nasional	Kesehatan	Dinas Kesehatan
20	Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat	Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional	Penguatan buffer stock obat	Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat Asli	Persentase ketersediaan obat generik	70%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
				Indonesia					
			Penjaminan kesehatan masyarakat	Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Penanggulangan penyakit	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	90,5%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
21	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi	Penanganan komprehensif usia 1.000 hari kehidupan/ Scalling Up Nutrition (SUN)	Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi yang spesifik dan sensitif	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan bayi Cakupan pelayanan kesehatan balita Cakupan pelayanan kesehatan ibu Pedoman dan Proyek percontohanPelaksanaan pelayanan pra konsepsi Pedoman dan Proyek percontohankelas ibu hamil dan menyusui	100% 20%	100% 100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Bappeda & SKDP Pendukung
				Perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi balita gizi buruk	6,6%	4,0%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Prevalensi balita gizi kurang	19%	17,5%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
					Prevalensi balita stunting	40%	33,18%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
22	Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan	Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan	Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	Pratama: 60,69% Madya: 23,44% Purnama: 15% Mandiri: 2,43%	Pratama: 5% Madya: 23% Purnama: 47% Mandiri: 25%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan PHBS rumah tangga	55,1%	65%		
23	Terkendalikannya pertumbuhan penduduk	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan	Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Prevalensi peserta KB Aktif	72,94%	79,11%	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKB; Pendukung: BK KBN
					Persentase keluarga pra-sejahtera	14,45%	11,05%		
24	Meningkatnya kapasitas jalan guna	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan	Pemeliharaan dan peningkatan	Penyelenggaraan Jalan	Persentase terhubungnya Pusat Kegiatan Lokal dan Kawasan Strategis Provinsi	83,6%	90,88 %	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa	berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan termasuk pengembangan kawasan strategis	kapasitas jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Sulawesi Selatan		Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	77.73%	92,03%	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
25	Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa	Penguatan konektivitas melalui pembangunan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia dalam	Pengembangan prasarana transportasi massal	Pembangunan transportasi massal	Dukungan pemerintah daerah Prov. Sulsel dalam pembangunan transportasi massal (Pembangunan KA dan BRT)	Persentase perwujudan pembangunan transportasi massal 5%	Persentase perwujudan pembangunan transportasi massal 30%	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			Pengembangan prasarana dan pelayanan transportasi darat	Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat	Persentase pelayanan transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pelayanan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi 80% ▪ Persentase pelayanan angkutan sungai dan danau 60% ▪ Persentase pelayanan angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pelayanan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi 100% ▪ Persentase pelayanan angkutan sungai dan danau 80% ▪ Persentase pelayanan angkutan penyeberangan 80% 	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
		pengembangan tol laut.				penyeberangan 60%			
			Pengembangan /Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara	Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara	Persentase pelayanan transportasi udara	Persentase pelayanan transportasi udara 70%	Persentase pelayanan transportasi udara 80%	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			Pengembangan /Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut	Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut	Persentase pelayanan transportasi laut	Persentase pelayanan transportasi laut 80%	Persentase pelayanan transportasi laut 90%	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
26	Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa	Mendorong peningkatan literasi TIK dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Koinfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik;	Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line 35%	Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line 60%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
27	Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses perumahan dan penataan bangunan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.	Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0,19	0,20	Perumahan Rakyat	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
					Persentase kawasan kumuh	0,10%	0,095		
					Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah	0	5.000 unit		
			Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan dan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga bersanitasi	75,28%	85%.	Pekerjaan Umum	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	
				Persentase penanganan sampah	81,23%	85%			
				Persentase RT berakses air minum	82,52%	87 %			
			Fasilitasi dan Penyelenggara	Persentase perwujudan Kawasan COI	5%	30%	Pekerjaan Umum	Dinas tata Ruang dan	

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
				aan Bangunan dan Lingkungan Gedung					Pemukiman
					Persentase pembangunan Wisma Negara	0	100%	Pekerjaan Umum	Dinas tata Ruang dan Pemukiman
					Jumlah kawasan di kab/kota yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	90 kawasan	125 kawasan	Pekerjaan Umum	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
28	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah	Penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi	Peningkatan kualitas air dan optimalisasi pemanfaatan air	Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas jaringan irigasi yang ditingkatkan, dipelihara dan direhabilitasi (Ha)	39.145	262.227	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
					Jumlah DRT yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan	6 DRT	69 DRT	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
					Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah embung serba guna yang terbangun	50	208	Pekerjaan Umum
29	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya	Pengembangan sumber-sumber energi alternatif terbarukan dan optimalisasi	Peningkatan jangkauan pelayanan kelistrikan	Kedaulatan Energi	Rasio daerah berlistrik	87,02	97	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
					Jumlah instalasi bio energi yang dibangun (unit)	7	1.987	Energi dan Sumberdaya	Dinas ESDM

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah	pengelolaan sumberdaya mineral						a Mineral	
			Pembangunan Sumberdaya Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah	Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah	Jumlah pembangunan sumur bor	19	85	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
					Cadangan Sumber Daya (Ton)	537.220.000	2.026.050.000		
					Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)	13.503	36.041		
			Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Konservasi Pertambangan Mineral	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara				Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas ESDM
					Logam (Ton/M ³)	81.863.938	521.255.705		
					Non Logam (Ton/M ³)	6.939.349	42.541.311		
					Batuan (Ton/M ³)	22.318.029	130.771.962		
					Batubara (Ton/M ³)	16.680.624	93.172.274		
30			Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.	Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau kecil	Dukungan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan	Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mengalami pemberdayaan ekonomi	2	12
	Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	0,83 Juta Ha					1,35 Juta Ha	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
				perikanan					
					Jumlah Perda Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pengelolaan rehabilitasi terumbu karang	0	2 Perda	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
31	Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.	Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan	Memperkuat Pusat Pengendalian Operasi dan Penyiapan Logistik untuk mendukung penanggulangan bencana di kawasan timur di Indonesia	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana	20%	100%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BKPBD & SKPD Pendukung
				Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana	25%	100%	Pemerintahan Umum	BKPBD
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemulihan pasca bencana	25%	100%	Pemerintahan Umum	BKPBD

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
32	Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.	Pengembangan kerjasama pembangunan dan penguatan daya saing daerah.	Pengembangan industri strategis dan pengembangan kerjasama regional dan promosi investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Jumlah investasi PMA dan PMDN	Jumlah investasi sebesar Rp. 2,8 Triliun	Jumlah investasi tahun 2013-2018 sebesar Rp. 41 Triliun	Penanaman Modal	BKPM
33	Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat internasional	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Menurunnya jumlah pengangguran	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 208.983 orang	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 148.983 orang	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
					Tingkat pengangguran terbuka	5,1 %	4,8 %		
34	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan	Membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian	Kebijakan Penguatan SDM dan Iptek daerah	Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan SDM dan IPTEK	Jumlah hasil penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	11	40	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Balitbangda Prov. Sulsel

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha.		Daerah.				masyarakat	
			Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah prototype/inovasi daerah yang dihasilkan	4	8	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Balitbangda Prov. Sulsel
35	Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.	Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global	Pengembangan kerjasama pembangunan wilayah antar wilayah dan antar pemangku kepentingan	Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Jumlah Kerjasama Daerah.	• 71 MoU/PKS	• 321 MoU/PKS	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Kerjasama
			Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan	Pengembangan Kerjasama Internasional	Jumlah kerjasama "Sister City" yang berjalan	2 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Kerjasama

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
			Luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional • Jumlah Kerjasama dalam Bidang Berbagai bidang dengan Provinsi dalam Berbagai Bidang dgn Provinsi lain di Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 MoU • 1 MoU 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 MoU • 5 MoU 	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Kerjasama
36	Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan	Peningkatan kualitas interkoneksi fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage	Penajaman koordinasi dan fasilitasi keterkaitan industrial antar kawasan andalan	Pengembangan kerjasama kawasan andalan	Jumlah kerjasama antar kabupaten/kota yang efektif terfasilitasi dan terkordinasikan dalam pengembangan kawasan andalan	5 MoU / PKS	10 MoU / PKS	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Kerjasama
37	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial	Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horisontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan	Penataan kebijakan yuridis Pemda dan Peningkatan kualitas produk hukum	Peningkatan sistem legislasi daerah	Jumlah kegiatan penataan produk hukum dan tugas yudisial Pemda dan diseminasinya	7 kegiatan/ tahun	7 kegiatan/ tahun	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Biro Hukum
				Program peningkatan kualitas produk	Jumlah kegiatan penyusunan Ranperda yang diajukan kelegislatif	8 kegiatan/ Tahun	8 kegiatan/ tahun		Biro Hukum

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
		norma sosial		hukum daerah				perlindungan masyarakat	
					Persentase Jumlah Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran	20%	84%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satpol PP
38	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih substantif	Pendidikan politik dan demokrasi	Pendidikan politik masyarakat	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat bagi parpol, pengawasan ormas, parpol dan LSM, pembinaan politik pemuda	7 kegiatan/ Tahun	40 kegiatan selama 5 tahun	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Kesbangpol
					Jumlah pokja Indeks Demokrasi Indonesia	1 pokja	1 pokja		
39	Meningkatnya	Memperkuat	Pemberdaya-an	Program	Persentase lembaga penyedia	25 %	75 %	Pember-	BPPKB

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkoordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan	perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi			dayaan perempuan dan perlindungan anak	
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota	28 %	88 %	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BBPKB
			Perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah kabupaten/kota layak anak	0 kab/kota layak anak	22 kab/ kota layak anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BPPKB
				Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah lembaga layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	30 lembaga layanan untuk AMPK	50 lembaga layanan untuk AMPK	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BPPKB

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
40	Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat	Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan.	Peningkatan Ketentraman, dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	80%	100%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Sat. Pol PP
					Terciptanya rasa aman bagi masyarakat	8 Kegiatan	11 Kegiatan	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Kesbangpol
				Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	20%	100%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Sat. Pol PP

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
41	Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI	Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa	Penguatan wawasan kebangsaan dan pilar NKRI	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan penguatan kebangsaan dan pilar NKRI melibatkan pramuka dan generasi muda, Ormas dan LSM yang terlaksana	2 kegiatan	20 kegiatan selama 5 tahun	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Kesbangpol
				Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan kemitraan dengan Pokja pendidikan wawasan kebangsaan yang terfasilitasi	1 kegiatan/tahun	5 kegiatan selama 5 tahun		
42	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen Pemerintahan serta penyempurnaan sistem pelayanan	Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah serta pengembangan transparansi birokrasi	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian minimal yang terpenuhi dengan akurat dan tepat waktu.	80%	100%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BKD

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
43	Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah penningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional	Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya tingkat kompetensi peserta setelah mengikuti diklat	355 org	3.405 org	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan Diklat
					Persentase Jumlah Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel yang terlatih dari total Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel	30%	62%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satpol PP
				Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi	Persentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi TIK	35%	60%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dinas Perhubungan & Infokom
			Penataan	Capaian skor Indeks	60%	80%	Ketentraman	Biro	

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
				Daerah Otonom Baru	Efektivitas Pemerintahan			an, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemerintahan Daerah
44	Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44)	Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seiring dengan pembelanjaan yang efektif dan efisien berbasis inovasi administratif dan teknis.	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek potensi, keadilan dan kemampuan masyarakat	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD	Rp. 2,5 T	Rp. 4,3 T	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dispenda
					Peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Rp. 5 T	Rp. 7,6 T		
					Persentase capaian target pendapatan setiap tahun	97%	100%		

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
								masyarakat	
					Persentase akurasi data objek dan subjek pajak	± 60 %	± 80 %	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dispenda
					Persentase Tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah	± 70 %	± 90 %	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dispenda
					Ketersediaan Perda/Juklak/Juknis di bidang pendapatan	90%	100%	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dispenda
					Meningkatnya Pemahaman aparat dan masyarakat tentang pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya.	3 kegiatan per tahun	26 kegiatan per tahun	Ketentraman, ketertiban umum dan	Dispenda

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
								perlindungan masyarakat	
				Peningkatan aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001-2000; system pelayanan pajak berbasis web	- 2 Drive Thru - 2 Gerai Samsat - 2 Samsat Keliling - 17 Samsat berstandar ISO 9001-2000 - Sistem pelayanan pajak berbasis desktop	- 6 Drive Thru - 24 Gerai Samsat - 12 Samsat Keliling - 24 Samsat berstandar ISO 9001-2000 - Pembayaran pajak langsung ke Bank yang ditunjuk - Sistem informasi dan pelayanan pajak berbasis Web	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dispenda
			Penertiban dan pengembangan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini penilaian administrasi keuangan oleh BPK	WTP	WTP	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BPKD
				Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD terkait pengelolaan asset	80%	100%	Ketentraman, ketertiban umum dan	Biro Asset

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
								perlindungan masyarakat	
45	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down-bottom up yang responsif gender dengan memperhatikan kearifan lokal	Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	Rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,52	Rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,73	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
					Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	17,73 %	26 %	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
			Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase dokumen perencanaan dan persentase pada level provinsi dan kabupaten/ kota yang responsif gender	23 SKPD Provinsi; 2 Kabupaten	57 SKPD Provinsi; 24 Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB dan SPKD Pendukung
					Persentase penerapan model kabupaten/kota layak anak	0% kabupaten kota memiliki kelurahan/ desa layak anak	70% kabupaten/kota memiliki kelurahan/desa layak anak	Pemberdayaan Perempuan	BPPKB dan SPKD Pendukung
Peningkatan Koordinasi Pembangunan Kabupaten/Kota	Program Koordinasi Pembangunan	Tingkat efektivitas kontribusi kabupaten/kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan nasional	Efektivitas 40%	Efektivitas 80%	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA			

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
			Peningkatan konsistensi perencanaan dan implementasi pembangunan	Program perencanaan pembangunan daerah	-Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) dan konsisten berdasarkan regulasi dan kalender perencanaan -Jumlah dokumen Pengembangan Kerjasama Perencanaan antar Daerah		100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Program Pengembangan data dan informasi	Persentase informasi pembangunan yang termanfaatkan	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
46	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	176 BUMDES	426 BUMDES	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok binaan LPM)	rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan	rata-rata kelompok binaan LPM = 6 klp binaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
				desa	Jumlah dan persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi)	0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020 Total jumlah LPM)	4,79% (720 LPM berprestasi dari 15.020 total jumlah LPM)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
					Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)	49,51 % (759 LSM Aktif dari 1.533 Total jumlah LSM)	64.2% (984 LSM aktif dari 1.533 total jumlah LSM)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
				Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan	rata-rata kelompok binaan PKK = 53 klp binaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
					Persentase PKK aktif	PKK Aktif 97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK)	PKK Aktif 98,02 % (61.658 PKK Aktif dari 62.903 total jumlah PKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
					Persentase Posyandu aktif	Posyandu Aktif 98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu)	Posyandu Aktif 99,89 % (8.791 Posyandu Aktif dari 8.801 total jumlah Posyandu)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK
47	Meningkatnya	Penguatan	Penguatan	Peningkatan	Jumlah desa berstatus	Belum ada data status	500 desa	Pember-	BPMPDK

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2013	Kondisi Akhir (2018)		
	kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa	kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa	kapasitas kelembagaan pemerintahan desa	kapasitas aparat pemerintah desa	swasembada	desa		dayaan Masyarakat dan Desa	
					Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	2.321 aparat pemerintah desa	5.821 aparat pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPDK

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2013-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan.

Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah provinsi.

Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode Tahun 2013-2018, selain bersumber dari APBD Provinsi, juga dari sumber lainnya seperti APBN, Dana Pinjaman, maupun swasta. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu Tahun 2013-2018 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab.

TABEL VIII-I
TABEL INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		T	Rp (Juta)	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				195,697		212,600		238,120		244,651		259,228		1,150,296	Semua SKPD
	Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD				173,014		178,934		214,096		191,856		202,572		960,471	Semua SKPD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD				67,429		70,895		77,744		81,567		88,994		386,630	Semua SKPD
II	URUSAN WAJIB				1,261,182		1,269,511		1,140,863		1,245,110		1,311,878		6,228,545	
	PELAYANAN DASAR															
	PENDIDIKAN				92,348		77,261		128,001		146,107		153,363		597,080	
1	Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	APK, APM, APS, AM		24 Kab./Kota	446	24 Kab./Kota	491	24 Kab./Kota	581	24 Kab./Kota	623	24 Kab./Kota	643	24 Kab./Kota	2,784	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK)													-	Dinas Pendidikan
		SMP Sederajat	98.95	99.25	110.00		111.25		112.00		113.50		113.50		113.50	Dinas Pendidikan
		SM Sederajat	69.75	78.00	83.00		93.00		98.00		99.50		99.50		99.50	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM)														Dinas Pendidikan
		SD Sederajat	97.90	100.10	103.00		103.65		104.00		104.10		104.10		104.10	Dinas Pendidikan
		SMP Sederajat	68.27	68.27	76.00		76.80		77.25		78.00		78.00		78.00	Dinas Pendidikan
		SM Sederajat	47.92	61.40	62.40		63.00		63.50		64.25		64.25		64.25	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)														Dinas Pendidikan
		SD Sederajat	97.59	97.63	98.10		98.57		99.04		99.50		99.50		99.50	Dinas Pendidikan
		SMP Sederajat	87.69	86.23	88.42		90.62		92.81		95.00		95.00		95.00	Dinas Pendidikan
		SM Sederajat	61.66	51.19	54.45		57.72		60.98		64.25		64.25		64.25	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM)														Dinas Pendidikan
		SD ke SMP	97.84	98.50	98.75		99.00		99.50		100		100		100	Dinas Pendidikan
		SMP ke SMA	95.03	96.00	96.60		97.00		97.50		98.00		98.00		98.00	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah/Drop Out														Dinas Pendidikan
		SD Sederajat	1.20	1.18	1.15		1.13		1.11		1.08		1.08		1.08	Dinas Pendidikan
		SMP Sederajat	1.09	1.07	1.05		1.03		1.01		0.70		0.70		0.70	Dinas Pendidikan
		SM Sederajat	1.30	1.27	1.25		1.22		1.20		1.00		1.00		1.00	Dinas Pendidikan
2	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase jumlah kelulusan		55 Kegiatan	4,476	53 Kegiatan	4,899	53 Kegiatan	5,401	53 Kegiatan	5,938	53 Kegiatan	6,535	267 Kegiatan	27,249	Dinas Pendidikan
		peserta UN/US	100													Dinas Pendidikan
		SD	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SMP	98,80	99,85		99,90		100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		SMA	97,85	98,10		98,15		98,20		98,25		98,25		98,25		Dinas Pendidikan
		SMK	99,93	99,75		99,80		99,82		99,85		99,87		99,87		Dinas Pendidikan
		Nilai Rata-rata Akhir Peserta didik dalam UN/US														Dinas Pendidikan
		SD	7,48	7,51		7,54		7,56		7,59		7,62		7,62		Dinas Pendidikan
		SMP	8,20	8,22		8,25		8,27		8,30		8,32		8,32		Dinas Pendidikan
		SMA	7,50	7,52		7,55		7,57		7,60		7,62		7,62		Dinas Pendidikan
		SMK	7,92	7,96		7,99		8,03		8,06		8,10		8,10		Dinas Pendidikan
3	Pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase jumlah kelulusan peserta UN/US		5 Kegiatan	1,046	6 Kegiatan	1,599	6 Kegiatan	1,803	6 Kegiatan	2,048	6 Kegiatan	2,341	29 Kegiatan	8,837	Dinas Pendidikan
		SDLB	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		SMPLB	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		SMALB	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan
4	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	50,40	60,00	8,109	75,00	6,217	85,00	6,560	90,00	6,682	97,00	6,774	97,00	34,342	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik PAUD bersertifikasi	20,22	22,00		23,15		24,80		24,50		25,00		25,00		Dinas Pendidikan
5	Peningkatan Kualitas dan Distribusi Fasilitas Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan		13 paket	1,248	14 paket	1,495	13 paket	1,511	13 paket	1,562	13 paket	1,607	66 paket	7,423	Dinas Pendidikan
		SD	17,00	17,35		18,00		18,90		19,00		19,50		19,50		Dinas Pendidikan
		SMP	21,00	22,00		23,75		24,00		23,35		25,75		25,75		Dinas Pendidikan
		SMA	30,00	32,50		33,50		34,50		35,50		36,50		36,50		Dinas Pendidikan
		SMK	29,00	34,00		39,00		44,00		49,00		54,00		54,00		Dinas Pendidikan
6	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-Jumlah Sekolah yang memanfaatkan jaringan pembelajaran berbasis TIK		20 keg	911	20 keg	907	20 keg	988	20 keg	1,062	21 keg	1,137	101 kegiatan	5,005	Dinas Pendidikan
		TK/PAUD	50	75		113		169		253		380		380		Dinas Pendidikan
		SD	48	72		108		162		243		365		365		Dinas Pendidikan
		SMP	72	108		162		243		365		547		547		Dinas Pendidikan
		SMA	72	108		162		243		265		547		547		Dinas Pendidikan
		SMK	24	36		54		81		122		182		182		Dinas Pendidikan
		-Jumlah Sekolah yang memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK		11 Kegiatan	1,750	11 Kegiatan	2,100	12 Kegiatan	2,520	12 Kegiatan	3,024	12 Kegiatan	3,629	58 Kegiatan	13,023	Dinas Pendidikan
		TK/PAUD	20	30		45		68		101		152		396		Dinas Pendidikan
		SD	32	48		72		108		162		243		633		Dinas Pendidikan
		SMP	35	53		79		118		177		266		692		Dinas Pendidikan
		SMA	40	60		90		135		203		304		791		Dinas Pendidikan
		SMK	36	54		81		122		182		273		712		Dinas Pendidikan
7	Promosi Minat Kelimuan	Perolehan Medali Peserta didik pada Lomba/Kejuaraan Tk. Nasional		34 kegiatan	5,807	36 kegiatan	6,592	36 kegiatan	8,435	36 kegiatan	11,385	36 kegiatan	12,457	178 kegiatan	44,676	Dinas Pendidikan
		SD	9	27		27		27		27		27		27		Dinas Pendidikan
		SMP	5	30		30		30		30		30		30		Dinas Pendidikan
		SMA	9	12		14		17		19		21		21		Dinas Pendidikan
		SMK	11	15		18		19		20		21		21		Dinas Pendidikan
8	Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional	Pencapaian Pembinaan Keaksaraan Fungsional		58,000	4,272	77,000	5,602	96,000	6,981	96,000	6,933	59,700	4,260	386,700	28,048	Dinas Pendidikan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Angka Melek Huruf	88,73	90,14		91,35		92,57		93,78		95,00		95,00		Dinas Pendidikan
		Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA	15,100	58,000		77,000		96,000		96,000		59,700		386,700		Dinas Pendidikan
		Rata Lama Sekolah	7,95	8,00		8,05		8,10		8,11		8,12		8,12		Dinas Pendidikan
9	Program Peningkatan Pendidikan Nonformal dan Informal	Pembinaan PNFI		11 kegiatan	2,185	11 kegiatan	3,080	11 kegiatan	3,934	11 kegiatan	4,841	11 kegiatan	5,912	55 kegiatan	19,952	Dinas Pendidikan
		Taman Bacaan Masyarakat	310 Paket	24 Paket		24 Paket		24 Paket		24 Paket		24 Paket		120 Paket		Dinas Pendidikan
10	Program Pembentukan Daya Saing dan Karakter Bangsa	Daya saing dan karakter bangsa	2370 orang	400 orang/4 paket	1,672	400 orang/4 paket	2,007	400 orang/4 paket	2,408	400 orang/4 paket	2,890	400 orang/4 paket	3,468	2000 orang/8 paket	12,445	Dinas Pendidikan
11	Program Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tinggi	Persentase Angka Melanjutkan (AM) Tamatan SM ke Perguruan Tinggi	46,14%	1,0	2,952	1,5	3,211	0,8	3,511	1,2	3,856	0,5	4,256	49,72%	17,786	Dinas Pendidikan
		Advokasi pengembangan dan pembinaan perguruan tinggi negeri dan swasta	5 PT	7 PT	250	9 PT	300	10 PT	350	12 PT	400	13 PT	450	13 PT	1,750	Dinas Pendidikan
		Gratis SPP Maba PTN/PTS Terakreditasi A,B dan C selektif dan proporsional	22000 org	23000 org	42,000	24610 org	49,220	26456 org	52,911	28572 org	57,144	31001 org	62,001	133.639 orang	263,276	Dinas Pendidikan
12	Program Pengembangan Pendidikan Vokasional	Jumlah Peserta Didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan Life skill/kejuruan pada jurusan :		114 paket/unit	2,500	114 paket/unit	2,575	114 paket/unit	2,650	114 paket/unit	2,730	112 paket/unit	2,810	50 paket/unit	13,265	Dinas Pendidikan
		Penerbangan	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	-	Dinas Pendidikan
		Pramugari	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	-	Dinas Pendidikan
		Pertanian	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	-	Dinas Pendidikan
		Perkebunan	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	-	Dinas Pendidikan
		Perikanan	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	-	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMK yang dibina dan dikembangkan menjadi SMK Model	1 smk (smk 5 mks)	5 paket/unit	6,500	5 paket/unit	7,115	5 paket/unit	7,790	5 paket/unit	8,532	5 paket/unit	9,347	25 paket/unit	39,284	Dinas Pendidikan
13	Program Beasiswa S1, S2 dan S3	Tersedianya bantuan penyelesaian studi :		750 orang	1,685	500 orang	6,364	450 orang	5,879	450 orang	5,894	450 orang	5,909	2600 Orang	25,731	Dinas Pendidikan
		S1	1000 org	400 org		350 org		300 org		300 org		300 org		1650 orang		Dinas Pendidikan
		S2	500 org	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		500 orang		Dinas Pendidikan
		S3	250 Org	250 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		450 orang		Dinas Pendidikan
14	Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4 bagi Pendidik :		6573 orang (3 paket)	21,093	6926 orang (3 paket)	22,068	6932 orang (4 paket)	23,090	6940 orang (3 paket)	24,480	6947 orang (2 paket)	26,596	11857 orang (15 paket)	117,327	Dinas Pendidikan
		SD	35,00%	37,00%		39,00%		41,00%		43,00%		45,00%		45,00%		Dinas Pendidikan
		SMP	68,50%	70,20%		71,90%		73,60%		75,30%		77,00%		77,00%		Dinas Pendidikan
		SMA	70,00%	72,00%		74,00%		76,00%		78,00%		80,00%		80,00%		Dinas Pendidikan
		SMK	72,00%	74,30%		76,60%		78,90%		81,20%		83,50%		83,50%		Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik yang Bersertifikasi pada :														Dinas Pendidikan
		SD	35,00%	37,00%		39,00%		41,00%		43,00%		45,00%		45,00%		Dinas Pendidikan
		SMP	68,50%	70,20%		71,90%		73,60%		75,30%		77,00%		77,00%		Dinas Pendidikan
		SMA	70,00%	72,00%		74,00%		76,00%		78,00%		80,00%		80,00%		Dinas Pendidikan
		SMK	72,00%	74,30%		76,60%		78,90%		81,20%		83,50%		83,50%		Dinas Pendidikan
		Jumlah Tenaga Pengajar Keagamaan yang menerima bantuan insentif :		11,50%	0,02											Dinas Pendidikan
		Pembinaan Guru Mengaji, Muballiq, Khatib dan Alim Ulama	3100 org	3100 org	7,850	3100 org	8,007	3100 org	8,167	3100 org	8,330	3100 org	8,497	15500 orang	40,851	Dinas Pendidikan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembinaan Penghafal Al-Quran		200 org	100	200 org	110	200 org	120	200 org	130	200 org	140	1000 orang	600	Dinas Pendidikan
15	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi pada jenjang :		36 kegiatan	5,337	36 kegiatan	5,978	36 kegiatan	6,550	36 kegiatan	7,210	36 kegiatan	8,085	180 Kegiatan	33,160	Dinas Pendidikan
		SD, Akreditasi "B"	66.10	68.25	68.40	69.25	69.75	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	Dinas Pendidikan
		SMP :- Akreditasi "A"	16.00	16.75	17.25	17.75	18.50	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	Dinas Pendidikan
		- Akreditasi "B"	35.00	35.50	37.00	38.75	39.50	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	Dinas Pendidikan
		SMA :- Akreditasi "A"	22.00	23.00	26.00	28.00	29.75	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Dinas Pendidikan
		- Akreditasi "B"	41.00	42.50	43.00	45.00	48.50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	Dinas Pendidikan
		SMK :- Akreditasi "A"	24.00	26.00	28.00	29.00	32.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	Dinas Pendidikan
		- Akreditasi "B"	37.00	38.00	39.50	42.00	48.50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	Dinas Pendidikan
		Ratio Siswa Perkelas														Dinas Pendidikan
		SD	1:32	1:31	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		SMP	1:32	1:32	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		SMA	1:32	1:32	1:32	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		SMK	1:32	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		Ratio Guru Persiswa														Dinas Pendidikan
		SD	1:33	1:32	1:31	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		SMP	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		SMA	1:32	1:32	1:31	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		SMK	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	Dinas Pendidikan
		Ratio Siswa Perkelas														Dinas Pendidikan
		SD	1:8	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	Dinas Pendidikan
		SMP	1:31	1:32	1:32	1:32	1:32	1:33	1:33	1:33	1:34	1:34	1:34	1:34	1:34	Dinas Pendidikan
		SMA	1:30	1:32	1:33	1:34	1:34	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	Dinas Pendidikan
		SMK	1:32	1:33	1:33	1:33	1:34	1:34	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	1:35	Dinas Pendidikan
		KESEHATAN			195,371		279,894		274,392		297,594		321,053		1,368,304	
1	Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Ketersediaan Obat		2,056		2,092		1,291		1,293		1,317		8,049	Dinas Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan Obat Generik	70%	75%	1,945	80%	1,869	85%	1,004	90%	1,000	95%	1,019	95%	6,837	Dinas Kesehatan
		% Pengawasan Obat dan Makanan yang layak, Bermutu dan Aman Dikonsumsi Masyarakat	35%	40%	52	45%	147	50%	150	55%	153	60%	155	60%	657	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional	25%	30%		35%	76	50%	77.4288	75%	78.88446144	100%	80	100%	313	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kefarmasian dalam pengembangan Obat Asli Indonesia	30%	50%	59	60%	0	65%	60.1092	75%	61.23925296	80%	62	80%	243	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat			55,472		68,411		73,651		80,239		87,867		365,641	Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak Pertiwi, Transfusi Darah, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, Transfusi Darah, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji
		Persentase upaya kesehatan Masyarakat yang ditingkatkan	90%	91%	100	92%	125	93%	150	94%	175	95%	200	95%	750	Balai Pelayanan Kesehatan
		Persentase upaya kesehatan Masyarakat yang ditingkatkan	90%	91%	15,049	92%	17,810	93%	18,701	94%	18,103	95%	18,688	95%	88,351	Rumah Sakit Khusus Daerah
		Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	100	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	900	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
		Tersedianya layanan kesehatan pada Pasien Askes, Jamkesma, Jamkesda dan umum pada 475.385 peserta	75,000	75,885	1,774	86,000	1,951	94,000	2,146	109,500	2,146	110,000	2,596	475,385	10,613	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
		Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengetahuan bagi masyarakat pekerja	5Keg	5Keg	1,728	5Keg	1,183	5Keg	1,300	5Keg	1,380	5Keg	1,450	5Keg	7,041	UPTD.BKKM
		Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat	100%	100%	5,898	100%	6,517	100%	10,650	100%	15,100	100%	19,500	100%	57,665	UPTD Transfusi Darah
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di RS	2 Keg.	2 Keg.	2,000	2 Keg.	2,200	2 Keg.	2,420	2 Keg.	2,663	2 Keg.	2,929	12 keg	12,212	UPTD RSU. Sayang Rakyat
		Persentase pelayanan IGD,rawat jalan dan rawat Inap 100%, Jumlah tenaga sesuai SPM 100 %	100%	100%	8,676	100%	14,132	100%	12,699	100%	14,000	100%	14,700	100%	64,207	UPTD RSU Haji
		Meningkatnya Motivasi Kerja Petugas Rumah Sakit	2 keg	2 keg	18,570	2 keg	19,498	2 keg	20,473	2 keg	21,497	2 keg	22,572	10 keg	102,610	RSUD. Labuang Baji
		Cakupan Kunjungan Puskesmas	29,46%	33,12%	310	36,77%	475	40,42%	484	44,08%	493	47,73%	502	47,73%	2,264	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Indera	37,5%	42,5%	10	47,5%	55	52,5%	56	57,5%	57	62,5%	58	62,5%	236	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Olahraga	20,8%	25%	166	35%	2779	40%	2831	45%	2884	50%	2939	50%	11,599	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Jiwa	29%	33,5%		38%	168	42%	171	46,5%	174	50%	178	50%	691	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Gigi-Mulut	11,14%	21,14%		31,14%	126	41,14%	128	51,14%	131	61,14%	133	61,14%	518	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Kerja	7,42%	8,35%		0.2		0.32	61	0.44	62	0.56	63	0.56	186	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	11,14%	16,71%	108	27,84%		33,41%	110	38,98%	112	44,55%	114	44,55%	444	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal 2 Puskesmas yang mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	0.4	33,3%	99	0.41		0.5	101	58,3%	103	0.66	105	0.66	407	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Meningkatkan Jumlah Kunjungan Pada Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika	1 Keg	100%	984	100%	1,317	100%	1,120	100%	1,134	100%	1140	100%	5,695	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			4,353		2,564		2,859		3,157		3,028		15,960	Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak st. Fatimah, Pertiwi, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, BKKM, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji
		Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	Meningkatnya Cakupan desa siaga aktif 89,57%	92%	200	95%	742	98%	756	100%	770	100%	785	100%	3,253	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan PHBS Rumah Tangga (%)	Meningkatnya Cakupan PHBS Rumah Tangga (55,1%)	56%	1,504	58%	991	60%	1,010	62%	1,029	65%	1,048	65%	5,581	Dinas Kesehatan
		Persentase promosi kesehatan lingkup RS	75%	75%	172	80%	23	80%	25	85%	25	85%	27	85%	272	Rumah Sakit Khusus Daerah
		Terselenggaranya Kegiatan promosi Kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung Rumah sakit	100%	100%	103	0%	-	0%	100	100%	260	0%	-	100%	463	RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
		Meningkatnya kepuasan pelanggan RS	84%	86%	150	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	86%	150	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
		Terwujudnya Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan yang terpadu	100%	40%	120	60%	135	80%	135	100%	148	100%	163	100%	701	UPTD RSU Haji
		Indeks Kepuasan Pelanggan > 90%, Peningkatan kunjungan pasien naik > 10 % pertahun														UPTD RSU Haji
		Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kepada 24 Kab./Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	384	4 Kab/Kota	248	5 Kab/Kota	250	5 Kab/Kota	265	5 Kab/Kota	270	24 Kab/Kota	1,417	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
		Tersedianya Data dan informasi tentang RS dan Marka RS	1 Keg.	1 Keg.	30	1 Keg.	50	1 Keg.	70	1 Keg.	90	1 Keg.	100	6 keg	340	UPTD RSU. Sayang Rakyat
		Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Kulit dan Kelamin, Mengoptimalkan Ketersediaan Bahan-Bahan Promosi dan Survey Kepuasan Masyarakat	3 Keg	100%	155	100%	135	100%	218	100%	220	100%	230	100%	958	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
		Sistem informasi kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,500	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	250	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	350	1 Kegiatan	2,600	RSUD. Labuang Baji
		Promosi kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung RS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	35	2 Kegiatan	40	2 Kegiatan	45	2 Kegiatan	50	2 Kegiatan	55	10 Kegiatan	225	RSUD. Labuang Baji
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				450		609		939		957		1,104		4,060	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	6,6%	5,7%	250	5,2%	156	5,0%	159	4,3%	162	4,0%	250	4,0%	977	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	0,19	18,7%		18,4%	215	18,1%	219	17,8%	223	17,5%	227	17,5%	885	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Stunting	40%	35,98%		35,26%		34,55%	50	33,86%	51	33,18%	52	33,18%	153	Dinas Kesehatan
		Cakupan Gizi Buruk Yang memperoleh Perawatan	100%	100%		100%		100%	75	100%	76.35	100%	100	100%	251	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penimbangan Balita (D/S)	70%	80%		85%		87%	75	90%	76.35	93%	100	93%	251	Dinas Kesehatan
		Cakupan ASI Eksklusif	65,5%	75%	121	80%	130	83%	132	85%	135	87%	137	87%	656	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pendistribusian Vitamin A Pada Balita	71%	85%		87%		0,9	69,0	92%	70,3	93%	72	93%	211	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu Hamil yang mengkonsumsi Tablet Fe 90 Tablet	68,9%	80%		85%		87%	40	90%	41	93%	42	93%	122	Dinas Kesehatan
		Cakupan Konsumsi Garam Beryodium	81,3%	85%		90%		0,92	40	93%	41	94%	42	94%	122	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	100%	100%	79	100%	108,0	1	80,0	100%	81,5	100%	83,0	100%	432	Dinas Kesehatan
5	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				1,300		1,108		1,706		1,758		1,800		7,672	Dinas Kesehatan, RSKD, Labuang Baji, Haji, PPKGM
		Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	21,04%	20,64%		20,24%		19,84%	180	19,44%	183.384	19,04%	187	19,04%	550	Dinas Kesehatan
		Mempertahankan Prevalensi Obesitas	13,6%	13,6%		13,6%		13,6%	150	13,6%	153	13,6%	156	13,6%	459	Dinas Kesehatan
		Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	7,2%	6,9%		6,6%		6,3%	120	6%	122.256	5,7%	125	5,7%	367	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular	0,6	0,65	507	0,7	758	0,78	772	0,85	787	0,9	802	0,9	3,626	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	1	570	100%	168	1	171.1584	100%	174.3761779	10000%	177.6544501	100%	1,261	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	90,5 %	95%	85	95%	53	95%	53.9964	95%	55.01153232	95%	56.04574913	95%	303	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan Kualitas Air Minum Masyarakat	1	80,5%	38	1	50	83,5%	51	1	74	1	86	1	299	RSUD. Labuang Baji
		Persentase pencegahan & pemberantasan penyakit lingkup RS	100%	100%	40	100%	41	100%	42	100%	42	100%	42	100%	207	UPTD RSU Haji
		meningkatnya pencatatan & pelaporan infeksi nosokomial	100%	100%	49	100%	23	100%	24	100%	25	100%	27	100%	149	Rumah Sakit Khusus Daerah
		Meningkatnya Pola Hidup Sehat, Keberdayaan Masyarakat Dalam Masalah Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan	2 Keg	100%	11	100%	15	100%	141	100%	142	100%	143	100%	452	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T		Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				8,207		11,728		14,054		15,764		18,687		68,440	Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu & anak st. Fatimah, Pertiwi, Pusat, BKKM, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji
		RS Terakreditasi Internasional	0	1	-	-	250	1	254.7	2	350	4 Rumah Sakit	855	Dinas Kesehatan		
		RS Terakreditasi Nasional (Versi 2012)	1 Rumah Sakit	1	5	5	250	5	254.7	5	259	22 Rumah Sakit	764	Dinas Kesehatan		
		Regulasi RS yang dihasilkan	1 Regulasi	2	1	60	1	61.128	1	62.2772064	1	63	6 Dokumen	247	Dinas Kesehatan	
		%RS Pemerintah yang telah mempunyai registrasi	97% (31 RS)	100% (32RS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	Dinas Kesehatan		
		%RS Swasta yang telah mempunyai registrasi	50% (25 RS)	60% (30RS)	70% (35RS)	80% (40RS)	100	90% (45RS)	102	100% (49RS)	104	100% (49RS)	306	Dinas Kesehatan		
		%RS Pemerintah yang telah melaksanakan penetapan klas	97% (31RS)	100%									0	Dinas Kesehatan		
		%RS Swasta yang telah melaksanakan penetapan klas	40% (20RS)	60% (30RS)	70% (35RS)	80% (40RS)	100	90% (45RS)	102	100% (49RS)	104	100% (49RS)	306	Dinas Kesehatan		
		%RS non pusat rujukan sebagai RS klas C	88% (23RS)	92% (24 RS)	96% (25RS)	100% (26RS)	100						100	Dinas Kesehatan		
		% RS pusat rujukan sebagai RS klas B	67% (4 RS)	83% (5 RS)	100% (6 RS)								0	Dinas Kesehatan		
		%RS Pemerintah yang telah memiliki izin RS	50% (16RS)	60% (19 RS)	133	70% (22 RS)	1448	80% (26 RS)	475	90% (29 RS)	484	100% (32 RS)	493	100% (32 RS)	3,033	Dinas Kesehatan
		%RS Swasta yang telah memiliki izin RS	33% (16 RS)	50% (24 RS)		60% (30RS)		70% (35RS)	150	80% (40RS)	153	90% (45RS)	156	90% (45RS)	459	Dinas Kesehatan
		%RS yang melaksanakan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	0	11,5% (24 RS)	224	17% (15 RS)		23% (20 RS)	228	34,5% (30 RS)	232	40% (35 RS)	237	40% (35 RS)	921	Dinas Kesehatan
		%RS Prov/Kab/Kota yang telah menjadi BLU	40% (13RS)	53% (17 RS)	168	69% (22RS)	100	83% (27 RS)	200	97% (31 RS)	204	100% (32 RS)	208	100% (32 RS)	879	Dinas Kesehatan
		%RS yang melakukan pelaporan SIRS on line	40% (36 RS)	60% (53RS)		70% (62RS)		80% (70RS)	100	90% (79RS)	102	100% (88 RS)	104	100% (88 RS)	306	Dinas Kesehatan
		PKM yang telah melaksanakan Akreditasi Pelayanan	0	2		4		6	190	8	193.572	10	197	10	581	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan Kab/Kota	1	1		1		1	200	1	203.76	1	208	1	611	Dinas Kesehatan
		% RS sebagai Wahana Internship	86% (18 RS)	86% (18 RS)		100% (21 RS)		100% (21 RS)	100	100% (21 RS)	101.88	100% (21 RS)	104	100% (21 RS)	306	Dinas Kesehatan
		Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	5/100.000 Penduduk	15/ 100.000 Penduduk		17/ 100.000 Penduduk	97.5	19/ 100.000 Penduduk	100	20/ 100.000 Penduduk	101.88	22/ 100.000 Penduduk	104	22/ 100.000 Penduduk	403	Dinas Kesehatan
		Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	5/100.000 Penduduk	8/ 100.000 Penduduk		10/ 100.000 Penduduk	97.5	11/ 100.000 Penduduk	100	12/ 100.000 Penduduk	101.88	13/ 100.000 Penduduk	104	13/ 100.000 Penduduk	403	Dinas Kesehatan
		Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	9/ 100.000 Penduduk		11/ 100.000 Penduduk	65	14/ 100.000 Penduduk	70	15/ 100.000 Penduduk	71.316	17/ 100.000 Penduduk	73	17/ 100.000 Penduduk	279	Dinas Kesehatan
		Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	10/ 100.000 Penduduk		11/ 100.000 Penduduk	65	13/ 100.000 Penduduk	70	15/ 100.000 Penduduk	71.316	17/ 100.000 Penduduk	73	17/ 100.000 Penduduk	279	Dinas Kesehatan
		Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	1/100.000 Penduduk	52/ 100.000 Penduduk		53/ 100.000 Penduduk	65	54/ 100.000 Penduduk	75	56/ 100.000 Penduduk	76.41	58/ 100.000 Penduduk	78	58/ 100.000 Penduduk	294	Dinas Kesehatan
		Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	2/100.000 Penduduk	94/ 100.000 Penduduk		95/ 100.000 Penduduk	65	97/ 100.000 Penduduk	75	99/ 100.000 Penduduk	76.41	100/ 100.000 Penduduk	78	100/ 100.000 Penduduk	294	Dinas Kesehatan
		Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	11/ 100.000 Penduduk		12/ 100.000 Penduduk	65	14/ 100.000 Penduduk	75	16/ 100.000 Penduduk	76	18/ 100.000 Penduduk	78	18/ 100.000 Penduduk	294	Dinas Kesehatan
		Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	12/ 100.000 Penduduk		13/ 100.000 Penduduk	65	15/ 100.000 Penduduk	75	16/ 100.000 Penduduk	76	17/ 100.000 Penduduk	78	17/ 100.000 Penduduk	294	Dinas Kesehatan
		Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk	20/100.000 Penduduk	21/ 100.000 Penduduk		22/ 100.000 Penduduk	65	23/ 100.000 Penduduk	75	24/ 100.000 Penduduk	76	25/ 100.000 Penduduk	78	25/ 100.000 Penduduk		Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya JCI dan ISO	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1,000	100%	1,000	RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
		1. Perpanjangan ISO terintegrasi 100% 2. Terakreditasinya 16 Pelayanan 100 % 3. Peningkatan type RS Pendidikan 100% 4. Pelaksanaan maintenance RS 100 %	100%	100%	909	100%	1,026	100%	869	100%	1,180	100%	1,298	100%	5,282	UPTD RSU Haji
		Persentase pelayanan kesehatan yang terstandart	90%	91%	687	92%	506	93%	531	94%	558	95%	586	95%	2,867	Rumah Sakit Khusus Daerah
		Terakreditasinya Akper Anging Mamiri oleh BAN PT	1 Keg	1 Keg	85	1 Keg	198	1 Keg	115	1 Keg	130	1 Keg	149	5 Keg	677	UPTD Akper Anging Mamiri
		Tersedianya bantuan pendidikan dan pelatihan aparatur	100%	100%	5,670	100%	7,563	100%	9,125	100%	10,494	100%	12,068	100%	44,920	UPTD Akper Anging Mamiri
		Tersedianya fasilitas pembelajaran yang lengkap	-	30 unit komputer	259	10 unit komputer	95	10 unit komputer	99	10 unit komputer	114	10 unit komputer	131	70 unit komputer	698	UPTD Akper Anging Mamiri
		Tersedianya kalender akademik agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar	-	1 Laporan	72	1 Laporan	83	1 Laporan	96	1 Laporan	110	1 Laporan	126	5 Laporan	487	UPTD Akper Anging Mamiri
		Tersusunnya dokumen akreditasi rumah sakit	4 Pokja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
		Terakreditasinya RSU Sayang RakyatMenjadi RS kelas B	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500	UPTD RSU. Sayang Rakyat
					65,517		98,788		97,539		105,521		114,974		482,340	Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, RSKD Ibu dan anak st. Fatimah, Pertiwi, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, BKKM, Transfusi Darah, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji
		Meningkatnya mutu sarana & prasarana serta penunjang pelayanan medis & non medis	7 Keg.	5 keg	18,551	5 keg	41,788	5 keg	33,535	5 keg	34,761	5 keg	35,598	5 keg	164,232	Rumah Sakit Khusus Daerah
		Meningkatnya sarana dan prasarana RT RS dan alat kesehatan RS	100%	100%	1,780	1	5,341	-	9,949	1	7,093	1	8,223	1	32,386	RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
		Meningkatnya sarana dan prasarana RS	2 Keg.	2 Keg.	4,625	2 Keg.	12,294	3 Keg	7,750	3 Keg	11,330	3 Keg	12,296	3 Keg	48,295	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
		Meningkatnya cakupan layanan kesehatan gigi dan mulut	2 Unit	2 Unit & 2 Paket	752	2 Unit, 1 Paket	600	2 Unit	500	2 Unit, 1 Paket	500	2 Unit, 1 Paket	200	10 Unit, 5 Paket	2,552	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
		Terpenuhinya Kebutuhan dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit	6 keg	6 keg	1,000	6 keg	1,500	6 keg	1,800	6 keg	2,000	6 keg	2,400	30 keg	8,700	UPTD.BKKM
		Ketersediaan alat dan gedung	100%	100%	6,459	100%	6,447	100%	10,103	100%	12,124	100%	14,548	100%	49,681	UPTD RSU Haji

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Termanfaatkannya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan kesehatan	310	100%	-	3 keg	588	3 keg	500	3 keg	600	3 keg	650	3 keg	2,338	Balai Pelayanan Kesehatan
		Terpenuhinya Kebutuhan dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit	7 Keg.	7 Keg.	27,977	7 Keg.	25,849	7 Keg.	28,434	7 Keg.	31,277	7 Keg.	34,405	35 Keg.	147,942	RSUD. Labuang Baji
		Pengadaan sarana prasarana	100%	100%	2,676	100%	2,444	100%	3,238	100%	3,562	100%	3,918	100%	15,838	UPTD RSU. Sayang Rakyat
		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	379	100%	448	100%	800	100%	950	100%	1,100	100%	3,677	UPTD Transfusi Darah
		Terpenuhinya alat alat laboratorium keperawatan	1 Paket	1 Paket	883	1 Paket	961	1 Paket	460	1 Paket	845	1 Paket	1,006	5 paket	4,155	UPTD Akper Anging Mamiri
		Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada BK4	1 Keg	100%	436	100%	528	100%	470.00	100%	480.00	100%	630.00	100%	2,544	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
8	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata/rumah sakit Khusus				7,480		7,551		7,991		10,775		10,066		43,863	Dinas Kesehatan, Balai Pelayanan Kesehatan, RSKD, Pertiwi, Pusat Pelayanan Gigi & Mulut, BKKM, Transfusi Darah, Sayang Rakyat, Haji & Labuang Baji
		Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	4 Keg.	4 Keg.	1,140	4 Keg.	2,832	4 Keg.	1,476	4 Keg.	1,535	4 Keg.	1,933	20 keg	8,916	Rumah Sakit Khusus Daerah
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal	5 keg	7 keg	781	7 keg	898	7 keg	1,033	7 keg	1,187	7 keg	1,366	35 keg	5,265	RSUD. Labuang Baji
		Terpeliharanya Alat / Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dan terkelolanya limbah rumah sakit	22,94%	2 Keg.	61	2 Keg.	64	2 Keg.	69	2 Keg.	69	2 Keg.	70	10 Keg.	333	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
		Terpeliharanya Perlengkapan Sarana dan Prasarana RT RS	1	100%	1,571	0%	-	0%	-	100%	2,000	0%	-	100%	3,571	RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
		Terpeliharanya Alat/Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
		1. Kalibrasi alat 100 % 2. Pemeliharaan gedung dan alat lainnya	100%	100%	2,087	100%	1,432	100%	2,652	100%	2,917	100%	3,209	100%	12,297	UPTD RSU Haji
		Terpeliharanya Alat Kesehatan dan kantor secara berkala serta terpeliharanya efisiensi peralatan kesehatan	3750000000%	1 keg	16	3 keg	186	3 keg	292	3 keg	321	3 keg	408	3 keg	1,223	Balai Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan rutin sarana prasarana	100%	100%	1,273	100%	1,400	100%	1,540	100%	1,694	100%	1,864	100%	7,771	UPTD RSU. Sayang Rakyat
		Terpeliharanya alat sarana dan prasarana rumah sakit	4 keg	4 keg	164	4 keg	179	4 keg	195	4 keg	211	4 keg	217	35 keg	966	UPTD.BKKM
		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	367	100	540	100	710	100	815	100	970	100	3,402	UPTD Transfusi Darah
		Mengoptimalkan Fungsi dan Kegunaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada BK4	1 Keg	100%	20	100%	20	100%	24.0	100%	26.0	100%	29.0	100%	119	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat				375		446		634.3848		646.3112342		705.9677444		2,808	Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
		Meningkatnya cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Menuju Universal Coverage	100%	100%	375	100%	420	100%	427.896	100%	436	100%	444	100%	2,103	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage	42%	45%		50%	26	60%	26.48888	70%	27	80%	75	80%	154	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%		100%		100%	90	100%	92	100%	93	100%	275	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	1	100%		100%		100%	90	100%	92	100%	93	100%	275	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia				475		883		1503		1531		1626		6,017	Dinas Kesehatan, Pertiwi
		Kematian Bayi (Kasus)	1.041 Kasus	1.031	55	1.026	32	1.021	33	1.016	33	1.011	100	1.011	253	Dinas Kesehatan
		Kematian Ibu (Kasus)	108 Kasus	107	126	106	314	105	320	104	326	103	332	103	1,418	Dinas Kesehatan
		Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (PN)	92,74%	93%		94%		95%	100	96%	102	97%	104	97%	306	Dinas Kesehatan
		Cakupan K4	91,64%	92%		92,5%		93%	100	93,5%	102	94%	104	94%	306	Dinas Kesehatan
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	64,99%	65%		67%		69%	150	71%	153	73%	156	73%	459	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Nifas	85,54%	87%		89%		91%	90	93%	92	95%	93	95%	275	Dinas Kesehatan
		Cakupan Peserta KB Aktif	67,27%	65%		66%	47	67%	90	68%	92	69%	93	69%	322	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Bayi	90,95%	94%		95%		96%	100	97%	102	98%	104	98%	306	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Balita	58,44%	68%		70%	122	75%	90	80%	92	85%	93	85%	397	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (KN 1)	91,84%	93%		94%		95%	100	96%	102	97%	104	97%	306	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	94,40%	95%		96%		97%	80	98%	82	99%	83	99%	245	Dinas Kesehatan
		Persentase Kelompok Lansia Aktif	85,48%	87%	294	87,5%	368	88%	250	89%	255	90%	259	90%	1,426	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
11	Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan tata laksana BLUD				31,350		48,694		44,716		46,900		49,720		221,380	Pertiwi, Sayang Rakyat, Haji, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah & Labuang Baji
		1.Pertumbuhan Pendapatan > 10 % pertahun 2. Tingkat kemandirian Keuangan RS > 70%	20%	40%	150	100%	150	100%	200	100%	200	100%	220	100%	920	UPTD RSU Haji
		Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	30%	40%	200	60%	200	80%	200	100%	200	100%	200	100%	1,000	RSUD. Labuang Baji

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD	100%	100%	17,500	100%	28,005	100%	28,316	100%	29,000	100%	30,800	100%	133,621	UPTD RS. Ibu dan Anak Pertiwi
		Tercapainya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS	100%	100%	13,500	100%	20,339	100%	16,000	100%	17,500	100%	18,500	100%	85,839	RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
12	Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan				18,335		37,019		27,509		29,053		30,159		142,075	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika, RSU Haji
		1). Pemenuhan Obat Pasien 100 % 2). Pemenuhan makan minum pasien 100 %	100%	100%	13,103	100%	32,103	100%	21,448	100%	22,408	100%	23,273	100%	112,335	UPTD RSU Haji
		Terpeliharanya alat sarana dan prasarana rumah sakit	1 keg	1 keg	500	1 keg	525	1 keg	535	1 keg	542	1 keg	548	5 keg	2,650	UPTD.BKKM
		Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan bahan Lab serta bahan gigi dan BHP	605,250,000	1 keg	713	1 keg	750	1 keg	795	1 keg	955	1 keg	787	1 keg	4,000	Balai Pelayanan Kesehatan
		Tersedianya obat-obatan dan makan minum pasien	100%	100%	2,894	100%	2,495	100%	3,435	100%	3,765	100%	4,161	100%	16,750	UPTD RSU. Sayang Rakyat
		Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam Mendukung Upaya Kesehatan	1 Keg	100%	1,125	100%	1,146	100%	1,296.00	100%	1,383.00	100%	1,390.00	100%	6,340	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					814,520		770,194		569,497		622,049		647,963		3,018,076	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	83.60%	85.79%	703,630	87.98%	581,356.0	89.44%	410,186.0	90.17%	439,308	100%	460,794	90,88 %	2,189,127	BINA MARGA
		Persentase tingkat kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	77.73%	82.50%		87.42%		88.55%		89.45%		90.01%		92,03%		BINA MARGA
2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai yang dinormalisasi (meter)	6,820	2,500	5,512	8,000	21,158	5,000	17,748	10,000	17,806	11,000	19,806	36,500	82,030	PSDA
		Panjang tanggul sungai yang	10,000	346		12,000		11,000		11,000		11,000		45,346		PSDA
		Jumlah sungai yang disediakan prasarananya (lokasi)	10	12		10		11		10		10		12		PSDA
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas jaringan irigasi yang ditingkatkan, dipelihara dan direhabilitasi		39,145	75,738	41,354	114,227	49,834	98,813	49,834	117,492	59,887	121,065	240,054	527,335	PSDA
		Jumlah DRT yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan	6	20		17		8		8		14		67		PSDA
4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah embung yang terbangun	50	35	5,378.37	23	5,289.49	20	9,023.00	40	14,832.63	40	14,859.93	208	49,383	PSDA

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Program Pengendalian Banjir dan pengamanan Pantai	Jumlah bahan bronjong yang disediakan (buah)	564	500	603.88	500	386.33	1,000	750.00	1,000	1,025.91	1,000	1,222.84	4,000	3,988.95	PSDA
		Jumlah karung plastik yang disediakan	10,000	12,500		13,000		15,000		15,000		15,000		70,500		PSDA
6	Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase rumah tangga berakses air minum	85.87	87.37	17,274	87.45	35,411	87.50	25,262	87.75	24,550	88.00	24,100	87.00	126,597	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Persentase rumah tangga bersanitasi	81.08	82.61		83.00		83.41		84.20		85.00		80.00		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Persentase Penanganan Sampah	81.23	82.40		83.09		83.72		84.34		85.00		85.00		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0.52	0.58	6,384	0.63	12,367	0.66	7,715	0.68	7,035	0.73	6,115	0.73	39,616	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	17.73	18.00		20.00		22.00		24.00		26.00		26		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					111,359		99,031		122,202		131,417		135,634		599,643	
1	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung	Persentase perwujudan Kawasan COI	3%	5%	45,686.00	7%	68,000.00	9%	104,974.00	12%	109,674.00	15%	109,156.00	15%	437,490	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Persentase pembangunan Wisma Negara	-	0%		11%		18%		20%		22%		22%		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Jumlah kawasan yang dilakukan Penataan Bangunan dan Lingkungan	95.00	14		4		4		4		4		125		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
2	Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah	-	1,000	65,673	1,000	31,031	1,000	17,228	1,000	21,743	1,000	26,478	5,000	162,153	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Rasio rumah layak huni	0.23	0.191		0.192		0.193		0.194		0.195		0.195		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
		Persentase kawasan kumuh	0.109	0.105		0.100		0.099		0.095		0.094		0.094		Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					28,799		31,295		33,589		33,341		37,123		164,147	
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat	9 kegiatan	9 kegiatan	3,745	8 kegiatan	3,426	11 kegiatan	3,270	11 kegiatan	3,270	11 kegiatan	3,760	50 kegiatan	17,471	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	80%	20%	1,332	20%	2,158	20%	2,434	20%	2,434	20%	2,434	100%	10,792	Satpol PP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Program Pemeliharaan Ketenteraman, ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal	Jumlah kegiatan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat	3 kegiatan	4 kegiatan	2,563	4 kegiatan	2,984	4 kegiatan	2,590	4 kegiatan	2,805	4 kegiatan	2,825	20 kegiatan	13,766	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman	1 kegiatan	1 kegiatan	90	1 kegiatan	94	1 kegiatan	100	1 kegiatan	110	1 kegiatan	150	5 kegiatan	544	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman	2 kegiatan	3 kegiatan	491	3 kegiatan	534	3 kegiatan	650	3 kegiatan	780	3 kegiatan	970	15 kegiatan	3,425	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman	4 kegiatan	4 kegiatan	654	4 kegiatan	85	8 kegiatan	1,110	4 kegiatan	1,275	4 kegiatan	1,530	24 kegiatan	4,654	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah masyarakat/aparat yang disosialisasi; jumlah kelompok kerja yang membantu melakukan pendidikan politik; jumlah kerjasama terhadap orkemas	7 kegiatan	7 kegiatan; 1 pokja	6,518	7 kegiatan; 1 pokja	5,076	7 kegiatan; 1 pokja	4,975	7 kegiatan; 1 pokja	4,105	7 kegiatan; 1 pokja	3,845	35 kegiatan; 1 pokja	24,519	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
7	Program Kemitraan Pemeliharaan Kerukunan dalam memelihara Kerukunan Nasional	Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman	3 kegiatan	3 kegiatan	851	3 kegiatan	1,135	4 kegiatan	1,350	3 kegiatan	1,440	3 kegiatan	1,700		6,476	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8	Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman	6 kegiatan	5 kegiatan	921	5 kegiatan	591	3 kegiatan	480	3 kegiatan	575	3 kegiatan	870		3,437	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9	Program Penguatan 4 Pilar Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman	1 kegiatan	1 kegiatan	92	1 kegiatan	44	1 kegiatan	130	1 kegiatan	150	1 kegiatan	170		586	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
10	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Daerah	Jumlah laporan pemantauan; jumlah masyarakat yang diberi pemahaman	1 kegiatan	4 kegiatan	259	4 kegiatan	270	6 kegiatan	780	5 kegiatan	900	5 kegiatan	1,050	24 kegiatan	3,259	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
11	Program Pelaksanaan Pemilu	Jumlah pemilu yg aman dan lancar	1 kegiatan	1 kegiatan	804	1 kegiatan	1,921	1 kegiatan	200	1 kegiatan	200	1 kegiatan	300		3,426	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk mewujudkan rasa aman masyarakat	0%	20%	120	20%	608	20%	1,098	20%	1,118	20%	1,128	20%	4,072	Satpol PP
15	Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja	Persentase jumlah Satpol PP yang terlatih dari total Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	35%	20%	165	20%	978	20%	983	20%	1,033	20%	1,033	100%	4,192	Satpol PP
16	Program Pengelolaan dan Keberagaman Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal keagamaan	9 kegiatan	9 kegiatan	590	9 kegiatan	710	9 kegiatan	850	9 kegiatan	920	9 kegiatan	1,055	45 kegiatan	4,125	Biro Bina Mental Spiritual Setda
17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan	Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitasi	14 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (700 org)	15 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (800 org)	1,955	17 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (1000 org)	2,300	15 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (1100 org)	2,270	17 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (1300 org)	2,630	18 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (1500 org)	2,950	82 Pelatihan/Sosialisasi dan Pembinaan (5700 org)	12,105	Biro Bina Mental Spiritual Setda
		Jumlah fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran al'quran	35 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	2,895	42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	1,800	42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	3,115	42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	2,000	42 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	3,290	210 orang pembinaan dan peningkatan terhadap al'quran	13,100	Biro Bina Mental Spiritual Setda
18	Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama	Jumlah dai dan pemuka agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan	5 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (200 org)	18 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org)	2,040	15 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (100 org)	3,615	17 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org)	3,940	16 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org)	4,005	17 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (50 org)	4,260	73 pembinaan/sosialisasi dan pelatihan lembaga keagamaan dan tokoh agama (500 org)	17,860	Biro Bina Mental Spiritual Setda
19	Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekanisme dan SDM untuk pengurangan resiko bencana 20%	20%	1,061	40%	1,168	60%	1,284	80%	1,413	100%	1,554	100%	6,480	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana	Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekanisme dan SDM untuk penanganan darurat bencana 15%	25%	1,152	40%	1,268	60%	1,395	80%	1,534	100%	1,550	100%	6,899	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T		Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Program Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan humas PB	Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekanisme dan SDM untuk pengelolaan data, informasi dan Humas (Datinmas) PB 15%	2 PT rapat/koordinasi/penerimaan kunjungan	499	3 PT rapat/koordinasi/penerimaan kunjungan	532	4 PT rapat/koordinasi/penerimaan kunjungan	585	5 PT rapat/koordinasi/penerimaan kunjungan	644	6 PT rapat/koordinasi/penerimaan kunjungan	699	6 PT rapat/koordinasi/penerimaan kunjungan	2,959	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					18,786		11,835		13,182		14,602		16,742		75,147	
1	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	2446 Jiwa	2691 jiwa	2,874	2960 jiwa	949	300 Org / 9 Kab / Kota	950	350 Org / 15 Kab / Kota	1,075	450 Org / 20 Kab / Kota	1,307	6,751 Org / 20 kab/kota	7,155	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial meliputi Penanganan PMKS, Konflik Sosial dan Kebencanaan	582 jiwa	641 jiwa	1,673	706 jiwa	773	500 Org / 1 Thn	1,150	575 Org / 1 Thn	1,257	650 Org / 1 Thn	1,627	3,072 Org / 1 Thn	6,480	Dinas Sosial
		Cakupan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0 Kab/kota yang melakukan pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7 Kab/kota dan 1 unit pelayanan Pada pemprov sulsel		6 kab/kota dan 1 unit pelayanan pada pemprov sulsel		5 Kab/Kota dan 1 Unit Pelayanan pada Pemprov sulsel		3 Kab/kota dan 1 Unit pelayanan pada pemprov sulsel		3 kab/kota dan 1 sitem terpadu pada pemprov sulsel		24 kab/kota	-	Dinas Sosial
		Cakupan rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan oleh petugas rehabilitasi terlatih	0 kab/kota yang melakukan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7 Kab/kota dan 1 unit pelayanan Pada pemprov sulsel		6 kab/kota dan 1 unit pelayanan pada pemprov sulsel		5 Kab/Kota dan 1 Unit Pelayanan pada Pemprov sulsel		3 Kab/kota dan 1 Unit pelayanan pada pemprov sulsel		3 kab/kota dan 1 sitem terpadu pada pemprov sulsel		24 kab/kota	-	Dinas Sosial
2	Program pembinaan anak terlantar	Terpenuhinya pembinaan dan kesejahteraan anak terlantar kearah kemandirian	459 Jiwa	551 Jiwa	2,996	601 jiwa	2,647	460 Anak / 3 UPTD	2,911	485 Anak / 3 UPTD	3,289	510 Anak / 3 UPTD	3,789	2607 Org / 3 UPTD	15,632	Dinas Sosial
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tertanganinya Penyandang disabilitas dan trauma dalam pemulihan keberfungsian sosial	245 Jiwa	270 Jiwa	348	297 jiwa	100	50 Org	150	75 Org	157	100 Org	173	792 Org / jiwa	928	Dinas Sosial
4	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Peningkatan pemenuhan jaminan hidup bagi Jompo dan pengembangan diri kearah kemandirian bagi anak asuhan dalam panti	155 Jiwa	430 Jiwa	1,869	473 Jiwa	1,611	205 Org / 2 UPTD	1,930	230 Org / 2 UPTD	2,024	255 Org / 2 UPTD	2,358	1,593 Org / 2 UPTD	9,792	Dinas Sosial
5	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Peningkatan pembinaan dan pengentasan eks penyandang sosial (EksNarapidana), PSK, Narkoba dan penyakit sosial dalam dan luar panti lainnya	257 Jiwa	345 Jiwa	1,088	379 jiwa	729	200 Org / 1 UPTD / 1 Thn	1,055	250 Org / 1 UPTD / 1 Thn	1,218	300 Org / 1 UPTD / 1 Thn	1,400	1,474 Org / 1 UPTD	5,490	Dinas Sosial

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kompetensi kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial untuk penguatan kelembagaan serta penanaman nilai nilai kepahlawanan	238 Jiwa	782 Jiwa	4,233	860 Jiwa	2,264	290 Org / 2 TMP / MPN	1,232	315 Org / 2 TMP / MPN	1,515	340 Org / 2 TMP / MPN	1,742	2,587 Org / 2 TMP / MPN	10,986	Dinas Sosial
7	Program Pengembangan, Kebijakan, Perlindungan dan Kerawanan Sosial	Jumlah Kegiatan pengembangan kemitraan dan pengembangan kebijakan sosial	9 Keg	1 Keg	330	1 Keg	144	3 keg	335	2 keg	255	2 keg	266	18 keg	1,330	Biro Bina Kesejahteraan
		Jumlah Kegiatan dalam upaya peningkatan dan pelaksanaan perlindungan sosial	14 keg	13 keg	1,511	12 keg	1,099	11 keg	1,260	15 keg	1,430	15 Keg	1,500	80 keg	6,800	Biro Bina Kesejahteraan
		Jumlah kegiatan koordinasi penanganan kerawanan sosial	16 keg	9 keg	1,127	7 Keg	708	13 keg	1,317	13 keg	1,400	13 keg	1,500	71keg	6,052	Biro Bina Kesejahteraan
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemulihan pasca bencana	Jumlah/persentase tersedianya perangkat, mekansme dan SDM untuk penyelenggaraan pemulihan pasca bencana 15%	25%	737	40%	811	60%	892	80%	982	100%	1,080	100%	4,502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NON PELAYANAN DASAR					442,429		457,887		538,978		566,545		618,177		2,624,016	
PERHUBUNGAN					76,800		76,300		108,500		108,700		135,000		505,300	
1	Pembangunan Transportasi Massal	Dukungan pemerintah Prov. Sulsel dalam pembangunan transportasi massal (kereta api dan BRT)	5%	10%	70,000	20%	70,000	25%	100,000	27%	100,000	30%	120,000	30%	460,000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Darat	Persentase pelayanan angkutan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi	80%	87%	4,500	90%	4,000	94%	5,000	97%	5,000	100%	7,000	100%	25,500	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Persentase pelayanan angkutan sungai dan danau	60%	65%		70%		75%		78%		80%				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Persentase pelayanan angkutan penyeberangan	60%	65%		70%		75%		78%		80%				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Laut	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut	80%	85%	800	87%	800	88%	1,500	89%	2,000	90%	5,000	90%	10,100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Udara	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara	70%	72%	1,500	74%	1,500	76%	2,000	78%	1,700	80%	3,000	80%	9,700	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
LINGKUNGAN HIDUP					10,784		7,263		10,155		11,263		11,245		50,710	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton)	3.39	6.08	4,224.00	12.72	3,007.27	18.28	4,495.00	24.34	4,625.00	30.43	4,255.00	30.43	20,606.27	BLHD
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA	6	12	3,477.15	24	1,494.00	36	2,375.00	48	3,005.00	60	2,156.00	60	12,507.15	BLHD
3	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	2.78	2.86	2,026.57	2.94	1,799.45	3.01	1,836.58	3.17	2,085.00	3.71	3,186.00	3.71	10,933.60	BLHD
4	Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi penanganan kasus lingkungan hidup	5%	10	1,056.18	14	962.32	16	1,448.00	18	1,548.00	20	1,648.00	78%	6,662.50	BLHD
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				561		720		1,385		1,523		1,675		5,864	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sulse	440	3 Keg	561	3 Keg	720	7 Keg	1,385	7 Keg	1,523	7 Keg	1,675	27 Keg	5,864	Biro Pemerintahan Umum Setda
	PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,146		2,485		3,083		2,500		2,500		12,714	
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kab/kota layak anak	0% dari kab/kota yang memiliki kel/desa layak anak	3 kab	243	3 kab	362	4 kab/kota	383	-	-	-	-	70% dari kab/kota yang memiliki kel/desa layak anak	988	BPPKB
		Jumlah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di provinsi dan kab/kota	23 SKPD dan 2 kab/kota	35 SKPD dan 10 kab/kota	830	37 SKPD dan 6 kab/kota	946	44 SKPD dan 14 kab/kota	701	-	-	-	-	57 SKPD dan 24 kab/kota	2,477	BPPKB

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan	0 % Kab/Kota yg menerapkan SPM	12,5 % atau 3 kab	332	12,5 % atau 3 kab	401	16,67 % atau 4 kab	401	-	-	-	-	19 atau 70 % Kab/Kota yg menerapkan SPM	1,134	BPPKB
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	89%	95%	128	98%	108	99%	906	-	-	-	-	100%	1,142	BPPKB
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	54%	60%	379	60%	431	65%	409	-	-	-	-	65%	1,219	BPPKB
3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	% partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	45%	45%		45%		46%		-	-	-	-	46%		BPPKB
		% partisipasi perempuan di parlemen	14,23% (123 orang)	14,5 %	105	14,5 %	117	14,5 %	150	-	-	-	-	14,5 %	372	BPPKB
		% partisipasi angkatan kerja perempuan	37,94%	38,23%	129	39%	120	39%	133	-	-	-	-	39,8%	382	BPPKB
4	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah lingkup provinsi yang melaksanakan pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan								35%	250	40%	250	75%	500	BPPKB
		Persentase layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota								40%	200	48%	200	88%	400	BPPKB
		Jumlah lembaga penyedia layanan yang dikembangkan dalam perlindungan perempuan								35 lembaga	150	43 lembaga	150	78 lembaga	300	BPPKB
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mengintegrasikan pemenuhan hak anak								25 lembaga	150	53 lembaga	150	78 lembaga	300	BPPKB
		Jumlah kabupaten/kota layak anak		3 kab/ kota		3 kab/ kota		4 kab/ kota		6 kab/ kota	250	6 kab/ kota	250	22 kab/ kota	500	BPPKB
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah lingkup provinsi yang melaksanakan pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya kekerasan terhadap anak, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.								40%	150	41%	150	81%	300	BPPKB

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah jenis layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis layanan	150	6 jenis layanan	150	11 jenis layanan	300	BPPKB
		Jumlah lembaga layanan yang dikembangkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga layanan	150	25 lembaga layanan	150	50 lembaga layanan	300	BPPKB
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah kebijakan teknis SKPD responsive gender	2 kebijakan teknis	10 kebijakan		10 kebijakan teknis		10 kebijakan teknis		10 kebijakan teknis	150	17 kebijakan teknis	150	59 kebijakan teknis	300	BPPKB
		Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yg aktif dlm pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga/oramas	150	25 lembaga/oramas	150	50 lembaga/oramas	300	BPPKB
		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga layanan	150	30 lembaga layanan	150	55 lembaga layanan	300	BPPKB
8	Program Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat/ keagamaan yang melakukan KIE penguatan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Hak Anak	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga	150	30 lembaga	150	55 lembaga	300	BPPKB
		Jumlah lembaga/organisasi masyarakat/keagamaan yg dilatih menjadi fasilitator penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Hak Anak di provinsi	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga	150	30 lembaga	150	55 lembaga	300	BPPKB
		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Hak Anak lintas kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga	150	30 lembaga	150	55 lembaga	300	BPPKB
9	Program Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	-	-	-	-	-	-	-	90%	150	100%	150	100%	300	BPPKB
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,010		1,827		2,322		2,010		2,200		10,369	
1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rasio akseptor KB Aktif (Jml akseptor KB Aktif/Jumlah pasangan usia subur)	27,47 (381.469 KB baru dari 1.388.691 PUS)	28.10%	465	28.95%	311	29.30%	357						1,133	BPPKB
		% Keluarga Prasejahtera	290.162 KK (14,45%)	13.00%	636	12,8%	483	12,2%	694				11,05%		1,813	BPPKB
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jml kelompok KRR luar sekolah	0 kelp	30 kelp (3 kab/kota)	251	30 kelp (3 kab/kota)	281	30 kelp (3 kab/kota)	324					180 kelp (18 kab/kota)	856	BPPKB

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan advokasi dan publikasi di di kab/kota	0 kab/kota	4 kab/kota	244	4 kab/kota	401	4 kab/kota	536					24 kab/kota	1,181	BPPKB
4	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	% peningkatan pembentukan kelompok bina keluarga di kab/kota	20%	12%	300	18%	257	25%	289					75%	846	BPPKB
5	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jml kec yang menerapkan model operasional BKB-Posyandu_PADU holistik	2 kec	20 kec (4 Kab/kota)	114	20 kec (4 kab/kota)	94	30 kec (6 Kab/kota)	122					120 kec (24 kab)	330	BPPKB
6	Program Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	-	-	-	-	-	-	-	24 kab/kota	465	24 kab/kota	289	24 kab/kota	754	BPPKB
7	Program Keluarga Berencana	Jumlah model pengembangan desain kie pengendalian keppddk dan kb berbasis kearifan local	-	-	-	-	-	-	-	10 model	251	15 model	357	25 model	608	BPPKB
		Prevalensi peserta KB Aktif	-	-	-	-	-	-	-	78,03%	636	79,11%	694	79,11%	1,330	BPPKB
8	Program Keluarga Sejahtera	Jumlah model ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	-	-	-	-	-	10 model	300	10 model	536	20 model	836	BPPKB
		Jumlah lembaga masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	25 lembaga layanan	358	30 lembaga layanan	324	55 lembaga layanan	682	BPPKB
	TENAGA KERJA				7,677		9,705		8,275		8,825		9,560		44,042	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedia tenaga kerja yang terampil dalam mengelola usahanya melalui pelatihan kewirausahaan, AMT dan pelatihan kewirausahaan	Terlaksana 9 Paket Pelatihan (180 orang)	12 paket (240 orang)	700	14 paket (280 orang)	900	12 paket (240 orang)	750	12 paket (240 orang)	750	12 paket (240 orang)	750	62 paket (1240 orang)	3,850	Disnakertrans
		Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui pelatihan Five S dan UKM	-	5 Paket (100 orang)	400	5 Paket (100 orang)	300	5 Paket (100 orang)	300	5 Paket (100 orang)	300	5 Paket (100 orang)	300	25 paket (500 orang)	1,600	Disnakertrans
		Tersedianya program pengembangan pelatihan produktivitas	-	2 Paket (40 orang)	150	1 Paket (20 orang)	50	1 Paket (20 orang)	50	1 Paket (20 orang)	50	1 Paket (20 orang)	50	6 Paket (120 orang)	350	Disnakertrans
		Meningkatnya keterampilan dan skill tenaga kerja petugas lansia, perempuan dan petugas operator	Terlaksana 3 paket pelatihan bagi petugas lansia, tenaga kerja perempuan dan petugas operator (70 Orang)	70 Orang	170	140 Orang	350	100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	510 Orang	1,270	Disnakertrans
		Meningkatnya keterampilan dan skill para pencari kerja dan putus sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja	Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 560 Orang (28 Paket)	600 Orang	1,500	280 Orang	850	500 Orang	1,000	500 Orang	1,000	500 Orang	1,050	2380 Orang	5,400	Disnakertrans

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan Tenaga Kerja Putus Sekolah 2 Paket (40 Orang)	100 Orang	250	140 Orang	350	100 Orang	250	100 Orang	250	100 Orang	250	540 Orang	1,350	Disnakertrans
		Berkembangnya Lembaga Pelatihan Kerja (250 LPK) sesuai Standar dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja serta Asosiasi Profesi yang terakreditasi '(300 Asosiasi Profesi)	Jumlah LPK yang diintervensi sebanyak 25 LPK	4 LPK	200	4 LPK	550	4 LPK	400	4 LPK	450	4 LPK	500	20 LPK	2,100	Disnakertrans
			Jumlah Asosiasi Profesi yang diintervensi sebanyak 50 Asosiasi Profesi	30 Asosiasi Profesi	200	40 Asosiasi Profesi	550	40 Asosiasi Profesi	400	40 Asosiasi Profesi	450	40 Asosiasi Profesi	500	190 Asosiasi Profesi	2,100	Disnakertrans
2	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, kelompok wirausahaproduktif dan padat karya	Telah dibina sebanyak 16 Klp Usaha Mandiri dengan jumlah anggota 320 Orang	500 Orang	1,150	160 Orang	400	500 Orang	1,000	500 Orang	1,000	500 Orang	1,000	2160 orang	4,550	Disnakertrans
			Padat karya infrastruktur kepada kelompok masyarakat	100 Orang	350	100 Orang	175	100 Orang	200	100 Orang	200	100 Orang	200	500 orang	1,125	Disnakertrans
			Telah dibina sebanyak 2 Klp (16 org) wirausaha produktif	3 Klp	195	1 Klp	75	2 Klp	150	2 Klp	150	2 Klp	150	10 Klp	720	Disnakertrans
		tersedianya data dan informasi jumlah penempatan tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal 30.904 Orang dan tenaga kerja luar negeri 23.000 orang	100.000 orang	400	100.000 orang	500	100.000 orang	500	100.000 orang	500	100.000 orang	500	500.000 orang	2,400	Disnakertrans
		Data dan Informasi Pasar Kerja dapat diakses/diketahui oleh para pencari kerja di 24 Kab/Kota	Beberapa kabupaten/kota belum dapat mengakses data dan informasi pasar kerja	24 Kab/Kota	60	24 Kab/Kota	100	24 Kab/Kota	100	24 Kab/Kota	100	24 Kab/Kota	100	24 Kab/Kota	460	Disnakertrans
3	Program Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Peran LKS Tripartit dalam menjalin hubungan industrial yang kondusif	Terlaksana pembinaan LKS Tripartit di 24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	375	24 Kab/Kota	350	24 Kab/Kota	350	24 Kab/Kota	400	24 Kab/Kota	500	24 Kab/Kota	1,975	Disnakertrans
		Tertanganinya kasus perselisihan, mogok kerja dan unjuk rasa di tempat kerja dengan baik	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di beberapa kab/kota (15 Kasus)	30 Kasus / Perusahaan / 3 Paket (90 Orang)	150	10 Paket / 300 Orang	500	4 Paket / 120 Orang	200	5 Paket / 150 Orang	250	7 Paket / 210 Orang	350	29 Paket (870 Orang)	1,450	Disnakertrans
		Koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha berjalan dengan baik sesuai dengan norma yang telah ditetapkan	Terlaksana koordinasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebanyak 50 Orang	60 Orang	110	60 Orang	200	60 Orang	100	60 Orang	150	60 Orang	150	300 Orang	710	Disnakertrans

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Mewujudkan pemahaman aturan-aturan ketenagakerjaan bagi serikat pekerja/serikat buruh	Terlaksana workshop sebanyak '40 Orang	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	50	50 Orang	100	100 Orang	200	300 Orang	550	Disnakertrans
		Syarat-syarat kerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Terlaksana di beberapa perusahaan di Kab/Kota	24 Kab/Kota	115	24 Kab/Kota	225	24 Kab/Kota	100	24 Kab/Kota	200	24 Kab/Kota	200	24 Kab/Kota	840	Disnakertrans
		Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha melalui sosialisasi UMP Unsur Tripartit, Penyusunan NormaKebutuhan Hidup Layak dan Fasilitasi Dewan Pengupahan	Terlaksana Sosialisasi UMP bagi Unsur Tripartit (30 Orang)	30 Orang	50	210 Orang	350	60 Orang	100	60 Orang	100	60 Orang	100	420 Orang	700	Disnakertrans
			Workshop Penyusunan KHL '30 Orang	30 Orang	50	30 Orang	50	30 Orang	50	60 Orang	100	60 Orang	100	210 Orang	350	Disnakertrans
			Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Provinsi	24 kab/kota	310	24 kab/kota	650	24 kab/kota	600	24 kab/kota	600	24 kab/kota	600	24 kab/kota	2,760	Disnakertrans
4	Program Pembinaan serta Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan	Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Norma Kerja	-	30 Orang	70	240 Orang	400	90 Orang	150	120 Orang	200	150 Orang	250	630 Orang	1,070	Disnakertrans
			Penanganan Kasus Ketenaga- kerjaan (10 Kasus)	50 Kasus Kab/Kota	90	50 Kasus Kab/Kota	150	50 Kasus Kab/Kota	100	50 Kasus Kab/Kota	100	50 Kasus Kab/Kota	150	50 Kasus Kab/Kota		Disnakertrans
		Meningkatnya perlindungan pekerja perempuan dan berkurangnya jumlah pekerja anak dan anak-anak yang terlibat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk	Pelatihan Sistem Pemantauan Pekerja Anak (30 Orang)	60 Orang	185	60 Orang	125	60 Orang	100	60 Orang	100	60 Orang	125	300 Orang	635	Disnakertrans
		Meningkatnya penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta berkurangnya jumlah kecelakaan kerja	-	-	-	-	275	24 Kab/Kota	200	24 Kab/Kota	250	24 Kab/Kota	300	24 Kab/Kota	1,025	Disnakertrans
		Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat pengawas ketenagakerjaan	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan '(30 Orang)	30 Orang	80	30 Orang	60	30 Orang	75	30 Orang	75	30 Orang	85	150 Orang	375	Disnakertrans
		Terwujudnya penerapan K3 dan pendataan objek pengujian K3	60 orang	60 Orang	60	60 Orang	120	60 Orang	100	60 Orang	100	120 Orang	200	300 Orang	580	Disnakertrans
		Terwujudnya pelaksanaan periksa dan uji di perusahaan	pelaksanaan pemeriksaan dan uji objek K3 di 18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	115	20 Kab/Kota	300	22 Kab/Kota	350	22 Kab/Kota	350	22 Kab/Kota	350	24 Kab/Kota	1,465	Disnakertrans
		Meningkatnya pengetahuan para pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	Bimbingan Teknis K3 sebanyak 60 Orang	60 Orang	92	420 Orang	700	120 Orang	300	120 Orang	300	120 Orang	300	840 Orang	1,692	Disnakertrans
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				35,232		36,007		30,890		39,377		41,877		183,383	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan produk pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana	1.500 unit	1.650 unit	3,100	1.800 unit	3,400	1.950 unit	3,750	2.100 unit	4,250	2.250 unit	4,750	KUMKM yg terfasilitasi sarana dan prasarana 2.250 unit	19,250	Dinas Koperasi dan UMKM
		Jumlah produk baru yang telah mendapatkan HAKI	96 produk	101 produk	-	106 produk	-	111 produk	-	116 produk	-	121 produk	-	Produk baru yang dihasilkan 121 produk	-	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif KUMKM	jumlah wirausaha baru	12.045 orang	72.405 orang	26,457	132.765 orang	26,157	193.125 orang	21,140	253.485 orang	26,127	313.845 orang	26,627	313.845 orang	126,508	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM	jumlah Koperasi aktif	5.554 unit	6.504 unit	3,000	6.554 unit	3,300	7.054 unit	3,000	7.554 unit	3,750	8.026 unit	4,500	jumlah Koperasi aktif 8.026 unit	17,550	Dinas Koperasi dan UMKM
		jumlah koperasi besar	5 unit	10 unit	-	15 unit	-	20 unit	-	25 unit	-	30 unit	-	Jumlah koperasi besar sebanyak 30 unit	-	Dinas Koperasi dan UMKM
		jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	113.370 unit	122.440 unit	-	131.510 unit	-	140.580 unit	1,000	149.650 unit	1,250	meningkatnya 158.718 unit	1,500	meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi 158.718 unit	-	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Program peningkatan daya saing Sumberdaya manusia dan peningkatan kepada sumberdaya produktif bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang difasilitasi diklat	5.000 orang	6.500 orang	2,675	8.000 unit	3,150	9.500 unit	2,000	11.000 unit	4,000	12.500 unit	4,500	SDM KUMKM yg difasilitasi mengikuti diklat 12.500 orang	16,325	Dinas Koperasi dan UMKM
		jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses ke lembaga keuangan bank dan Non bank	150.000 unit	150.150 unit	-	150.300 unit	-	150.450 unit	-	150.600 unit	-	150.750 unit	-	KUMKM terfasilitasi pada lembaga keuangan bank dan non bank 150.750 unit	-	Dinas Koperasi dan UMKM
	PENANAMAN MODAL				9,273		9,844		11,125		13,390		14,670		58,302	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Investasi PMA dan Investasi PMDN	Jumlah investasi : PMA 582 Juta USD, PMDN Rp. 2,32 Triliun	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun	8,923	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun	9,114	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 4 Triliun	10,305	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 5 Triliun	12,550	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 6 Triliun	14,220	Investasi PMA 2000 juta USD, Investasi PMDN Rp. 21 triliun	55,112	BKPM
2	Program fasilitasi inisiasi penyiapan lahan untuk investasi	Jumlah kabupaten kota yang difasilitasi dalam penyediaan lahan untuk investasi	0	2 Kab/Kota	350	4 Kab/Kota	730	6 Kab/Kota	820	8 Kab/Kota	840	10 Kab/Kota	450	10 Kab/Kota	3,190	BKPM
	KEBUDAYAAN				6,513		6,809		7,908		9,001		9,091		39,322	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengkajian, pengembangan dan pelestarian nilai nilai budaya	Jumlah kajian budaya lokal dan jumlah pendokumentasian serta penyebarluasan naskah sejarah budaya lokal	-	-	-	-	-	2 Naskah	531	3 Naskah	736	2 Naskah	744	7 Naskah	2,011	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
2	Pengembangan Budaya Maritim Brbasis Budaya Lokal Sulawesi Selatan	Cakupan pengkajian dan pengembangan komunitas spesifik maritim dan cakupan pengembangan museum budaya maritim	-	-	-	1 Keg	231	2 Keg	243	2 Keg	373	2 Keg	377	7 Keg	1,223	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs Cagar Budaya yang akan dilestarikan	Jumlah Situs Cagar Budaya yang akan dilestarikan sebanyak 15 Situs	3	1,811	3	1,829	3	1,903	3	2,210	3	2,232	15	9,985	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
		Jumlah benda budaya yang akan dilestarikan	Jumlah benda budaya yang akan dilestarikan sebanyak 1.250 Benda	250	1,290	250	1,303	250	1,298	250	1,510	250	1,524	1,250	6,926	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 16 Kali	16 Kali	2,512	18 Kali	2,456	20 Kali	2,844	20 Kali	2,974	22 Kali	2,897	96 Kali	13,682	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak di 4 lokasi	4	900	4	990	4	1,089	4	1,198	4	1,318	4	5,495	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
	PEMUDAN DAN OLAHRAGA				47,021		47,178		53,090		55,661		56,278		259,228	
1	Program Pengembangan & Keserasian Kebijakan Pemuda	Presentase kegiatan dalam pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	98.21%	3 keg	475	3 keg	422	3 keg	450	3 keg	540	3 keg	575	15 keg	2,462	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Presentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	97.26%	14 keg (20%)	4,035	13 keg (20%)	3,822	15 keg (20%)	4,695	14 keg (20%)	4,915	14 keg (20%)	5,150	70 keg (100%)	22,617	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Presentase kegiatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	86.36%	4 keg	500	6 keg	531	4 keg	535	5 keg	713	5 keg	930	24 keg	3,209	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Presentase kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	98.21%	11 keg	2,270	13 Keg	4,070	15 keg	4,050	16 Keg	4,665	15 keg	4,500	70 keg	19,555	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Program Peningkatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perencanaan Dan Sarana dan Prasarana Kememudaan dan Keolahragaan	90.00%	26 keg	13,944	22 keg	12,848	30 keg	12,020	35 keg	10,428	28 keg	10,623	175 keg	59,863	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Terbangunnya Stadion Barombong	5%	1 keg10%	25,000	1 keg 40%	24,654	1 Keg 60%	30,000	80% 1 Keg	33,000	1 keg 100%	33,000	1 keg 100%	145,654	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Program Pembinaan Pemuda, Olahraga, Pendidikan dan Seni Budaya	Jumlah Kegiatan dalam peningkatan pembinaan kepemudaan, olahraga dan seni budaya		9 Keg	797	11 keg	831	18 keg	1,340	18 keg	1,400	19 keg	1,500	89 keg	5,868	Biro Bina Kesejahteraan
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18,016		18,258		20,300		21,900		22,000		100,474	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	2.120 RTM	2,280	2,444	2,970	2,528	3,200	1,450	3,430	1,600	3,660	1,450	5,040	9,472	BPMPDK
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	176 BUMDES	226	2922	276	2309	326	2600	376	2800	426	2,900	426 BUMDES	13,531	BPMPDK
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan		1,200	rata-rata 3 klp binaan	850	rata-rata 4 klp binaan	600	rata-rata 5 klp binaan	700	rata-rata 6 klp binaan	600	rata-rata kelompok binaan LPM = 6 klp binaan	3,950	BPMPDK
		Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi)	9,52 % (288 LPM Berprestasi dari 3.024 Total jumlah LPM)	11%	900	11.5%	850	12.5%	700	13.5%	700	14.5%	700	14.52% (720 LPM berprestasi)	3,850	BPMPDK
		Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)	49,51% (759 LSM Aktif dari 1.533 Total LSM)	52.51%	950	55.51%	850	58.51%	700	61.51%	700	64.2%	700	64.2% (984 LSM aktif)	3,900	BPMPDK

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Swasembada	belum ada data desa swasembada	24 kab/kota tersedia data profil	2,200	100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang	2,000	200 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang	2,400	300 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang	2,600	400 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang	2,600	500 desa swasembada	11,800	BPMPDK
		Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya	aparatus desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang	3021	2,300	3,721	2,293	4,421	2,600	5,121	2,800	5,821	2,800	5821 orang	12,793	BPMPDK
5	Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	Jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif	rata-rata kelompok binaan PKK = 2 klp binaan	rata-rata 1 klp binaan	1,650	rata-rata 1 klp binaan	2,200	rata-rata 1 klp binaan	2,200	rata-rata 1 klp binaan	2,400	rata-rata 1 klp binaan	2,400	rata-rata kelompok binaan PKK = 7 klp binaan	10,850	BPMPDK
			97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 PKK)	97,58%		97,69%		97,80%		97,91%		98,02%		PKK Aktif 98,02 %		BPMPDK
			98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu)	99,09%		99,29%		99,49%		99,69%		99,89%		Posyandu Aktif 99,89 %		BPMPDK
6	Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa	Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan Pelatihan pemberdayaan terstandarisasi	4 Modul tersertifikas	4	600	6	600	8	600	10	800	12	800	12 Modul	3,400	BPMPDK
			4 Pelatihan terstandarisasi	1	2,850	26	3,778	37	3,700	48	3,700	59	3,700	59 pelatihan	17,728	BPMPDK
7	Program Pengembangan Pemasarakan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Dan Kelembagaan TTG yang di Bina	12 Posyantekdes	0	-	0	-	28	1,250	38	1,250	38	1,500	38 Posyantekdes	4,000	BPMPDK
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat	22.519 Pokmas	0	0	0	0	25,037	750	27,555	1,000	30,071	1,000	30,071	2,750	BPMPDK
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa Yang di Tingkatkan	360 KPM	-	-	-	-	720	750	1,080	850	1,440	850	1,440	2,450	BPMPDK
KEARSIPAN					7,701	9,841		5,829	5,966	6,282	35,619					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terselamatkannya arsip-arsip /dokumen daerah	2,243	100%	972	100%	1,931	100%	1,450	100%	1,298	100%	1,369	100%	7,020	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terselamatkannya dan lestariannya arsip-arsip statis	727	100%	620	100%	730	100%	690	100%	732	100%	776	100%	3,548	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	Meningkatnya pemeliharaan prasarana kearsipan	2,441	100%	3,231	100%	2,975	100%	1,659	100%	1,775	100%	1,872	100%	11,512	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya arsip	3,945	100%	2,878	100%	4,205	100%	2,030	100%	2,161	100%	2,265	100%	13,539	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
5	Program Layanan Informasi Perpustakaan	Meningkatnya layanan informasi perpustakaan			504										504	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
6	Pembudayaan dan Kegemaran Membaca	Meningkatnya budaya membaca			215										215	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
7	Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan	Peningkatan kualitas sdm			347										347	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
8	Program Sosialisasi/Pemasyarakatan kearsipan	meningkatnya sosialisasi kearsipan			1,099										1,099	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
9	Program Pengembangan Kearsipan	meningkatnya pengembangan kearsipan			1,122										1,122	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
10	Program Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan	meningkatnya pembinaan kelembagaan perpustakaan			454										454	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
11	Program pengembangan SDM Perpustakaan	Meningkatnya sdm perpustakaan			287										287	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
12	Program Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	meningkatnya koservasi bahan pustaka			391										391	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PERPUSTAKAAN				3,635		6,203		4,999		5,285		5,545		25,667	
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penelusuran Info. Bahan Pustaka dengan sistem online	3,989	100%	3,635	100%	6,203	100%	4,999	100%	5,285	100%	5,545	100%	25,667	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,063		8,689		9,207		9,268		9,605		44,832	
1	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	35%	40%	2,810	45%	2,810	50%	2,900	55%	2,950	60%	3,000	60%	14,470	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik yang berbasis elektronik	35%	40%		45%		50%		55%		60%		60%		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang informasi komunikasi	Jumlah Workshop	34	org yang dilatih	64	org yang dilatih	68	40 org yang dilatih	72	org yang dilatih	75	org yang dilatih	77	200 org yang dilatih	356	KPID
3	Program Pengkajian dan penelitian bahan informasi dan komunikasi penyiaran	Persentase Temuan Hasil Monitoring	90	20%	99	15%	159	15%	165	10%	173	10%	175	70%	771	KPID
4	Program Peningkatan Kelembagaan ,Data dan Informasi	Penguatan Kelembagaan	232	2 Tahapan	279		330	1 Tahapan	401		401	1 Tahapan	578	4 Tahapan	1,989	KPID
5	Program kerjasama informasi dengan media massa	Terwujudnya Pembinaan dan Pembentukan Kab/Kota	44	6 Kab/Kota	65	5 Kab/Kota	75	5 Kab/Kota	85	5 Kab/Kota	85	3 Kab/Kota	91	24 Kab/Kota	401	KPID
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Sosialisasi Hasil Monitoring	118	1 Kali	258	1 Kali	365	1 Kali	395	1 Kali	395	1 Kali	395	5 Kali	1,808	KPID
7	Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa	Jumlah Lembaga penyiaran yang berizin	273	10 lembaga	270	10 lembaga	266	10 lembaga	273	10 lembaga	273	10 lembaga	273	50 lembaga	1,355	KPID
8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan Pemprov Sulsel	1,382	100%	2,001	100%	2,220	100%	2,220	100%	2,320	100%	2,370	100%	11,131	Biro Humas dan Protokol Setda
		Tersosialisasinya kegiatan pemerintah Prop. Sulsel di media cetak	2,334	100%	1,633	100%	1,813	100%	2,113	100%	1,913	100%	1,963	100%	9,435	Biro Humas dan Protokol Setda
		Meningkatnya Persentase Penyiapan Bahan Dokumentasi	340	100%	584	100%	583	100%	583	100%	683	100%	683	100%	3,116	Biro Humas dan Protokol Setda
	PANGAN				2,910		5,535		6,055		7,150		7,690		29,339	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pengembangan Pengantaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman (skor Pola Pangan Harapan (PPH))	80,90	80,60	4,687	82,1	3,223	84,1	4,124,000	85,9	4,900,000	87,7	5,200,000	87,7	17,452,062	Badan Ketahanan Pangan Daerah
		Penurunan kasus ketidakamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (% dari Batas Maksimum Residu /BMR)	80,0	80,0		80		80		80		80		80,00	Badan Ketahanan Pangan Daerah	
2	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan	Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%)	90	100	1,628	100	1,314	100	1,029	100	1,300	100	1,500	100	9,095	Badan Ketahanan Pangan Daerah
3	Pengembangan Distribusi dan harga pangan	Ketersediaan Informasi Distribusi, Harga dan Akses Pangan di Daerah	85	90	1,277	100	997	100	902	100	950	100	990	100	7,356	Badan Ketahanan Pangan Daerah
	FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN				28,486		24,063		27,314		30,062		31,591		141,516	
1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya.	Dokumen	Dokumen	2,791	Dokumen	3,166	Dokumen	3,718	Dokumen	4,090	Dokumen	4,466	Dokumen	18,231	Bappeda
2	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan	Dokumen	Dokumen	23,299	Dokumen	18,816	Dokumen	16,789	Dokumen	18,484	Dokumen	19,122	Dokumen	96,510	Bappeda
3	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target RPJMD.	Dokumen	Dokumen	2,396	Dokumen	2,081	Dokumen	2,407	Dokumen	2,648	Dokumen	2,908	Dokumen	12,440	Bappeda
4	Program Kordinasi Pembangunan	Persentase Capaian Kontribusi Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan Nasional.			-		-	Dokumen	4,400	Dokumen	4,840	Dokumen	5,095	Dokumen	14,335	Bappeda
	FUNGSI KEUANGAN				42,456		43,475		49,159		51,669		56,362		243,121	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Penyusunan APBD dan APBD/P, Administrasi Perbendaharaan dan Penggajian, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban, kebijakan tata kelola, bimtek dan monitoring, serta evaluasi, sinkronisasi, perencanaan dan pelaksanaan APBD dan APBD/P dengan baik dan disajikan tepat waktu, koordinasi dan penatausahaan pinjaman yang terkelola dengan baik, terlaksananya sosialisasi peraturan bidang penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, terlaksananya administrasi penyelesaian kerugian daerah dan tindak lanjut hasil temuan serta terlaksananya pengelolaan penatausahaan, penganggaran dan evaluasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial	Penyusunan APBD dan APBD/P, Administrasi Penggajian, Penatausahaan Serta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan APBD/P Sejahtah Ini Telah Terlaksana Dengan Baik dan Disajikan Tepat Waktu. Selain Itu Kegiatan Sosialisasi Mengenai Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Juga Terlaksana Dengan Baik.	100%	20,926	100%	20,056	100%	23,367	100%	24,535	100%	25,188	100%	114,072	BPKD
2	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Fungsi Koordinasi dan Pembinaan Yang Baik Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam Hal Penyusunan APBD dan APBD/P Kabupaten/Kota Serta Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Bidang Evaluasi Kabupaten/Kota.	Pembinaan dan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota Sejahtah Ini Telah Terlaksana Dengan Baik	100%	5,530	100%	4,319	100%	5,032	100%	5,284	100%	5,424	100%	25,589	BPKD
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD minimal 12% per tahun	10 Kegiatan	1000%	2,000	1200%	2,500	1200%	3,000	1400%	3,000	1600%	4,000	6400%	14,500	Dinas Pendapatan Daerah
		Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sekitar 8-10% pe tahun	4 Kegiatan	500%	1,200	500%	1,600	500%	1,850	500%	1,950	600%	2,500	2600%	9,100	Dinas Pendapatan Daerah
		Penurunan jumlah tunggakan pajak daerah	4 Kegiatan	2600%	1,800	2600%	1,900	2600%	2,200	2600%	2,200	3000%	3,000	13400%	11,100	Dinas Pendapatan Daerah
		Persentase peningkatan akurasi data objek dan subjek pajak	5 Kegiatan	5000%	2,500	6000%	2,600	6000%	2,800	6000%	2,850	6000%	3,000	29000%	13,750	Dinas Pendapatan Daerah
		Tertib administasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Benda-Benda Berharga	3 Kegiatan	300%	800	400%	1,200	400%	1,500	400%	1,600	400%	1,700	1900%	6,800	Dinas Pendapatan Daerah
		Perda/Juklak/ Juknis di bidang Pendapatan	3 Kegiatan	300%	900	300%	1,000	300%	1,250	300%	1,450	300%	1,650	1500%	6,250	Dinas Pendapatan Daerah
		Meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat tentang Pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya	27 Kegiatan	3000%	2,200	3000%	2,250	3000%	2,300	3000%	2,350	3000%	2,500	15000%	11,600	Dinas Pendapatan Daerah
		peningkatan akurasi data pendapatan daerah	6 Kegiatan	600%	1,200	600%	1,300	600%	1,400	600%	1,800	1000%	2,000	3400%	7,700	Dinas Pendapatan Daerah
		penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan	30 Kegiatan	3000%	2,500	3000%	2,500	3000%	2,600	3000%	2,700	3200%	2,800	15200%	13,100	Dinas Pendapatan Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program Peningkatan aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001-2000; system pelayanan pajak berbasis web, pembayaran pajak langsung ke bank yang ditunjuk	2 Drive Thru	200%	150	200%	250	100%	350	100%	450	200%	600	800%	1,800	Dinas Pendapatan Daerah
			2 Gerai Samsat	100%	200	1400%	300	200%	300	200%	400	300%	500	2200%	1,700	Dinas Pendapatan Daerah
			2 Samsat Keliling	200%	250	300%	400	500%	150	500%	150	500%	200	500%	1,150	Dinas Pendapatan Daerah
			17 ISO 9001-2000	300%	150	400%	200	2400%	300	2400%	400	2400%	500	2400%	1,550	Dinas Pendapatan Daerah
			1 Sistem Pelayanan Berbasis Desktop			100%	1,000	100%	500	100%	250	100%	350	100%	2,100	Dinas Pendapatan Daerah
			1 Sistem Elektronik Tax Paiment					100%	150	100%	150	100%	150	100%	450	Dinas Pendapatan Daerah
			1 Sms Info Pajak	100%	150	100%	100	100%	110	100%	150	100%	300	100%	810	Dinas Pendapatan Daerah
	FUNGSI KEPEGEWAIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN				21,461		23,171		24,515		27,455		27,864		124,466	
1	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah test seleksi pendidikan kedinasan	6 kali	6 kali	980	6 kali	795	6 kali	1,050	6 kali	1,250	6 kali	1,100	30 kali	5,175	BKD
2	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional		605 org	9,628	750 org	11,238	750 org	6,950	630 org	8,180	750 org	6,670	3.485 org	42,666	Badan Diklat
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tercapainya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur	8 Keg	10 keg	1,420	10 keg	1,254	10 keg	2,720	10 keg	3,280	10 keg	4,120	10 keg	12,794	Badan Diklat
		Jumlah pelamar CPNS formasi umum Pemprov.Sulsel serta jumlah tenaga honorer yang menjadi CPNS	9.000 orang dan 1.256 orang	dan 348 orang	4,515	dan 897 orang	4,218	9.700 orang	5,535	9.800 orang	5,677	9.900 orang	6,505	48.500 orang	26,450	BKD
		Jumlah peningkatan kesejahteraan PNS Pemprov.Sulsel melalui pemberian penghargaan dan penganugerahan satya lancana karya satya 10,20 dan 30 tahun serta pelepasan PNS purna tugas,santunan kepada keluarga PNS yang meninggal dunia,fasilitasi check kesehatan bagi PNS dan keluarganya	903 orang	1.110 orang		1.110 orang		843 orang		878 orang		1.154 orang		5.915 orang		BKD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T		Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen PNS serta regulasi kepegawaian	4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan		BKD
		Pengembangan dan pemeliharaan SIMPEG dan arsip kepegawaian serta Sistem Manajemen Dokumen Digital Arsip Kepegawaian serta jaringan dan website BKD	1(satu) software SIMPEG BKD Pemprov.Sulsel dan website BKD/1 tahun	Pengembangan SIMPEG BKD Pemprov.Sulsel berbasis WEBSITE dan tersedianya perangkat keras		Teroperasionalkannya software SIMPEG rilis baru, tersedianya peralatan penunjang,		Pemeliharaan SIMPEG, tersedianya peralatan penunjang, terduduknya 80 org arsiparis serta		Pemeliharaan SIMPEG, tersedianya peralatan penunjang serta pemeliharaan jaringan dan		Pemeliharaan SIMPEG, tersedianya peralatan penunjang serta pemeliharaan jaringan dan		Data PNS yang mutakhir dan ter update, tersedianya data arsip kepegawaian digital pada 46 SKPD, terduduknya 80 org		BKD
		Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima	14.500 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti /Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi	14.600 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi		13.890 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi		14.507 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi		14.707 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi		14.800 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi		72.504 SK/KGB/Bh/Nota pertimbangan/Cuti/Izin/PMK/surat tanggapan/surat persetujuan/nota usul/pernyataan persetujuan/rekomendasi		BKD
		Jumlah penataan, evaluasi kompetensi dan kelayakan pejabat struktural Pemprov.Sulsel/ pembangunan assessment center Pemprov.Sulsel	12 kali /Terlaksananya test calon assesor Pemprov.Sulsel	12 kali/Terlaksananya pelatihan assesor bagi 12 org calon assesor yang memenuhi		12 kali/dibuatnya 1 (satu) modeln assesmen bagi PNS/pejabat/calon pejabat sesuai dengan		14 kali/ 1) Disusun sistem & prosedur manajemen serta struktur organisasi pengelola		14 kali/ 1) Terlaksananya pelatihan asesor bagi 6 org calon asesor yang memenuhi syarat dan		14 kali/ 1) Terlaksananya pelatihan asesor bagi 6 org calon asesor yang memenuhi syarat dan		75 kali/ Terbangunnya Assessment Center Pemprov.Sulsel		BKD
4	Program peningkatan kapasitas profesionalitas SDM	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber daya manusia		40 org	1,000	40 org	929	40 org	1,000	40 org	1,000	40 org	1,000	200 org	4,929	Badan Diklat
5	Program penataan dan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka Reformasi Birokrasi	Terwujudnya fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas Pemerintah dalam kerangka Reformasi Birokrasi	17 Kegiatan	17 Kegiatan	2,754	25 Kegiatan	2,988	25 Kegiatan	3,835	25 Kegiatan	4,423	25 Kegiatan	4,514	134 Kegiatan	18,514	Biro Organisasi dan Kepegawaian
6	Program Penguatan Jiwa Korps Anggota KORPRI	Meningkatnya Kapasitas Jiwa Korps	1,000	700 orang	45	700 org	30	700 orang	60	700 orang	75	700 orang	115	3500 org	325	KORPRI
7	Program peningkatan Kapasitas Sehat Jasmani Anggota KORPRI	Terwujudnya peningkatan Jumlah/Persentase anggota Korpri Yang Terfasilitasi mengikuti Orientasi, Senam Sehat, PORKORPRI dan PORNAS	Tekirimnya 28 Orang Kontingen Hasil Seleksi Atlik pada Ajang PORNAS KORPRI	100 org	30	264 Org	31	274 Org	320	160 Org	470	304 Org	370	1102 org	1,221	KORPRI

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Program peningkatan kapasitas apresiasi nilai-nilai seni budaya Anggota KORPRI	Meningkatnya Jumlah Anggota Korpri Povinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam peningkatan Kapasitas apresiasi Nilai Seni Budaya dan wawasan Korpri	Partisipasi 50 Anggota Korpri Pada Peningkatan kualitas Seni budaya lokal	150	25	1,950	63	1,975	330	2,003	345	2,028	430	8,106	1,193	KORPRI
9	Program Peningkatan Kapasitas Mental Kerohanian Anggota KORPRI	Meningkatnya pembinaan Mental kerohanian, Kualitas Iman dan cinta Al-Quran serta Pemahaman KDRT Anggota KORPRI	50 Orang	120	469	355	996	390	460	475	365	500	570	1,840	2,860	KORPRI
10	Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI	Terwujudnya Penyelenggaraan Bantuan hukum bagi anggota KORPRI	4 orang	2 orang (50%)	463	1kgt	174	1kgt	700	1	750	1	700	1	2,787	KORPRI
11	Program Pengembangan Usaha Kesejahteraan Anggota KORPRI	Terwujudnya pengembangan usaha dan Pelayanan kesejahteraan bagi seluruh anggota Korpri termasuk yang kurang mampu maupun yang kena musibah/kematian	50 Org, 103 m2	1 kgt	132	4 kgt	351	4 kgt	1,325	4 kgt	1,350	4 kgt	1,400		4,558	KORPRI
12	Program Pengarusutamaan Gender dalam Lingkungan KORPRI	Terwujudnya Peningkatan Apresiasi Gender Bagi Anggota Korpri	Terwujudnya 100% sikap positif 50 orang alumni orientasi terhadap peran gender	-	-	100 org	17	110 org	80	120	90	125	115	455 org	302	KORPRI
13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat DP.KORPRI	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesekretariat KORPRI	Tersedianya DP KORPRI Defenitif Se Sulsel	-	-	10 Kab/Kota 6 unit Prov.	87	12 Kab/Kota 6 unit Prov	150	7 Kab/Kota 4 unit KORPRI	200	5 Kab/Kota 3 unit Prov	255	24 Kab/Kota 54 unit Prov	692	KORPRI
	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5,161		5,313		5,790		7,244		7,541		31,049	
1	Program pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa)	Jumlah Inovasi	4 inovasi	1 Inovasi	2,373	1 inovasi	2,395	2 inovasi	2,040	2 inovasi	2,956	2 inovasi	3,227	8 inovasi	12,991	Balitbangda
2	Program penelitian, pengembangan dan pemanfaatan SDM dan IPTEK daerah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	11 litbang	8 litbang	2,788	8 litbang	2,918	8 litbang	3,750	8 litbang	4,288	8 litbang	4,314	40 litbang	18,058	Balitbangda
	FUNGSI PEMERINTAHAN				106,524		115,201		149,078		148,296		159,601		678,700	
1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya Pengaturan Acara/Kegiatan pimpinan Pemprov Sulsel	91700%	100%	964	100%	947	100%	1,097	100%	1,097	100%	1,147	100%	5,252	Biro Umum dan Perlengkapan Setda
		Meningkatnya Jumlah Pelayanan Tamu Dinas Pemprov	61300%	Pelayanan Tamu	764	Pelayanan Tamu	697	0 Pelayanan Tamu	947	Pelayanan Tamu	847	Pelayanan Tamu	897	2100 Pelayanan Tamu	4,152	Biro Humas dan Protokol Setda
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Pemeliharaan,Perbaikan Sarana informasi			1,278		977		1,177		1,177		1,177		5,786	Biro Humas dan Protokol Setda

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terpelihara dan terkelolanya sistem informasi manajemen	67293000		-		-		-		-		-	100%		Biro Humas dan Protokol Setda
		Tercapainya layanan internet	800421000		-		-		-		-		-	100%		Biro Humas dan Protokol Setda
		Terlaksananya Pengembangan Jaringan Internet	182285000	100%	855	100%	606	100%	456	100%	681	100%	681	100%		Biro Humas dan Protokol Setda
		Terpenuhinya Data Internal dan Eksternal		100%	179	100%	152	100%	327	100%	227	100%	227	100%		Biro Humas dan Protokol Setda
3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan	Terlaksananya tertib administrasi dan kemitraan antar lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah	490	100%	1,045	100%	1,480	100%	3,100	100%	3,204	100%	3,355	100%	12,184	Biro Pemerintahan Daerah
4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Tata Pemerintahan Daerah Otonomi yang Baik		24 Kab/Kota	530	24 Kab/Kota	520	24 Kab/Kota	950	24 Kab/Kota	950	24 Kab/Kota	950	24 Kab/Kota	1,371	Biro Pemerintahan Daerah
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Monitoring peningkatan kerjasama	190	24 KAB/KOTA	400	24 KAB/KOTA	450	24 KAB/KOTA	450	24 KAB/KOTA	473	24 KAB/KOTA	496	24 KAB/KOTA	2,269	Badan Lintas Kabupaten dan Kota
6	Program Peningkatan Pemahaman Produk Hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan	Persentase kegiatan sosialisasi/bintek terkait pembentukan produk hukum.	100%	100%	1,206	100%	755	100%	985	100%	1,000	100%	1,050	100%	4,996	Biro Hukum dan HAM
7	Program peningkatan sistem legislasi daerah	Jumlah rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	11 Perda, 1946 Kepgub, 69 Pergub, dan 53 Mou	gub, dan 15 Mou	528	gub, dan 15 Mou	1,637	gub, dan 15 Mou	2,040	gub, dan 15 Mou	2,100	gub, dan 15 Mou	2,150	6 Kepgub, 250 Pergub	8,455	Biro Hukum dan HAM
8	Program usaha jasa pembangunan	Terkoordinasi pelaksanaan pembinaan usaha jasa pembangunan di sulawesi selatan	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki IUJK	a pembangunan	1,414	a pembangunan	1,373	asa pembangunan	3,200	a pembangunan	3,350	a pembangunan	3,500	asa Pembangunan, 3). I	12,837	Biro Bina Pembangunan Setda
9	Program koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan	Terwujudnya tertib administrasi pembangunan	18 laporan/ Dokumen	boran/ dokumen	4,519	boran/ dokumen	3,138	aporan/ dokumen	7,428	boran/ dokumen	8,542	boran/ dokumen	9,379	192 laporan/ dokumen	33,006	Biro Bina Pembangunan Setda
10	Program peningkatan kualitas produk hukum daerah	Persentase kab/kota yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukumnya, pembinaan PPNS dan penataan dokumentasi hukum	100%	100%	882	100%	1,073	100%	1,420	100%	1,600	100%	1,700	100%	6,675	Biro Hukum dan HAM
11	Program peningkatan kualitas produk hukum daerah	Persentase Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total jumlah pelanggaran	20%	20%	681	20%	966	20%	1,392	20%	1,392	20%	1,392	100%	5,823	Satpol PP
12	Program penyebarluasan produk hukum daerah	Persentase orang/SKPD yang diberikan pelayanan terkait penyebarluasan produk hukum.	100%	100%	174	100%	-	100%	100	100%	100	100%	100	100%	474	Biro Hukum dan HAM

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Program peningkatan dan penegakan hukum & HAM dalam rangka pemantapan advokasi dan pengamanan yuridis kerov.bijakan pemerintahan	Persentase tercapainya penegakan hukum dan perlindungan HAM	30 Perkara	100%	975	100%	1,294	100%	1,050	100%	1,400	100%	1,500	100%	6,219	Biro Hukum dan HAM
14	Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Ibadah Haji	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Selatan	4 araan ibadah haji Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji		700		695		700		840		870	sosialisasi penyelengga	3,805	Biro Bina Mental Spiritual Setda
15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulsel	WTP		8,072		9,190		9,982		10,858	WTP	12,009	WTP	50,111	Inspektorat
		b. Penanganan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terhadap LKPD Prov Sulsel	552 / 653 atau 84,53%	86%		87%		87%		88%		88%		88%		Inspektorat
		c. Hasil EKPPD PemProv. Sulsel secara nasional	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Inspektorat
		d. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel	C (Kurang)	C (Kurang)		CC (Cukup)		CC (Cukup)		CC (Cukup)		B (Baik)		B (Baik)		Inspektorat
16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Semakin meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme aparat pengawasan	6 Kali PKS=300 Orang , 14 Orang Diklat Fungs., 4 angk. Bintek=160 Orang	teknik=160 Orang	873	teknik=160 Orang ,	934	teknik=240 Orang	2,457	teknik=240 Orang	1,051	teknik=240 Orang	1,175	107 Orang Diklat , 8	6,490	Inspektorat
17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi	2 Kebijakan	4 Kebijakan	28	4 Kebijakan	29	4 Kebijakan	30	4 Kebijakan	31	4 Kebijakan	35	4 Kebijakan	153	Inspektorat
18	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dimanfaatkannya web site Inspektorat sebagai media informasi pengawasan	1 tahun	1 Tahun	51	1 Tahun	53	1 Tahun	55	1 Tahun	75	1 Tahun	100	1 Tahun	334	Inspektorat
19	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan	100%	100%	600	100%	630	100%	650	100%	675	100%	750	100%	3,305	Inspektorat
20	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Skpd PROV	Zona Integritas	Zona Integritas	660	a WBK/WBBM	756	erja WBK/WBBM	848	a WBK/WBBM	1,040	a WBK/WBBM	1,314	Unit Kerja WBK/WBBM	4,618	Inspektorat
		b. Pendampingan pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota	-	Inspektorat
21	Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar Daerah,Provinsi	Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan dan Terfasilitasinya Konflik-Konflik Pertanahan di Prov. Sulsel dan Terwujudnya Penegasan Batas Wilayah/Administrasi Pemerintahan	73000%	2 Keg	861	2 Keg	1,508	6 Keg	1,860	6 Keg	1,846	6 Keg	1,767	22 Keg	7,842	Biro Pemerintahan Umum Setda

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa	115600%	3 Keg	2,227	3 Keg	2,659	5 Keg	2,865	5 Keg	2,961	5 Keg	3,259	21 Keg	13,971	Biro Pemerintahan Umum Setda
23	Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	72800%	6 Keg	1,721	6 Keg	3,087	10 Keg	3,695	10 Keg	3,719	10 Keg	4,091	42 Keg	16,313	Biro Pemerintahan Umum Setda
24	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Prosentase pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan public	90%	20%	3,811	20%	2,988	20%	3,148	20%	3,441	20%	3,763	100%	17,151	Sekretariat DPRD
25	Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Jumlah MoU /PKS yang difasilitasi, jumlah kerjasama dipantau/ di Monev pelaksanaannya dalam kerangka BKPRS serta kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga	71 MoU/PKS, 30 Kerjasama yang dipantau pelaksanaannya	50 Mou/PKS	1,718	50 Mou/PKS	2,089	50 Mou/PKS	2,289	50 Mou/PKS	2,489	50 Mou/PKS	2,489	321 Mou/PKS	11,074	Biro Kerjasama
26	Program Pengembangan Kerjasama Kawasan Andalan	Jumlah Kerjasama Kabupaten/Kota yang efektif terfasilitasi dan terkoordinasikan dalam pengembangan kawsan andalan	5 Mou	1 Mou	670	1 Mou	937	1 Mou	1,237	1 Mou	1,437	1 Mou	1,437	10 Mou	5,718	Biro Kerjasama
27	Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah kerjasama "Sister city"	2 Kab/Kota	1 Kab/Kota	865	1 Kab/Kota	1,151	1 Kab/Kota	1,451	1 Kab/Kota	1,451	1 Kab/Kota	1,651	7 Kab/Kota	6,569	Biro Kerjasama
		Jumlah kerjasama dengan lembaga internasional	6 Mou	1 Mou		1 Mou		1 Mou		1Mou		1 Mou		11 Mou		Biro Kerjasama
		Jumlah Kerjasama antar provinsi dalam berbagai bidang dengan provinsi lain di luar negeri	1 Mou	1 Mou		1 Mou		1 Mou		1 Mou		1 Mou		5 Mou		Biro Kerjasama
28	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat kelancaran dan kualitas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD		20%	46,345	20%	46,148		-		-		-		-	Sekretariat DPRD
29	Program Produk Hukum Daerah	Tersedianya produk hukum daerah						20%	25,222	20%	27,780	20%	30,596	100%	83,598	Sekretariat DPRD
30	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan						20%	13,683	20%	14,544	20%	15,193	100%	43,420	Sekretariat DPRD
31	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						20%	7,650	20%	8,425	20%	9,280	100%	25,355	Sekretariat DPRD
32	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya data dan informasi mengenai Aspirasi Masyarakat						20%	14,995	20%	17,041	20%	19,064	100%	51,100	Sekretariat DPRD
33	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Akses informasi harga pangan strategis	10 komoditi pada 1 Kab/Kota	ada 2 Kab/Kota	250	ada 2 Kab/Kota	150	pada 4 Kab/Kota	250	ada 5 Kab/Kota	305	ada 5 Kab/Kota	350	komoditi pada 5 Kab/Kota	1,305	Biro Bina Perekonomian Setda

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Program Pengembangan perekonomian daerah	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah dalam mewujudkan daya saing ekonomi yang berbasis pengelolaan SDA	Pertumbuhan ekonomi / Inflasi Daerah	>8% / 4,5%±1	3,816	>8% / 4,5%±1	2,403	>8% / 4,5%±1	3,452	>8% / 4,5%±1	3,557	>8% / 4,5%±1	3,655	>8% / 4,5%±1	16,883	Biro Bina Perekonomian Setda
35	Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi	Berkembangnya kelembagaan ekonomi Kab/Kota		24 Kab/ Kota	1,242	24 Kab/ Kota	643	24 Kab/ Kota	1,150	24 Kab/ Kota	1,175	24 Kab/ Kota	1,238	24 Kab/ Kota	5,448	Biro Bina Perekonomian Setda
36	Program peningkatan koordinasi kelembagaan/kemasyarakatan	Teridentifikasinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kelembagaan kemasarakatan	25500%	2000%	350	1000%	450	2000%	363	2000%	381	2000%	400	10000%	1,944	Badan Lintas Kabupaten dan Kota
37	Program peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota	Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah kerja	27400%	2000%	420	2000%	550	2000%	373	2000%	392	2000%	411	10000%	2,146	Badan Lintas Kabupaten dan Kota
38	Program peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan antar sektor pemerintah di kabupaten dan kota	Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor dalam wilayah kerja	27400%	2000%	450	2000%	560	2000%	374	2000%	393	2000%	412	10000%	2,189	Badan Lintas Kabupaten dan Kota
39	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama daerah	651300%	100%	5,200	100%	9,713	100%	10,940	100%	3,900	100%	4,000	100%	33,753	Kantor Penghubung
40	Program Fasilitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan tamu daerah	651300%	100%	7,200	100%	9,713	100%	10,940	100%	7,900	100%	8,000	100%	43,753	Kantor Penghubung
41	Program peningkatan penanggulangan NAPZA dan HIV/ AIDS	Meningkatnya upaya kemitraan, pencegahan dan penanggulangan serta rehabilitasi kasus NAPZA dan HIV/AIDS di Sulawesi Selatan	19 Keg	21 Keg	2,000	22 Keg	2,100	24 Keg	2,300	26 Keg	2,450	28 Keg	2,590	28 Keg	11,440	Biro Bina NAPZA dan HIV-AIDS
III	URUSAN PILIHAN				320,781		316,868		367,711		394,293		425,557		1,825,210	
	PERTANIAN				194,998		167,994		209,279		218,771		232,728		1,023,771	
1	Peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan	Volume Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Ton)	391,831	362,989	30,025	382,167	31,042	459,370	32,928	528,597	34,148	561,869	36,345	561,869	164,488	Dinas Perkebunan
		Produktifitas Kmoditi Unggulan Perkebunan (Kg/ha)	1,038	1,030		1,036		1,043		1,050		1,055		1,055		Dinas Perkebunan
		Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (triliun)	7,473,523	9,032		9,671		122,272		15,977		16,650		16,650		Dinas Perkebunan
																Dinas Perkebunan
2	Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran hasil Perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan Hasil yang dimanfaatkan	9	12	6,178	20	6,388	25	6,776	30	7,027	35	7,479	35	33,848	Dinas Perkebunan
		2. Volume Ekspor Komoditi perkebunan (ton)	98,465	104,619		117,999		139,973		143,442		150,699		150,699		Dinas Perkebunan
		3. Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan (US\$)	205,198	255,525		289,048		343,716		352,959		372,240		372,240		Dinas Perkebunan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T		Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurun, Terkendali dan Tertanggulangnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis, Parasiter dan Penyakit Zoonosis	44.116 Kasus	43.621 Kasus	2,534	42.966 Kasus	3,515	42.322 Kasus	3,650	41.688 Kasus	4,000	41.063 Kasus	4,400	41.063 Kasus	18,099	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			- Presentase Jumlah Sapi sakit yang di obati dalam satu tahun	95%		95%		95%		97%		97%		97%		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak	Populasi :		19,408		22,380		24,861		26,415		27,400		120,464	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Sapi potong 1.128.306 ekor	1.232.800 ekor		1.347.080 ekor		1.471.954 ekor		1.608.404 ekor		1.870.542 ekor		1.870.542 ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Sapi perah 1.426 ekor	2.295 ekor		2.544 ekor		2.821 ekor		3.346 ekor		3.708 ekor		3.708 ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Kerbau 100.831 ekor	108.504 ekor		111.684 ekor		115.086 ekor		120.272 ekor		125.830 ekor		125.830 ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Kuda 156.545 ekor	172.590 ekor		181.220 ekor		190.281 ekor		199.795 ekor		209.785 ekor		209.785 ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Ternak Kecil 1.175.924 ekor	1.258.824 ekor		1.303.579 ekor		1.350.713 ekor		1.400.365 ekor		1.452.681 ekor		1.452.681 ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Unggas 53.377.612 ekor	61.085.911 ekor		65.378.117 ekor		69.983.075 ekor		74.924.539 ekor		80.228.191 ekor		80.228.191 ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Produksi daging 41.742.926 kg	46.871.956 Kg		49.739.830 Kg		52.860.387 Kg		56.259.158 Kg		59.964.362 Kg		59.964.362 Kg		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Produksi Telur 82.654.476 Kg	110.558.073 Kg		120.102.531 Kg		130.510.754 Kg		141.863.678 Kg		154.250.005 Kg		154.250.005 Kg		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Produksi Susu 2.897.820	3.511.350 Kg		3.890.790 Kg		4.316.130 Kg		5.120.910 Kg		5.673.240 Kg		5.673.240 Kg		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah Pelaku Usaha Agribisnis dan Agroindustri Peternakan	2.299 Pelaku Usaha	3.232 Pelaku Usaha	2,784	3.395 Pelaku Usaha	2,987	3.566 Pelaku Usaha	3,400	3.744 Pelaku Usaha	3,530	3.931 Pelaku Usaha	3,800	3.931 Pelaku Usaha	16,501	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan kelompok peternakan yang menggunakan teknologi tepat guna dan IB	112 Kelompok	8.000 kelahiran dan 24 Kelompok	1,494	15.000 kelahiran dan 28 Kelompok	2,027	20.000 kelahiran dan 32 Kelompok	5,000	25.000 kelahiran dan 35 Kelompok	5,150	30.000 kelahiran dan 38 Kelompok	5,921	98.000 kelahiran dan 157 Kelompok	19,592	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T		Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi, produktivitas dan nilai produksi tanaman pangan utama (ton)			40,287		28,243		36,200		37,597		40,075		182,403	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<u>Produksi (ton)</u>	ATAP 2013 :													Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Padi	5,035,831	5,337,981	5,658,260	5,997,755	6,357,621	6,739,078	6,739,078.03							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jagung	1,250,203	1,331,466	1,418,011	1,510,182	1,608,344	1,712,886	1,712,886.21							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Kedelai dan Palawija lainnya	45,693	47,978	50,377	52,896	55,541	58,318	58,317.56							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<u>Produktivitas (Kw/Ha)</u>	ATAP 2013 :													Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Padi	51.22	52.25	53.30	54.36	55.45	56.56	56.6							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jagung	45.62	47.51	48.22	48.95	49.68	50.43	50.4							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Kedelai dan Palawija lainnya	14.77	14.99	15.21	15.44	15.67	15.91	15.91							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<u>Nilai Produksi (Rp.000.000)</u>	Hasil ATAP 2012													Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Padi	21,024,594	22,286,071	23,623,235	25,040,629	26,543,067	28,135,651	28,135,651							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jagung	2,812,957	2,995,799	3,190,525	3,397,910	3,618,774	3,853,994	3,853,994							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Kedelai dan Palawija lainnya	342,698	359,835	377,827	396,718	416,554	437,382	437,382							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura	Produksi komoditas hortikultura (ton)			20,964		27,911		28,050		29,133		31,053		137,110	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<u>Produksi (ton)</u>	ATAP 2012 :													Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Komoditas hortikultura	134,691	137,398	138,772	140,160	141,561	142,977	142,977							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<u>Nilai Produksi (Rp.000.000)</u>														Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Komoditas hortikultura	1,733,026	1,767,856	1,785,535	1,803,392	1,821,422	1,839,639	1,839,639							Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Program Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Pengembangan Agribisnis, dan Penyebaran Informasi	Penanganan pasca panen, pengolahan hasil, standarisasi, pelayanan pengawasan mutu hasil, promosi dan pemasaran hasil			10,465		8,618		12,664		13,168		14,054		58,969	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen	Tingkat kehilangan hasil Padi 9,96% dan jagung 7,0	turun 0,25 %		turun 0,25 %		turun 0,25 %		turun 0,25 %		turun 0,25 %		Tingkat kehilangan hasil Padi 8,71 % dan jagung 5.75		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agribisnis dengan efektif	SL PUA 8 klp	10 klp		15 klp		20 klp		25 klp		30 klp		100 klp yg telah mengikuti SL PUA		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan alsin, Cakupan ketersediaan jaringan irigasi, Cakupan ketersediaan sarana produksi pertanian			41,996		20,375		32,500		33,755		35,979		164,605	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Ketersediaan alat dan mesin pertanian	229.159 unit	236,034		243,115		250,408		257,920		265,658		265.658 unit		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Ketersediaan jaringan irigasi	70,699 Ha	74,234		77,946		81,843		85,935		90,232		90,232 Ha		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Ketersediaan pupuk	467.800 Ton	481,834		496,289		511,178		526,513		542,308		542.308 ton		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
13	Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan	- Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan	0	0	0	1	200	1	250	1	250	1	250	1 perda	950	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Program Penyediaan Benih Bermutu Pengendalian OPT dan Statistik Pertanian	Persentase serangan OPT yang menurunkan nilai produksi dibawah ambang ekonomi, Prosentase Penggunaan Benih Bersertifikat yang Bersumber dari Penangkar lokal, serta pelayanan data dan informasi statistik pertanian			5,658		5,047		6,500		6,751		7,196		31,151	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Prosentase serangan OPT	5.20%	5.00%		4.80%		4.60%		4.40%		4.20%		4.20%		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Prosentase penggunaan benih Padi	63.18%	64.68%		66.18%		67.68%		69.18%		70.68%		70.68%		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Kualitas pelayanan data dan informasi statistik pertanian	65.00%	70.00%		75.00%		80.00%		85.00%		90.00%		90.00%		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	Program Fasilitas Prasarana dan Sarana Berbantuan	Fasilitas prasarana dan sarana berbantuan dalam dan luar negeri			5,771.29		5,701.18		10,300.00		10,697.58		11,402.55		43,872.600	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Fasilitas Prasarana dan sarana berbantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Fasilitas kegiatan berbantuan loan WISMP	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah kecamatan yang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) berbasis teknologi informasi, memiliki demplot terintegrasi pertanian, perikanan dan kehutanan	BP3K = 117 Unit	BP3K = 35 Unit	1,400.00	BP3K = 50 Unit	2,113.40	BP3K = 50 Unit	2,200.00	BP3K = 70 Unit	3,150.00	BP3K = 75 Unit	3,375.00	BP3K = 280 Unit	12,238	Bakorluh
19	Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan	Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang fokus mendampingi petani miskin melalui paket kreatif penyuluh	0	300 Orang	3,611.35									#VALUE!	3,611	Bakorluh
		Jumlah pelayanan sistem informasi penyuluhan melalui cyber extension (Gedung Sulsel Sayang Penyuluh Centre) yang terbangun di provinsi	Belum ada gedung perkantoran Bakorluh, jumlah perangkat cyber extension di provinsi 2 unit		-			Pembangunan 1 Gedung Sulsel Sayang Penyuluh Centre	2,500.00	Pembangunan lanjutan	2,500.00	Pembangunan lanjutan	2,500.00	1 Gedung Sulsel Sayang Penyuluh Centre, dan pusat Sistem Informasi Penyuluhan melalui Cyber Extension	7,500	Bakorluh
20	Program Pemberdayaan Ketenagaan Penyuluhan	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	-Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang akan mengikuti diklat dasar dan teknis = 2242 orang penyuluh	910	1,625.30	1,170	1,445.21	1,000	1,500.00	1,000	1,500.00	1,000	1,500.00	5,080	7,571	Bakorluh
		Jumlah penyuluh pertanian dan THL-TB PP yang diberikan pakain kerja penyuluh	Jumlah Penyuluh pertanian yang belum mendapatkan pakaian kerja 1718 orang, THL-TB PP 937 orang	1,331	798.60	-	-	0	-	0	-	0	-	1,331	799	Bakorluh

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KEHUTANAN				20,559		18,503		20,993		22,178		23,717		105,951	
1	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan (M3)	175,327	192,860	4,152	212,146	4,161	233,360	4,100	256,696	3,500	282,366	4,000	282,366	19,913	Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu (Ton)	2,309	2,437		2,309		2,564		2,692.02		2,947		2,947		Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi pangan dalam hutan (Ton)	-	-		-		10.00		15		25		50		Dinas Kehutanan
2	Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan	59.56	59.56	1,438	55.65	2,316	55.65	2,700	55.65	4,120	55.65	4,217	55.65	14,791	Dinas Kehutanan
		Terbentuknya KPH	1	-		-		3.00		3.00		1.00		7.00		Dinas Kehutanan
3	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	luas lahan kritis sebesar 525.885,28 ha	497,885	12,820	469,885	9,724	441,885	11,193	413,885	11,000	395,885	11,500	luas lahan kritis sebesar 395.885,28 ha	56,237	Dinas Kehutanan
4	Program Perlindungan Hutan & Konservasi Sumberdaya Alam	Luas kebakaran hutan yang dikendalikan (Ha)	399.76	379.78	2,149	360.79	2,303	342.75	3,000	325.61	3,558	309.33	4,000	309.33 ha	15,010	Dinas Kehutanan
		Jumlah illegal logging yang tertangani (M3)	111.19	105.63		100.35		95.33		90.56		86.04		86,04 m3		Dinas Kehutanan
	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				18,713		15,286		17,641		19,057		20,365		91,062	
1	Program Keadulatan Energi	Ratio Desa Berlistrik	87,02	89,22	10,129	91	8,491	93	10,532	95	10,650	97	11,085	97	50,887	ESDM
		Jumlah Bio Energi yang dibangun	7	200		270		460		500		550		1,987		ESDM
2	Pemetaan dan Penyelidikan Geologi, Sumberdaya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi serta Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah	Cadangan Sumberdaya (Ton)	537,220,000	338,830,000	5,751	250,000,000	4,396	275,000,000	5,334	300,000,000	5,900	325,000,000	6,335	2,026,050,000	27,716	ESDM
		Jumlah Pembangunan Sumur Bor	19	13		8		15		15		15		85		ESDM
		Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)	13,503	2,538		5,000		5,000		5,000		5,000		36,041		ESDM
3	Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Konservasi Pertambangan dan Mineral	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara			2,833.00		2,399.00		1,775		2,507.00		2,945.00		12,459.00	ESDM
		Logam (Ton/M ³)	81,863,938	68,905,773		85,957,134		90,254,991		94,767,741		99,506,128		521,255,705		ESDM
		Non Logam (Ton/M ³)	6,939,349	4,196,969		7,286,316		7,650,632		8,033,163		8,434,822		42,541,251		ESDM
		Batuan (Ton/M ³)	22,318,029	7,450,776		23,433,930		24,605,626		25,835,908		27,127,703		130,771,972		ESDM
		Batubara (Ton/M ³)	16,680,624	1,299		17,514,655		19,390,387		19,309,907		20,275,402		93,172,274		ESDM
	PARIWISATA				15,083		13,478		15,084		19,292		23,235		86,172	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara		5,920,528	3,636	5,500,000	3,672	5,750,000	4,223	6,000,000	5,265	6,250,000	6,818	6,250,000	23,615	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 106.584 kunjungan	151,763	1,400	160,000	1,713	175,000	1,970	185,000	2,991	200,000	4,521	200,000	12,594	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi pariwisata menjadi destinasi unggulan	Jumlah destinasi pariwisata unggulan di Sulsel sebanyak 2 destinasi	2	5,584	3	5,940	3	6,631	4	8,753	4	8,841	4	35,748	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
3	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan penyelenggara event wisata	Jumlah event / pihak yang bermitra sebanyak 28 event	28	2,063	28	2,153	28	2,260	28	2,283	28	3,056	140	11,814	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
5	Program Pengembangan Pariwisata berbasis Ekonomi Kreatif MDI (Media, Desain dan Iptek)	Meningkatnya jumlah unit usaha sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek	1. Pengemasan produk kerajinan khas Sulsel (keg.)	2	450	2	455	2	477	2	482	2	487	10	2350.539473	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
			2. Supporting sentra kreasi garmen khas Sulsel (keg.)	1	450	1	455	2	477	2	482	2	487	8	2350.539473	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya	Kontribusi Jumlah pelaku kreatif yang memperoleh peningkatan jejaring melalui festival film nasional (orang)	Pengembangan industri perfilman (rumah produksi)	2	1,500	2	1,515	2	1,591	2	1,607	2	1,623	10	7,835	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
KELAUTAN DAN PERIKANAN					47,742		48,714		48,524		50,900		53,030		248,910	
1	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan (pulau)	2	4	1,500	6	1,575	8	8,000	10	9,000	12	9,525	12	29,600	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	838,260.63	83,825.00		92,207.50		101,428.25		111,571.08		122,728.18		1,350,019.13		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	195,403	213,403		232,946		244,593		256,240		267,887		267,887		Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan kasus illegal fishing dan penggunaan bahan yang merusak yg dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)	1	1	1,000	2	1,050	2	5,800	2	5,850	2	5,900	10	19,600	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (klp)	110	120		130		140		150		160		160		Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	0.71	19.09		35.91		57.27		73.64		80.91		80.91		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	2,591,769	2,850,946	32,480	3,051,023	32,879	3,216,206	19,208	3,841,657	19,426	4,599,528	19,675	4,599,528	123,668	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.juta)	7,463,700	8,210,069		8,786,245		9,261,534		11,063,090		13,245,584		13,245,584		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga pembudidaya (org)	289,847	324,629		363,584		407,214		456,080		510,809		510,809		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar pembudidaya (NTP)	107.7	107.9		108		108.2		108.3		108.5		108.5		Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan Tangkap (ton)	292,237.6	295,160	7,452	298,111.6	7,825	301,092.7	8,781	304,103.6	9,135	307,145	9,490	307,145	42,683	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.juta)	4,346,900	4,390,368		4,434,272		4,478,615		4,523,401		4,568,635		4,568,635		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga kerja Nelayan (orang)	114,705	115,783		116,870		117,967		119,074		120,191		120,191		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (orang)	13,906	14,114		14,326		14,541		14,759		14,980		14,980		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102.8	103.1		103.3		103.6		103.8		104.1		104.1		Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	98,276	103,170	5,310	142,565	5,385	149,665	6,735	157,119	7,489	164,945	8,440	164,945	33,359	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Ekspor hasil perikanan (US\$ 1.000/ thn)	221,000	247,260		311,160		326,660		342,930		353,427		353,427		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Konsumsi ikan (kg/kapita)	44.3	44.7		45.2		45.6		46.1		46.6		46.6		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga kerja Pengolah dan Pemasar (orang)	330,621	370,296		414,731		464,499		520,239		582,667		582,667		Dinas Kelautan dan Perikanan
	PERDAGANGAN				14,114		20,858		20,396		24,036		27,057		106,461	
1	Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			1,500		3,205		2,900		3,210		3,465		14,280	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa BDKT dan non BDKT di Sulsel	Jumlah barang beredar yang diawasi tahun 2012 sebanyak 164.197 unit	170.000 unit	100	180.000 unit	305	190.000 unit	260	200.000 unit	315	210.000 unit	360	950.000 unit	1,340	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan dan fasilitasi pembentukan 3 BPSK dan LPKSM kab/kota	Jumlah BPSK yang telah dibentuk sebanyak 3 BPSK	1 BPSK	100	2 BPSK	250	3 BPSK	240	3 BPSK	315	3 BPSK	315	12 BPSK	1,220	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlatihnya Konsumen Cerdas didalam memahami produk yang beredar di pasaran	1 Sosialisasi	400	2 Sosialisasi	450	3 Sosialisasi	360	2 Sosialisasi	450	2 Sosialisasi	495	10 Sosialisasi	2,155	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah partisipasi sulsel dalam promosi dalam dan luar negeri	Jumlah partisipasi sulsel mengikuti promosi dalam negeri 4 kali dan luar negeri 1 kali.	1 LN, 9 DN	1,000	1 LN, 11` DN	1,200	0	-	0	-	0	-	1 LN, 11` DN	2,200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			4,982		6999		7608		8,845		9,636		-	38,070	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Eksportir yang berdaya saing di pasar Internasional dan terlayannya Buyer dari Luar	Meningkatnya Nilai Ekspor Non tAmbang Sulsel Sebesar 15% /Tahun	14 KL, 100 Buyer	700	15 KL, 100 Buyer	750	16 KL, 110Buyer	640	16KL, 120Buyer	720	17 KL, 120 Buyer	810	63 KL, 430 Buyer	3,620	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengendalian impor 21 % dibawah nilai ekspor	39 API U, 13 API P	50 data	100	60 data	150	pengendalian impor 5 % dibawah ekspor	144	pengendalian impor 7 % dibawah ekspor	203	pengendalian impor 9 % dibawah ekspor	243	110 data dan pengendalian impor 21% dibawah ekspor	840	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Pameran Produk Unggulan	Partisipasi dalam Pameran Produk Sulsel	1 kali	200	1 kali	300	1 kali	240	1kali	270	1 kali	315	5 kali	1,325	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya informasi pelayanan sertifikasi mutu	Jumlah pelayanan sertifikasi mutu Tahun 2012 sebanyak 1.673 lembar.	1700 lembar	900	1750 lembar	2,000	1800 lembar	2,000	1850 lembar	2,475	1900 lembar	2,400	9.000 lembara	9,775	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terpenuhinya akreditasi lembaga sertifikasi produk	Jumlah pelayanan sertifikasi produk pada tahun 2013, 10 sertifikat	8 sertifikat/ 8 perusahaan	700	10 sertifikat/ 10 perusahaan	500	12 sertifikat/ 12 perusahaan	880	14 sertifikat/ 14 perusahaan	1,170	16 sertifikat/ 16 perusahaan	1,350	60 sertifikat/ 60 perusahaan	4,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan volume dan nilai ekspor	Jumlah ekspor 510.163 ton dan nilai USD 1.445.493.474	V: 550.976 ton, N:USD 1.561.132.951	782	V: 508.715 ton, N:USD.1,974,833,183	899	V: 585.021 ton, N:USD.2,567,283,138	744	V: 661.329 ton, N:USD 3,722,560,550	877	V: 737.636 ton, N:USD.4,653,200,687	1,008	V: 3.043.677 ton, N:USD.14,479,010,509	4,310	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				2,650		3,850		4,380		5,186		6,660	-	22,726	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya informasi bahan pokok dan strategis yg dipantau peredarannya di pasar.	Jumlah bahan pokok dan strategis tahun 2012 sebanyak 10 komoditi.	12 komoditi		14 komditi		15 komoditi		16 komoditi		17 komoditi		74 komoditi	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya pelaksanaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Jumlah pelaksanaan pasar lelang dan sistem resi gudang Tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 200 orang	300 orang/ 3 kali		400 orang/ 4 kali		450 orang/ 5 kali		500 orang/ 6 kali		550 orang/ 6 kali		2.200 orang/22 kali	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya promosi pengembangan komoditi unggulan Sulsel yang dilaksanakan untuk membuka akses pasar.	Promosi produksi dalam negeri untuk pengembangan komoditi unggulan Sulsel dilaksanakan 4 kali yaitu di Jakarta, Surabaya dan Batam	4 kali		6 kali		8 kali		10 kali		12 kali		39 kali	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terdatanya dan terselenggaranya workshop waralaba dan multi level marketing	Terselenggaranya Workshop Waralaba dan Pendataan Perusahaan Multi Level Marketing					2 kali pelaksanaan workshop, 1 dokumen		2 kali pelaksanaan workshop, 1 dokumen		2 kali pelaksanaan workshop, 1 dokumen		6 kali pelaksanaan workshop, 3 dokumen		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Pelayanan Dibidang Usaha Dagang dalam pengawasan serta mekanisme pelaksanaannya	Terbentuknya Klinik Dagang Sebagai wadah untuk memfasilitasi perdagangan antar pulau					1 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang		1 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang		1 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang		3 dokumen pelayanan pengaduan usaha dagang		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PERINDUSTRIAN				8,422		30,085		34,144		38,258		43,624		154,533	
1	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kapasitas iptek sistem industri			1,550		1,850		1,760		1,880		2,250	-	9,290	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya kegiatan rumah kemasan (packaging)	Mesin packaging untuk kegiatan pengepakan sudah tersedia	30 produk	200	40 produk	250	50 produk	240	60 produk	280	70 produk	360	250 jenis produk IKM	1,330	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Prototipe alat/mesin industri yang dibuat sebanyak 30 unit dan Tersedianya Informasi tentang Hasil Rekayasa/Inovasi	Jumlah prototipe alat/mesin industri yang dibuat tahun 2012 sebanyak 2 unit (minyak nilam dan pupuk) dan Ikut serta dalam pameran TTG Tingkat Nasional yang ke XIV	/ 1 Kali Pameran	900	/ 1 Kali Pameran	1,100	/ 1 Kali Pameran	920	/ 1 Kali Pameran	960	/ 1 kali pameran	1,125	29 Unit/ 5 Kali Pameran TTG	5,005	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tumbuhnya inkubator bisnis dibidang IT	Belum terwadahnya wirasaha berbasis IT dalam bentuk inkubator/technopark	usaha baru, 1 pelatihan, 1 in	450	u, 2 pelatihan, 1 in	500	g, 2 pelatihan, 1 in	440	g, 2 pelatihan, 1 in	480	g, 3 pelatihan, 1 in	585	240 orang, 10 pelatihan, 1 mapping, 3 inkubator	2,455	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tumbuhnya 1 Alsintan Centre di Sulawesi Selatan							160		160		180	Terbentuknya Alsintan Centre di Sulsel	500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri lokal kecil dan menengah yang berkembang baik dari industri yang sudah ada maupun yang baru.			2,400		13,076		14,355		15,880		17,809	-	63,520	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas industri lokal	Terbangunnya industri kecil dan menengah	0 industri	-	6 industri	9,129	5 Industri	10,000	7 industri	11,000	6 industri	12,000	24 Industri	42,129	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya pelatihan SDM sumber daya lokal	terlatihnya SDM Industri yang berbasis sumber daya lokal	-	-	Terfasilitasinya 5 IKM	868	Terfasilitasinya 5 IKM (Maros, Pinrang, Sinjai, Bone, Barru)	720	Terfasilitasinya 5 IKM (Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Makassar)	760	Terfasilitasinya 5 IKM (Maros, Barru, Pangkep, Takalar, Makassar)	900	Terfasilitasinya 24 IKM	3,248	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
				T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)	T	Rp (Juta)		T	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlatihnya Peserta dalam pengembangan Produk sebanyak 2.250 IKM	Jumlah Peserta IKM Yang dilatih dalam Pengembangan Produk. Tahun 2012 Sebanyak 365 Orang	50 orang	200	55 orang	200	55 orang	203	65 orang	220	65 orang	270	285 orang	1,093	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kemampuan Teknologi industri			2,418		2,575		3,476		4,014		4,950		17,433	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman dalam penerapan teknologi di bidang Industri		25 orang		30 orang		35 orang		35 orang		40 orang		165 orang	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Terbentuknya sentra industri			152		355		1,710		2,384		2,835	-	7,436	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terbentuknya Sentra Industri Sutra dan Tekstil yang dibentuk sebanyak 9 Sentra	Belum terbentuknya sentra industri sutera dan tekstil di Sulsel	2 kali event dan 1 pelatihan	152	2 sentra di Kab.Bulukumba	182	2 sentra di Kab. Bantaeng dan Pare-Pare	160	2 sentra di Kab. Enrekang	240	2 sentra di Kota Makassar	360	2 kali event dan 1 pelatihan dan 8 sentra	1,094	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	TRANSMIGRASI				1,150		1,950		1,650		1,800		1,800		8,350	
1	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersedianya Calon Lokasi Transmigrasi	2 (dua) Calon Lokasi transmigrasi	2 Lokasi	100	4 Lokasi	300	2 Lokasi	150	2 Lokasi	200	2 Lokasi	200	12 Lokasi	950	Disnakertrans
		Tersedianya gambaran umum lokasi transmigrasi yang dibina	13 (tiga belas) lokasi transmigrasi	1 Paket (11 Lokasi)	150	-	-	1 Paket (10 Lokasi)	50	1 Paket (10 Lokasi)	100	1 Paket (10 Lokasi)	100	5 Paket	400	Disnakertrans
		Tersedianya Peta Potensi Kawasan Transmigrasi	-	4 Lokasi	100	4 Lokasi	150	4 Lokasi	100	4 Lokasi	150	4 Lokasi	150	20 Lokasi	650	Disnakertrans
		Memberikan gambaran pelaksanaan Program P2KT dan P2MKT	-	5 Lokasi	50	5 Lokasi	150	5 Lokasi	300	5 Lokasi	300	5 Lokasi	300	25 Lokasi	1,100	Disnakertrans
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para transmigran dalam rangka memenuhi kebutuhannya	Pelatihan transmigrasi lokal sebanyak 7 paket (350 orang)	10 Paket (500 orang)	750	13 Paket (650 orang)	1,350	10 Paket (500 orang)	1,050	10 Paket (500 orang)	1,050	10 Paket (500 orang)	1,050	53 Paket (2650 orang)	5,250	Disnakertrans
	TOTAL															
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2,509,987		2,594,274		2,642,700		2,766,123		2,905,302		13,418,386	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dijadikan dasar oleh SKPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan indikator kinerja sasaran pada perubahan RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan terdapat beberapa data yang mengalami perubahan berdasarkan pada tahun dasar seperti PDRB.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan target-target yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap II Provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan capaian pada tahun terakhir. Terkait dengan adanya beberapa indikator pada tahun berjalan yang mengalami perubahan metode perhitungan, maka perubahan tersebut akan disesuaikan pada Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD)

TABEL IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
ASPEK KESEJAHTERAAN									
I	Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	Pertumbuhan PDRB		7.63	7.57	7.70	7.80	8.10	8.30	8.30
2	Laju Inflasi		4.41	8.60	5 - 3	5 - 3	5 - 3	4,5 - 2,5	4,5 - 2,5
3	PDRB Per Kapita	Rp	30,678	35,977	40.56	46.25	52.79	60.20	60,2
4	Gini Ratio		0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38
5	Persentase penduduk miskin	%	10,32	9,54	9,34	8,86	8,38	7,92	7,92
6	Angka Kriminalitas yang tertangani	Jw	7,355	8,362	9,186	10,091	11,085	12,176	12,176
7	Indeks Pembangunan Manusia		Metode Baru 67,92 Metode Lama 73,28	68,49	69,11 - 69,72	69,73 - 70,34	70,35 - 70,97	70,98 - 71,60	70,98 - 71,60
8	Paritas Daya Beli (PDB)	Rp	646,710	649.500	653.190	656.380	659.580	662.780	662.780
9	PDRB (HK) Tahun Dasar 2010	Rp.M	217,618	234,084	252,065	271,775	294,876	320,825	320,825
10	PDRB (HB)	Rp.M	258,683	300,125	345,572	398,071	458,744	528,898	528,898
II	Kesejahteraan Masyarakat								
A	Pendidikan								
1	Harapan Lama Sekolah	Thn %	Metode Baru 12,52 Metode Lama (AMH) 89,69	12,90	13,25	13,61	13,97	14,33	14,33
2	Rata-rata lama sekolah	Thn	Metode Baru 7,45 Metode Lama 8,01	7,49	7,54	7,59	7,64	7,69	7,69
3	Angka partisipasi kasar								
a.	SD/Sederajat	%	103.05%	105.45	107.09	109.90	111.00	113.50	113.50
b.	SLTP/Sederajat	%	98.95	99.25	110.00	111.25	112.00	113.50	113.50
c.	SLTA/Sederajat	%	69.75	78.00	83.00	93.00	98.00	99.50	99.50
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97.90	100.10	103.00	103.65	104.00	104.10	104.10
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	68.27	76.00	76.80	77.25	77.85	78.00	78.00
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	47.92	61.40	62.40	63.00	63.50	64.25	64.25
B	Kesehatan								
1	Angka kelangsungan hidup bayi	Jw	994	994	995	996	1,006	1,017	1,017.12
2	Jumlah kematian bayi	Kasus	1.041 Kasus	1.031	1.026	1.021	1.016	1.011	1.011
3	Angka harapan hidup saat lahir	Thn	Metode Baru 69,50 Metode Lama 70,60	69,60	69,76	69,93	70,10	70,27	70,27
4	Prevalensi balita gizi buruk	%	6,6%	5,7%	5,2%	5,8%	4,3%	4,0%	4,0%
C	Ketenagakerjaan								
1	Rasio penduduk yang bekerja	%	94.13	94.94	95.76	96.59	97.42	98.26	98.26
III	Seni Budaya dan Olahraga								
A	Kebudayaan								
1	Jumlah grup kesenian	Jml	290	291	292	293	294	295	295
2	Jumlah kawasan budaya yang dilestarikan	Jml	5	5	7	7	9	5	5
B	Pemuda dan olahraga								
1	Jumlah gedung olahraga/Lap. Olahraga	Jml	2,480	2,492	2,510	2,540	2,581	2,632	2,632
ASPEK PELAYANAN UMUM									
A	Layanan Urusan wajib								

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
	Pelayanan Dasar								
I	Pendidikan								
a.	Pendidikan dasar								
2	Angka partisipasi sekolah								
	a.SD		97.59	97.63	98.10	98.57	99.04	99.50	99.50
	b.SMP		87.69	86.23	88.42	90.62	92.81	95.00	95.00
3	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	SD		152.62	153.08	154.15	154.92	155.23	155.89	155.89
	SMP		220.84	221.72	223.94	225.85	226.45	228.85	228.85
4	Rasio guru per murid								
	- SD		13.74	13.20	12.94	12.45	11.80	11.35	11.35
	- SMP		7.35	7.05	6.92	6.75	6.40	5.80	5.80
5	Rasio murid per kelas rata-rata								
	- SD		26.82	25.98	25.14	24.70	24.11	23.86	23.86
	- SMP		60.12	59.77	59.43	58.95	58.67	57.01	57.01
b.	Pendidikan Menengah:								
7	Angka partisipasi sekolah								
	SMA		61.66	62.10	62.90	63.10	64.01	64.25	64.25
8	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	SMA		399	411	427	449	475	505	505
9	Rasio guru per murid								
	- SMA /SMK		14.00	13.74	13.28	12.94	12.76	12.45	12.45
10	Rasio murid per kelas rata-rata								
	- SMA /SMK		38.06	37.65	35.98	34.76	32.45	30.50	30.50
11	Fasilitas Pendidikan:								
	- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	60.31	61.86	63.44	65.07	66.74	68.45	68.45
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	77.30	79.94	81.93	84.39	87.26	90.23	90.23
	- Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik	%	75.00	78.00	81.51	85.59	89.01	94.08	94.08
12	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		50.40	60.00	75.00	85.00	90.00	97.00	97.00
13	Angka Putus Sekolah								
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1.20	1.18	1.15	1.13	1.11	1.08	1.08
	- Angka Putus Sekolah (APS)SMP/MTs	%	1.09	1.07	1.05	1.03	1.01	0.99	0.99
	- Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1.30	1.27	1.25	1.22	1.20	1.18	1.18
14	Angka kelulusan								
	- Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100.00	100	100	100	100	100	100
	- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.80	100	100	100	100	100	100
	- Angka kelulusan (AL) SMA/MA	%	99.07	100	100	100	100	100	100
	- Angka kelulusan (AL) SMK	%	99.93	100	100	100	100	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM)								
	- Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts		97.84	98.50	98.75	99.00	99.50	100.00	100.00
	- Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		95.03	96.00	96.60	97.00	97.50	98.00	98.00
16	Angka Putus Sekolah								
	- SD	%	1.20	1.18	1.15	1.13	1.11	1.08	1.08
	- SMP	%	1.09	1.07	1.05	1.03	1.01	0.70	0.70
	- SMA	%	1.30	1.27	1.25	1.22	1.20	1.00	1.00
II	Kesehatan								

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA/ PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	Jumlah rumah sakit terakreditasi nasional dan bertaraf internasional	Unit	Terakreditasi nasional 1, terakreditasi internasional 0	Terakreditasi nasional 1 unit dan terakreditasi internasional 1 unit	Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 0 unit	Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 0 unit	Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 1 unit	Terakreditasi nasional 5 unit dan terakreditasi internasional 2 unit	Terakreditasi nasional 22 unit dan terakreditasi internasional 4 unit
2	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	Org	5.38	5.49	5.6	5.71	5.82	5.93	5.93
3	Rasio Pustu per 100.000 Penduduk	%	17.24	19.18	0.21	23.06	25	26.94	26.94
4	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	Org	15/100.000 Penduduk	15/ 100.000 Penduduk	17/ 100.000 Penduduk	19/ 100.000 Penduduk	20/ 100.000 Penduduk	22/ 100.000 Penduduk	22/ 100.000 Penduduk
5	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	Org	5/100.000 Penduduk	8/ 100.000 Penduduk	10/ 100.000 Penduduk	11/ 100.000 Penduduk	12/ 100.000 Penduduk	13/ 100.000 Penduduk	13/ 100.000 Penduduk
6	Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk	Org	92/100.000 Penduduk	94/ 100.000 Penduduk	95/ 100.000 Penduduk	97/ 100.000 Penduduk	99/ 100.000 Penduduk	100/ 100.000 Penduduk	100/ 100.000 Penduduk
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,99%	65%	67%	69%	71%	73%	73%
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,74%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
9	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)		87.10%	95	95	95	95	95	95.0
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100.0
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	55,78	60.78%	65.32%	69.98%	74.20%	79.40%	79.40%
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100.0
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100.00	100	100	100	100	100	100.0
14	Cakupan kunjungan bayi	%	90,95%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
III Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Prosentase Kinerja Jaringan Jalan di Provinsi Sulawesi Selatan	%	83.60%	85.79%	87.98%	89.44%	90.17%	90,88 %	90,88 %
2	Prosentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.73%	82.50%	87.42%	89.65%	90.67%	92,03 %	92,03 %
3	Tingkat efektivitas pengelolaan jaringan irigasi	%	81	83	85	87	88	90	90
4	Presentase rumah tinggal bersanitasi	%	75.28%	76.78%	77.93%	78.18%	79.33%	80.00%	80.00%
5	Rasio rumah layak huni	%	0.23	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.50
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	%	17.73%	18%	20%	22%	24%	26%	26%
IV Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	85.87	87.37	87.45	87.5	87.75	88	88.00
2	Rumah tangga pengguna listrik	%	87.02	89.22	91.00	93.00	95.00	97.00	97.00
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	81.08	82.61	83	83.41	84.2	85	85
4	Persentase kawasan kumuh	%	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
IV Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM.Ormas dan OKP	Jml	7	7	9	9	9	9	9
	Rasio jumlah polisi pamong Praja per 10.000 penduduk								

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA/ PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		1.99	2.08	2.18	2.24	2.25	2.27	2.27
2	Rasio Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk		32.93	35.72	35.97	36.91	37.08	37.14	37.14
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		2.97	2.97	3.17	3.32	3.48	3.57	3.57
4	Cakupan patroli petugas satpol PP		2,116	2,561	2,680	2,663	2,906	3,174	3,174.00
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)di kabupaten	%	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.94
6	Petugas perlindungan Masyarakat (linmas) di kabupaten	Jiwa	27,353	32,295	32,842	32,842	34,042	34,542	34,542.00
V Sosial									
1	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	4.20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Non Pelayanan Dasar									
VI Perhubungan									
1	Persentase pembangunan transportasi massal	%	5%	10%	20%	25%	27%	30%	30%
2	Persentase pelayanan angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi	%	80	87	90	94	97	100	100
3	Persentase kualitas pelayanan transportasi laut	%	80	85	87	88	89	90	90
4	Persentase kualitas pelayanan transportasi laut	%	70	72	74	76	78	80	80
VII Lingkungan Hidup									
1	Persentase Penanganan Sampah	%	81.23	82.40	83.09	83.72	84.34	85.00	85.00
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85.87	87.37	87.45	87.50	87.75	88.00	88.00
3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	86.11%	86.20%	86.25%	86.20%	86.15%	86.10%	86.10%
4	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal	%	98.21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk		0.0014	0.00138	0.00135	0.00133	0.00131	0.00128	0.00128
6	Penegakan Hukum Lingkungan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VIII Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	45%	45%	45%	46%	46%	47 %	47 %
2	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	24%	24%	24,3%	24,5%	25%	25%	25%
3	Rasio KDRT	%	3,3%	3,2%	3,1%	3%	3%	3%	3%
4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja diBawah Umur	%	0,74%	0,74%	0,73%	0,72%	0,72%	0,7%	0,7%
5	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	%	89%	95%	98%	99%	100%	100%	1.00
IX Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	anak	1,68	1,68	1,69	1,70	1,70	1,70	1,70
2	Rasio Akseptor KB	%	27.47%	28.10%	28.95%	29.30	29.88	30.35	30.35
3	Cakupan Peserta KB Aktif	%	73,47 %	73,38 %	74.08 %	74.19 %	74,32 %	74,47 %	74,47 %
4	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	38,29%	38,22%	38%	37,89%	37,78%	37,63%	37,63%

No	FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
X	Ketenagakerjaan								
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	62.82	63.37	63.64	63.92	64.20	64.48	64.48
	a. Angkatan Kerja 15 Tahun keatas	Jiwa	3,560,891.00	3,628,228.00	3,662,522.00	3,697,242.00	3,732,394.00	3,767,985.00	3,767,985.00
	b. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Jiwa	5,667,985.00	5,725,718.00	5,754,925.00	5,784,362.00	5,814,033.00	5,843,940.00	5,843,940.00
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun	%		1.12	1.09	1.06	1.04	1.01	
	a. Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kss		130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang dapat diselesaikan yaitu 178 kasus dari 11.358 perusahaan yang terdaftar di Prov. Sulsel
	b. Jumlah Perusahaan	Jml		11,657.00	11,952.00	12,247.00	12,542.00	12,837.00	650 kasus dari jumlah perusahaan yang terdaftar
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62.82%	63.37%	63.64%	63.92%	64.20%	64.48%	Tingkat partisipasi angkatan kerja bertambah 0,2% per tahun
	a. Jumlah penduduk angkatan kerja	Jiwa	3,560,891.00	3,628,228.00	3,662,522.00	3,697,242.00	3,732,394.00	3,767,985.00	
	b. Jumlah penduduk usia kerja	Jiwa	5,667,985.00	5,725,718.00	5,754,925.00	5,784,362.00	5,814,033.00	5,843,940.00	
4	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	13.14%	15.50%	16.87%	18.21%	19.51%	20.78%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan bertambah 1% per tahun
	a. Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	Jiwa	30,904.00	38,992.00	43,036.00	47,080.00	51,124.00	55,168.00	
	b. Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Jiwa	235,115.00	251,535.00	255,031.00	258,527.00	262,023.00	265,519.00	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,1%	5,1%	5,0%	5,0%	4,9%	4,8%	Tingkat pengangguran berkurang 0,1 % per tahun atau jumlah penganggur berkurang 10.000 orang pertahun
	a. Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Jiwa	208,983.00	188,983.00	178,983.00	168,983.00	158,983.00	148,983.00	
	b. Jumlah penduduk angkatan kerja	Jiwa	3,560,891.00	3,628,228.00	3,662,522.00	3,697,242.00	3,732,394.00	3,767,985.00	
6	Keselamatan dan Perlindungan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 bertambah 10% per tahun dari 4,35 % tahun 2012 dari jumlah perusahaan yang terdaftar
	a. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Jml	11,358.00	11,657.00	11,952.00	12,247.00	12,542.00	12,837.00	
	b. Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten	Jml	11,358.00	11,657.00	11,952.00	12,247.00	12,542.00	12,837.00	
7	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kasus perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu 650 kasus
	a. Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	Kss	142 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	
	b. Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	Kss	142 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	130 Kasus	
XI	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1	Jumlah KUMKM yang difasilitasi sarana prasarana dan jumlah produk baru yang telah mendapatkan HAKI	Unit	KUMKM yg terfasilitasi sarana dan prasarana 1.500 unit	1.650 unit	1.800 unit	1.950 unit	2.100 unit	2.250 unit	2.250 unit
			Jumlah produk baru yang mendapatkan HAKI 96 Produk	101 produk	106 produk	111 produk	116 produk	121 produk	121 produk
2	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB		23,72% atau (Rp.32.591,90)	Rp. 35.199,25	Rp. 38.199,25	Rp. 41.056,40	Rp. 44.340,91	Rp. 47.888,19	Rp. 47.888,19
3	jumlah wirausaha baru	Jiwa	12.045 orang	72.405 orang	132.765 orang	193.125 orang	253.485 orang	313.845 orang	313.845 orang
4	Jumlah Koperasi aktif	Unit	5.554 unit	6.504 unit	6.554 unit	7.054 unit	7.554 unit	8.026 unit	8.026 unit
5	Jumlah Koperasi besar	Unit	5 unit	10 unit	15 unit	20 unit	25 unit	30 unit	30 unit
6	Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	Unit	113.370 unit	122.440 unit	131.510 unit	140.580 unit	149.650 unit	158.718 unit	158.718 unit

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
7	Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar	Unit	3.185 unit	3.249 unit	3.313 unit	3.377 unit	3.441 unit	3.503 unit	3.503 unit
8	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang didalitasi diklat dan jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga keuangan bank dan non bank		SDM KUMKM yg difasilitasi mengikuti diklat 5.000 orang	6.500 orang	8.000 unit	9.500 unit	11.000 unit	12.500 unit	12.500 unit
			KUMKM yg terfasilitasi pada lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 150.000	150.150 unit	150.300 unit	150.450 unit	150.600 unit	150.750 unit	150.750 unit
XII Penanaman Modal									
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jml	Jumlah investasi : PMA USD 462 JUTA, PMDN Rp. 962	180	200	210	220	230	230
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp	Tahun 2008-2012 Rp. 23 Triliun	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 3Triliun	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 4 Triliun	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 5 Triliun	Investasi PMA 400 Juta USD, Investasi PMDN 6 Triliun	Investasi PMA 2000 juta USD, Investasi PMDN Rp. 21 triliun
XIII Kebudayaan									
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jml	37	37	37	37	37	37	37
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jml	10	11	14	15	16	17	17
XIV Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Jml	651	684	705	747	783	810	810
2	Jumlah Klub Olahraga	Jml	1532	1590	1643	1670	1723	1788	1788
3	Peningkatan peran serta kepemudaan	%	97	100	100	100	100	100	100
XV Ketahanan Pangan									
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Reg	1	1	2	3	4	5	5.00
2	Skor Pola Pangan Harapan peningkatan diversifikasi konsumsi pangan		80.90	81.71	82.53	83.35	84.18	85.03	85.03
XVI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		1	2	3	4	5	6	6
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		2	3	4	5	6	7	7
3	Jumlah LSM Aktif	%	49.51%	52.51%	55.51%	58.51%	61.51%	64.20%	64.20%
4	LPM Berprestasi	%	9.52%	11.00%	11.50%	12.50%	13.50%	14.52%	14.52%
5	PKK Aktif	%	97.47%	97.58%	97.69%	97.80%	97.91%	98.02%	98.02%
6	Posyandu Aktif	%	98.89%	99.09%	99.29%	99.49%	99.69%	99.89%	99.89%
7	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	Jml	2,120	2,970	3,820	4,670	5,520	6,370	6,370
8	Jumlah BUMDES yang difalitasi	Jml	176	226	276	326	376	426	426
XVII Statistik									
1	Buku "Sulawesi Selatan Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Sulawesi Selatan"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
XVIII Perencanaan Pembangunan									

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA/ PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	1						1
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dok	1						1
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dok	1	1	1	1	1	1	5
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : KUA dan PPAS yang telah ditetapkan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi	Dok	2	2	2	2	2	2	10
B	Layanan Urusan Pilihan								
I	Pertanian								
1	Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar								
	- Padi	Kwt/Ha	51.22	52.25	53.30	54.37	55.45	56.56	56.56
	- Jagung	Kwt/Ha	45.62	47.51	48.22	48.95	49.68	50.43	50.43
	- Kedele	Kwt/Ha	14.77	14.99	15.22	15.44	15.68	15.91	15.91
2	Nilai PDRB (HK) Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (juta rupiah)	Rp	46,446,700	51,084,100	53,875,000	57,772,000	65,230,000	69,944,000	69,944,000
3	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	4.90	10.00	5.50	7.20	12.90	7.20	7.20
4	PDRB Tanaman Pangan (Tanaman Bahan Makanan)	Rp	19,253,336.81	19,640,328.88	19,836,732.17	20,035,099.49	20,235,450.49	20,437,804.99	20,437,804.99
5	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (Juta Rupiah)	Rp	7,364.98	7,585.93	7,813.51	8,047.92	8,289.35	8,538.04	8,538.04
	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	%	4,56	4,64	4,72	4,80	4,88	4,96	4,96
6	Komoditi Unggulan								
	- Volume produksi	Ton	391,831	362,989	382,167	459,370	528,597	561,869	561,851.00
	- Produktifitas	Ha	1,038	1,030	1,036	1,043	1,050	1,055	1,055.00
7	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB								
	- Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor peternakan		3,574,126.00	3,826,110.00	4,116,196.00	4,452,797.00	4,846,374.00	5,309,945.00	5,309,945.00
8	Populasi Ternak								
	a. Jumlah populasi sapi potong	Ekor	1,128,306.00	1,232,800.00	1,347,080.00	1,471,954.00	1,608,404.00	1,870,542.00	1,870,542.00
	b. Jumlah populasi Sapi perah	Ekor	1,426.00	2,295.00	2,544.00	2,821.00	3,346.00	3,708.00	3,708.00
	c. Jumlah populasi kerbau	Ekor	100,831.00	108,504.00	111,684.00	115,086.00	120,272.00	125,833.00	125,833.00
10	Konsumsi Produk Peternakan								
	a. Daging (kg/kapita/tahun)		3.253	3.338	3.425	3.515	3.606	3.701	3.701
	b. Telur (kg/kapita/tahun)		9.456	9.532	9.609	9.686	9.764	9.843	9.843
	c. Susu (kg/kapita/tahun)		6.996	7.033	7.070	7.107	7.144	7.181	7.181
11	Nilai Tukar Peternakan								
	a. Rata-rata Nilai Tukar Petani	%	97.51	99.14	99.69	100.24	100.79	101.35	101.35

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
12	Kecamatan yang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) berbasis teknologi informasi, memiliki demplot terintegrasi pertanian, perikanan dan kehutanan	BP3K	117	35	50	50	70	75	280
13	Jumlah penyuluh :								
	a. Pertanian	org	1,718	1,750	1,800	1,850	1,900	2,000	2,000
	b. Perikanan	org	235	300	350	400	450	500	500
	c. Kehutanan	org	291	350	400	450	500	550	550
II	Kehutanan								
1	Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis								
	a. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	115,628.91	143,628.91	171,628.91	199,628.91	227,628.91	255,628.91	255,628.91
	b. Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	525,885.28	497,885.28	469,885.28	441,885.28	413,885.28	395,885.28	395,885.28
2	Kerusakan Kawasan Hutan								
	a. Luas kerusakan kawasan hutan	Ha	399.76	379.77	360.78	342.74	325.61	309.33	309.33
	b. Luas kawasan hutan	Ha	2,725,796.00	2,725,796.00	2,725,796.00	2,725,796.00	2,725,796.00	2,725,796.00	2,725,796.00
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB								
	a. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	Rp Mlyr	138.05	150.38	163.81	178.43	194.37	211.73	211.73
III	Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara								
	a. Cadangan Sumber Daya	Ton	537,220,000	338,830,000	250,000,000	275,000,000	300,000,000	325,000,000	325,000,000
	b. Luas wilayah pemetaan	Ha	13,503	2,538	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	c. Jumlah produksi mineral dan batubara								
	1. Logam	Ton/M3	81,863,938	68,905,773	85,957,134	90,254,991	94,767,741	99,506,128	99,506,128
	2. Non Logam	Ton/M3	6,939,349	4,196,969	7,286,316	7,650,632	8,033,163	8,434,822	8,434,822
	3. Batuan	Ton/M3	22,318,029	7,450,776	23,433,930	24,605,626	25,832,908	27,127,703	27,127,703
	4. Batubara	Ton/M3	16,680,624	1,299	17,514,655	19,390,387	19,309,907	20,275,402	20,275,402
2	Kedaulatan Energi								
	a. Rasio desa berlistrik	%	87.02	89.22	91.00	93.00	95.00	97.00	97.00
	b. Jumlah instalasi bio energi yang terbangun	unit	7	200	270	460	500	550	550
V	Kelautan dan Perikanan								
1	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sulawesi Selatan								
	a. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perikanan	%	31,21	33,35	36,02	38,87	41,94	45,25	45,25
2	Produksi Perikanan	Ton	2,869,663.1	3,146,106.01	3,349,134.60	3,517,298.70	4,145,760.60	4,906,672.70	4,906,672.70
	a. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	292,237.6	295,160.0	298,111.6	301,092.7	304,103.6	307,144.7	307,144.7
	b. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	2,591,769.1	2,850,946.0	3,051,023.0	3,216,206.0	3,841,657.0	4,599,528.0	4,599,528.0
3	Produksi Komoditi Unggulan								
	a. Jumlah produksi Udang (ton)	Ton	34,402.7	36,466.9	38,630.0	41,378.0	44,369.0	47,615.0	47,615.0
	b. Jumlah produksi Bandeng (ton)	Ton	91,502.3	96,992.4	123,280.0	154,140.0	192,660.0	240,780.0	240,780.0
	c. Jumlah produksi Rumput Laut (ton)	Ton	2,422,154.2	2,718,868.1	2,866,119.0	2,995,050.0	3,576,443.0	4,280,366.0	4,280,366.0
4	Konsumsi Ikan								
	a. Jumlah konsumsi ikan (kap/th)	Kg	44.3	44.743	45.2	45.6	46.1	46.6	46.6
5	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya								
	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)		102.8	103.1	103.3	103.6	103.8	104.1	104.1

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
	b. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)		107.7	107.9	108.0	108.2	108.3	108.5	108.5
6	Jumlah Tenaga Kerja Perikanan		749,079	824,821	909,511	1,004,221	1,110,152	1,228,648	1,228,648
	a. Perikanan Tangkap	Orang	128,611	129,897	131,196	132,508	133,833	135,171	135,171
	b. Perikanan Budidaya	Orang	289,847	324,629	363,584	407,214	456,080	510,809	510,809
	c. Pengolahan dan Pemasar	Orang	330,621	370,296	414,731	464,499	520,239	582,667	582,667
VI	Perdagangan								
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Kontribusi perdagangan thd PDRB thun 2012 sebesar 17,64%	18,00%	18,20%	18,50%	18,90%	19,10%	19,10%
2	Nilai ekspor perdagangan		nilai ekspor perdagangan thn 2012 sebesar USD 1,446,195,843.78	USD.1,686,842,832.18	USD.1,446,195,843.78	USD.1,821,790,258.76	USD.1,967,533,479.46	USD.2,124,936,157.82	USD.2,124,936,157.82
VII	Perindustrian								
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	0.12	12,48%	12,73%	12,98%	13,24%	13,51%	13,51%
2	Jumlah industri	Unit	Jumlah industri tahun 2012 sebesar 51.278 unit usaha	52,170	53,061	53,950	54,850	55,740	55,740
VIII	Ketransmigrasian								
1	Transmigrasi swakarsa		Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) sudah dihentikan sejak tahun 2000	-	-	-	-	-	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
A	Kemampuan Ekonomi Daerah								
I	Nilai Tukar Petani		106.89	103.25	104.55	104.65	104.76	104.86	104.86
	Sub sektor tanaman pangan	NTP	109.24	97.75	100.15	100.25	100.35	100.45	100.45
	sub sektor hortikultura	NTP	104.53	108.74	108.95	109.06	109.17	109.28	109.28
I	Pertanian								
1	Sub sektor tanaman pangan		109.24	97.75	100.15	100.25	100.35	100.45	100.45
2	sub sektor hortikultura		104.53	108.74	108.95	109.06	109.17	109.28	109.28
B	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
I	Perhubungan								
1	Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan								
	a. Panjang jalan	Km	32,486.39	32,486.39	32,486.39	32,486.39	32,486.39	32,486.39	32,486.39
	b. Jumlah kendaraan	Jml	2,428,807	2,863,771	3,081,253	3,298,735	3,516,217	3,733,698	3,733,698
II	Penataan Ruang								
1	Ketataan Terhadap RTRW		0.52	0.58	0.63	0.66	0.68	0.73	0.73
2	Luas Wilayah produktif	Hektar	1,816,757.00	1,853,056.43	1,890,081.14	1,927,845.62	1,966,364.64	2,005,653.283	2,005,653.283
3	Luas Wilayah Industri	Hektar	7.92	7.974	8.029	8.084	8.140	8.196	8.196
4	Luas Wilayah Kebanjiran	Hektar	5,154.02	5,139.00	5,136.00	5,133.00	5,130.00	5,124.00	5,124.00
5	Luas Wilayah Perkotaan	Hektar	4,072.40	4,072.40	4,072.40	4,072.40	4,072.40	4,072.40	4,072.40
III	Komunikasi dan Informatika								
1	Rasio Ketersediaan daya listrik								
	a. Daya listrik terpasang	gwh	4307 gwh	5074.4 gwh	5647.6 gwh	6265.3 gwh	6930.7 gwh	7647.7 gwh	7647.7 gwh

No	FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
	b. Jumlah kebutuhan	gwh	3758 gwh	4018.94 gwh	4298 gwh	4596.45 gwh	4915.61 gwh	5256.94 gwh	5256.94 gwh
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	92.85	93.35	93.84	94.32	94.79	95.25	95.25
	a. Jumlah rumah tangga menggunakan listrik		1,792,256.00	1,819,524	1,846,959	1,874,562	1,902,334	1,930,278	1,930,278.00
	b. Jumlah rumah tangga		1,930,191.00	1,949,088.00	1,968,171.00	1,987,440.00	2,006,898.00	2,026,547.00	2,026,547.00

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan program Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan untuk 3 (tahun) tahun kedepan.

10.1. Pedoman Transisi

Untuk mengisi kekosongan dokumen rencana pembangunan daerah dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi

Kebijakan perencanaan tahun 2018 secara umum masuk dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD 2013-2018 melalui pemantapan kebijakan dari penyebaran misi pembangunan 2013-2018, sebagai berikut : (1) Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur (4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global (5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum (6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan kesatuan bangsa (7) meningkatkan Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

10.3. Program Transisi

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 masih mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 7 (Tujuh) misi yang telah ditetapkan beserta penjabaran kebijakan yang telah dirumuskan dalam setiap urusan untuk program-program Prioritas lanjutan. Penetapan program Prioritas pembangunan di tahun 2018 memperhatikan isu strategis yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam upaya penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah.

Program transisi tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan, dan (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari satu periode keperiode selanjutnya.

10.4. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Perubahan tahun 2016, RKPD tahun 2017 dan RKPD tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

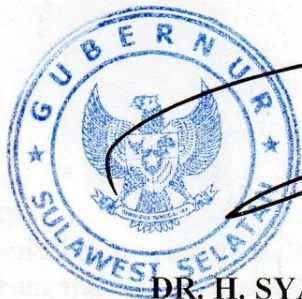
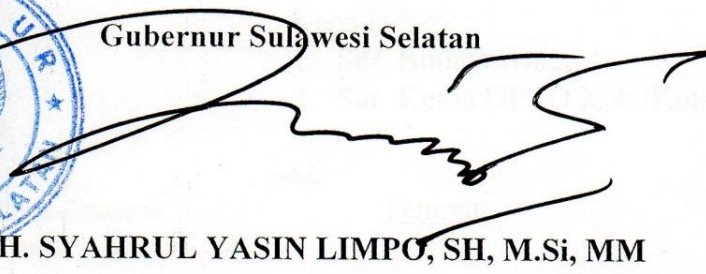
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada Masyarakat, termasuk DPRD;
2. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi tahunan RPJMD;
3. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan Perubahan Renstra-SKPD Tahun 2013-2018;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;
6. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2016-2018;
7. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJM-Kabupaten/kota) memperhatikan Perubahan RPJMD Prov SulSel 2013-2018. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitas, dan mediasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD serta Rancangan RPJM Daerah Kabupaten/Kota;

9. Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, perlu mengacuh kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;
10. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan Gubernur untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;
11. Perubahan RPJMD ini akan menjadi dasar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi;
12. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

BAB XI P E N U T U P

Perubahan RPJM-Daerah Tahun 2013-2018 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama beberapa tahun kedepan. Menurut Skalanya, Perubahan RPJM-Daerah merupakan perencanaan tingkat menengah daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen Perubahan RPJM-Daerah secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses pencapaian visi Daerah yakni **“SULAWESI SELATAN PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERENSI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”**.

 Gubernur Sulawesi Selatan

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MM